



Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Tahun 2025 - 2029



Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat

Peraturan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan ...

- pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
 15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
 16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 17. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
 18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 20. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
 22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Manggarai Barat.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. mewujudkan kesinambungan perencanaan Pembangunan yang berorientasi pada proses dan substansi capaian kinerja pembangunan sebagai arah pembangunan Daerah tahun 2025-2029;

b. tersedianya ...

- b. tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual;
- c. tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- d. sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah selama lima tahun kedepan;
- e. sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD;
- f. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sektoral;
- g. menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029;
- h. sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati;
- i. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah; dan
- j. menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR: 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 06/2025

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan menurut prakarsa sendiri guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Maka dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dalam kerangka itu pula, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pengertian tersebut menempatkan perencanaan pembangunan dalam posisi strategis untuk menentukan efektivitas pengelolaan kewenangan daerah yang besar di era otonomi daerah. Perencanaan pembangunan sekaligus menjadi ruang interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks *good governance*.

RPJMD merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain

itu ...

itu, RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, RPJMD menjadi instrument untuk menilai kinerja Kepala Daerah sampai akhir periode kepemimpinannya. Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, serta menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, serta sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 disajikan dalam lima bab meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup. Dalam penyusunan dokumen RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan, serta berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, KLHS, RPJMN, serta dokumen sektoral terkait.

Adapun pendekatan perencanaan yang digunakan yakni berorientasi pada proses dan hasil. Pendekatan perencanaan berorientasi proses terdiri dari 4 empat pendekatan yakni (1) Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah; (2) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama DPRD; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Sedangkan pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-

tematik ...

tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang efektif merupakan salah satu faktor utama untuk mengatasi berbagai permasalahan, memaksimalkan potensi yang tersedia, dan menanggapi isu-isu strategis daerah.

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dilakukan guna merumuskan kembali fokus sasaran, target kinerja, strategi dan program pembangunan yang lebih efektif. Evaluasi RPJMD yang mempertimbangkan capaian kondisi internal dan eksternal diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Bupati Edistasius Endi dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng yaitu *"Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap"*. Muaranya dokumen ini dapat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi dan misi yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 259

LAMPIRAN ...

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	9
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045.....	10
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.....	0
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.....	0
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	1
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)....	2
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja dan APBD.....	2
1.4 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4.1 Maksud.....	2
1.4.2 Tujuan.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	6
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	6
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	6
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	47
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	80
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	100
2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....	127
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024.....	128
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030.....	196
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	219
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	219
2.3.2 Permasalahan lintas sektor.....	219

2.3.3	Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	226
2.3.4	Isu Strategis Daerah.....	244
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		264
3.1	Visi dan Misi	264
3.2	Tujuan dan Sasaran.....	275
3.3	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	278
3.3.1	Penahapan Pembangunan RPJMD.....	278
3.3.2	Strategi dan Arah Kebijakan	281
3.3.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	288
3.3.4	Dukungan Program Strategis Nasional	305
3.3.5	Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029	305
3.3.6	Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RJMN 2025-2029	309
3.3.7	Arah Kebijakan Khusus Rencana Bisnis Perumda	311
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		317
4.1	Program Perangkat Daerah	317
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	367
4.2.1	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU).....	367
4.2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	368
BAB V PENUTUP		408
5.1	Kesimpulan	408
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	409
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	411

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045	11
Tabel 2. 1 Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	7
Tabel 2. 2 Luas Panen (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	10
Tabel 2. 3 Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Manggarai Barat Tahun 2024	13
Tabel 2. 4 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	16
Tabel 2. 5 Proyeksi Daya Dukung Penyedia Pangan Tahun 2025-2029	17
Tabel 2. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	20
Tabel 2. 7 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	21
Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2019-2025)	34
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2024	36
Tabel 2. 10 Perkembangan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013-2024	39
Tabel 2. 11 Proyeksi Rasio Ketergantungan (Persen) Kabupaten Manggarai Barat	46
Tabel 2. 12 Jumlah Keluarga yang Melaksanakan PHBS Tahun 2023	56
Tabel 2. 13. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 ...	57
Tabel 2. 14 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024	68
Tabel 2. 15 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023	71
Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	75
Tabel 2. 17 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2024	82
Tabel 2. 18 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024	87
Tabel 2. 19 Distribusi PDRB Pertambangan dan Non-Pertambangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	88

Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat.....	91
Tabel 2. 21 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020–2024 (Km)	95
Tabel 2. 22 Rasio Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	99
Tabel 2. 23 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan (Persen), 2021-2024	107
Tabel 2. 24 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan, 2022-2023	108
Tabel 2. 25 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023	110
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024	114
Tabel 2. 27 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024	126
Tabel 2. 28 Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024.....	130
Tabel 2. 29 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	135
Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	158
Tabel 2. 31 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	183
Tabel 2. 32 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	188
Tabel 2. 33 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	197
Tabel 2. 34 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	200
Tabel 2. 35 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026-2030.....	207
Tabel 2. 36 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026-2030	212
Tabel 2. 37 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026-2030	216
Tabel 2. 38 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor Kabupaten Manggarai Barat.....	220
Tabel 2. 39 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	226
Tabel 2. 40 Telaahan Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045.....	244
Tabel 2. 41 Tabel Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2045.....	253
Tabel 2. 42 Perumusan Isu Strategis Daerah.....	255

Tabel 3. 1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat	265
Tabel 3. 2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat, RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN Tahun 2025-2029	273
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	276
Tabel 3. 4 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2030	278
Tabel 3. 5 Perumusan Strategi Berbasis Respon Atas Isu Strategis.....	281
Tabel 3. 6 Keselarasan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	283
Tabel 3. 7 Penyandingan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dengan Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri	290
Tabel 3. 8 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	296
Tabel 3. 9 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029	306
Tabel 3. 10 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029	309
Tabel 3. 11 Capaian Perumda Bidadari 2022-2024 dan Target 2025-2029	312
 Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2030	 318
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	367
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	369
Tabel 4. 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029	402

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	10
Gambar 2. 1 Peta Liputan Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat	7
Gambar 2. 2 Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) Kabupaten Manggarai Barat.....	11
Gambar 2. 3 Produksi Perikanan Laut (Ton) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	12
Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.....	24
Gambar 2. 5 Indeks Kualitas 6Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024	27
Gambar 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023.....	30
Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2024	33
Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024	37
Gambar 2. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen).....	48
Gambar 2. 11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	49
Gambar 2. 12 PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2020-2024.....	50
Gambar 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020- 2024	51
Gambar 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024.....	53
Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	54
Gambar 2. 16 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	55
Gambar 2. 17 Angka Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Manggarai Barat.....	58
Gambar 2. 18 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Manggarai Barat	59
Gambar 2. 19 RLS Kab. Manggarai Barat, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	60
Gambar 2. 20 HLS Kab. Manggarai Barat, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	61
Gambar 2. 21 Rapor Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024	62
Gambar 2. 22 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab. Manggarai Barat Tahun 2020-2024	64
Gambar 2. 23 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Manggarai Barat Tahun 2020-2024	65

Gambar 2. 24 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024	67
Gambar 2. 25 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia 2021-2024 .	69
Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 Sumber: Satu Data Indonesia, 2025	70
Gambar 2. 27 IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023.....	74
Gambar 2. 28 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023..	75
Gambar 2. 29 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	77
Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	78
Gambar 2. 31 IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2019-2023.....	79
Gambar 2. 32 Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2023	81
Gambar 2. 33 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)	83
Gambar 2. 34 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen).....	85
Gambar 2. 35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)	86
Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT	90
Gambar 2. 37 Capaian Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT	90
Gambar 2. 38 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (Miliar Rupiah) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	93
Gambar 2. 39 Net Ekspor Barang dan Jasa ADHB (Miliar Rupiah) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	94
Gambar 2. 40 Inflasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	100
Gambar 2. 41 Indeks SPBE Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	101
Gambar 2. 42 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023	103
Gambar 2. 43 Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	104
Gambar 2. 44 Persentase Penegakan Perda Tahun 2022-2024.....	105
Gambar 2. 45 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2023	106
Gambar 2. 46 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2024.....	112
Gambar 2. 47 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)	132

Gambar 2. 48 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	137
Gambar 2. 49 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Manggarai Barat	
Tahun 2020-2024	139
Gambar 2. 50 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Manggarai Barat	
Tahun 2020-2024	140
Gambar 2. 51 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	142
Gambar 2. 52 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah	
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	143
Gambar 2. 53 Rata-rata Proporsi Komponen PAD, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	145
Gambar 2. 54 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Barat	
Tahun 2020-2024	148
Gambar 2. 55 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	149
Gambar 2. 56 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah	
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	151
Gambar 2. 57 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	153
Gambar 2. 58 Pertumbuhan Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah,	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	154
Gambar 2. 59 Rata-rata Proporsi Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah,	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	155
Gambar 2. 60 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	160
Gambar 2. 61 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	162
Gambar 2. 62 Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	164
Gambar 2. 63 Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	166
Gambar 2. 64 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah	
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	168
Gambar 2. 65 Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten	
Manggarai Barat Tahun 2020-2024	170

Gambar 2. 66 Pertumbuhan Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	172
Gambar 2. 67 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	173
Gambar 2. 68 Realisasi Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	175
Gambar 2. 69 Pertumbuhan Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	176
Gambar 2. 70 Realisasi Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	178
Gambar 2. 71 Pertumbuhan Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	179
Gambar 2. 72 Proporsi Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	180
Gambar 2. 73 Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah dan SILPA, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	185
Gambar 2. 74 Rasio Likuiditas Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024.....	190
Gambar 2. 75 Rasio Solvabilitas Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024.....	193
Gambar 2. 76 Rasio Aktivitas Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024	195
Gambar 2. 77 Proyeksi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	201
Gambar 2. 78 Proyeksi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	203
Gambar 2. 79 Proyeksi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	208
Gambar 3. 1 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029	278

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan menurut prakarsa sendiri guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Maka dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dalam kerangka itu pula, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pengertian tersebut menempatkan perencanaan pembangunan dalam posisi strategis untuk menentukan efektivitas pengelolaan kewenangan daerah yang besar di era otonomi daerah. Perencanaan pembangunan sekaligus menjadi ruang interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks *good governance*.

RPJMD merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, RPJMD menjadi instrument untuk menilai kinerja Kepala Daerah sampai akhir periode kepemimpinannya. Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, serta menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, serta sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 disajikan dalam lima bab meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup. Dalam penyusunan dokumen RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan, serta berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, KLHS,

RPJMN, serta dokumen sektoral terkait. Visi dan Misi didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Edistasius Endi, SE dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 disusun oleh Bappeda Kabupaten Manggarai Barat dengan menjabarkan visi misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Adapun pendekatan perencanaan yang digunakan yakni berorientasi pada proses dan hasil. Pendekatan perencanaan berorientasi proses terdiri dari 4 empat pendekatan, yakni (1) Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah; (2) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama DPRD; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Sedangkan pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil terdiri dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang efektif merupakan salah satu faktor utama untuk mengatasi berbagai permasalahan, memaksimalkan potensi yang tersedia, dan menanggapi isu-isu strategis daerah.

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dilakukan guna merumuskan kembali fokus sasaran, target kinerja, strategi dan program

pembangunan yang lebih efektif. Evaluasi RPJMD yang mempertimbangkan capaian kondisi internal dan eksternal diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Bupati Edistasius Endi, SE dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes yaitu **“Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap”**. Muaranya dokumen ini dapat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi dan misi yang dicita-citakan pemerintah serta masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029 mengacu pada berbagai dasar hukum, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang RTRW Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5441);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
 30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 228);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 255);
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan arah yang jelas tentang keterkaitan antar dokumen perencanaan. Definisi sistem perencanaan pembangunan nasional di dalam regulasi tersebut yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Keterkaitan yang dimandatkan di dalam regulasi tersebut berupa keterkaitan antar jangka perencanaan maupun antara perencanaan pusat dan daerah. Tidak kalah penting, sistem perencanaan tidak hanya menjadi domain pemerintah semata, tetapi juga perlu adanya peran masyarakat. Urgensi keterkaitan antar perencanaan ini semakin jelas dengan merujuk pada tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan antara dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

panjang, serta perumusan rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjang

Secara konseptual, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat diarahkan kepada empat tahapan, yakni Fondasi, Transformasi, Stabilitas dan Evolusi. Adapun tahapan pertama memiliki tema pembangunan berupa “Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan”. Pada tahap pertama ini, perencanaan pembangunan difokuskan pada hal-hal yang bersifat fundamental, di antaranya pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pembangunan turut difokuskan pada infrastruktur dasar lainnya untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut penjabaran arah kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045 pada tahap periodisasi pertama tahun 2025-2029:

Tabel 1. 1 Penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045

Agenda Transformasi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat periode pertama (2025-2029)
Transformasi Sosial	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar
Transformasi Ekonomi	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya ekonomi
Transformasi Tata Kelola	Penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan pelayanan publik yang profesional
Mewujudkan Stabilitas Daerah	Penguatan fondasi stabilitas daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan ketangguhan sosial budaya dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

RPJMD memiliki keterkaitan erat dengan RPJMN karena RPJMD merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional ke tingkat daerah. Penyusunan RPJMD memiliki kesesuaian waktu dengan RPJMN. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. Berbagai muatan RPJMN yang ditelaah dan diacu yaitu isu strategis jangka menengah nasional, tema pembangunan Bali - Nusa Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, target kinerja makro, serta indikasi intervensi pembangunan yang akan dijalankan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran penting untuk mewujudkan tema pembangunan Bali - Nusa Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bali - Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”. Adapun tema pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam RPJMN, yaitu “Pusat Pariwisata Bahari dan Minat Khusus Bertaraf Internasional”. Secara lebih detail, dalam RPJMN tahun 2025-2029 memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. Mengacu pada tema dan arah kebijakan RPJMN tersebut, pembangunan jangka menengah daerah memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD di level kabupaten harus membangun keterkaitan dengan RPJMD di level provinsi. Rancangan kinerja dan agenda pembangunan yang akan dijalankan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur akan ditopang oleh Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa substansi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditelaah dan diacu, yaitu identifikasi kondisi Kabupaten Manggarai Barat di dalam konteks pembangunan provinsi, isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan periode pertama.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi instrumen penting bagi penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah dengan rencana tata ruang wilayah. Aspek di dalam RTRW yang perlu dipedomani antara lain rumusan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Kabupaten Manggarai Barat memiliki periodisasi RTRW Tahun 2021-2041 yang secara umum masih beririsan dengan periodisasi RPJPD. Keselarasan RPJPD dengan RTRW merupakan aspek kritikal pada masa depan, mengingat prediksi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat yang akan berkembang secara dinamis. Tujuan penataan ruang Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2041 adalah “Mewujudkan ruang daerah yang produktif, berbasis pada sektor pariwisata, penataan perkotaan, penataan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, dan pertanian yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat.” Pencapaian tujuan tersebut ditopang dengan Sembilan kebijakan penataan ruang, yang meliputi:

- 1) Penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai untuk dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas intra wilayah dan antar wilayah;
- 2) Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia agar memiliki daya saing di dunia kerja;
- 3) Pengembangan sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan dan konservasi;
- 4) Pengembangan sektor pertanian hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan sebagai produk unggulan dan menjadi sektor basis;
- 5) Pengembangan industri dengan bahan baku lokal (pertanian dan perikanan) dan berwawasan lingkungan;
- 6) Peningkatan hubungan kerja sama antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang sinergis dan saling menguatkan;
- 7) Peningkatan pelestarian lingkungan alam melalui pemantapan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- 8) Pengembangan pelayanan jaringan sarana dan prasarana wilayah yang merata; dan

- 9) Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan melalui mekanisme perijinan dan pengawasan yang tersinergi.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar perencanaan. Melalui KLHS, potensi dampak pembangunan diidentifikasi dan diberikan rekomendasi perbaikan berupa langkah antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi terhadap program dan kegiatan. Isu-isu strategis yang teridentifikasi di dalam KLHS akan diintegrasikan dan dielaborasi dengan permasalahan pembangunan daerah, sehingga memunculkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Manggarai Barat lima tahun ke depan.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja dan APBD

Salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJMD memiliki peran penting dalam menyinergikan antara perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Berikutnya, ketika telah ditetapkan, RPJMD dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan. Proses penjabaran yang selaras antara RPJMD dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) menjadi modal penting bagi keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran, sehingga terwujud penganggaran yang berorientasi kinerja.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang

berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun ke depan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama periode 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sektoral;
6. Menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi

masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis.
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program

prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah.

Bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi merujuk pada interaksi keruangan antar unsur geografi dalam satu kesatuan ruang wilayah. Identifikasi terhadap interaksi keruangan didukung dengan analisis pada dimensi letak wilayah, faktor biofisik lingkungan, dan aspek sosial, sebagai basis dalam menganalisis potensi dan permasalahan lanskap wilayah seperti pengelolaan sumber daya alam dan kebencanaan. Aspek demografi mewakili kondisi sosial keruangan dari sisi distribusi dan komposisi penduduk. Analisis terhadap kedua aspek merupakan fondasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan pemerataan dan keberlanjutan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah administrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdiri pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Manggarai Barat mencakup 945.000 hektare membentang dengan posisi absolut diantara 8°14' LS – 9°00' LS dan 119°21' BT -120°20' BT. Secara kewilayahan, Kabupaten Manggarai Barat terletak pada ujung barat Pulau Flores dalam bentang Gugusan Pulau Nusa Tenggara dengan ciri khas Wallacea. Bentang wilayah daratan meliputi daratan utama Pulau Flores, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Longos, dan gugusan pulau kecil lainnya dengan cakupan luas 314.147 hektare.

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Pulau	Desa	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
5	Lembor	Wae Nakeng		14	1	14.568	4,64
6	Welak	Orong		16		31.919	10,16
7	Lembor Selatan	Lengkon g Cepang	1	15		27.587	8,78
8	Kuwus	Golo Welu		10	2	5.455	1,74
9	Ndoso	Tentang		15		12.495	3,98
10	Kuwus Barat	Landong		14		4.266	1,36
11	Macang Pacar	Bari	3	10		17.464	5,56
12	Pacar	Pacar		12		11.212	3,57
Kabupaten Manggarai Barat		Komodo	201	164	5	314.147	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka Tahun 2025, data diolah

Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat terletak di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Kecamatan Komodo merupakan daerah dengan cakupan wilayah administrasi terluas meliputi 25,9 persen wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan termasuk di dalamnya Pulau Komodo dan 186 gugus pulau di perairan Laut Flores dan Selat Sape. Sebagai daerah terluas, Kecamatan Komodo memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu meliputi 17 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan dengan liputan wilayah administrasi terkecil adalah Kecamatan Kuwus Barat dan Kecamatan Kuwus, masing-masing daerah tersebut hanya meliputi 1,35 persen dan 1,74 persen dari luas kabupaten.

Secara geografis, letak Kabupaten Manggarai Barat dapat berperan sebagai pintu gerbang memasuki Pulau Flores dari sisi barat. Ketersediaan infrastruktur transportasi udara, laut, dan darat memperkuat konektivitas wilayah Pulau Flores dengan wilayah lain. Bandar Udara Internasional Komodo adalah sarana transportasi utama yang menghubungkan wisata Pulau Flores dengan wisatawan mancanegara. Interaksi kewilayahan diperkuat oleh transportasi laut melalui Pelabuhan Labuan Bajo sebagai akses utama mobilitas barang dan jasa secara regional yang terhubung dengan jalur Makassar-Labuan Bajo dan Bali-Bitung. Jalan Trans Flores yang melalui Manggarai Barat menghubungkan Bandara dan Pelabuhan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semakin memperkuat arus pergerakan ekonomi di regional Pulau Flores.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Bentang alam wilayah pesisir dan sabana tropis merupakan potensi wisata bahari Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki daya jual sangat tinggi pada skala nasional dan internasional. Potensi tersebut dikembangkan melalui penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) meliputi 11 kabupaten dan Kawasan Cagar Biosfer Komodo serta wilayah otorita seluas 400 hektare di labuan bajo sebagai suatu Kawasan pariwisata terpadu. Jumlah kunjungan wisata yang ditaksir melalui jumlah tamu hotel sepanjang tahun 2024 mencapai 453.622 jiwa atau bertambah 27,48 persen dari tahun 2023 (BPS Nusa Tenggara Timur, 2025). Potensi wisata tidak hanya berasal dari pesona alam, namun juga dari segi warisan identitas budaya. Merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membuat program Inovasi Fasilitas Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi) dengan tujuan menggali potensi wisata desa untuk kemudian dikembangkan sebagai atraksi wisata budaya dan ekonomi kreatif dilengkapi dengan peningkatan kapasitas internal masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan pemerataan kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata di wilayah Manggarai Barat hingga mencapai 12.715 wisatawan di tahun 2024.

Geliat ekonomi dan pariwisata diproyeksikan akan terus berkembang di Kabupaten Manggarai Barat, pasokan energi yang stabil dibutuhkan untuk mendukung berjalannya perekonomian daerah. Dari sektor energi, Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi energi panas bumi (*geothermal*) mencapai 910 Mwe dengan potensi sumber daya diperkirakan mencapai 385 MWe serta cadangan energi mencapai 524 Mwe. Potensi tersebut membuka peluang Kabupaten Manggarai Barat sebagai wilayah pengembangan sektor energi terbarukan untuk menyediakan energi bersih dan suplai listrik secara berkelanjutan.

Sektor ekonomi primer di Kabupaten Manggarai Barat ditopang oleh kegiatan pertanian termasuk pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan. Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, sektor pertanian menempati posisi pertama dengan porsi 37,79 persen pada tahun 2024. Berikut

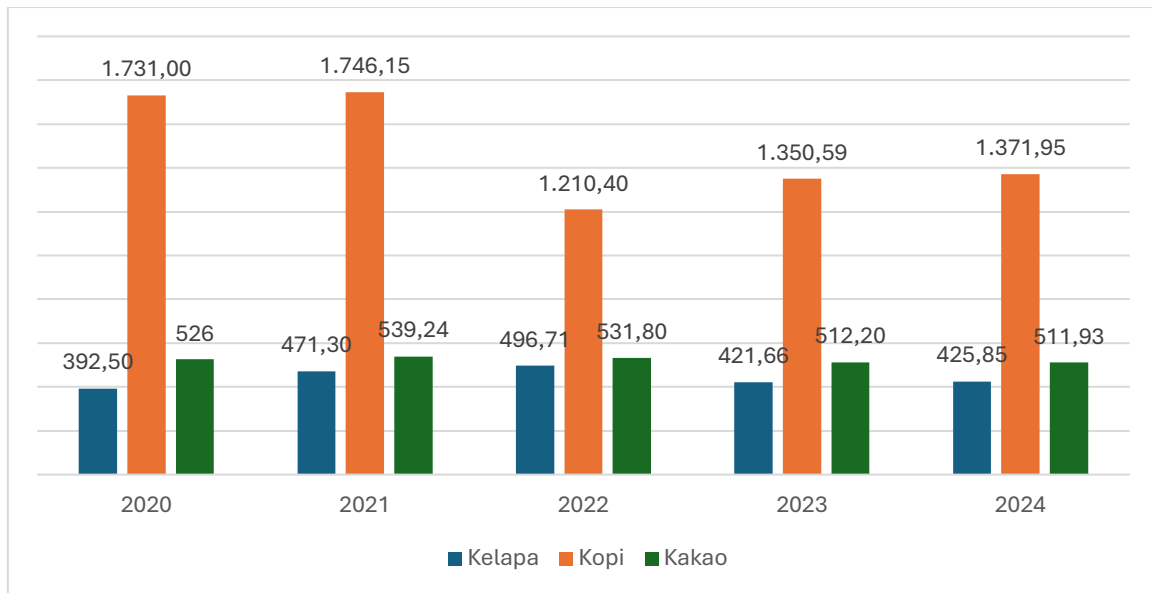
ini merupakan luas panen dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 2 Luas Panen (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Komoditi	2020		2021		2022		2023		2024	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Padi Sawah	37.886,20	212.313,70	28.413,80	158.763,60	32.299,30	217.891,76	30.384,10	184.733,83	31.462,60	185.038,50
Padi Ladang	5.936,00	13.653,60	8.041,00	21.337,80	1.419,00	3.582,39	2.105,00	5.982,70	1.377,80	4.217,70
Jagung	9.829,00	60.540,90	3.322,30	19.395,80	2.434,80	13.187,10	5.176,70	26.814,30	3.328,70	14.392,20
Ubi Jalar	573,00	5.608,20	1.268,00	14.607,40	1.422,00	8.723,00	1.287,00	8.572,50	715,00	11.773,30
Ubi Kayu	864,00	8.640,00	2.314,00	32.141,50	2.193,00	14.836,00	1.815,00	25.210,35	2.269,00	31.884,60
Kacang Tanah	298,00	357,60	402,00	980,20	201,00	305,80	193,30	348,30	163,50	220,70
Kedelai	305	411,5	153	206,9	115	153,38	199,8	129,89	187,1	217,7
Kacang Hijau	262	417,1	266	340,8	100	127,8	227,3	286,51	140	207

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

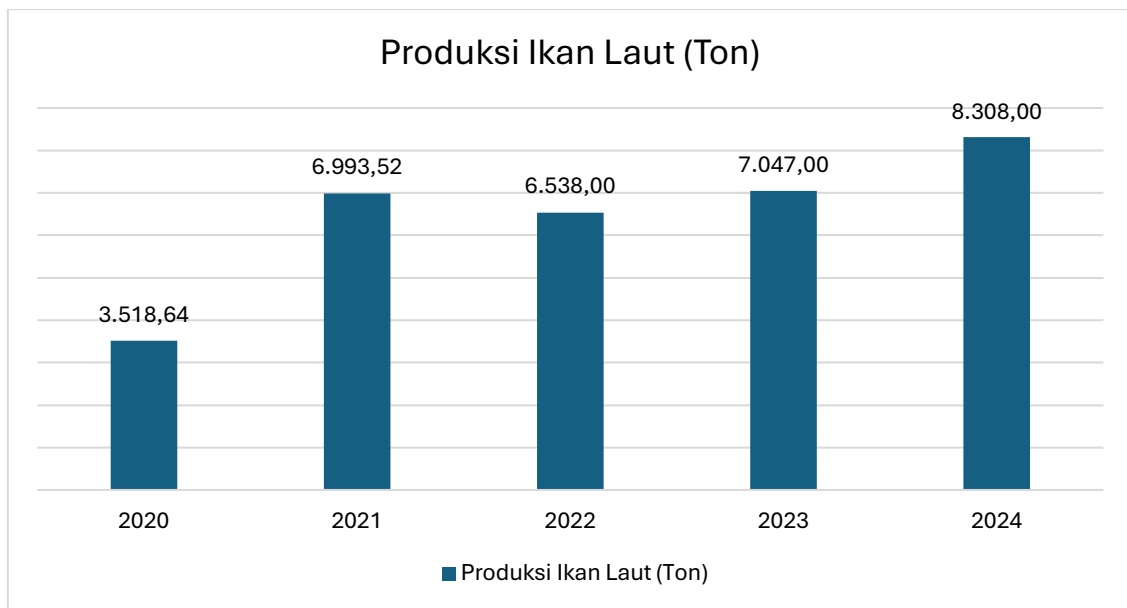
Sektor pertanian tanaman pangan sangat potensial dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komoditas padi sawah menyumbang produksi tanaman pangan terbesar dibandingkan komoditas lainnya, yakni 185.038,5 ton pada tahun 2024. Luas tanam sawah meliputi 18,64 persen dari luas tanam total Provinsi NTT, tercatat menopang produksi 15,17 persen GKG dari total produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024. Sehingga menghasilkan produksi beras mencapai 62 ribu ton atau 15,17 persen dari total produksi Provinsi NTT. Komoditas tanaman pangan lain seperti jagung dan ubi jalar menghasilkan lebih rendah, namun pengembangannya penting untuk diversifikasi tanaman pangan yang lebih variatif. Ketercukupan produksi pangan lokal sangat strategis untuk mendukung perkembangan pariwisata melalui penyediaan pasokan pangan yang stabil.



Gambar 2. 2 Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Statistik Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Komoditas perkebunan dengan potensi cukup besar meliputi kopi, kakao, dan kelapa. Komoditas kopi mampu menghasilkan lebih dari 1000 ton setiap tahunnya dengan tren produksi yang fluktuatif. Produksi kopi mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 30,68 persen, kemudian berhasil melonjak 11,58 persen di tahun 2023 dan berlanjut 1,58 persen tahun 2024. Sejalan dengan produksi kopi, kakao mengalami penurunan produksi 1,38 persen di tahun 2022 dan terus berlanjut hingga 3,69 persen di tahun 2023. Produksi kelapa cenderung lebih stabil karena mengalami peningkatan hingga 0,99% di tahun 2024. Lonjakan produksi kelapa terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu bertambah 20,08 persen.



Gambar 2. 3 Produksi Perikanan Laut (Ton) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Statistik Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Hasil laut Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi sangat besar, terutama dari hasil tangkapan ikan laut. Produksinya terus meningkat dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tren yang positif dalam pengembangan sektor ekonomi biru. Produksi perikanan laut berhasil meningkat 7,79 persen pada tahun 2023 dan berlanjut mencapai 17,89 persen pada tahun 2024. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan persentase peningkatan mencapai 98,76 persen atau setara dua kali produksi perikanan tahun 2020.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat sangat penting untuk memastikan kesinambungan rantai pasok, terutama dalam sektor pertanian yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Dengan menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan dan konservasi lahan, diharapkan stabilitas produksi dapat terjaga, sehingga rantai pasok pangan tetap lancar dan mendukung ketahanan pangan serta perekonomian lokal.

Tabel 2. 3 Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Manggarai Barat Tahun 2024

No	Komoditi	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS	JLH.KK	Wujud Produksi
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelapa	297,85	1.305,27	687,74	2.290,86	432,08	331	4.675	Kopra
2	Jambu Mete	587,00	3.406,90	2.900,10	6.894,00	1.076,63	316	9.805	Biji
3	Kopi	577,83	3.490,18	2.004,82	6.072,83	1.409,86	404	10.603	Biji Kering
	- Arabika	122,00	288,50	178,00	588,50	117,48	407	1.069	Biji Kering
	- Robusta	455,83	3.201,68	1.826,82	5.484,33	1.292,38	404	9.534	Biji Kering
4	Kakao	277,00	1.518,20	741,65	2.536,85	513,34	338	4.059	Biji Kering
5	Kemiri	336,15	3.030,71	1.041,62	4.408,48	1.327,90	438	6.406	Inti Biji
6	Kapuk	9,00	217,06	603,35	829,41	46,39	214	1.707	Serat Kering
7	Cengkeh	1.255,03	1.520,86	315,40	3.091,29	500,56	329	4.945	Bunga Kering
8	Pinang	69,52	176,65	106,63	352,80	50,16	284	796	Biji Kering
9	Vanili	200,78	152,11	29,08	381,97	38,65	254	598	Polong Kering
10	Lada	20,90	29,10	12,00	62,00	9,33	321	132	Lada Kering
11	Asam	2,00	7,00	-	9,00	1,99	284	11	
12	Pala	239,00	-	12,50	251,50	-	-	511	Biji Kering
13	Tembakau	-	60,00	-	60,00	58,00	967	87	Daun Kering
14	Sirih	6,25	9,25	4,00	19,50	4,37	472	71	Daun Kering
15	Lontar	2,50	3,25	-	5,75	0,40	123	3	
TOTAL		3.880,81	14.926,54	8.458,89	27.266,24	5.469,65	366	44.408	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Catatan: TBM = Tanaman Belum Menghasilkan, TM = Tanaman Menghasilkan, TT/TR = Tanaman Tua/Tanaman Rusak

Berdasarkan tabel Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa sektor perkebunan di daerah ini memiliki keragaman komoditas unggulan dengan total luas areal mencapai 27.266,24 hektare dan total produksi sebesar 5.469,65 ton. Data tersebut mencakup tiga kategori luas areal, yaitu Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tua/Tanaman Rusak (TT/TR), yang menunjukkan tahapan produktivitas dari masing-masing komoditas. Secara umum, komoditas yang memiliki luas areal terbesar adalah Jambu Mete (6.894,00 Ha), disusul oleh Kopi (6.072,83 Ha) dan Kemiri (4.408,48 Ha). Ketiga komoditas ini menjadi tulang punggung perkebunan rakyat di Manggarai Barat. Dari sisi produksi, Kopi menempati urutan pertama

dengan total produksi mencapai 1.409,86 ton, diikuti oleh Kemiri (1.327,90 ton) dan Jambu Mete (1.076,63 ton). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas kopi, terutama jenis Robusta, menjadi andalan utama karena memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi daerah.

Komoditas lain seperti Kakao, Cengkeh, dan Kelapa juga memberikan kontribusi penting meskipun skalanya lebih kecil. Kakao memiliki luas areal 2.536,85 Ha dengan produksi 513,34 ton, sementara Cengkeh mencapai 3.091,29 Ha dengan produksi 500,56 ton. Kedua komoditas ini masih memiliki potensi pengembangan yang besar, terutama melalui peningkatan produktivitas tanaman dan peremajaan kebun. Adapun komoditas dengan skala pengelolaan kecil seperti Lada, Vanili, Tembakau, Sirih, dan Lontar menunjukkan diversifikasi hasil perkebunan rakyat yang mendukung ketahanan ekonomi lokal.

Dari sisi produktivitas (ton/ha), rata-rata berada pada angka 366 kg per hektare, dengan nilai tertinggi dimiliki oleh komoditas Tembakau (967 kg/ha) dan Sirih (472 kg/ha). Sementara itu, jumlah rumah tangga tani yang terlibat mencapai 44.408 KK, menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki peran sosial-ekonomi yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan menopang kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Manggarai Barat. Secara umum, dapat dilihat bahwa struktur perkebunan Manggarai Barat tahun 2024 didominasi oleh komoditas tahunan berorientasi konsumsi domestik, terutama kopi, jambu mete, dan kemiri. Tantangan utama ke depan adalah peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan industri hilir agar nilai tambah komoditas perkebunan dapat lebih optimal mendukung pariwisata dan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi bagian penting yang perlu dianalisis dalam mengidentifikasi gambaran umum kondisi daerah. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Secara umum, lingkungan menyediakan berbagai jasa ekosistem, termasuk jasa penyediaan, pengaturan, pendukung, dan kultural. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat difokuskan pada

ketersediaan pangan dan air, mengingat keduanya merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

2.1.1.3.1 Proyeksi Daya Dukung Pangan

Kemampuan lahan dalam penyediaan pangan di Kabupaten Manggarai Barat didukung oleh kemampuan jasa ekosistem lahan. Ekosistem memberikan jasa berupa penyediaan bahan baku pangan yang berasal dari berbagai sumber hayati. Dalam perkembangannya, tantangan penyediaan pangan tidak hanya berupa pertambahan jumlah penduduk, melainkan juga potensi bencana alam dan perubahan iklim. Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir, ada tiga jenis kejadian bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, yaitu puting beliung, banjir, dan longsor. Ancaman bencana alam, khususnya banjir, berpotensi mengganggu ketahanan pangan akibat berkurangnya produksi padi. Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi serta intensitas perubahan iklim, dan meningkatnya risiko serangan hama memberikan dampak negatif bagi petani. Kondisi ini menyulitkan mereka dalam menentukan jadwal tanam yang tepat, sehingga berpotensi mengakibatkan rendahnya hasil panen dan produktivitas tanaman, yang pada akhirnya dapat mengancam sumber penghidupan mereka. Selain itu, peningkatan kebutuhan akan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan juga berisiko mengurangi luas lahan pertanian di masa mendatang.

Daya dukung penyediaan pangan merujuk pada kapasitas produksi tanaman pangan, seperti padi atau jenis tanaman pangan lainnya, dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di suatu daerah. Status DDLH indikatif untuk jasa lingkungan penyedia pangan ditentukan dengan menghitung batas maksimum jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan jasa lingkungan. Batas ini dikenal sebagai ambang batas penduduk, yaitu jumlah maksimum penduduk yang masih dapat terlayani oleh sumber daya yang tersedia. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan jumlah penduduk aktual pada suatu periode dengan ambang batas yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029:

Tabel 2. 4 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Kecamatan	2023		Proyeksi									
			2025		2026		2027		2028		2029	
	Sp	DP	SP	DP	SP	DP	SP	DP	SP	DP	SP	DP
Komodo	13.083,71	7.333,65	13.281,20	7.825,60	13.379,94	8.083,94	13.478,69	8.350,64	13.676,18	8.626,20	13.787,88	8.910,88
Boleng	16.054,90	2.486,96	16.288,42	2.581,36	16.405,18	2.629,93	16.521,94	2.679,37	16.750,11	2.729,69	16.869,27	2.781,01
Sano Nggoang	11.486,78	1.840,94	11.687,79	1.889,13	11.788,29	1.913,73	11.888,80	1.938,58	12.081,64	1.963,80	12.274,48	1.989,27
Mbeliling	9.805,22	1.811,22	9.978,88	1.882,14	10.065,70	1.918,72	10.152,53	1.955,93	10.326,19	1.993,89	10.490,58	2.032,60
Lembor	24.880,79	4.444,14	25.222,24	4.629,18	25.392,96	4.724,45	25.563,69	4.821,84	25.740,41	4.921,11	25.917,14	5.022,49
Welak	10.540,32	2.794,62	10.712,54	2.888,14	10.798,65	2.936,08	10.884,76	2.984,90	11.044,09	3.034,35	11.203,42	3.084,79
Lembor Selatan	13.080,94	3.073,18	13.296,87	3.182,31	13.404,84	3.238,37	13.512,80	3.295,31	13.728,73	3.353,37	13.934,85	3.412,30
Kuwus	7.294,55	1.761,65	7.421,03	1.802,35	7.484,27	1.823,08	7.547,51	1.844,06	7.673,99	1.865,28	7.797,85	1.886,76
Ndoso	5.969,14	2.600,26	6.066,99	2.675,87	6.115,92	2.714,08	6.164,85	2.752,91	6.262,70	2.792,37	6.350,03	2.832,20
Macang Pacar	7.058,96	1.409,29	7.177,95	1.465,61	7.237,45	1.494,70	7.296,95	1.524,29	7.409,93	1.554,51	7.522,92	1.585,22
Kuwus Barat	5.394,45	2.070,18	5.508,47	2.130,61	5.565,48	2.161,58	5.622,49	2.192,92	5.736,50	2.224,63	5.839,48	2.256,97
Pacar	10.642,40	2.199,91	10.799,04	2.273,08	10.877,35	2.310,66	10.955,67	2.348,74	11.100,25	2.387,45	11.244,82	2.426,90
Manggarai Barat	135.292,16	33.826,70	137.441,42	35.225,38	138.516,05	35.949,32	139.590,68	36.689,49	141.530,72	37.446,64	143.232,72	38.221,39

Keterangan:

SP = Ketersediaan Pangan Setara Beras (Ton/tahun)

DP = Kebutuhan Pangan Setara Beras (Ton/Tahun).

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029

Tabel 2. 5 Proyeksi Daya Dukung Penyedia Pangan Tahun 2025-2029

Kecamatan	2023			Proyeksi														
				2025			2026			2027			2028			2029		
	JP	DDP	Indikatif	JP	DDP	Indikatif	JP	DDP	Indikatif	JP	DDP	Indikatif	JP	DDP	Indikatif	JP	DDP	Indikatif
Komodo	58.735	1,78	TT	62.675	1,70	TT	64.744	1,66	TT	66.880	1,61	TT	69.087	1,59	TT	71.367	1,55	TT
Boleng	19.918	6,46	TT	20.674	6,31	TT	21.063	6,24	TT	21.459	6,17	TT	21.862	6,14	TT	22.273	6,07	TT
Sano Nggoang	14.744	6,24	TT	15.130	6,19	TT	15.327	6,16	TT	15.526	6,13	TT	15.728	6,15	TT	15.932	6,17	TT
Mbeliling	14.506	5,41	TT	15.074	5,30	TT	15.367	5,25	TT	15.665	5,19	TT	15.969	5,18	TT	16.279	5,16	TT
Lembor	35.593	5,60	TT	37.075	5,45	TT	37.838	5,37	TT	38.618	5,30	TT	39.413	5,23	TT	40.225	5,16	TT
Welak	22.382	3,77	TT	23.131	3,71	TT	23.515	3,68	TT	23.906	3,65	TT	24.302	3,64	TT	24.706	3,63	TT
Lembor Selatan	24.613	4,26	TT	25.487	4,18	TT	25.936	4,14	TT	26.392	4,10	TT	26.857	4,09	TT	27.329	4,08	TT
Kuwus	14.109	4,14	TT	14.435	4,12	TT	14.601	4,11	TT	14.769	4,09	TT	14.939	4,11	TT	15.111	4,13	TT
Ndoso	20.831	2,29	TT	21.431	2,27	TT	21.737	2,25	TT	22.048	2,24	TT	22.364	2,24	TT	22.683	2,24	TT
Macang Pacar	11.287	5,01	TT	11.738	4,90	TT	11.971	4,84	TT	12.208	4,79	TT	12.450	4,77	TT	12.696	4,75	TT
Kuwus Barat	16.580	2,61	TT	17.064	2,59	TT	17.312	2,57	TT	17.563	2,56	TT	17.817	2,58	TT	18.076	2,59	TT
Pacar	17.619	4,84	TT	18.205	4,75	TT	18.506	4,71	TT	18.811	4,66	TT	19.121	4,65	TT	19.437	4,63	TT
Manggarai Barat	270.917	4,00	TT	282.119	3,90	TT	287.917	3,85	TT	293.845	3,80	TT	299.909	3,78	TT	306.114	3,75	TT

Keterangan:

JP = Jumlah Penduduk (jiwa)

DDP = Daya Dukung Pangan

TT = Tidak Terlampaui

T = Terlampaui.

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029

Proyeksi daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan bahwa status daya dukung pangan untuk masing-masing kecamatan masih dalam kategori TT (Tidak Terlampaui). Artinya, jasa ekosistem lingkungan penyedia pangan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun ke depan. Untuk merespons tantangan penyediaan pangan di masa mendatang dibutuhkan strategi pengembangan untuk meningkatkan daya dukung pangan:

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, secara konsisten;
- b. Pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta menerapkan indeks penanaman sampai 2 (dua) kali per tahun
- c. Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan
- d. Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim
- e. Pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah
- f. Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan
- g. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pendekatan teknologi yang cocok dengan karakteristik lokal yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi serta penguatan sarana-prasarana produksi
- h. Diversifikasi pangan melalui penerapan gizi berimbang untuk menurunkan konsumsi beras per kapita.
- i. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan.

2.1.1.3.2 Proyeksi Daya Dukung Air

Daya dukung lingkungan dalam menyediakan air dihitung dengan membandingkan jumlah air yang tersedia dengan kebutuhan air yang layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah yang dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan (SA) dan kebutuhan air (DA). Jika nilai $SA > DA$ maka daya dukung air dinyatakan surplus, sebaliknya jika nilai $SA < DA$ maka daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Jumlah air yang tersedia dihitung menggunakan metode koefisien limpasan, yang didasarkan pada data penggunaan lahan dan curah hujan tahunan. Sementara itu, estimasi kebutuhan air diperoleh melalui konversi terhadap standar kebutuhan hidup layak. Ketersediaan (*supply*) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Proyeksi daya dukung air di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan menggunakan asumsi ketersediaan air permukaan tetap dan potensi peningkatan kebutuhan air akibat pertambahan jumlah penduduk. Hasil proyeksi daya dukung air Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Kecamatan	2023		Proyeksi Kebutuhan				
	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	2025	2026	2027	2028	2029
Komodo	230.116.066,10	93.976.000	100.280.000	103.590.400	107.008.000	110.539.200	114.187.200
Boleng	49.179.606,67	31.868.800	33.078.400	33.700.800	34.334.400	34.979.200	35.636.800
Sano Nggoang	104.973.758,88	23.590.400	24.208.000	24.523.200	24.841.600	25.164.800	25.491.200
Mbeliling	22.702.069,52	23.209.600	24.118.400	24.587.200	25.064.000	25.550.400	26.046.400
Lembor	120.209.623,64	56.948.800	59.320.000	60.540.800	61.788.800	63.060.800	64.360.000
Welak	43.445.940,86	35.811.200	37.009.600	37.624.000	38.249.600	38.883.200	39.529.600
Lembor Selatan	173.200.790,10	39.388.800	40.779.200	41.497.600	42.227.200	42.971.200	43.726.400
Kuwus	15.126.158,41	22.574.400	23.096.000	23.361.600	23.630.400	23.902.400	24.177.600
Ndoso	21.200.055,79	33.329.600	34.289.600	34.779.200	35.276.800	35.782.400	36.292.800
Macang Pacar	114.549.609,03	18.059.200	18.780.800	19.153.600	19.532.800	19.920.000	20.313.600
Kuwus Barat	14.294.394,24	26.528.000	27.302.400	27.699.200	28.100.800	28.507.200	28.921.600
Pacar	15.703.328,30	28.190.400	29.128.000	29.609.600	30.097.600	30.593.600	31.099.200
Manggarai Barat	924.701.401,54	433.467.200	451.390.400	460.667.200	470.152.000	479.854.400	489.782.400

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029

Tabel 2. 7 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Kecamatan	2023			Proyeksi														
				2025			2026			2027			2028			2029		
	JP	DDA	Indikatif	JP	DDA	Indikatif	JP	DDA	Indikatif	JP	DDA	Indikatif	JP	DDA	Indikatif	JP	DDA	Indikatif
Komodo	58.735	2,45	TT	62.675	2,29	TT	64.744	2,22	TT	66.880	2,15	TT	69.087	2,08	TT	71.367	2,02	TT
Boleng	19.918	1,54	TT	20.674	1,49	TT	21.063	1,46	TT	21.459	1,43	TT	21.862	1,41	TT	22.273	1,38	TT
Sano Nggoang	14.744	4,45	TT	15.130	4,34	TT	15.327	4,28	TT	15.526	4,23	TT	15.728	4,17	TT	15.932	4,12	TT
Mbeliling	14.506	0,98	T	15.074	0,94	T	15.367	0,92	T	15.665	0,91	T	15.969	0,89	T	16.279	0,87	T
Lembor	35.593	2,11	TT	37.075	2,03	TT	37.838	1,99	TT	38.618	1,95	TT	39.413	1,91	TT	40.225	1,87	TT
Welak	22.382	1,21	TT	23.131	1,17	TT	23.515	1,15	TT	23.906	1,14	TT	24.302	1,12	TT	24.706	1,10	TT
Lembor Selatan	24.613	4,40	TT	25.487	4,17	TT	25.936	4,17	TT	26.392	4,10	TT	26.857	4,03	TT	27.329	3,96	TT
Kuwus	14.109	0,67	T	14.435	0,65	T	14.601	0,65	T	14.769	0,64	T	14.939	0,63	T	15.111	0,63	T
Ndoso	20.831	0,64	T	21.431	0,62	T	21.737	0,61	T	22.048	0,60	T	22.364	0,59	T	22.683	0,58	T
Macang Pacar	11.287	6,34	TT	11.738	6,10	TT	11.971	5,98	TT	12.208	5,86	TT	12.450	5,75	TT	12.696	5,64	TT
Kuwus Barat	16.580	0,54	T	17.064	0,52	T	17.312	0,52	T	17.563	0,51	T	17.817	0,50	T	18.076	0,49	T
Pacar	17.619	0,56	T	18.205	0,54	T	18.506	0,53	T	18.811	0,52	T	19.121	0,51	T	19.437	0,50	T
Manggarai Barat	270.917	2,13	TT	282.119	2,05	TT	287.917	2,01	TT	293.845	1,97	TT	299.909	1,93	TT	306.114	1,89	TT

Keterangan:

JP = Jumlah Penduduk (jiwa)

DDP = Daya Dukung Pangan

TT = Tidak Terlampaui T = Terlampaui.

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029

Hasil proyeksi daya dukung air menunjukkan bahwa terdapat lima kecamatan dengan kondisi daya dukung air yang telah terlampaui yakni Mbeliling, Kuwus, Ndosso, Kuwus Barat, dan Pacar. Namun demikian secara agregat, kondisi daya dukung air di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025- 2029 masih dalam kondisi surplus atau Tidak Terlampaui (TT), dengan nilai indeks daya dukung air (DDA) berkisar 1,89 – 2,05.

Masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki pasokan air permukaan yang memadai untuk mendukung kehidupan yang layak dan nyaman. Namun, dengan meningkatnya jumlah penduduk, konsentrasi populasi di daerah perkotaan dan pesisir, serta perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan tetap harus menjadi perhatian utama. Ketersediaan air, terutama yang berasal dari hujan, sangat bervariasi dalam hal lokasi dan waktu, sementara anomali iklim turut memengaruhi jumlah serta intensitas curah hujan, yang menyebabkan fluktuasi tinggi. Kondisi ini perlu diantisipasi karena hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat memicu banjir dan longsor, sedangkan curah hujan yang rendah saat musim kemarau berpotensi menyebabkan kekeringan. Selain air permukaan, Kabupaten Manggarai Barat mempunyai potensi air tanah berupa cekungan air tanah (CAT), yaitu:

- a) CAT Ruteng, yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 3.724 km² serta memiliki debit CAT tidak tertekan sebesar 2.058 juta m³/tahun dan debit CAT tertekan sebesar 30 juta m³/tahun.
- b) CAT Labuan bajo, yang merupakan CAT dalam satu Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 413 km² serta memiliki debit CAT tidak tertekan sebesar 191 juta m³/tahun dan debit CAT tertekan sebesar 3 juta m³/tahun.
- c) CAT Lempe, yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 398 km² serta memiliki debit CAT tidak tertekan sebesar 174 juta m³/tahun dan debit CAT tertekan sebesar 1 juta m³/tahun.

Beberapa rekomendasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dan menjaga ketersediaan air antara lain sebagai berikut:

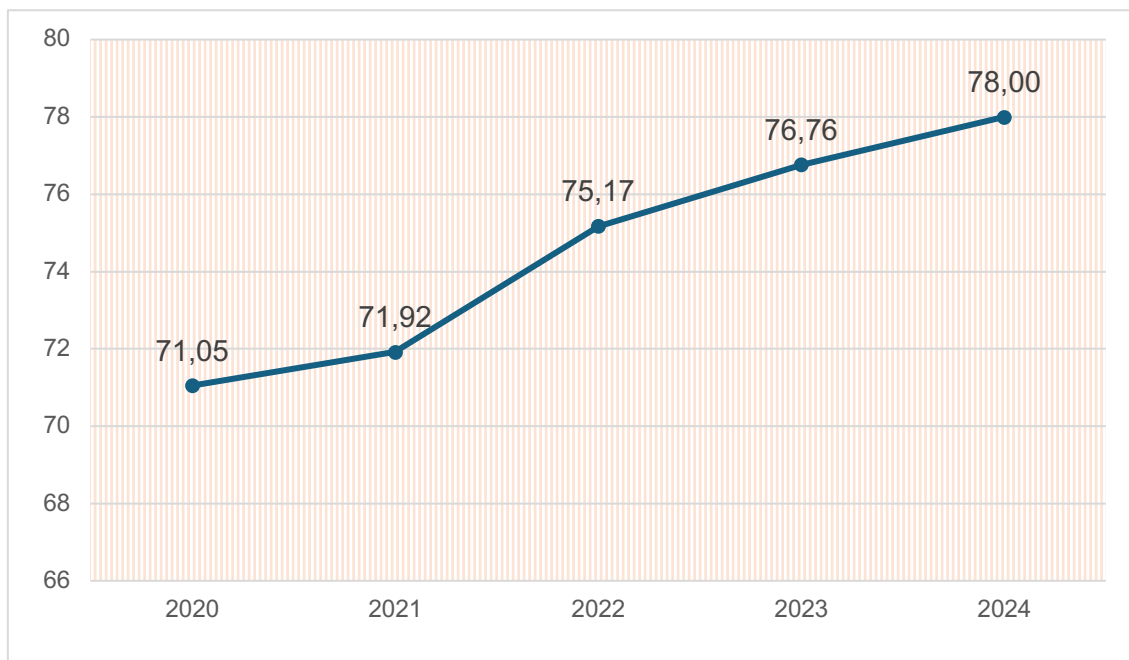
- a) Peningkatan kawasan lindung resapan air, sempadan sungai, mata air dan bendungan/waduk untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem penyedia air;
- b) Peningkatan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung serta pemanenan air hujan, dengan cara membuat sumur resapan dalam rumah tangga maupun di ruang-ruang terbuka, serta bangunan milik pemerintah, swasta, dan badan usaha;
- c) Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari berbagai sumber pencemar;
- d) Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan air tanah;
- e) Rehabilitasi lahan kritis dan sangat kritis di luar Kawasan hutan;
- f) Penghematan penggunaan air untuk lahan pertanian dengan penerapan sistem pertanian yang hemat air;
- g) Pengaturan dan penertiban pemanfaatan sumber air CAT dengan memperhatikan antara kemampuan pengisian kembali dengan pemanfaatannya;
- h) Peningkatan upaya inisiasi dan inseminasi pemanenan dan pemanfaatan air hujan skala rumah tangga maupun komunal melalui pembangunan sistem pemanenan dan pengolahan air hujan serta penerapan teknologi sederhana pengolahan air hujan misalnya teknik elektrolisis; dan
- i) Peningkatan edukasi lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi, dan hemat air.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Subbagian ini menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator, seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, serta Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.

2.1.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Ketersediaan pangan yang memadai tidak hanya menjadi modal dasar bagi pemerintah dalam membangun daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta stabilitas ekonomi dan sosial. Sebaliknya, ketidakstabilan atau kerawanan pangan dapat menjadi hambatan serius yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, serta memicu permasalahan sosial di berbagai wilayah. Berikut ini merupakan capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024:.



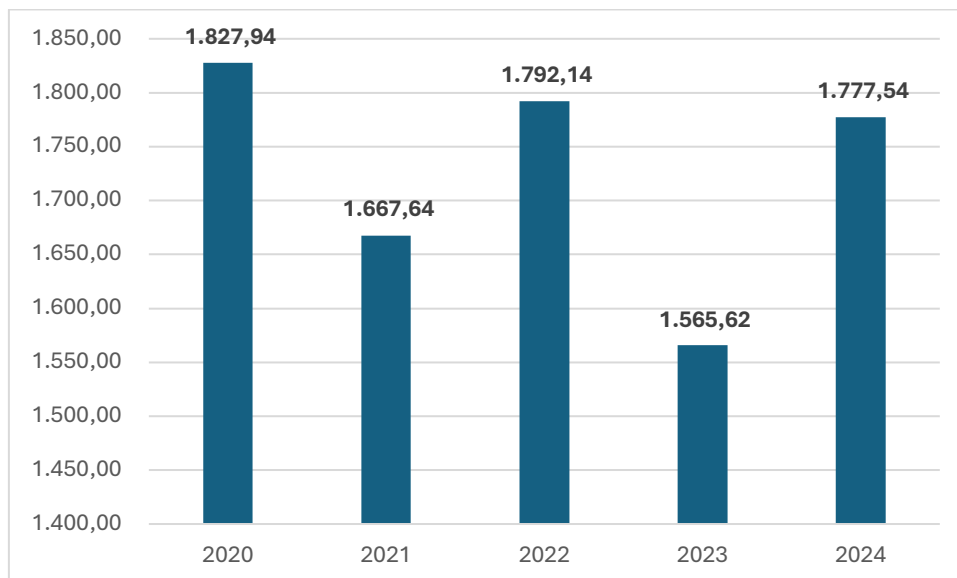
Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Manggarai Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,37 persen per tahun. Peningkatan nilai tersebut didukung dengan tingginya nilai pada komponen ketersediaan yang mencapai lebih dari 90. Mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah. Upaya ini harus diwujudkan melalui kebijakan strategis yang mencakup peningkatan produksi pangan, optimalisasi distribusi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencapai kemandirian pangan.

2.1.1.4.2 Ketenagalistrikan

Kondisi pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Manggarai Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga menurut sumber penerangan PLN sebesar 92,99 persen, sedangkan non PLN 6,23 persen. Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Manggarai Barat telah dibangun cukup memadai. Namun, masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah.



Gambar 2. 5 Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

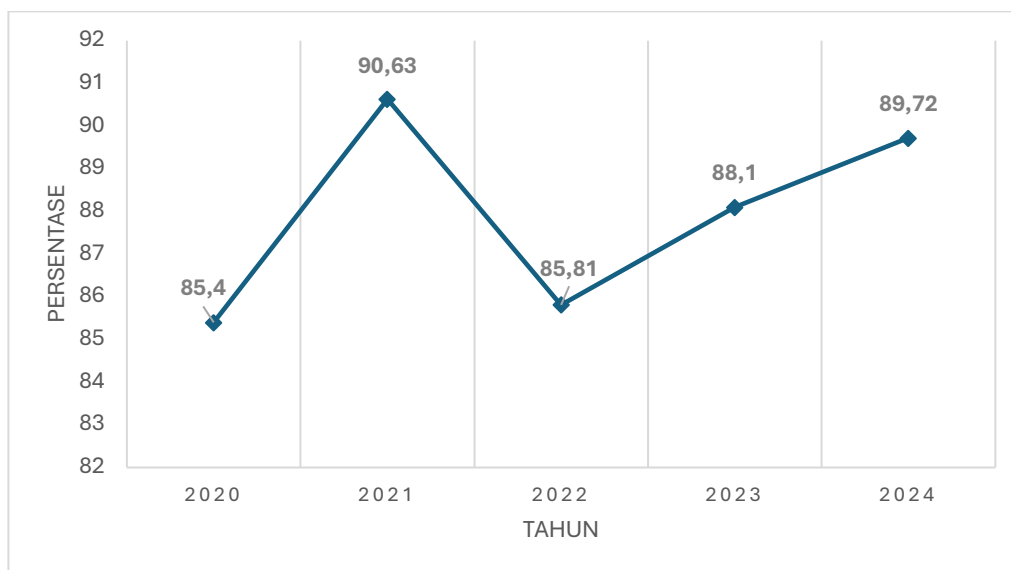
Sumber: PT. PLN Ranting Labuan Bajo (Dalam Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka, 2024)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa pada tahun 2020 konsumsi listrik per kapita berada pada angka tertinggi sebesar 1.827,94 kWh, yang kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 1.667,64 kWh. Penurunan ini kemungkinan mencerminkan dampak dari pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial selama masa pandemi COVID-19. Namun, konsumsi kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.792,14 kWh, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas masyarakat.

Meskipun sempat turun drastis pada tahun 2023 hingga mencapai titik terendah sebesar 1.565,62 kWh, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Manggarai Barat kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1.777,54 kWh. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi, perubahan pola konsumsi energi masyarakat, serta kemungkinan pengaruh dari kebijakan pemerintah daerah terkait efisiensi energi dan elektrifikasi wilayah. Kenaikan konsumsi di tahun terakhir dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap pemulihan daya beli dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

2.1.1.4.3 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak

Penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mengolah sumber air baku sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Air yang telah melalui proses pengolahan kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan. Berikut disajikan data persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 6 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

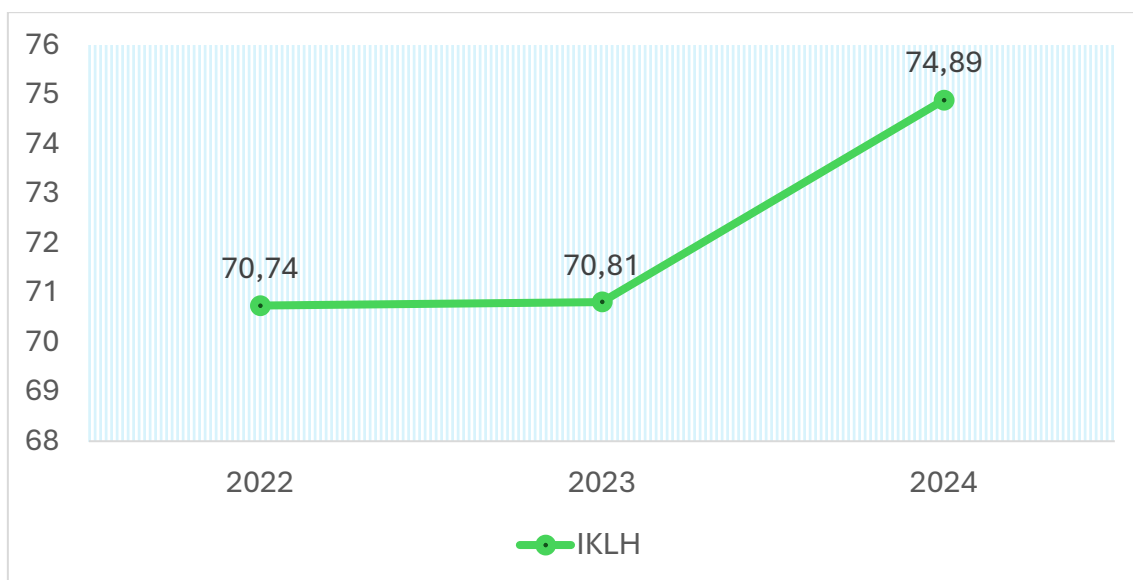
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami tren yang fluktuatif antara tahun 2020 hingga 2022, dengan capaian tertinggi sebesar 90,63 persen pada tahun 2021. Kemudian pada rentang tahun 2022 hingga 2024

mengalami tren capaian yang meningkat. Fluktuasi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan sumber daya air, sehingga air baku di Kabupaten Manggarai Barat dapat terlayani optimal. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai dan mata air, yang menjadi akar masalah dan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar yang sangat penting. Saat ini, isu lingkungan hidup menjadi isu nasional dan global. Bahkan dalam setiap agenda pembangunan, aspek lingkungan hidup juga menjadi aspek yang selalu dipertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan lingkungan di suatu daerah.



Gambar 2. 7 Indeks Kualitas 8Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

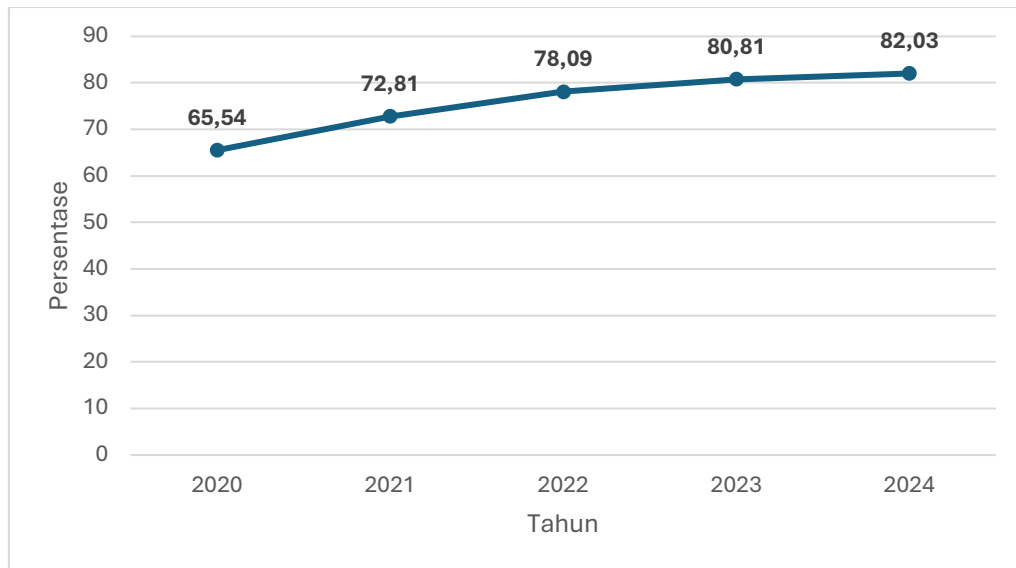
Gambar di atas hanya menampilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2022 hingga 2024 saja, dikarenakan nilai IKLH tahun 2020 dan 2021 tidak mendapatkan nilai karena Indeks Kualitas Air tidak dapat

diukur sehubungan dengan Laboratorium Air yang belum bisa mengukur kualitas air di Kabupaten Manggarai Barat. Dari data tahun 2022 hingga 2024, dapat dilihat bahwa IKHL Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin dengan komponen IKLH dengan capaian terendah adalah indeks kualitas air.

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni. Ketidaklayakan hunian tersebut dapat diketahui dengan ciri-ciri tidak teraturnya bangunan, jaringan jalan tidak diperkeras, sanitasi umum, drainase tidak berfungsi, pembuangan air limbah masih buruk, persampahan belum dikelola dengan baik, kurangnya proteksi kebakaran serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi sanitasi permukiman merupakan hal yang sangat krusial untuk diintervensi untuk memperkecil luasan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai Barat.

Sementara itu, sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik (KemenPU, 2020). Akses sanitasi layak diidentifikasi jika sebuah rumah tangga memiliki toilet kedap air yang terhubung dengan tangki septik, sedangkan akses sanitasi aman diidentifikasi jika suatu rumah tangga memiliki toilet sendiri dengan sekat air yang terhubung dengan tangki septik yang dikuras secara teratur. Kondisi tangki septik dan lokasi pembuangan limbah (lumpur tinja) tidak dipertimbangkan dalam identifikasi akses sanitasi aman (UNICEF, 2024). Berikut merupakan data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 9 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Rumah tangga yang telah mengakses sanitasi layak di Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 82,03 persen. Capaian ini merupakan yang tertinggi antara tahun 2020 hingga 2024 di mana mengalami tren yang terus meningkat. Namun, kondisi tersebut belum diikuti dengan layanan sanitasi permukiman aman. Hal tersebut mengindikasikan bahwa layanan sanitasi aman di Kabupaten Manggarai Barat masih harus ditingkatkan.

2.1.1.5.3 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Penanganan sampah di Kabupaten Manggarai Barat secara umum dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan sampah dan pengurangan sampah. Kegiatan penanganan sampah dilaksanakan dalam bentuk pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat diukur melalui indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, di mana pada tahun 2024 mempunyai nilai 26,1. Capaian kinerja tersebut belum dapat diperbandingkan karena merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2024.

Capaian tersebut membuktikan bahwa upaya-upaya penanganan sampah di Kabupaten Manggarai Barat masih perlu ditingkatkan sebagai daerah tujuan

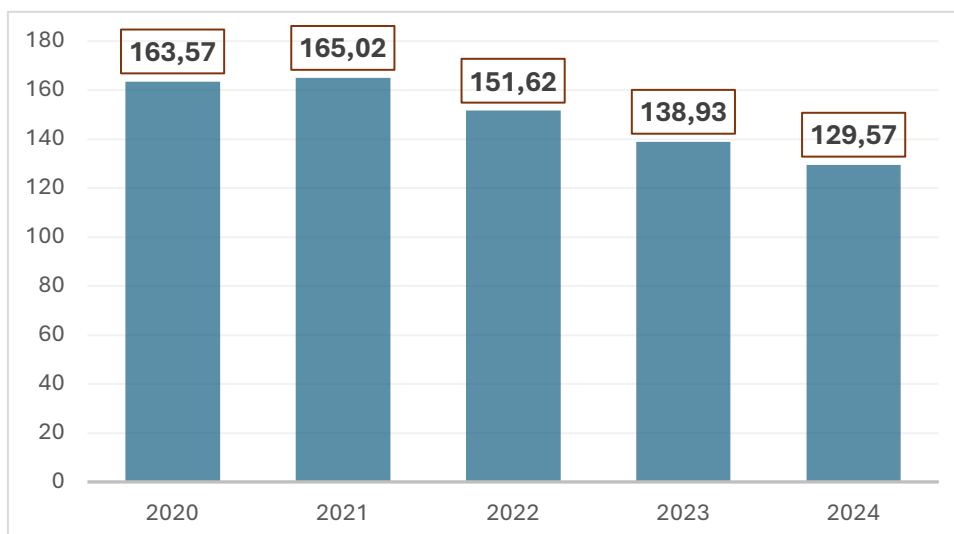
pariwisata dunia, seiring dengan volume timbunan sampah terus meningkat. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagai tindak lanjut arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah lingkup kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Indeks Risiko Bencana

Subbab ini menjelaskan perihal kapasitas daerah, dalam hal ini meliputi masyarakat, infrastruktur, serta ekosistemnya untuk bertahan dan pulih kembali setelah terjadinya peristiwa ekstrem seperti bencana dan perubahan iklim. Bencana dimaknai sebagai suatu peristiwa, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, maupun kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat digambarkan melalui data seperti Indeks Risiko Bencana yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana.

Untuk menilai tingkat risiko atau potensi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam dan bencana lainnya, digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, iklim, infrastruktur, kesiapan masyarakat—terutama dalam aspek kepemimpinan—serta kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah data IRB Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024.



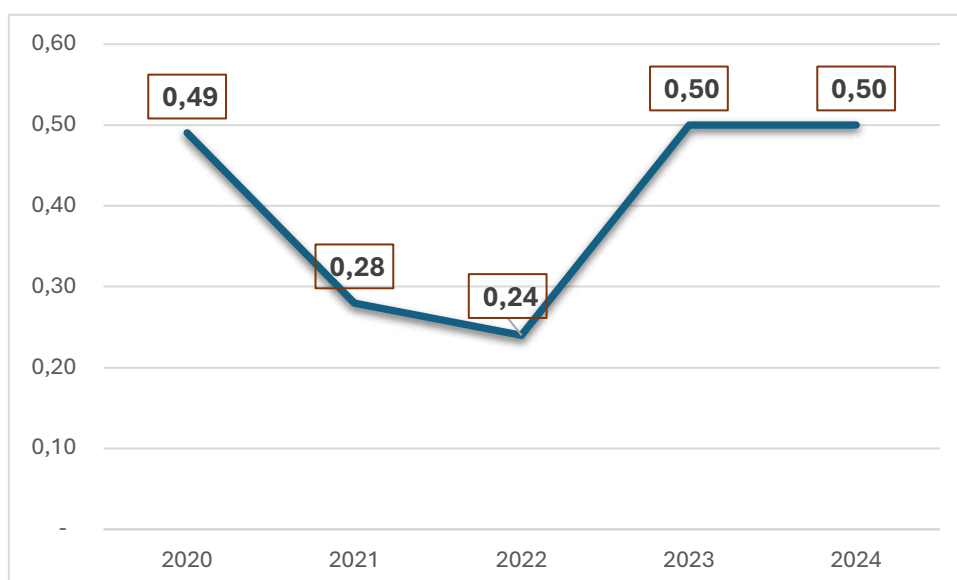
Gambar 2. 10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Buku IRBI BNPB, 2024

Berdasarkan data tersebut, Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya mitigasi bencana di daerah tersebut telah cukup optimal. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam menurunkan angka Indeks Risiko Bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Faktor-faktor tersebut meliputi kerentanan, eksposur, kapasitas, resiliensi, serta ancaman atau bahaya. Untuk menurunkan angka Indeks Risiko Bencana, faktor-faktor kunci ini dapat dijadikan dasar dalam merancang intervensi yang tepat. Tingkat ketahanan daerah Kabupaten Manggarai Barat masih dalam kategori sedang, sedangkan jenis bencana yang paling rawan terjadi adalah kekeringan dan gempa bumi.

2.1.1.6.2 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur berbagai aspek seperti kapasitas ekonomi, sosial-demografis, dan konektivitas komunitas, serta kerentanan dan ancaman bencana di suatu wilayah. IKD digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rekomendasi kebijakan.



Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

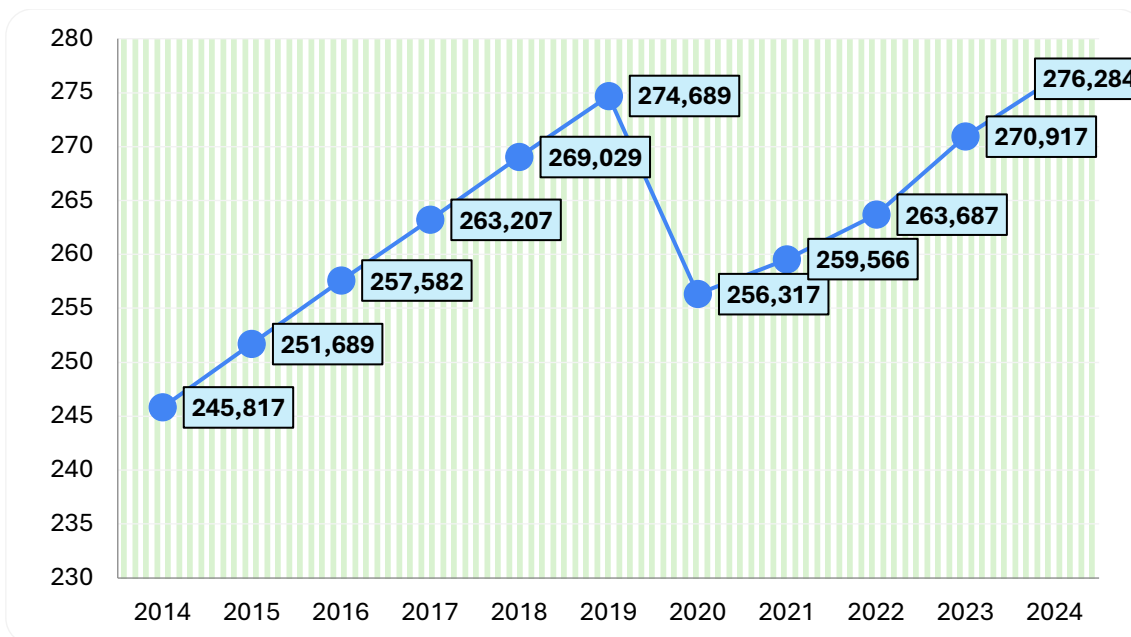
Sumber: Buku IRBI BNPB, 2024

2.1.1.7 Demografi

Penduduk adalah objek sekaligus subjek dari proses pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan perlu memerhatikan kondisi demografi atau penduduk suatu wilayah dalam proses perencanaannya. Perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek demografi bertujuan untuk menghasilkan perencanaan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kondisi demografi yang ada. Dalam bagian ini, akan dijabarkan mengenai aspek demografi dari Kabupaten Manggarai Barat yang akan dibagi ke dalam subbagian yang masing-masing akan membahas jumlah penduduk, struktur penduduk, dan distribusi penduduk.

2.1.1.7.1 Jumlah Penduduk

Bagian ini akan menjabarkan mengenai jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Penjabaran mengenai jumlah penduduk bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun mengenai jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan ke depan. Perhitungan jumlah penduduk ini akan merujuk pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. Untuk memahami data kependudukan dari BPS Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan pemahaman perihal definisi mengenai penduduk dari BPS. Menurut BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih dan/atau orang yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap di wilayah tersebut. Berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk dari Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.



Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka 2014-2024; BPS, Satu Data Kabupaten Manggarai Barat

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren pertumbuhan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, terdapat penurunan yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian data yang dilakukan dari hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Penduduk kembali mengalami pertumbuhan sejak tahun 2020 dan penduduk Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai angka 276.284 jiwa pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk sebelum tahun 2020 tercatat sebesar 2,23 persen per tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk setelah tahun 2020 memiliki rata-rata sebesar 1,93 persen setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang juga akan meningkat kebutuhannya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

2.1.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2019 hingga proyeksi tahun 2025. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,35%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 1,41% pada tahun

2020. Namun, angka ini kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 2,02% dan mengalami sedikit penyesuaian di angka 2,01% pada tahun 2025. Fluktuasi ini mengindikasikan dinamika kependudukan yang cukup aktif di wilayah tersebut.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2019-2025)

Wilayah	2019	2020	2024	2025
Sumba Barat	1.70	2.63	1.78	1.75
Sumba Timur	1.37	0.70	1.54	1.52
Kupang	3.15	1.80	0.99	0.96
Timor Tengah Selatan	0.61	0.31	1.48	1.47
Timor Tengah Utara	1.08	1.20	1.57	1.56
Belu	1.70	4.54	2.11	2.08
Alor	0.83	1.06	1.62	1.60
Lembata	2.12	1.39	1.43	1.41
Flores Timur	1.02	1.70	1.47	1.47
Sikka	0.67	0.68	1.49	1.49
Ende	0.51	0.37	1.03	1.02
Ngada	1.48	1.45	1.40	1.39
Manggarai	1.58	0.65	1.80	1.78
Rote Ndao	4.02	1.77	1.67	1.65
Manggarai Barat	2.35	1.41	2.02	2.01
Sumba Tengah	1.66	3.08	2.08	2.06
Sumba Barat Daya	2.08	0.62	2.14	2.12
Nagekeo	1.22	2.00	1.41	1.40
Manggarai Timur	1.38	0.84	1.94	1.91
Sabu Raijua	3.11	1.98	1.59	1.59
Malaka	1.70	-	1.37	1.35
Kota Kupang	2.84	2.70	1.88	1.84
Nusa Tenggara Timur	1.66	1.25	1.62	1.60

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2025
 *Data terakhir diperbarui: 10 Februari 2025

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai Barat secara konsisten berada di atas angka provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2019, angka pertumbuhan Manggarai Barat (2,35%) lebih tinggi dari NTT (1,66%). Tren ini berlanjut di tahun 2020 (1,41% untuk Manggarai Barat berbanding 1,25% untuk NTT) dan juga pada proyeksi tahun 2024 (2,02% berbanding 1,62%) serta tahun

2025 (2,01% berbanding 1,60%). Hal ini menunjukkan bahwa Manggarai Barat merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dibandingkan rata-rata wilayah di NTT.

Dalam konteks yang lebih luas di antara kabupaten/kota se-NTT, laju pertumbuhan penduduk Manggarai Barat termasuk dalam jajaran yang tertinggi. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kabupaten lain seperti Rote Ndao (4,02%) dan Belu (4,54%) yang memiliki lonjakan lebih tinggi, proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 menempatkan Manggarai Barat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan paling signifikan. Pada tahun 2024, angka 2,02% hanya sedikit di bawah Sumba Barat Daya (2,14%), Sumba Tengah (2,08%), dan Belu (2,11%). Data ini mengukuhkan posisi Manggarai Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan penduduk utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.1.7.3 Komposisi Penduduk

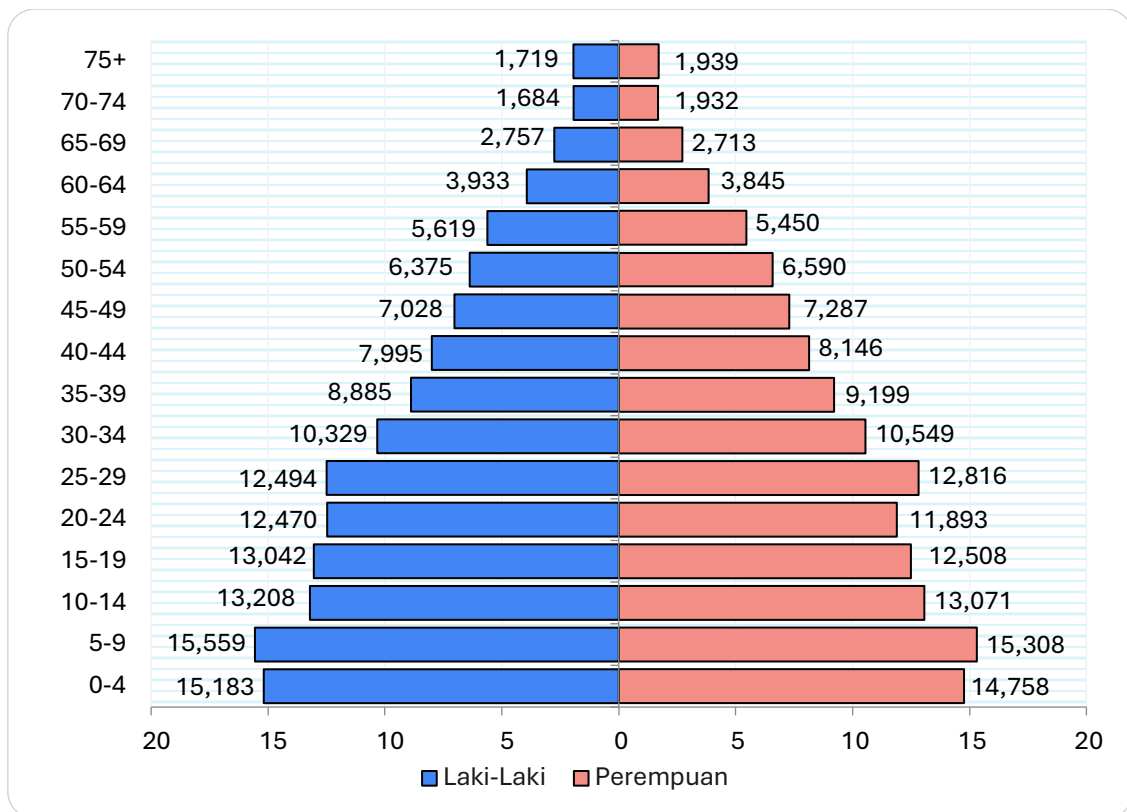
Struktur penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan untuk memilah data kependudukan total. Dalam dokumen ini, struktur penduduk yang akan dijabarkan merupakan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk menganalisis rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang menggambarkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dianalisis melalui piramida penduduk untuk menunjukkan sebaran penduduk menurut kelompok usia. Secara umum, analisis struktur penduduk bertujuan untuk mengetahui komposisi penduduk yang pada waktu tertentu. Komposisi penduduk yang ada nantinya akan menjadi landasan bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah ke depannya. Berikut merupakan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
2014	121.596	124.221	245.817	97,89
2015	124.620	127.069	251.689	98,07
2016	127.409	130.173	257.582	97,88
2017	130.199	133.008	263.207	97,89
2018	133.003	136.026	269.029	97,78
2019	135.690	138.999	274.689	97,62
2020	129.267	127.050	256.317	101,74
2021	130.874	128.692	259.566	101,70
2022	132.921	130.766	263.687	101,65
2023	136.188	134.729	270.917	101,08
2024	138.748	137.536	276.284	100,88

Sumber: BPS, Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka 2014-2024; BPS, Satu Data Kabupaten Manggarai Barat

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan pergeseran komposisi penduduk. Sebelum tahun 2020, penduduk di Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan setelah tahun 2020 penduduk di Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh penduduk laki-laki. Perubahan basis data pada tahun 2020 melalui Sensus Penduduk 2020 menjadi salah satu penyebab perubahan yang cukup signifikan dalam komposisi penduduk di Kabupaten Manggarai Barat. Meskipun demikian, kondisi rasio jenis kelamin menunjukkan tumbuhnya jumlah penduduk perempuan jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kondisi ini perlu menjadi basis bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas yang inklusif untuk semua kalangan dan dapat diakses dengan mudah. Untuk lebih memahami struktur penduduk di Kabupaten Manggarai Barat, berikut merupakan piramida penduduk yang bertujuan untuk menggambarkan sebaran penduduk berdasarkan usia:



Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

Sumber: BPS, Satu Data Kabupaten Manggarai Barat

Piramida penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024 menunjukkan persebaran jumlah penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda. Komposisi penduduk Kabupaten Manggarai Barat dapat diklasifikasikan menjadi penduduk usia produktif yang merupakan penduduk usia 15-64 tahun dan penduduk usia non-produktif yang merupakan penduduk usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Secara komposisi, penduduk usia produktif masih mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat dengan persentase sebesar 63,96 persen dari jumlah total penduduk keseluruhan, sedangkan penduduk usia non-produktif memiliki persentase sebesar 36,04 persen, yang terdiri dari 31,32 persen penduduk usia muda (0-14 tahun) dan 4,72 persen penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Secara kelompok umur, penduduk pada kelompok balita atau usia 0-4 tahun sendiri merupakan kelompok penduduk dengan jumlah terbesar, dengan penduduk laki-laki sebesar 15.183 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 14.758 jiwa. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana bagi pertumbuhan penduduk balita ke

depannya dan lebih lanjutnya saat penduduk usia muda ini akan masuk ke usia produktif dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Penduduk usia lanjut khususnya pada rentang usia 75 tahun ke atas merupakan kelompok penduduk dengan jumlah terendah di antara kelompok penduduk lainnya dengan angka penduduk laki-laki sebesar 1.939 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.719 jiwa. Meskipun demikian, penduduk dalam rentang usia 40 tahun ke atas memiliki angka yang cukup besar, di mana hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana beserta pelayanan publik yang menyasar kepada penduduk lanjut usia ke depannya.

2.1.1.7.4 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk merupakan sebaran penduduk di suatu wilayah yang ada di dalam subwilayah level tertentu. Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, distribusi penduduk merupakan sebaran jumlah penduduk dalam masing-masing kecamatan yang ada. Penjabaran distribusi penduduk bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk per kecamatan yang nantinya akan menggambarkan tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Analisis kepadatan penduduk ini menjadi basis bagi perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan keruangan dan kewilayahan. Berikut merupakan data mengenai sebaran penduduk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 10 Perkembangan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013-2024

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2013		2016		2021		2023	2024		
		Jumlah (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Komodo	813,53	46.262	61	50.356	66	55.022	67	58.735	72	60.573	61
Boleng	486,56	17.662	39	19.278	42	19.138	39	19.918	41	20.282	68
Sano Nggoang	360,19	13.819	49	14.683	50 ¹	14.355	40	14.744	41	14.935	73
Mbeliling	231,53	13.164	*)	13.258	-	13.880	60	14.506	62	14.780	52
Lembor	145,68	50.393	129	33.491	146 ²	33.928	233	35.593	244	36.303	179
Welak	319,19	19.800	66	22.004	73	21.564	67	22.382	70	22.747	155
Lembor Selatan	275,87	*)	*)	24.080	-	23.892	86	24.613	89	25.036	68
Kuwus	54,55	42.312	203	25.310	216 ³	13.776	252	14.109	259	14.273	264
Ndoso	124,95	*)	*)	19.807	-	20.184	161	20.831	167	21.127	170
Kuwus Barat	42,66	-	-	-	-	10.776	252	11.287	265	11.504	286
Macang Pacar	174,64	30.275	113	35.315	131	16.069	91	16.580	95	16.819	63
Pacar	112,12	-	-	-	-	16.982	151	17.619	157	17.905	104
Manggarai Barat	3.141,47	233.687	79	257.582	82	259.566	82	270.917	86	276.284	88

Sumber: BPS, Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka 2014, 2017, 2022, 2024 (diolah)

Catatan:

*) Data masih tergabung di kecamatan induk

1 Termasuk Kecamatan Mbeliling

2 Termasuk Kecamatan Lembor Selatan

3 Termasuk Kecamatan Ndoso

Sebaran atau distribusi penduduk yang dilihat dalam aspek kepadatan wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan kepadatan wilayah kabupaten yang cenderung meningkat sejak tahun 2013 hingga 2024. Peningkatan terjadi dari angka 79 jiwa/km² pada tahun 2013 menjadi 88 jiwa/km² pada tahun 2024 atau peningkatan sebesar 9 jiwa/km² dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir.

Beberapa wilayah tercatat memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, di antaranya adalah Kecamatan Kuwus Barat (286 jiwa/km²), Kecamatan Kuwus (264 jiwa/km²), Kecamatan Lembor (179 jiwa/km²), Kecamatan Ndoso (170 jiwa/km²), dan Kecamatan Pacar

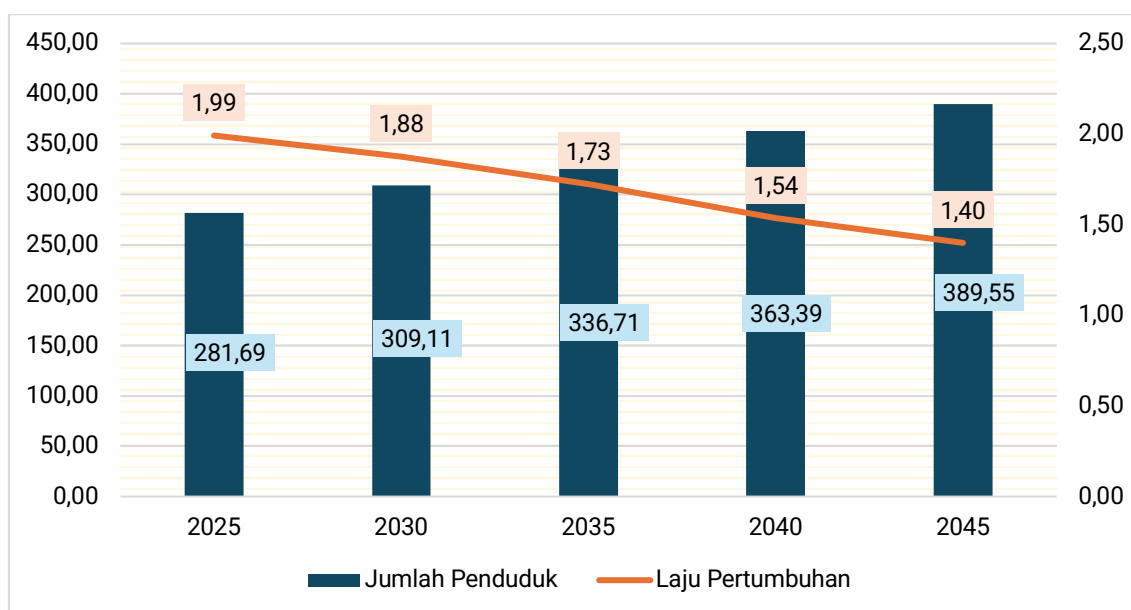
(104 jiwa/km²) yang merupakan beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk di atas 100 jiwa/km² pada tahun 2024.

Sebaliknya, beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di antaranya adalah Kecamatan Komodo (61 jiwa/km²), Kecamatan Boleng (68 jiwa/km²), Kecamatan Sano Nggoang (73 jiwa/km²), dan Kecamatan Lembor Selatan (68 jiwa/km²). Kondisi pertumbuhan kepadatan penduduk ini perlu diantisipasi oleh pemerintah ke depannya, terkhusus perihal kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan.

2.1.1.7.5 Proyeksi Demografi

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Dinamika jumlah penduduk suatu daerah memiliki peran penting sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Proyeksi jumlah penduduk membantu untuk menaksir penambahan jumlah penduduk yang akan terjadi selama periode pembangunan di masa mendatang. Analisis terhadap tren dan pola perubahan kependudukan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 hingga 2021 dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi jumlah penduduk ke depannya. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat disajikan dalam periode lima tahunan, sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini.



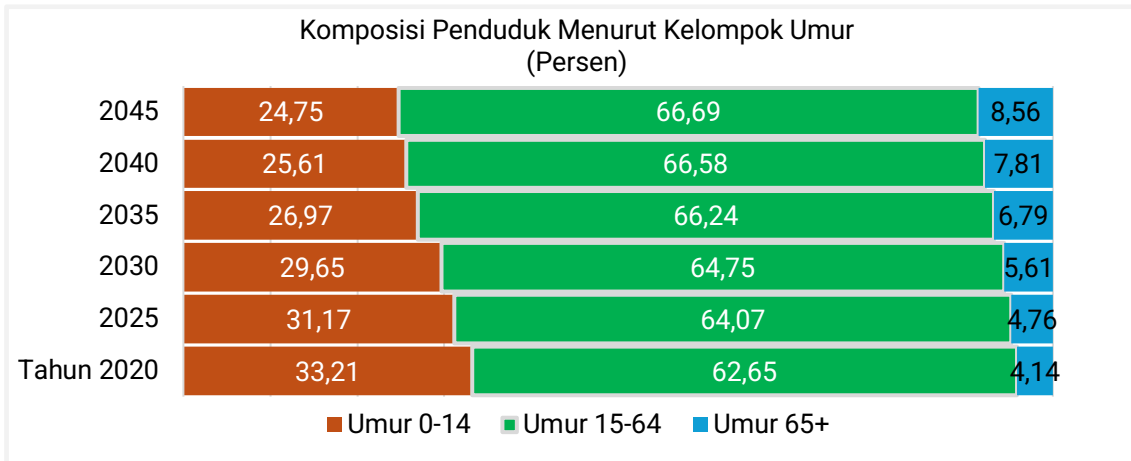
Gambar 2. 14 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045

Sumber: BPS, *Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020--2035*, Olah Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat diproyeksikan akan terus mengalami lonjakan setiap periodenya hingga mencapai 389,55 ribu jiwa tahun 2045, dengan persentase mencapai poin 52,62 persen atau bertambah 134,32 ribu jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi diperkirakan terjadi pada tahun 2025, dengan persentase laju pertumbuhan 1,99 persen terjadi penambahan penduduk 26,46 ribu jiwa dari tahun 2020. Pertumbuhan penduduk diperkirakan mengalami penurunan dari tahun 2030 sampai akhir periode perencanaan tahun 2045. Laju pertumbuhan penduduk pada akhir periode diperkirakan mencapai titik terendah selama 20 tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan ditaksir 1,40 persen atau bertambah 26,16 ribu jiwa dari jumlah penduduk tahun 2040.

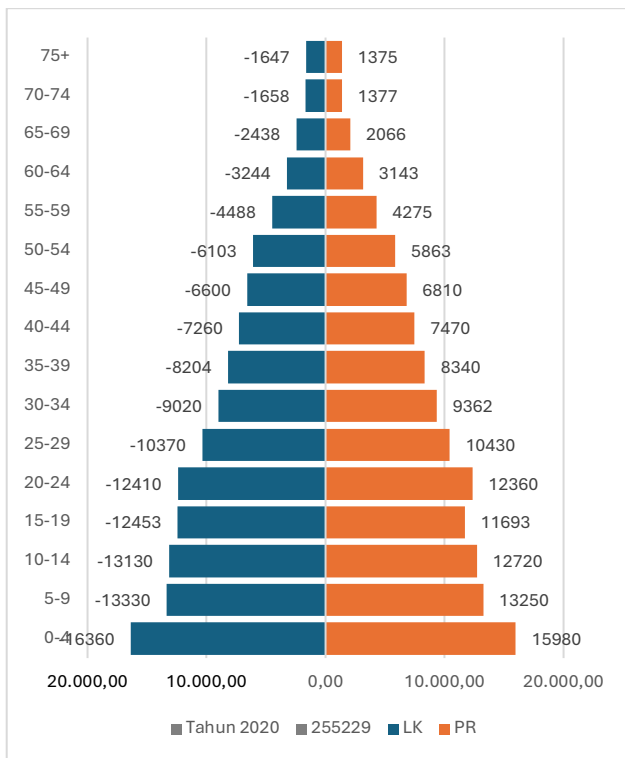
B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok umur memberikan informasi terkait tingkat ketergantungan penduduk, jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia sekolah dan bonus demografi dalam periode pembangunan ke depan. Proses perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pertumbuhan pada setiap kelompok umur, karena perlakuan yang dibutuhkan pada setiap kelompok umur berbeda-beda. Dalam konteks kelompok umur, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu penduduk usia produktif dengan rentang usia 15-64 tahun, penduduk usia belum produktif atau dengan rentang usia 0-14 tahun, dan kelompok penduduk usia tidak produktif dengan rentang usia di atas 65 tahun. Dalam proses pertumbuhannya, bonus demografi dapat terjadi yang ditandai dengan penambahan penduduk usia produktif yang lebih besar dari kelompok usia lainnya. Di samping tersedianya SDM dalam jumlah besar, bonus demografi perlu dipersiapkan secara matang untuk mengantisipasi tingginya usia lanjut usia setelah terlaluinya bonus demografi, yang akan berdampak bagi tingginya angka ketergantungan penduduk. Oleh karena itu, proses pembangunan harus direncanakan dengan memperhatikan pola kependudukan yang terjadi. Berikut ini merupakan uraian terkait analisis penduduk berdasarkan kelompok umur, untuk kemudian dilanjutkan dalam menganalisis bonus demografi dan tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat.

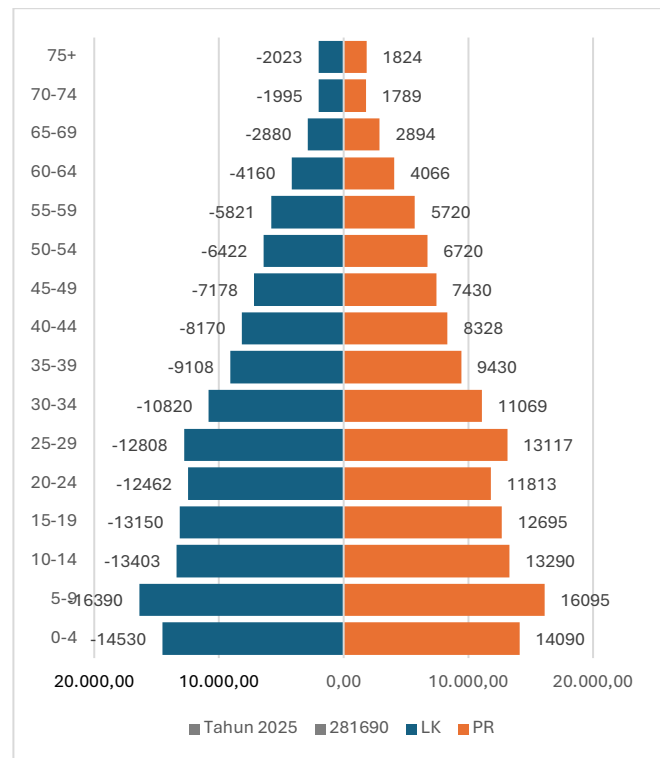


Gambar 2. 15 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Manggarai Barat

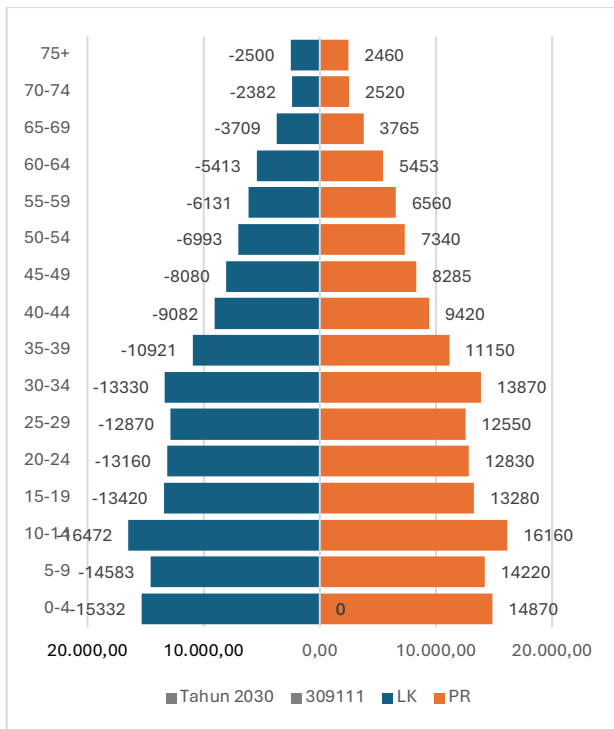
Sumber: BPS, Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020--2035, Olah Data Hasil Sensus Penduduk 2020



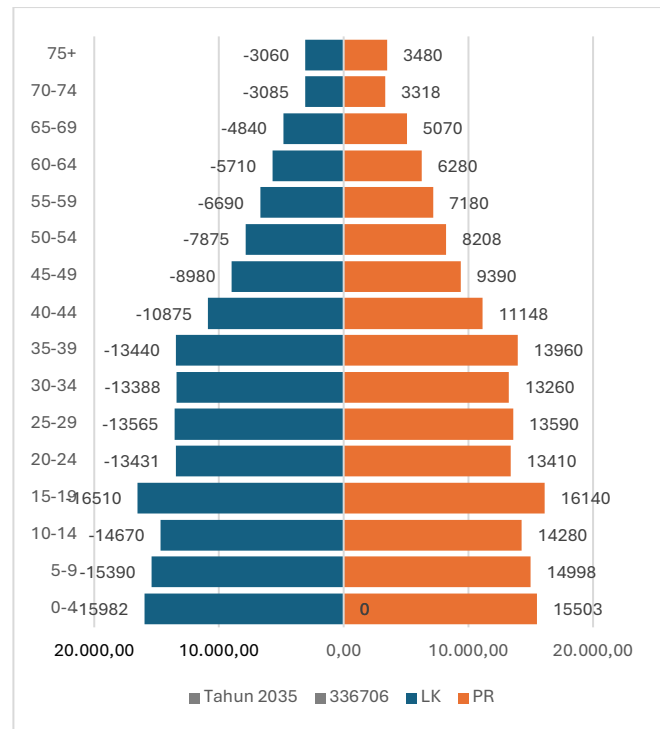
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 2. 16 Proyeksi piramida penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045 (Ribu Jiwa)

Sumber: BPS, Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020--2035, Olah Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia 0-14 tahun menunjukkan peningkatan pertumbuhan dalam beberapa periode selama 20 tahun mendatang, kecuali pada tahun 2035 yang mengalami penurunan laju pertumbuhan. Jumlah penduduk usia 0-14 pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 87,80 ribu jiwa, mengalami lonjakan sebesar 9,8 persen menjadi 96,41 ribu jiwa pada tahun 2045. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2030 dengan laju pertumbuhan 4,37 persen berhasil menambah 3,8 ribu jiwa dari tahun 2025. Sementara itu, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 3,48 persen pada tahun 2035 menjadi 0,89 persen atau pengurangan 814 jiwa. Penurunan ini dipengaruhi oleh angka kelahiran yang mengalami penurunan pada tahun 2025, ditunjukkan oleh jumlah penduduk pada usia 0-4 tahun yang berkurang 3,7 ribu jiwa dari tahun 2020. Hal ini memengaruhi jumlah penduduk pada usia 5-10 tahun dan 10-14 tahun pada periode selanjutnya yang lebih rendah, sehingga memengaruhi total jumlah penduduk usia belum produktif di tahun 2035. Namun

demikian, jumlah penduduk usia 0-4 tahun atau jumlah kelahiran diprediksi akan kembali meningkat di tahun 2030 dan terus berlangsung sampai tahun 2045, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun di tahun 2040 dengan pertumbuhan 2,45 persen dan pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk melonjak menjadi 3,61 persen. Berbanding terbalik dengan pertumbuhannya yang meningkat, proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan secara perlahan pada setiap periodenya dan berlangsung hingga tahun 2045. Proporsi penduduk usia 0 – 14 tahun menyentuh nilai 31,16 persen pada tahun 2025, kemudian pada tahun 2045 menurun 6,42 persen menjadi 24,74 persen.

Penduduk usia produktif pada usia 15-64 tahun diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dalam 20 tahun ke depan, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk berkisar 10,21 persen. Penduduk usia angkatan kerja pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 180,49 ribu dan bertambah menjadi 79,29 ribu pada tahun 2045 atau meningkat 43,93 persen dari jumlah total tahun 2025. Meskipun jumlah penduduk angkatan kerja meningkat, namun pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2030, 2040, dan 2045. Jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2030 tumbuh sebesar 10,89 persen, namun persentase tersebut menurun 1,99 persen dari pertumbuhan tahun 2025. Pertumbuhan penduduk kembali meningkat di tahun 2035 menjadi 11,45 persen atau terjadi lonjakan 0,55 persen dari jumlah penduduk produktif tahun 2030. Pertumbuhan penduduk usia produktif kembali mengalami penurunan pada tahun 2040 dengan persentase pertumbuhan sebesar 8,48 persen atau mengalami penurunan 2,96 persen dari pertumbuhan tahun 2035, dan pertumbuhan tahun 2045 berhasil memperoleh persentase 7,47 persen atau mengalami penurunan 1,10 persen dari pertumbuhan tahun 2040. Sementara, proporsi penduduk usia produktif diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara progresif dalam 20 tahun mendatang yang dipengaruhi oleh penurunan laju pertumbuhan penduduk usia 0 – 14 tahun. Selain itu, nilai TFR Kabupaten Manggarai Barat diprediksikan pada tahun 2025 sebesar 2,60 menurun menjadi 2,44 pada tahun 2035, berdampak pada menurunnya jumlah kelahiran dengan rata-rata kelahiran 2 anak dari tiap pasangan. Pola ini kemudian berdampak terhadap struktur kependudukan jangka panjang di Kabupaten Manggarai Barat.

Tren fluktuasi pertumbuhan penduduk juga terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun yang merupakan penduduk tidak produktif. Pertumbuhan penduduk usia tidak produktif meningkat selama tahun 2025 sampai tahun 2035, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2035 sebesar 31,82 persen atau bertambah 5,5 ribu jiwa dari tahun 2030. Penurunan pertumbuhan berlangsung pada tahun 2040 sampai tahun 2045, dengan penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2040 sebesar 7,57 poin menjadi 24,26 persen dari tahun 2035. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan, secara angka absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan, di tahun 2025 sebesar 13,41 ribu jiwa meningkat menjadi 33,36 ribu jiwa pada tahun 2045. Hasil proyeksi pertambahan penduduk usia lanjut menandakan ke depannya usia harapan hidup Kabupaten Manggarai Barat akan semakin membaik. Di samping itu, pertambahan jumlah penduduk lanjut usia menandakan akan semakin tingginya angka ketergantungan yang akan dibebankan pada penduduk usia produktif. Untuk itu, perlu dilakukan upaya preventif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek.

C. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia dikelompokkan berdasarkan rentang usia yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Pertambahan jumlah penduduk lanjut usia diproyeksikan akan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2045. Jumlah penduduk lanjut usia pada tahun 2020 sebesar 16,94 ribu jiwa kemudian bertambah menjadi 47,92 ribu jiwa pada tahun 2045, artinya telah terjadi pertambahan 30,97 ribu jiwa selama periode perencanaan. Perubahan komposisi demografi pada penduduk lanjut usia dipengaruhi oleh kondisi pelayanan bidang kesehatan yang telah membaik, sehingga meningkatkan usia harapan hidup penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia menjadi tantangan dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Manggarai Barat. Di samping harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan sesuai kebutuhan lansia, pemerintah diharapkan juga dapat memberdayakan kelompok penduduk lanjut usia untuk tetap produktif dan mandiri.

D. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Penduduk usia kerja atau dikategorikan sebagai usia produktif akan menanggung penduduk yang tergolong sebagai non produktif. Ukuran yang menyatakan beban tanggungan tersebut diukur menggunakan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan diukur dengan membandingkan jumlah penduduk usia non produktif yaitu kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia di atas 65 tahun, dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu kelompok usia 15-64 tahun. Tingkat ketergantungan penduduk yang tinggi ditandai dengan besarnya rasio ketergantungan dan sebaliknya. Berikut ini merupakan hasil proyeksi rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2025 sampai 2045.

Tabel 2. 11 Proyeksi Rasio Ketergantungan (Persen) Kabupaten Manggarai Barat

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	33,21	31,17	29,65	26,97	25,61	24,75
Umur 15-64	62,65	64,07	64,75	66,24	66,58	66,69
Umur 65+	4,14	4,76	5,61	6,79	7,81	8,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dependency Ratio	59,62	56,07	54,45	50,97	50,20	49,95

Sumber: BPS, Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020--2035, Olah Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat diprediksikan akan menurun selama 20 tahun mendatang. Rasio ketergantungan semula bernilai 59,62 persen pada tahun 2020 kemudian terus mengalami penurunan hingga di tahun 2045 memperoleh nilai 49,95 persen. Artinya terjadi perubahan rasio ketergantungan, di mana di tahun 2020 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 59 sampai 60 penduduk usia tidak produktif dan penduduk usia belum produktif, sedangkan di tahun 2045 berubah menjadi setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49 sampai 50 penduduk usia tidak produktif dan penduduk belum produktif. Menurunnya rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat dipengaruhi oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk pada kelompok usia produktif dibandingkan dengan laju pertumbuhan kelompok usia belum produktif dan penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan yang

rendah mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan produktivitas penduduk. Lebih lanjut, rasio ketergantungan memengaruhi perkembangan daerah karena tingginya beban tanggungan yang dihadapi cenderung menghambat produktivitas penduduk.

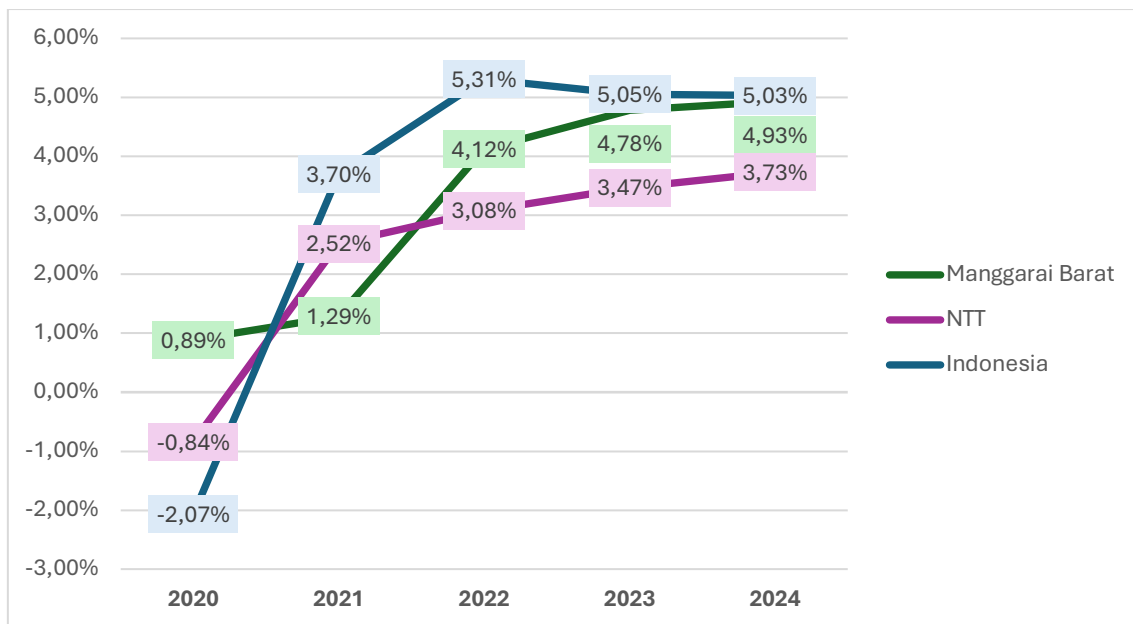
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi indikator bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dapat diukur melalui berbagai indikator makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB Per Kapita. Pemaparan berbagai data ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro dalam bidang perekonomian yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan perkembangan ekonomi secara keseluruhan dengan mengukur tingkat produktivitas daerah dalam menciptakan nilai ekonomi. Berikut adalah gambaran LPE Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2020-2024.



Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

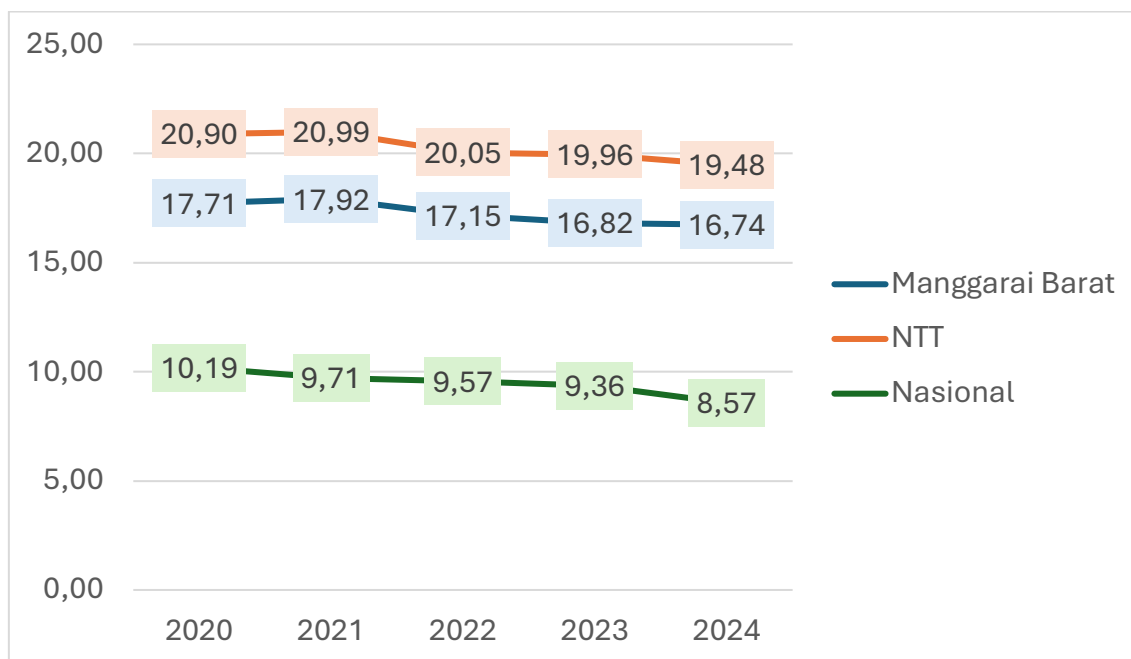
Sumber: BPS RI, 2025; BPS NTT, 2025.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tercatat tumbuh sebesar 3,59 persen setiap tahunnya, di mana rata-rata ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan provinsi sebesar 2,87 persen per tahun, namun lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 3,67 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah ini menunjukkan pemulihan ekonomi daerah yang kuat pasca pandemi Covid-19 dan meningkatnya produktivitas ekonomi daerah secara umum, yang mengindikasikan kembali pulih dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan tumbuhnya sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian.

2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu metode untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Manggarai

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 18 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

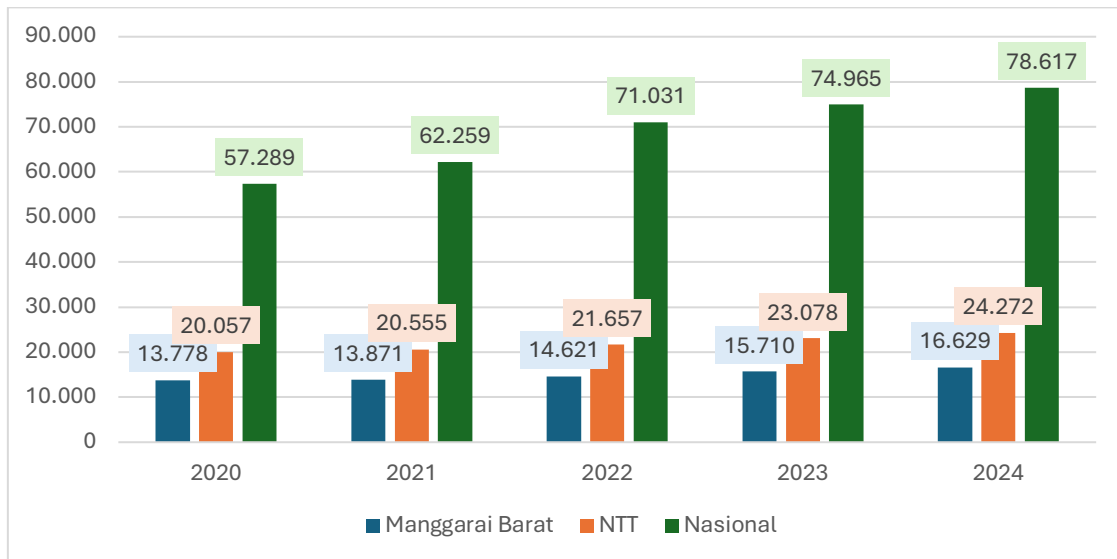
Sumber: BPS RI, 2025; BPS NTT, 2025.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat secara umum memiliki tren yang menurun dalam lima tahun terakhir. Penurunan tingkat kemiskinan daerah terjadi sebesar -0,97 poin, namun penurunan ini masih lebih lambat dibandingkan dengan laju penurunan kemiskinan di level provinsi dengan angka sebesar -1,42 poin dan di level nasional sebesar -1,62 poin. Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat masih berada di atas level rata-rata nasional namun masih berada di bawah level provinsi. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat 16 orang dari 100 orang penduduk di Kabupaten Manggarai Barat, di mana hal ini menunjukkan kondisi pengentasan kemiskinan yang belum optimal. Hal ini mengindikasikan belum meratanya kesempatan kerja, belum optimalnya distribusi pendapatan masyarakat, dan belum optimalnya sektor unggulan daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah indikator ekonomi makro yang diperoleh dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah, pendapatan per kapita umumnya direpresentasikan melalui PDRB per kapita, yang dihitung dengan

membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Indikator ini memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah dalam periode tertentu. Berikut ini disajikan data PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2020-2024.



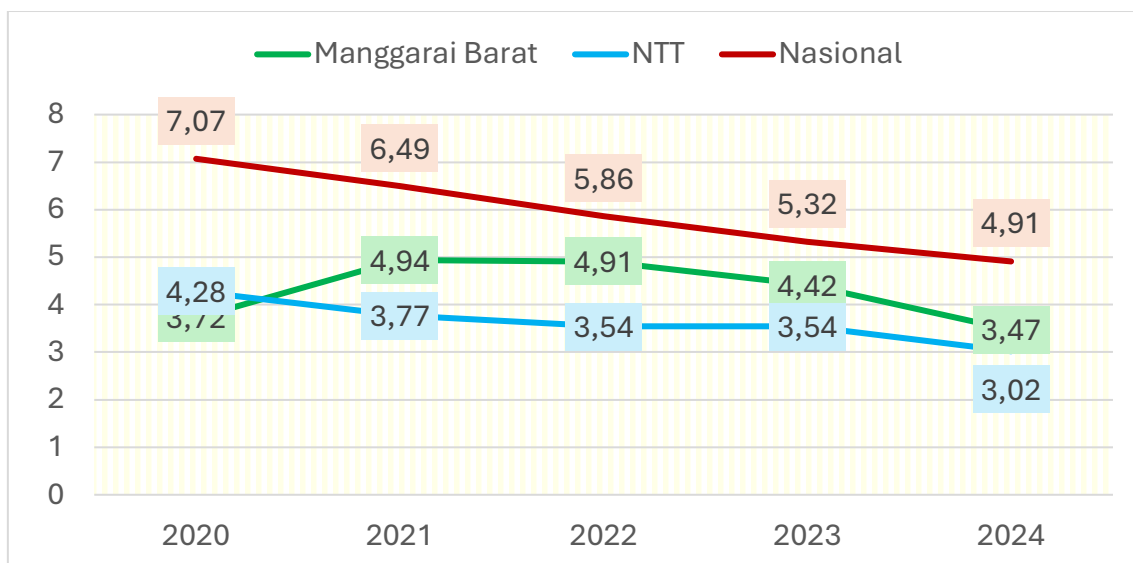
Gambar 2. 19 PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2025; BPS NTT, 2025.

PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan PDRB per kapita daerah tercatat sebesar 2,85 juta rupiah, di mana peningkatan ini lebih rendah dari laju peningkatan di level provinsi sebesar 4,21 juta rupiah dan di level nasional sebesar 21,33 juta rupiah. Selain itu, PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat tercatat masih berada di bawah level rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi per kapita daerah masih rendah, di mana hal ini mengindikasikan masih dominannya sektor ekonomi yang tidak memberikan nilai tambah lebih, corak perekonomian masyarakat yang cenderung belum terintegrasi dengan pasar yang lebih luas, dan masih lemahnya sektor ekonomi formal daerah.

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mengukur persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Secara umum, semakin rendah TPT di suatu daerah, semakin baik kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa tenaga kerja yang terserap ke dalam pasar kerja memperoleh penghasilan yang sesuai dengan regulasi upah yang berlaku. Namun, interpretasi terhadap data TPT harus dilakukan dengan cermat, karena rendahnya angka pengangguran tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap TPT sebaiknya dilakukan bersamaan dengan indikator lain, seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Gini, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah data mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2020-2024.



Gambar 2. 20 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

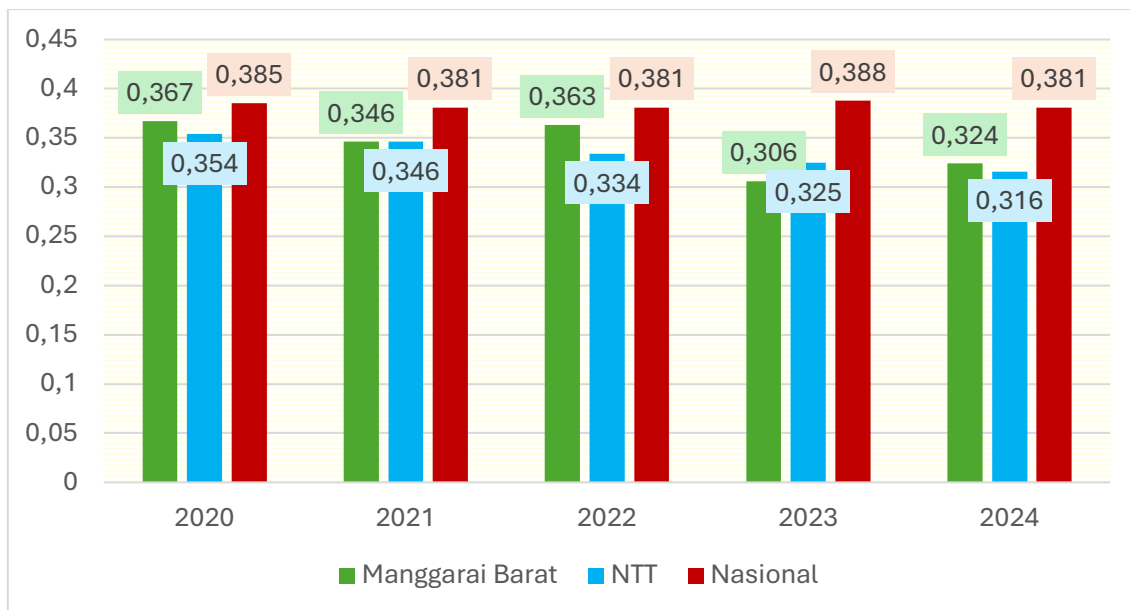
Sumber: BPS RI, 2025; BPS NTT, 2025.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, meskipun terdapat peningkatan di pertengahan tahun periode data. Penurunan TPT di Kabupaten Manggarai Barat terjadi sebesar -0,25 poin selama periode data. Namun,

penurunan ini masih lebih rendah dari laju penurunan yang terjadi di level provinsi sebesar -1,26 poin dan di level nasional sebesar -2,16 poin. Meskipun menurun, TPT Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian daerah secara umum akibat pandemi Covid-19. Namun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketenagakerjaan daerah belum memiliki tingkat resiliensi yang kuat terhadap masa krisis. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja daerah masih terserap pada sektor-sektor yang volatil terhadap dinamika perekonomian, seperti sektor pariwisata.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, dengan skala nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama, sementara nilai 1 mencerminkan ketimpangan ekstrem, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok tertentu. Semakin tinggi angka Indeks Gini, semakin besar kesenjangan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dan strategi untuk menjaga agar nilai Indeks Gini tetap mendekati 0, guna mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Berikut merupakan perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia selama periode 2020-2024.



Gambar 2. 21 Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

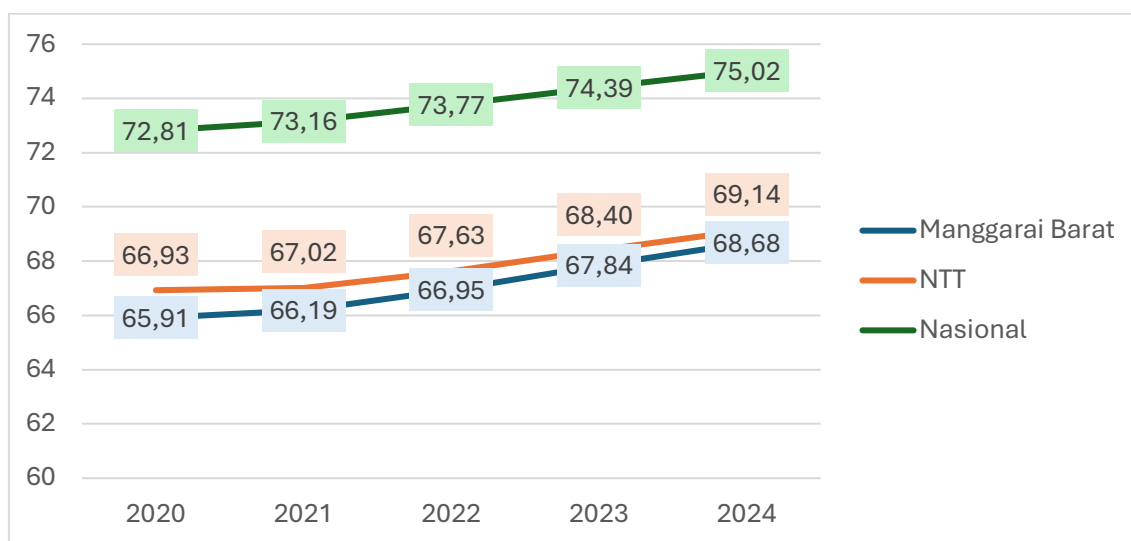
Sumber: BPS RI, 2025; BPS NTT, 2025.

Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat memiliki tren yang menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan ketimpangan di daerah tercatat sebesar -0,027 poin, di mana laju penurunan ini lebih baik dari level nasional dengan penurunan sebesar -0,001 poin namun lebih rendah dari laju penurunan provinsi sebesar -0,040 poin. Penurunan ketimpangan ini menunjukkan kondisi distribusi pendapatan masyarakat yang semakin baik dari kondisi sebelumnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kondisi ketimpangan daerah memiliki angka yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir, di mana hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan yang masih belum kokoh dan mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat yang masih volatil.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator makro yang digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Perhitungan IPM didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiga aspek ini kemudian direpresentasikan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran per kapita. AHH mencerminkan harapan hidup yang lebih panjang, yang bergantung pada akses terhadap nutrisi dan layanan kesehatan yang memadai. Sementara itu, RLS dan HLS menggambarkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal,

sedangkan pengeluaran per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Berikut merupakan capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2020-2024.



Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2025; BPS NTT, 2025.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan IPM Kabupaten Manggarai Barat tercatat terjadi sebesar 4,79 poin, di mana pertumbuhan ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi di level provinsi sebesar 3,95 poin dan pertumbuhan di level nasional sebesar 2,21 poin. Tren pertumbuhan tersebut menyebabkan kesenjangan IPM Kabupaten Manggarai Barat dengan provinsi maupun nasional mengecil, dengan *gap* sebesar 0,46 poin dengan rata-rata provinsi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Barat yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, semakin sehatnya masyarakat, dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat daerah secara umum.

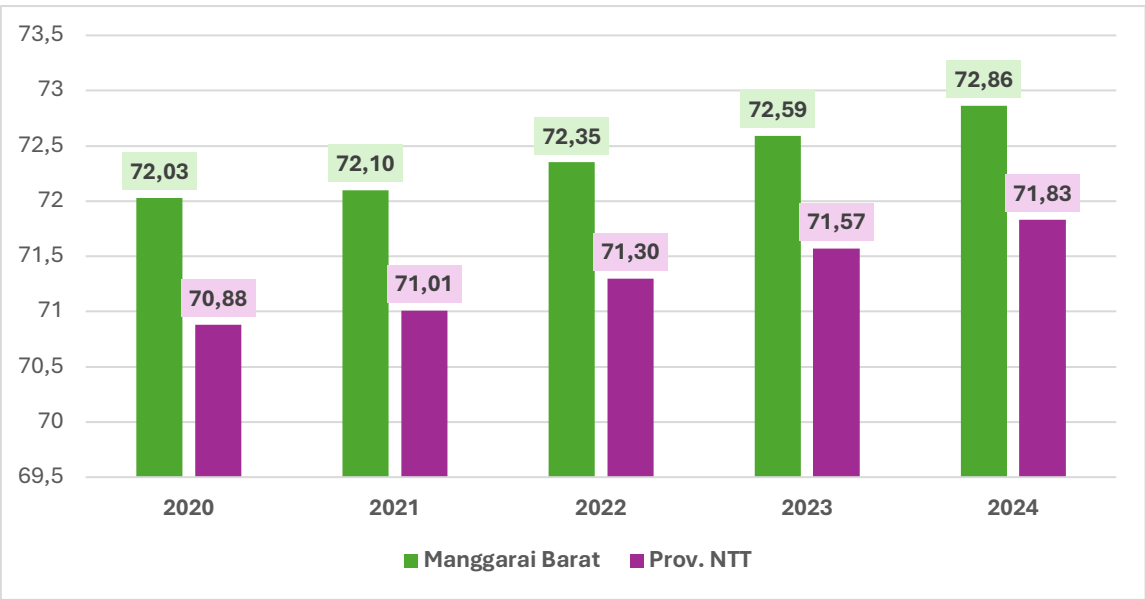
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Aspek kesehatan merupakan modal utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat diidentifikasi melalui beberapa indikator bidang kesehatan seperti usia harapan hidup, prevalensi stunting, angka

kematian ibu, dan angka kematian bayi dalam lima tahun terakhir. Berikut ini merupakan capaian indikator kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah indikator untuk menaksi jumlah rata-rata usia yang diperkirakan secara individu untuk terus hidup. Faktor yang memengaruhi angka harapan hidup meliputi kesehatan fisik, kesehatan lingkungan, dan kondisi ekonomi. Berikut ini merupakan capaian angka harapan hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 – 2024.



Gambar 2. 23 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Angka harapan hidup Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir dengan capaiannya berada diatas capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam periode 2020 hingga 2024, UHH Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan sebesar 0,83 poin. Kondisi ini menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat terus diperbaiki melalui intervensi pada urusan bidang kesehatan. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan UHH di Kabupaten Manggarai Barat antara lain adalah peningkatan ketersediaan layanan kesehatan di setiap kecamatan, dukungan sarana dan prasarana yang semakin meningkat hingga tingkat kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang turut mengalami peningkatan.

2.1.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat merupakan indikator untuk menilai kualitas kesehatan keluarga dengan mengukur 12 indikator termasuk di dalamnya menyangkut kesehatan PUS, ibu, bayi, jaminan kesehatan, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak. Capaian IKS di Provinsi NTT tercatat pada 4,15 poin pada tahun 2019, mewakili kualitas kesehatan keluarga yang masih perlu untuk ditingkatkan ke depannya. Sedangkan capaian IKS Kabupaten Manggarai Barat mencapai 0,063 pada tahun 2017, menempati urutan keenam menurut provinsi dan 272 secara nasional. Untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga saat ini, dilakukan *proxy* dengan data jumlah keluarga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Tabel 2. 12 Jumlah Keluarga yang Melaksanakan PHBS Tahun 2023

Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Keluarga yang melaksanakan PHBS	Persentase
Kecamatan Macang Pacar	452	12,27%
Kecamatan Kuwus	2.394	63,98%
Kecamatan Lembor	4.397	51,32%
Kecamatan Sano Nggoang	3.073	81,12%
Kecamatan Komodo	7.800	51,59%
Kecamatan Boleng	1.179	26,10%
Kecamatan Welak	4.583	82,71%
Kecamatan Ndosso	2.898	63,26%
Kecamatan Lembor Selatan	3.335	52,84%
Kecamatan Mbeliling	3.638	88,26%
Kecamatan Pacar	2.552	62,72%
Kecamatan Kuwus Barat	304	4,18%
Kabupaten Manggarai Barat	36.605	51,33%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Secara keseluruhan, persentase keluarga yang melaksanakan PHBS baru mencapai 51,33 persen atau sekitar 36 ribu jiwa, artinya masih terdapat sekitar 48,67 persen keluarga yang belum menerapkan pola hidup bersih di Kabupaten Manggarai Barat. Jika dilihat distribusinya, persentase tertinggi berada di Kecamatan Mbeliling dengan jumlah keluarga yang melaksanakan PHBS mencapai 88,26 persen, sedangkan persentase tersendah ditunjukkan oleh Kecamatan Kuwus Barat yakni hanya 4,18 persen. Perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk diterapkan pada setiap keluarga untuk

meningkatkan kualitas kesehatan dan mengurangi risiko penyakit menular. Pemerintah memiliki andil besar terutama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan penanganan persampahan secara merata.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Permasalahan kesehatan stunting merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk segera dituntaskan karena berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia untuk berdaya saing. Stunting merupakan suatu kondisi seorang balita mengalami masalah kekurangan gizi secara kronis dalam jangka panjang sehingga menghambat pertumbuhannya. Secara umum, anak dengan kondisi stunting memiliki berat badan lebih rendah dan tinggi badan lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Berikut ini merupakan catatan capaian prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 13. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

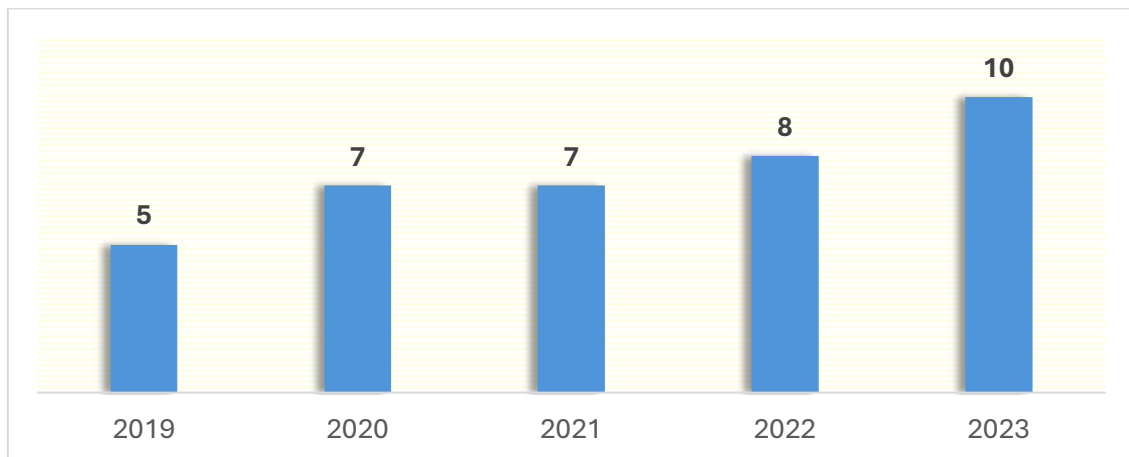
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	17,3	15,1	15,9	8,2	8,0
Provinsi	24,5	20,9	17,7	15,2	17,0
Nasional	26,9	24,4	21,6	21,5	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Capaian prevalensi stunting menunjukkan tren positif dengan terus menurun hingga berhasil menekan 9,3 persen dalam lima tahun terakhir. Penurunan tertinggi tercatat 7,7 persen pada tahun 2023. Posisi capaian prevalensi stunting Kabupaten Manggarai Barat selalu lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Hal tersebut menunjukkan upaya perbaikan gizi dan kesehatan balita di Kabupaten Manggarai Barat dapat secara signifikan menekan angka stunting hingga 54,75 persen selama tahun 2020-2024. **Prevalensi Stunting dari Dokumen SKI Dalam Angka sebesar 31,10. SKI tersebut hanya dilaksanakan sekali dalam 5 tahun.** Pencegahan stunting tidak hanya berhenti pada peningkatan gizi anak, termasuk didalamnya menyelesaikan masalah sistemik seperti akses air bersih aman, sanitasi aman, dan lingkungan bersih secara merata.

2.1.2.2.4 Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu merupakan indikator utama untuk menaksir kondisi kesehatan ibu dengan mengukur jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Berikut ini merupakan catatan data jumlah kematian ibu Kabupaten Manggarai Barat dalam lima tahun terakhir.



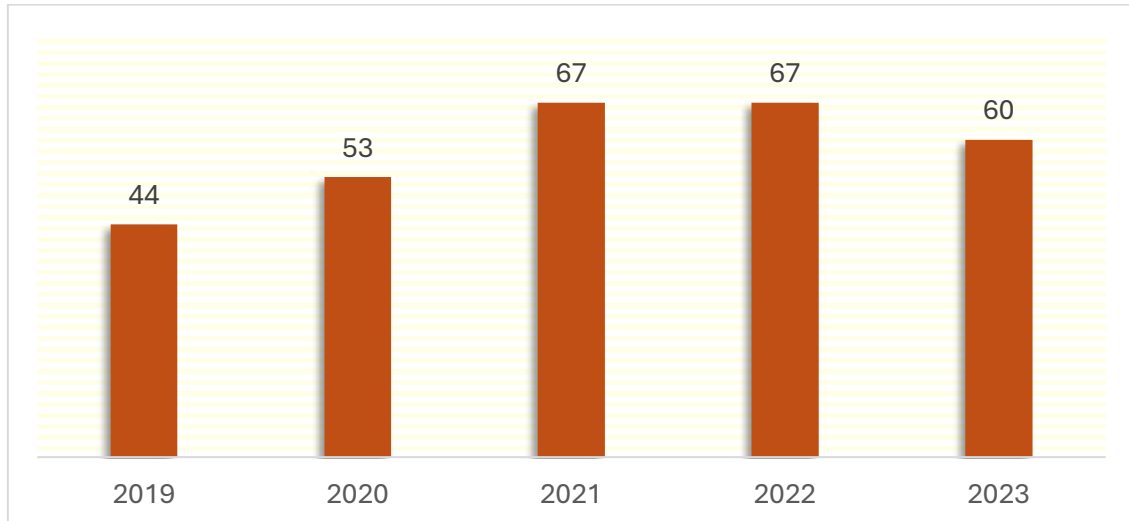
Gambar 2. 24 Jumlah kematian per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Tren jumlah kematian ibu Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam rentang waktu lima tahun terjadi peningkatan 5 kematian ibu atau sekitar dua kali dari yang terjadi pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya layanan kesehatan terutama dalam pelayanan maternal di Kabupaten Manggarai Barat. Ketimpangan geografis di Kabupaetn Manggarai Barat merupakan salah satu kendala dalam pemerataan kualitas kesehatan bagi ibu. Namun demikian terdapat inovasi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menangani ketimpangan tersebut dengan mendirikan Rumah Tunggu Bersalin (RTB). RTB sebagai tempat penampungan sementara bagi ibu hamil yang bertempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maternal secara memadai. Saat ini telah ada 13 unit RTB yang didirikan secara kolaboratif melalui partisipasi Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD), masyarakat, dan donatur dari pihak swasta.

2.1.2.2.5 Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi merupakan indiaktor yang mengukur jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Kondisi AKB dapat mencerminkan kualitas kesehatan bayi, lingkungan tempat tinggal, hingga status sosial suatu masyarakat. Berikut ini merupakan catatan data jumlah kematian bayi Kabupaten Manggarai Barat dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 25 Jumlah Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

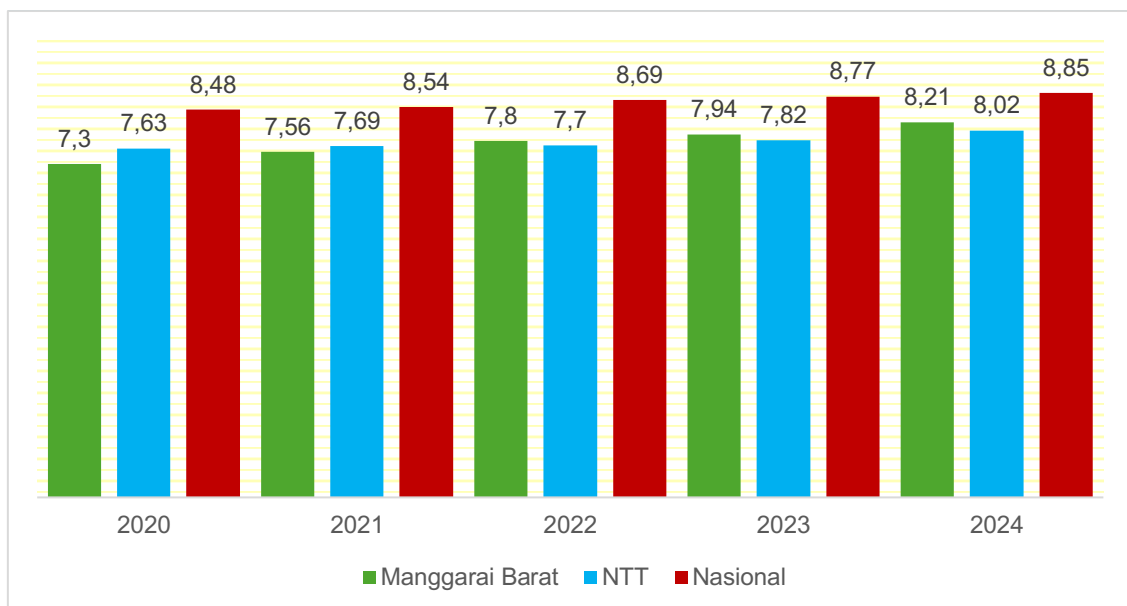
Angka kematian bayi tercatat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2021, bertambah hingga 23 kematian. AKB juga tercatat stagnan pada tahun 2022, mengindikasikan kualitas kesehatan bayi belum menunjukkan perbaikan. AKB mengalami penurunan pada tahun 2023, meskipun demikian capaiannya masih sangat tinggi, terjadi 60 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Diperlukan adanya penguatan kebijakan kesehatan yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak secara merata. Kolaborasi multi-aktor juga dapat dioptimalkan melalui RTB untuk memastikan setiap bayi mendapatkan perawatan optimal sejak dalam kandungan hingga usia satu tahun.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas dan merata merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada penyampaian materi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan, dan kreativitas peserta didik. Selain itu, pemerataan pendidikan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang layak. Pembangunan pada sektor pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui kinerja beberapa indikator makro seperti Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan budaya baca masyarakat.

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

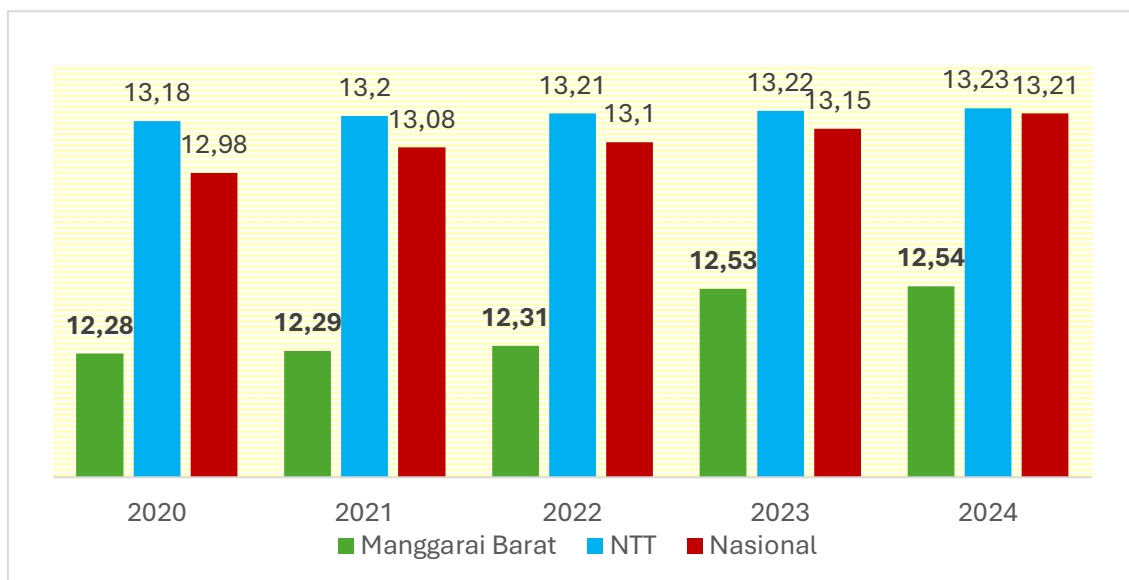
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mencerminkan aspek pengetahuan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia. RLS menunjukkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal, sementara HLS menggambarkan perkiraan durasi pendidikan yang akan dijalani oleh anak berusia 7 tahun di masa depan. Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kualitas serta kondisi sistem pendidikan di suatu daerah. Berikut adalah pencapaian RLS dan HLS di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020-2024.



Gambar 2. 26 RLS Kab. Manggarai Barat, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provisini Nusa Tenggara Timur, 2025

Capaian RLS Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Capaian tersebut sudah berada di atas rata-rata Provinsi NTT, walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Selama periode 2020 hingga 2024, RLS Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin. Capaian RLS Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024 berada pada angka 8,21 atau lebih tinggi 0,19 dibanding Provinsi NTT. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berumur 25 tahun keatas di Kabupaten Manggarai Barat mampu menyelesaikan pendidikannya selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.



Gambar 2. 27 HLS Kab. Manggarai Barat, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

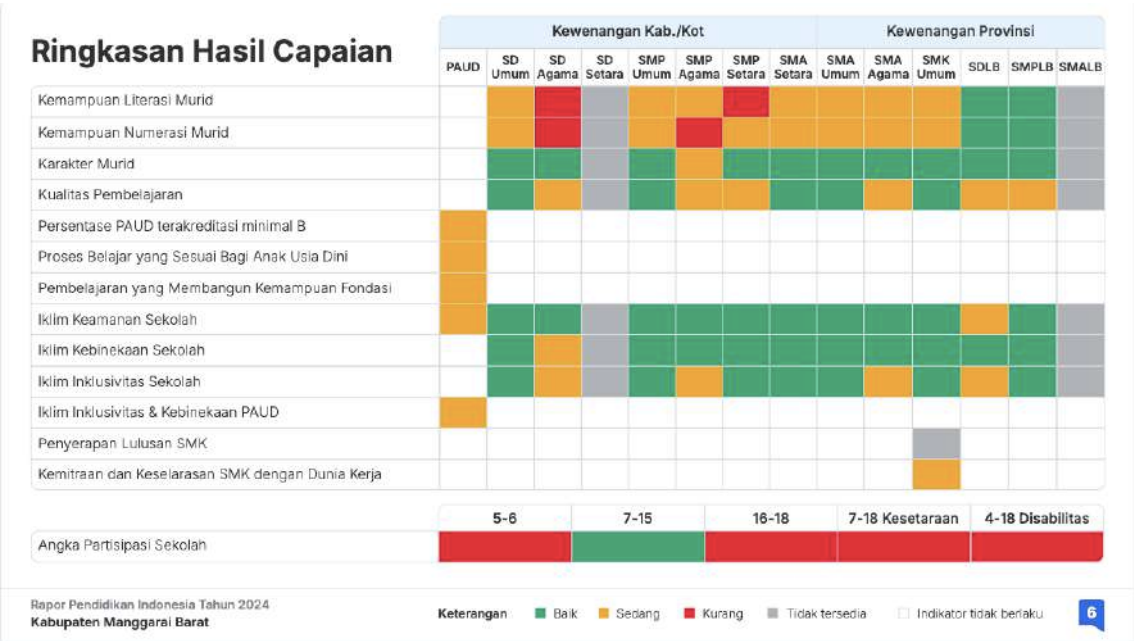
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Capaian HLS Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Namun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi NTT dan Nasional. Capaian HLS Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024 berada pada angka 12,54 atau lebih rendah 0,69 dari Provinsi NTT. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMA. Dengan demikian, baik capaian RLS maupun HLS masih perlu untuk ditingkatkan pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat, mengingat program wajib belajar yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sudah bergeser dari 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun atau setara kelas 3 SMA.

2.1.2.3.2 **Angka Literasi/Numerasi**

Angka literasi merupakan ukuran Tingkat kemampuan Masyarakat dalam menulis dan membaca serta kemampuan mengelola informasi dan pengetahuan. Angka literasi menentukan kualitas SDM suatu daerah, semakin tinggi Tingkat literasi maka akan semakin luas wawasan ilmu dan kecakapan yang dimiliki Masyarakat. Sementara itu, angka numerasi merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan menganalisis dan menggunakan angka, simbol, dan grafik. Hal ini dapat tercermin dari rapor pendidikan yang merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan mencakup hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. Berikut merupakan hasil rapor pendidikan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024.



Gambar 2. 28 Rapor Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

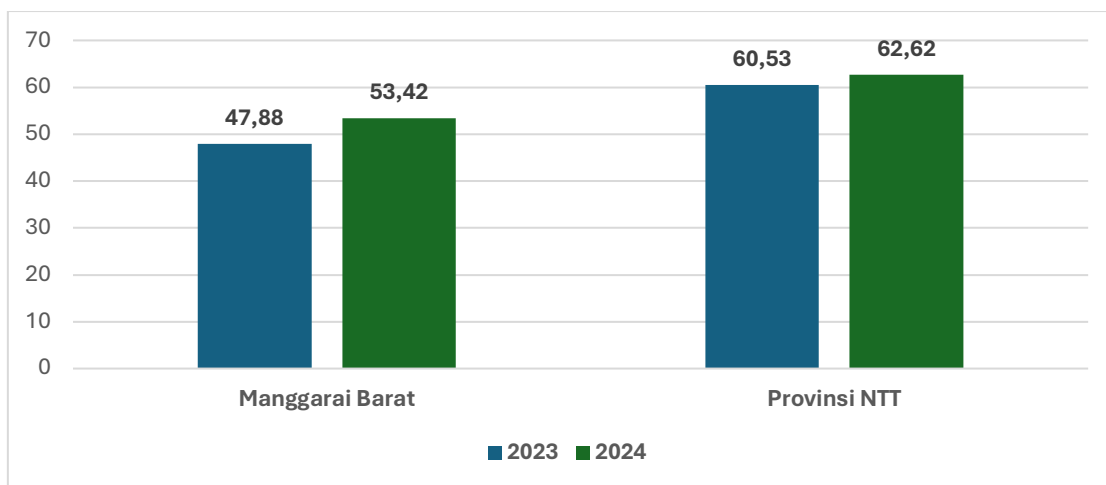
Sumber: BPS Provinisi Nusa Tenggara Timur, 2025

Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2024 untuk Kabupaten Manggarai Barat, menunjukkan bahwa capaian pendidikan memiliki variasi antar jenjang dan indikator. Secara umum, indikator seperti karakter murid, kualitas pembelajaran, serta iklim keamanan dan kebinekaan sekolah menunjukkan hasil

yang cukup baik di banyak jenjang, terutama pada jenjang SD dan SMP umum, serta SMA/SMK. Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian serius, seperti kemampuan literasi dan numerasi murid di SD dan SMP Agama serta SMP Setara yang masuk kategori "Kurang" (merah). Selain itu, partisipasi sekolah pada semua kelompok usia juga menjadi masalah signifikan karena berada dalam kategori "Kurang". Beberapa data juga tidak tersedia (abu-abu), terutama pada satuan pendidikan setara dan luar biasa, yang menandakan perlunya penguatan sistem pendataan dan inklusi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat aspek positif, masih banyak tantangan yang perlu ditangani secara strategis untuk mencapai pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

2.1.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 dan 2024.



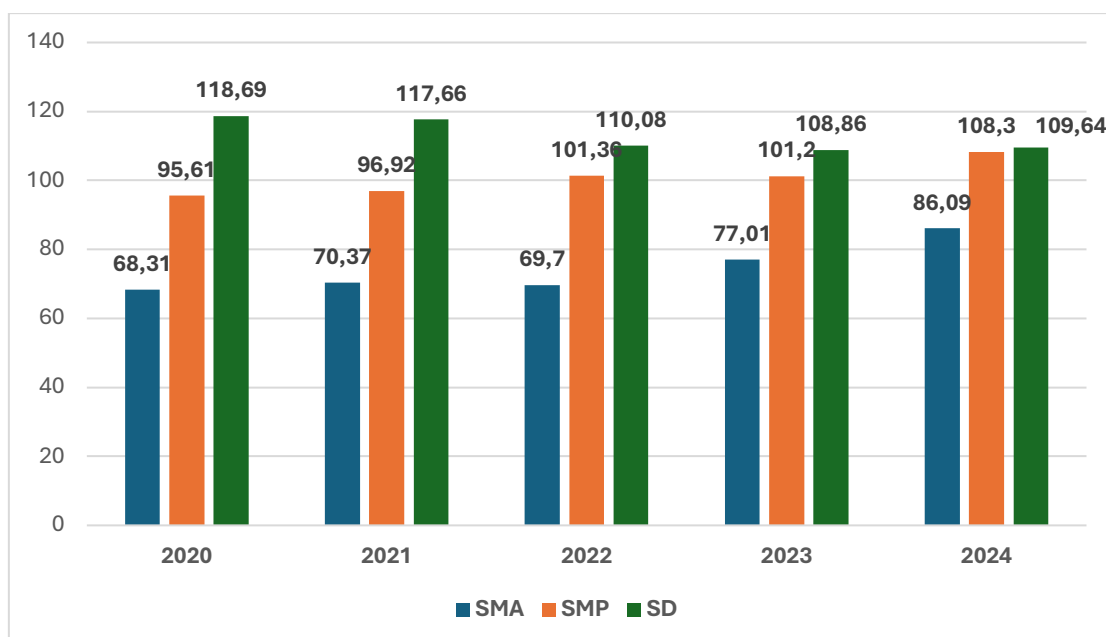
Gambar 2. 29 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat
 Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

IPLM Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat selama tahun 2023 hingga 2024. Capaian IPLM Kabupaten Manggarai Barat, mengalami peningkatan sebesar 5,54 poin. Sementara itu, Provinsi NTT juga mengalami peningkatan sebesar 2,09 poin. Meskipun mengalami peningkatan capaian IPLM Kabupaten Manggarai Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi, tren kenaikan yang lebih signifikan menunjukkan adanya upaya perbaikan yang cukup kuat di tingkat kabupaten. Hal ini menandakan potensi akselerasi yang positif jika intervensi dan kebijakan yang tepat terus dilanjutkan.

2.1.2.3.4 Indeks Literasi Digital

2.1.2.3.5 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Sekolah (APK) merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK sering digunakan untuk memprediksi banyaknya anak yang bersekolah. Berikut capaian APK SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab. Manggarai Barat Tahun 2020-2024

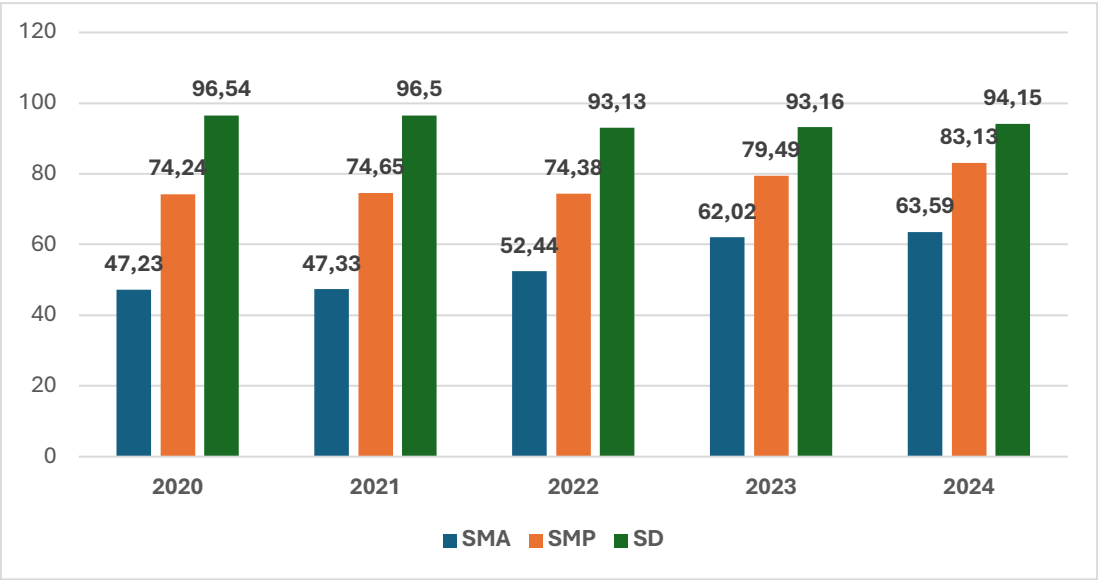
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD selalu melebihi 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat siswa di luar rentang usia ideal, baik yang lebih muda maupun lebih tua dari seharusnya

yang bersekolah pada jenjang SD. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat mampu menampung lebih banyak siswa usia SD dibandingkan target yang ditetapkan. Sementara itu, APK SMP dalam periode tiga tahun terakhir telah melampaui 100 persen, sedangkan APK SMA masih mengalami tren yang fluktuatif. APK SMA tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan mencapai angka 86,09 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah masyarakat yang melanjutkan ke tingkat tersebut.

2.1.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Berikut capaian APM Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. 31 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provisini Nusa Tenggara Timur, 2025

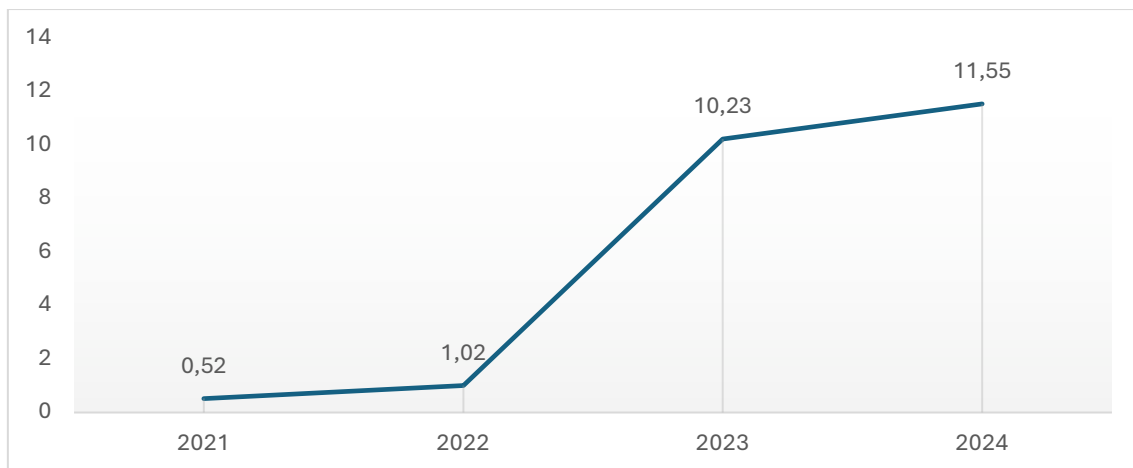
Selama rentang waktu 2020 hingga 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan tren peningkatan yang sejalan dengan pola Angka Partisipasi Kasar (APK). Pola ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi siswa dalam kelompok usia yang seharusnya. Hal ini mencerminkan adanya tantangan

dalam mempertahankan partisipasi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, aksesibilitas sekolah, serta faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan sesuai dengan usia ideal pada setiap jenjang. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan beasiswa, penguatan program wajib belajar, serta perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dapat menjadi alternatif solusi untuk memastikan bahwa lebih banyak siswa dapat menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Bidang sosial merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam menyediakan layanan dasar yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kelompok ini dikenal sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Layanan yang diberikan mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan layanan sosial ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut adalah data PPKS yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. 32 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Manggarai Barat, 2025

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial mengalami tren yang terus meningkat selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021 hingga 2022, jumlah PPKS penerima bantuan sosial meningkat, didorong oleh meningkatnya distribusi bantuan sosial akibat Pandemi Covid-19 serta kebijakan yang masih memperbolehkan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk membantu korban bencana. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan penerima bantuan sosial, yang salah satunya disebabkan oleh pendataan yang lebih baik sehingga jumlah PPKS yang terjaring semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi setelah dilakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mengakibatkan pengurangan jumlah penerima dalam daftar, serta adanya Insentif Fiskal yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak inflasi. Jumlah PPKS di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024

No	Jenis-Jenis PPKS	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	0	0	159	40
2	Anak Terlantar	670	670	1904	1337
3	Anak Jalanan	0	0	0	0
4	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	0	0	165	143
5	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	16060	13256	7775	6671
6	Penyandang Disabilitas	2421	2421	2421	2399
7	Tuna Susila	0	0	0	0
8	Gelandangan	0	0	0	0
9	Pengemis	0	0	0	0
10	Pemulung	0	0	0	0
11	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0
12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	0	0
	Total :	19.151	16.347	12.424	10.590

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Manggarai Barat, 2025

Selama periode 2021-2024, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan total 19.151 orang, sebelum akhirnya mengalami penurunan menjadi 16.347 orang pada tahun 2022 dan kembali berkurang menjadi 12.424 orang pada tahun 2023. Lonjakan jumlah PPKS pada tahun 2021 hingga 2022 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, kehilangan pekerjaan, serta kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

Dari berbagai kategori PPKS, kelompok dengan jumlah penerima bantuan sosial terbesar adalah Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sosial di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai perangkat daerah serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dapat mencakup pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, akses modal usaha, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan. Dengan adanya intervensi yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf hidup mereka, keluar dari kemiskinan, serta mengurangi jumlah Data Terpadu

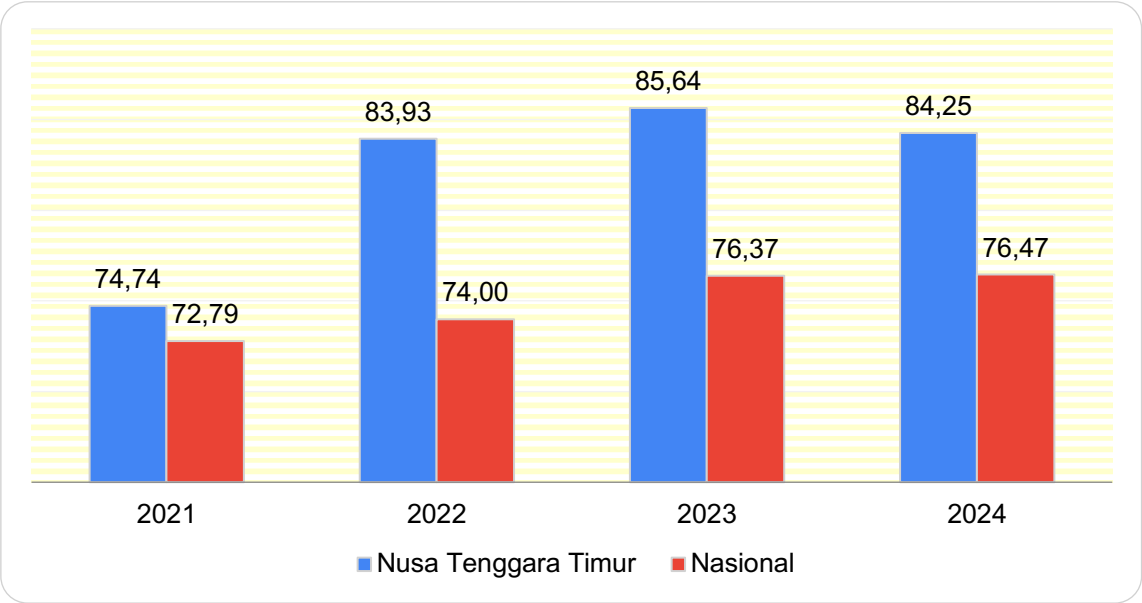
Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program sosial juga menjadi hal penting guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan ukuran tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama yang meliputi dimensi toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara konsisten mencatat Indeks KUB yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 2. 33 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia 2021-2024

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

Pada tahun 2021, Indeks KUB NTT tercatat sebesar 74,74, kemudian meningkat signifikan menjadi 83,93 pada 2022, dan mencapai 85,64 pada 2023. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 84,25, angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 76,47.

Sebagai salah satu kabupaten di NTT, Kabupaten Manggarai Barat diproyeksikan memiliki tren Indeks KUB yang sejalan dengan capaian provinsi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Manggarai Barat tetap dalam kategori tinggi, mencerminkan tingginya toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antarumat beragama di wilayah tersebut.

2.1.2.5.2 Kebudayaan

Pariwisata memberikan dampak pada banyak sektor di Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya pada bidang kebudayaan. Dampak pariwisata pada kebudayaan tampak dari semakin meningkatnya jumlah sanggar budaya milik masyarakat yang aktif dalam berbagai pementasan budaya di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut merupakan capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun sebelumnya yang dilihat melalui proksi capaian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Rankhir RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

Grafik di atas menampilkan perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun 2018 hingga 2022 serta membandingkannya dengan rata-rata nasional. Selama periode tersebut, IPK NTT bergerak relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Indeks tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 50,48, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 48,93. Dibandingkan dengan rata-rata nasional yang selalu lebih tinggi, IPK NTT masih berada di bawah standar nasional, namun menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2022 dengan kenaikan ke angka 50,70.

Perbandingan dengan rata-rata nasional memperlihatkan bahwa meskipun NTT mengalami perkembangan positif, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Rata-rata nasional mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan nilai 55,91, sempat menurun drastis pada 2021 menjadi 51,90, namun kembali naik menjadi 55,13 pada 2022. Kenaikan IPK di NTT pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan lokal. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat identitas budaya lokal mulai menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih perlu kerja keras untuk menyamai capaian nasional.

Untuk melihat lebih lanjut kondisi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Manggarai Barat, berikut merupakan kondisi dari sarana dan prasarana kebudayaan daerah selama beberapa tahun ke belakang.

Tabel 2. 15 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sanggar Budaya Aktif (%)	58,9	58,9	100	100	69,74
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Frekuensi)	0	0	0	2	1
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	23	23	22	22	14

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya variasi dalam persentase sanggar budaya yang aktif di masyarakat. Jumlah sanggar budaya aktif mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19, di mana seluruh sanggar budaya tergolong aktif. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh jumlah sanggar budaya yang beroperasi setiap tahunnya. Perubahan dalam jumlah sanggar budaya aktif ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai acara kebudayaan di Kabupaten Manggarai Barat. Acara-acara tersebut diselenggarakan untuk mendukung kebijakan pariwisata yang dirancang oleh pemerintah daerah. Setiap tahun, berbagai acara budaya seperti Festival Florata, Karnaval Budaya, dan Festival Religi Golo Koe diadakan dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan permintaan wisatawan. Tahun 2024 menandakan adanya penurunan dalam persentase sanggar aktif menjadi hanya 69,74 persen, di mana hal ini mengindikasikan adanya sanggar yang awalnya aktif menjadi tidak beroperasi. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah melalui berbagai dukungan bagi komunitas kebudayaan daerah dalam rangka pelestarian budaya.

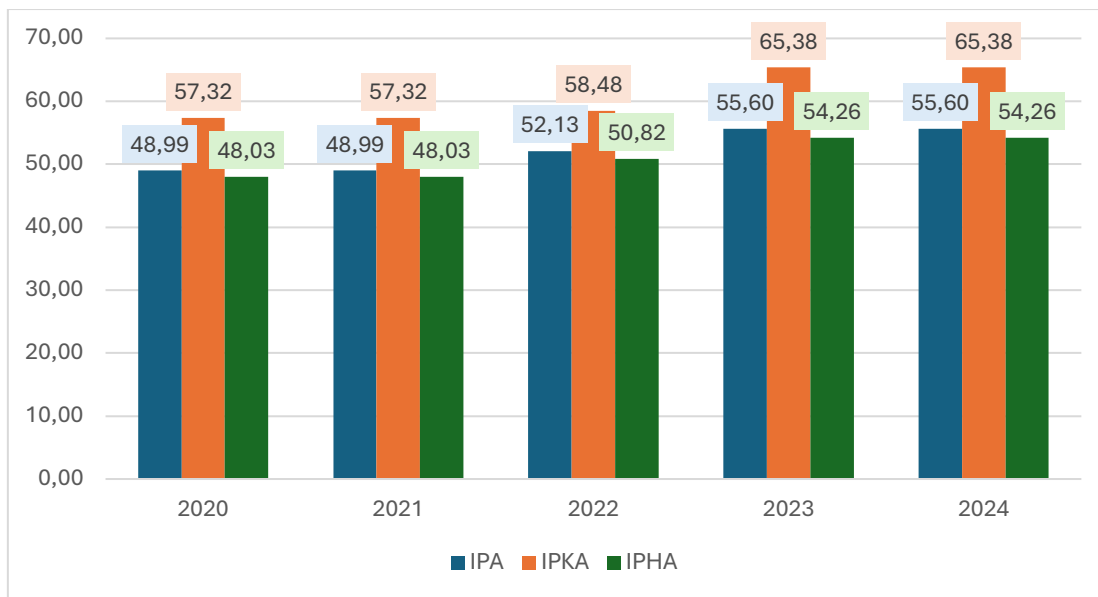
Selain perkembangan sanggar budaya, pengelolaan cagar budaya juga menjadi perhatian penting. Setelah pandemi Covid-19, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi fisik bangunan yang rentan, pengaruh unsur biotik seperti aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan, serta unsur abiotik seperti perubahan iklim, kondisi lingkungan, dan bencana alam. Faktor lain seperti keterbatasan sumber daya juga turut memengaruhi pengelolaan cagar budaya. Untuk menjaga kelestariannya, pemerintah telah mempekerjakan tenaga penjaga situs yang bertugas merawat benda dan situs bersejarah, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan ke daerah tersebut. Namun, upaya pemeliharaan ini perlu diperkuat dengan strategi promosi yang lebih gencar serta kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan pelestarian dan pengembangan pariwisata dapat tercapai.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Bagian ini akan menguraikan mengenai peningkatan ketangguhan individu, keluarga, hingga masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Kajian ini bertujuan untuk memahami kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut dalam mendukung proses pembangunan. Sebagai elemen utama dalam pembangunan daerah, sumber daya manusia perlu dikembangkan secara optimal agar dapat berkontribusi lebih efektif di masa depan. Dalam bagian ini, akan dibahas berbagai indikator yang mencerminkan kondisi tersebut, di antaranya Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, serta Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.2.6.1 Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan aspek penting dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak memegang peranan kunci dalam pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah untuk memastikan terciptanya generasi yang unggul. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kualitas tumbuh kembang anak adalah adanya perlindungan yang memadai. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi. Tingkat perlindungan anak dapat diukur melalui sejumlah indikator yang dirilis oleh KemenPPPA RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS RI), beberapa diantaranya adalah Indeks Perlindungan Anak, Indeks Perlindungan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak. Berikut merupakan kondisi perlindungan Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 2. 35 IPA, IPKA, dan IPHA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: KemenPPPA RI, 2025

Berbagai indikator yang mengukur kualitas perlindungan anak daerah di Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi meningkat. Indeks Perlindungan Anak daerah tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,61 poin dengan persentase peningkatan sebesar 13,49 persen. Indeks Perlindungan Khusus Anak daerah juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,06 poin dengan persentase peningkatan sebesar 14,06 persen. Sementara itu, Indeks Perlindungan Hak Anak daerah turut mengalami peningkatan sebesar 6,23 poin dengan persentase peningkatan sebesar 12,97 persen. Peningkatan kinerja tertinggi dicapai dalam pelaksanaan kinerja terkait perlindungan khusus anak, dengan persentase peningkatan sebesar 14,06 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Hal ini mengindikasikan kinerja perlindungan daerah sudah cukup optimal, sehingga perlu dipertahankan ke depannya melalui berbagai kebijakan perlindungan anak daerah yang komprehensif.

2.1.2.6.2 Kualitas Keluarga

Keluarga merupakan salah satu institusi fundamental dalam masyarakat. Sebagai lingkungan pertama yang ditemui individu, keluarga memiliki peran krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak serta perjalanan individu menuju kedewasaan. Kekuatan peran dan fungsi keluarga dalam suatu komunitas berkontribusi pada proses perkembangan individu yang lebih optimal,

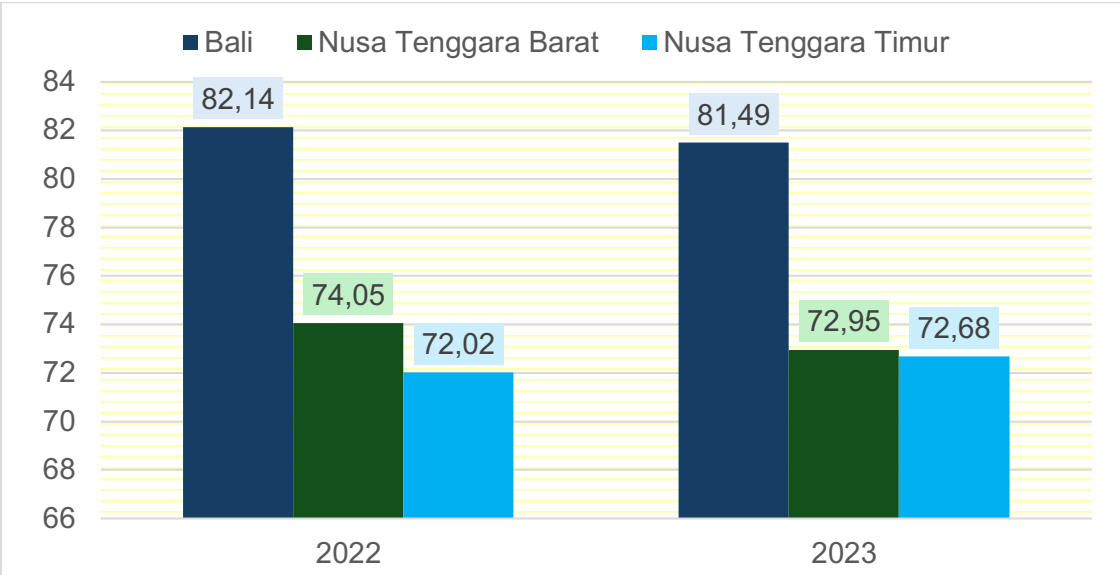
sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kualitas keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	64.70

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Manggarai Barat belum dapat diukur capaian tren tiap tahunnya. Capaian diukur pada tahun 2024 sebesar yaitu 64,70. Untuk menggambarkan kondisi pembangunan keluarga, digunakan indikator Indeks Kualitas Keluarga, yang dihitung oleh KemenPPPA RI. Namun, perhitungan Indeks Kualitas Keluarga sendiri masih dihitung hanya di level provinsi. Berikut merupakan capaian kinerja pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Manggarai Barat yang diukur melalui angka di level provinsi sebagai berikut:



Gambar 2. 36 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023

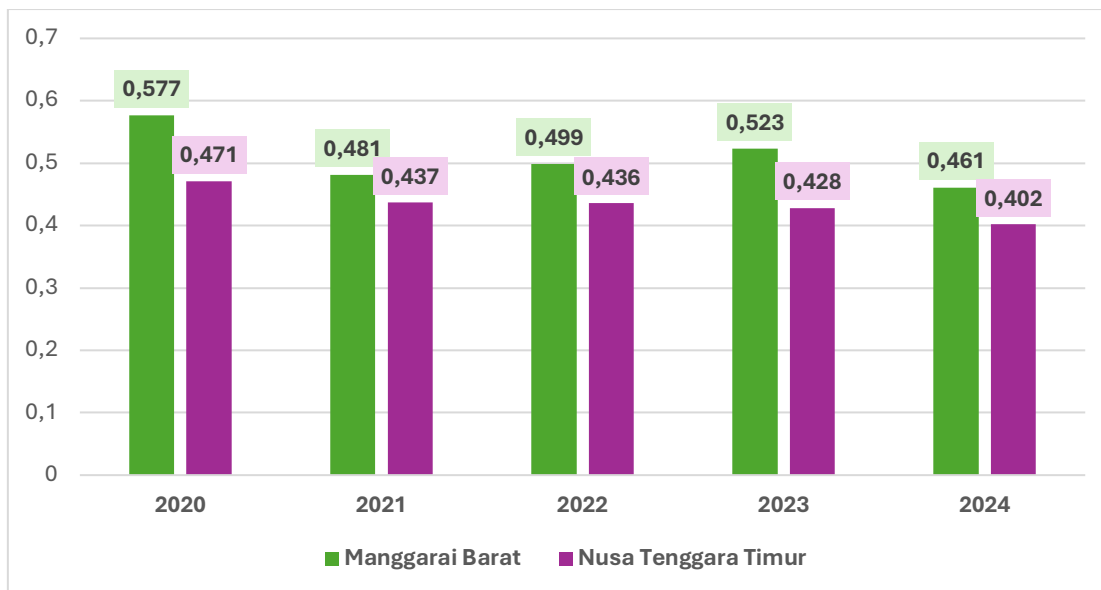
Sumber: KemenPPPA, 2024

Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Nusa Tenggara menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2022-2023. Peningkatan tercatat sebesar 0,66 poin, di mana peningkatan ini lebih baik dibandingkan capaian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan penurunan sebesar -1,10 poin dan capaian

Provinsi Bali dengan penurunan sebesar 0,65 poin. Meskipun demikian, tingkat kualitas keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan yang terendah dibandingkan dengan wilayah sekitar. Hal ini menunjukkan meskipun terdapat berbagai perbaikan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga, kondisi kualitas keluarga daerah relatif masih tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah sekitar. Pada tahun 2023, kesenjangan antara Provinsi NTB dan NTT sebesar 0,27 poin, sedangkan dengan Provinsi Bali kesenjangan lebih dalam terjadi sebesar 8,81 poin. Kondisi ini perlu diperbaiki ke depannya untuk memastikan kualitas SDM daerah yang unggul dimulai dari pembangunan keluarga yang berkualitas sebagai institusi sosial pertama yang dihadapi manusia dalam perkembangannya.

2.1.2.6.3 Gender

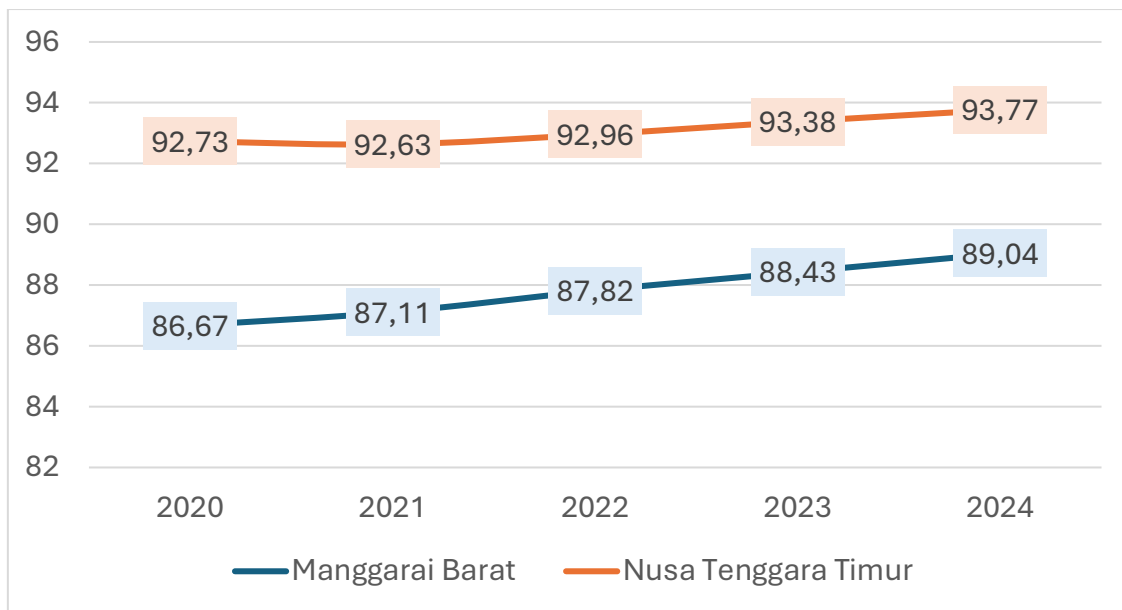
Kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam menilai kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Kesetaraan dalam akses dan peluang bagi perempuan serta laki-laki dalam pembangunan daerah secara menyeluruh menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh penduduk. Aspek ini dapat diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang merupakan pengembangan dari indikator sebelumnya, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IKG tidak hanya mengukur partisipasi perempuan dan laki-laki dalam sektor pendidikan serta ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan reproduksi perempuan. Berikut ini merupakan angka IKG Kabupaten Manggarai Barat beberapa tahun terakhir.



Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini tercatat sebesar -0,061 poin, di mana laju penurunan ini lebih baik dibandingkan dengan laju penurunan di level provinsi sebesar -0,053 poin. Meskipun demikian, angka ketimpangan di Kabupaten Manggarai Barat masih berada di atas level provinsi, dengan kesenjangan sebesar 0,095 poin pada tahun 2023. Selain itu, terdapat tren yang meningkat sejak tahun 2021 dimana angka ketimpangan gender Kabupaten Manggarai Barat selalu meningkat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai upaya pengarusutamaan gender di berbagai lini untuk memastikan kesempatan yang setara baik bagi laki-laki maupun perempuan di seluruh sektor daerah. Selain IKG, terdapat indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan tingkat pembangunan gender di suatu wilayah. Berikut merupakan capaian IPG Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun sebelumnya:



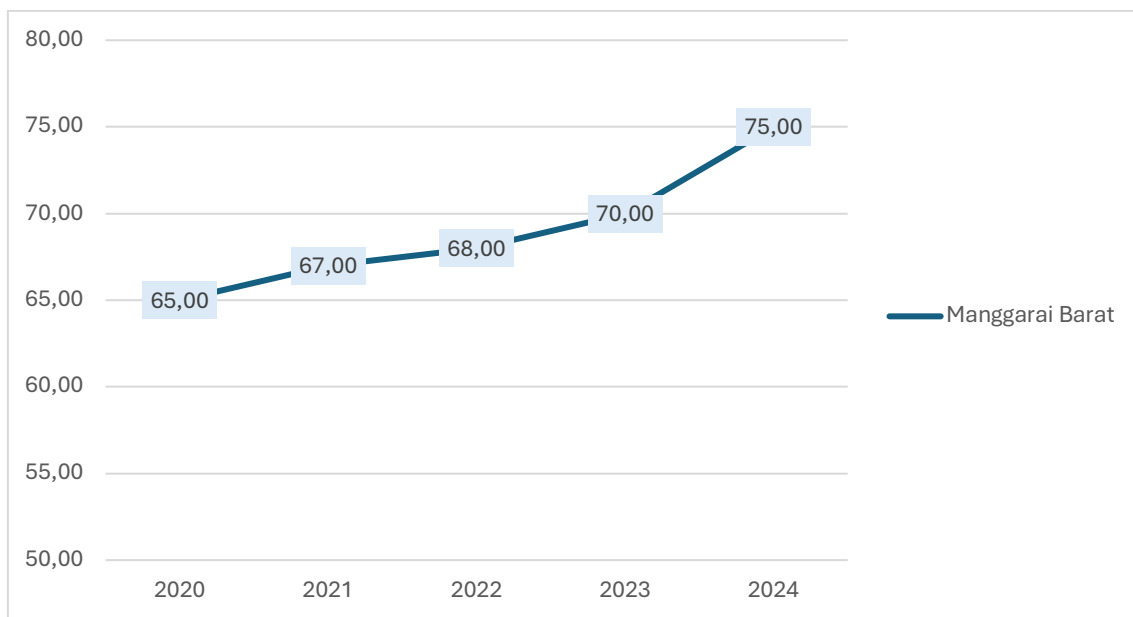
Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS NTT, 2025

IPG Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan ini mengindikasikan kondisi masyarakat daerah yang semakin timpang gender dan perlu intervensi lebih lanjut untuk menahan laju peningkatan ketimpangan tersebut. Peningkatan terjadi sebesar 2,37 poin atau persentase peningkatan sebesar 2,73 persen dibandingkan dengan data awal. Pertumbuhan ini tercatat lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan di level provinsi dengan angka pertumbuhan sebesar 1,04 poin dengan persentase peningkatan sebesar 1,12 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Meskipun demikian, kondisi pembangunan gender di Kabupaten Manggarai Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi, dengan *gap* sebesar 4,73 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai upaya pembangunan gender telah berhasil memberikan pertumbuhan yang pesat bagi kondisi kesetaraan gender daerah, kondisi ini belum mampu menciptakan keadilan gender yang setingkat dengan rata-rata kondisi di provinsi.

2.1.2.6.4 Pembangunan Pemuda

Pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, menjadikannya salah satu aktor utama dalam kemajuan wilayah. Kehadiran pemuda yang mandiri dan berdaya saing sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan, terutama karena mereka termasuk dalam kelompok usia produktif. Tingkat kualitas dan perkembangan pemuda di suatu wilayah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks ini disusun berdasarkan berbagai aspek utama yang mencerminkan kondisi pemuda, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta aspek kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi. Ketersediaan data IPP saat ini hanya terbatas pada level provinsi. Berikut adalah data Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Manggarai Barat pada periode 2020-2024.



Gambar 2. 39 IPP Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: <https://ipp.sarikata.com/>

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ini terjadi sebesar 10,00 poin dengan persentase peningkatan sebesar 15,38 persen. Hal tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya keberdayaan dan prestasi pemuda daerah di Kabupaten Manggarai Barat, dengan meningkatnya berbagai aspek pembangunan kepemudaan yang meliputi pendidikan,

kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta aspek kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi. Pemerintah daerah perlu mempertahankan kinerja ini dengan berbagai intervensi pembangunan dalam bidang kepemudaan dalam rangka meningkatkan keberdayaan pemuda daerah.

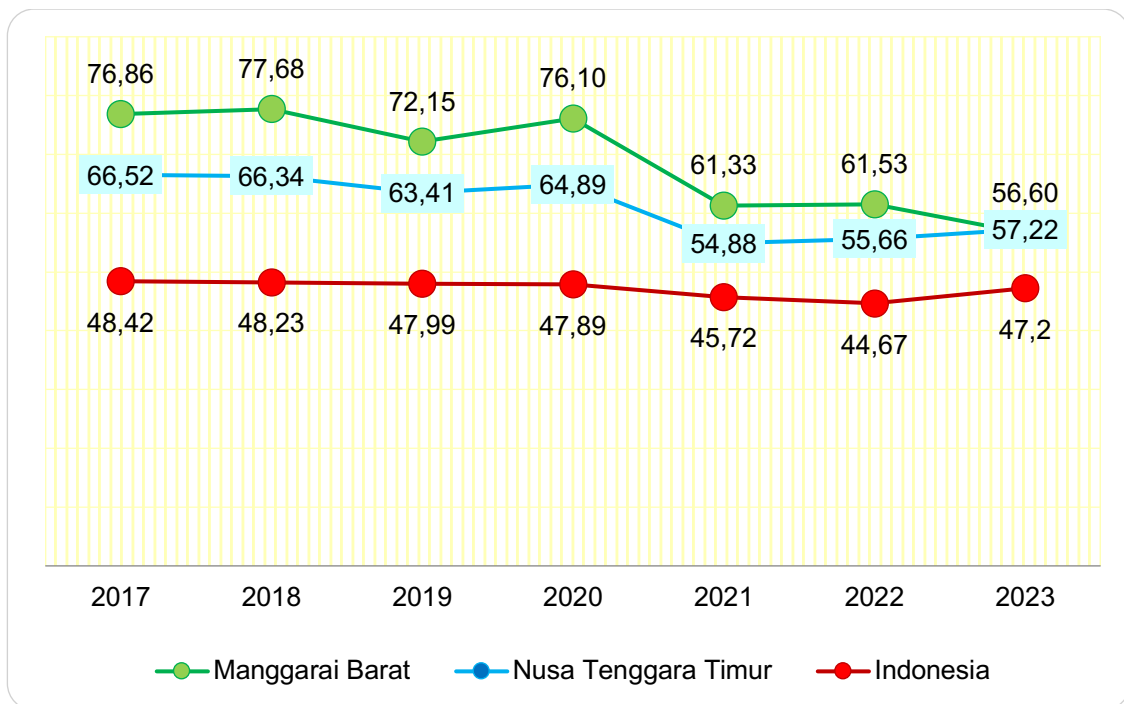
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing Sumber Daya Manusia merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan SDM di Kabupaten Manggarai Barat sehingga mampu bersaing dalam berbagai bidang. Aspek daya saing ini mencerminkan sejauh mana Kabupaten Manggarai Barat dapat mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, menciptakan lapangan dan angkatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan sebuah perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun) di suatu daerah. Angka ketergantungan secara konseptual menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam hal membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif dalam menanggung hidup penduduk usia non produktif.



Gambar 2. 40 Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2024

Rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang menurun selama periode 2017 hingga 2023. Selama periode tersebut, rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan hingga 20,26 poin, dari 76,86 persen pada tahun 2017 menjadi 56,60 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat berada pada angka 56,60 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Manggarai Barat memiliki beban tanggungan sebanyak 57 jiwa penduduk usia non-produktif.

2.1.3.1.2 Penduduk Bekerja Sesuai Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pendidikan menjadi salah satu input yang dapat memberikan perubahan terhadap kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut akan semakin baik. Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi cenderung memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Kondisi ini juga turut berdampak terhadap upah yang diperoleh sehingga berimplikasi pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja. Berikut merupakan

gambaran penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 2. 17 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD	59.65%	55.77%	58.46%	53.91%	47.72%	72.90%
SMP	13.44%	15.64%	13.40%	11.35%	10.98%	16.97%
SMA	14.47%	15.97%	15.43%	22.00%	24.30%	30.37%
Perguruan Tinggi	12.44%	12.63%	12.71%	12.73%	17.01%	22.14%

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

Selama periode 2019 hingga 2024, mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat masih merupakan lulusan dari Sekolah Dasar (SD). Jumlah angkatan kerja lulusan SD di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024 mencapai 72,90 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 47,72 persen. Pada tahun yang sama, angkatan kerja lulusan Perguruan Tinggi juga mengalami peningkatan menjadi 22,14 persen, dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 17,01 persen. Sementara itu, lulusan SMP mencapai 16,97 persen dan lulusan SMA mencapai 30,37 persen pada tahun 2024. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi dan kualitas pekerjaan yang dimiliki oleh angkatan kerja tersebut. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui optimalisasi layanan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, terutama dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman.

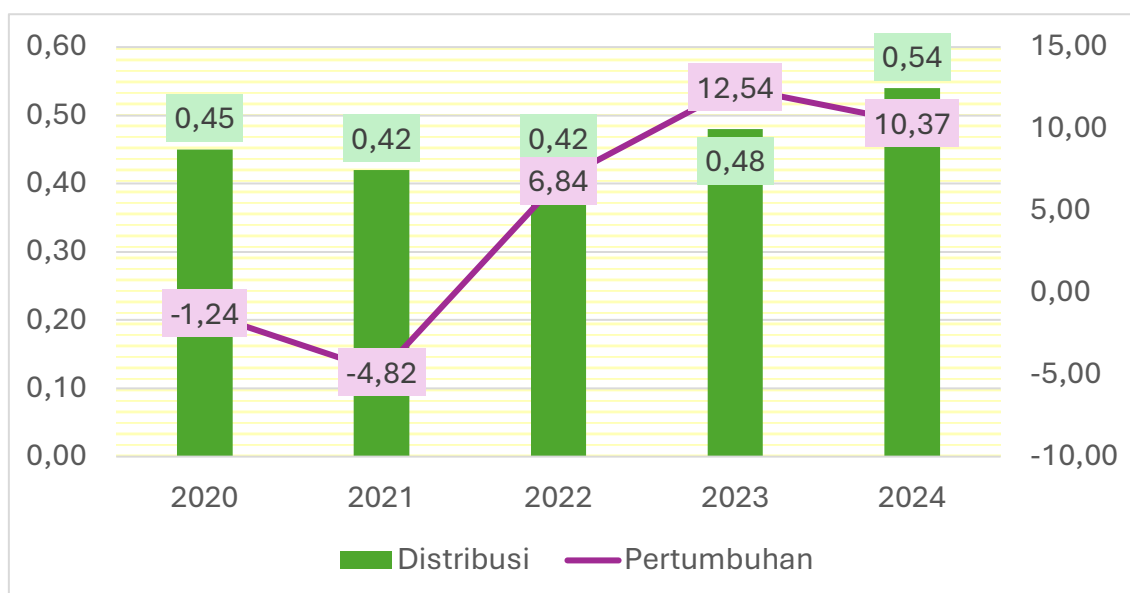
2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kemajuan teknologi serta ekosistem inovasi yang kondusif di tingkat daerah. Perkembangan teknologi dan informasi di suatu wilayah dapat tercermin dari pertumbuhan sektor-sektor yang bergantung pada penerapan teknologi dalam operasionalnya, seperti sektor industri pengolahan. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menjadi indikator pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di suatu daerah, karena sektor ini sangat bergantung pada teknologi digital yang terus berkembang. Bagian ini akan mengulas beberapa indikator yang

mencerminkan kondisi tersebut, seperti rasio PDRB industri pengolahan; rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman; tingkat partisipasi angkatan kerja; serta indeks inovasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Analisis terhadap indikator-indikator ini akan memberikan gambaran sejauh mana teknologi dan inovasi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan indikator ekonomi makro yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total produksi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan sektor industri menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor ini berperan dalam meningkatkan nilai produk daerah dengan mengolah bahan mentah menjadi barang siap konsumsi. Rasio PDRB Industri Pengolahan dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB di suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran mengenai peran sektor industri dalam mendukung perekonomian wilayah. Berikut adalah data terkait Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2020-2024.



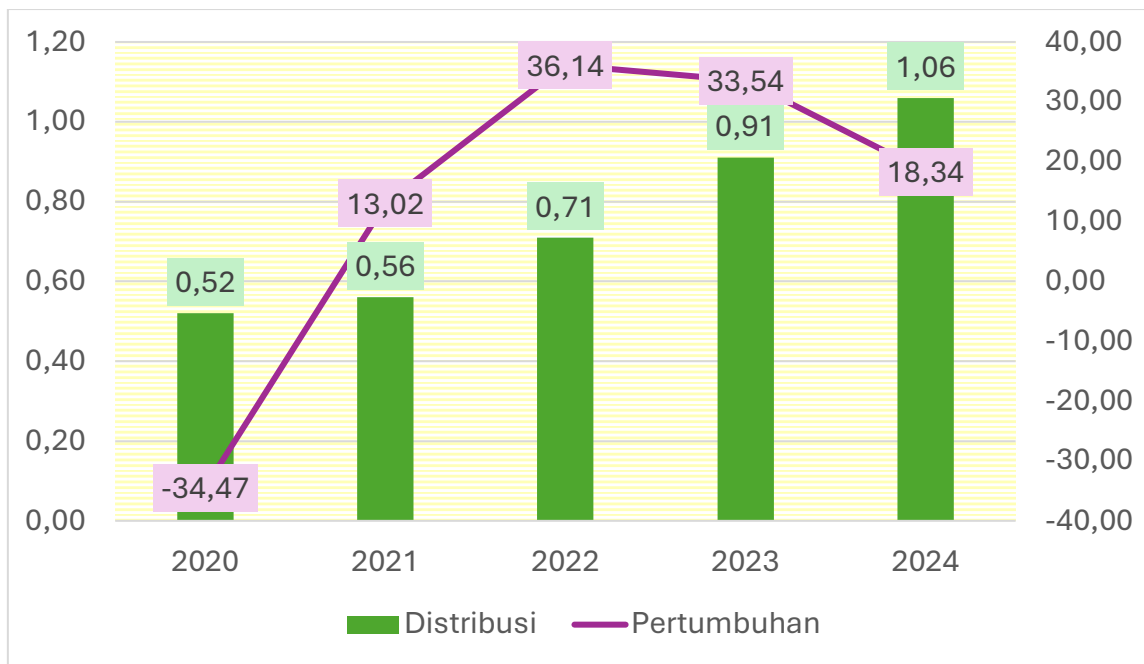
Gambar 2. 41 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang meningkat dan tumbuh. Dalam aspek distribusi, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah meningkat dari 0,45 persen pada tahun 2020 menjadi 0,54 persen pada tahun 2024, meningkat sebesar 0,09 persen atau sebesar 20 persen. Dari aspek pertumbuhan, sektor industri pengolahan juga mencatatkan kinerja yang cukup optimal, meskipun pada dua tahun pertama dalam periode data pertumbuhan yang dialami merupakan minus. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 4,74 persen setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan sektor industri pengolahan daerah tumbuh dan berkembang, yang mengindikasikan semakin baiknya iklim usaha daerah, meningkatnya produktivitas IKM daerah, dan kepastian usaha yang menjanjikan bagi para pelaku usaha industri secara umum.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman merupakan salah satu komponen dalam perhitungan total PDRB suatu daerah. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan nilai produksi dari sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB. Rasio ini mencerminkan sejauh mana sektor tersebut berkontribusi terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam kaitannya dengan industri pariwisata dan layanan kuliner. Melalui indikator ini, dapat dianalisis peran sektor akomodasi, makanan, dan minuman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Berikut adalah data mengenai PDRB lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman di Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2020-2024.



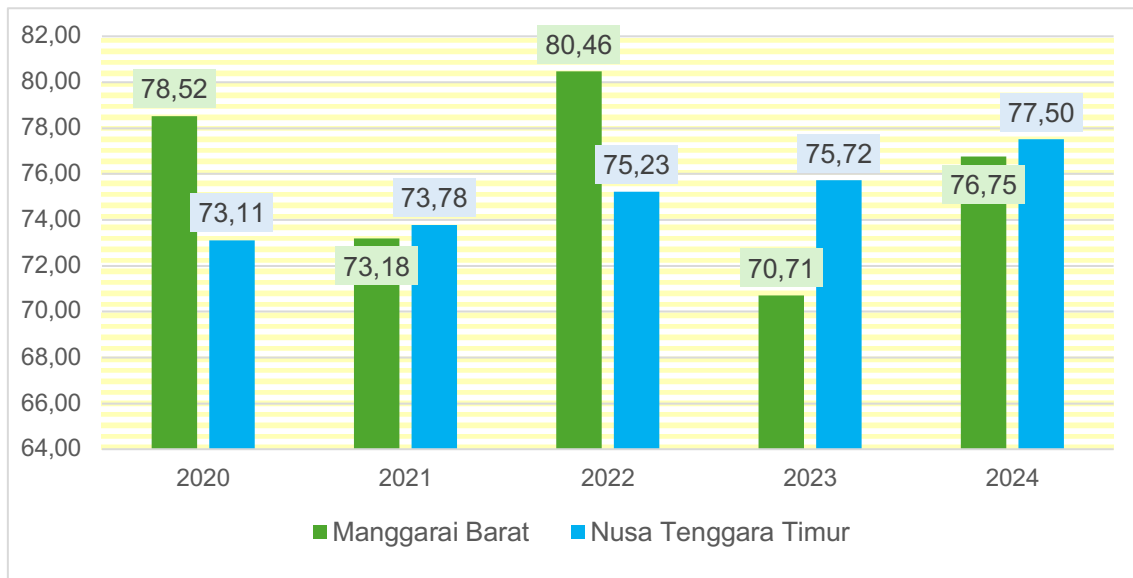
Gambar 2. 42 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik distribusi maupun laju pertumbuhan dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang meningkat. Dari aspek distribusi, lapangan usaha ini meningkat sebesar 0,54 poin atau meningkat sebesar 103,85 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Dari aspek laju pertumbuhan, lapangan usaha ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tercatat sebesar 13,31 persen per tahunnya. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata yang digambarkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pulih dengan signifikan pasca pembatasan sosial yang diterapkan saat pandemi Covid-19. Kondisi ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah lebih lanjut, mengingat distribusi ekonomi yang masih relatif rendah terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan namun memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi.

2.1.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total penduduk usia kerja di suatu daerah. TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang siap berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa. Indikator TPAK menjadi salah satu ukuran penting dalam memahami dinamika ketenagakerjaan serta potensi ekonomi suatu wilayah. Berikut adalah data capaian TPAK Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 2. 43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

TPAK Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergolong fluktuatif dengan tren yang menurun. Fluktuasi ini terlihat dimana hampir setiap tahunnya TPAK di Kabupaten Manggarai Barat berganti arah pertumbuhan yang meningkat dan menurun. Secara tren, TPAK Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2020-2024 menurun sebesar -1,77 poin. Hal ini cukup berbeda dengan kondisi yang ada di level provinsi, di mana TPAK Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren yang konsisten meningkat setiap tahunnya, dengan pertumbuhan sebesar 4,39 poin dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Fluktuatifnya TPAK daerah menunjukkan kondisi penyerapan

ketenagakerjaan daerah yang belum stabil, yang dapat mengindikasikan beberapa hal di antaranya lapangan kerja yang fluktuatif, kepastian kerja yang masih rendah, belum optimalnya kondisi *link and match* ketenagakerjaan daerah, pengaruh sektor industri padat karya daerah yang belum optimal, dan lainnya.

2.1.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan inovasi dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Inovasi sendiri berfungsi sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Keberadaan inovasi memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu mengembangkan serta menerapkan ide-ide baru dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor ekonomi. Berikut adalah data mengenai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2021-2024.

Tabel 2. 18 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Skor	55,96	54,65	44,60	53,22
Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kepmendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang menurun dalam aspek implementasi dan iklim inovasi daerah. Melalui Indeks Inovasi Daerah, tercatat bahwa kondisi inovasi daerah Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan sebesar -2,74 poin dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan, nilai ini masih dikategorikan dengan predikat inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan dan iklim inovasi baik di ranah pemerintahan maupun masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat belum optimal, yang mengindikasikan belum optimalnya regulasi yang mendukung iklim inovasi daerah, masih terbatasnya inisiatif inovasi daerah, serta belum optimalnya dukungan pemerintah dalam mendorong inovasi daerah secara lebih lanjut.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pembangunan ekonomi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam proses produksi di suatu wilayah. Kesadaran terhadap aspek lingkungan telah mendorong arah pembangunan ekonomi yang memperhitungkan daya dukung serta daya tampung ekosistem sekitarnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap konsep pembangunan berkelanjutan semakin meningkat melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*). Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan kelestarian lingkungan. Bagian ini akan mengulas penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat, yang akan digambarkan salah satunya melalui angka PDRB Non-Pertambangan.

2.1.3.3.1 PDRB Non-Pertambangan

PDRB Non-Pertambangan mengacu pada total nilai produksi ekonomi suatu wilayah yang tidak berasal dari aktivitas sektor pertambangan. Indikator ini berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu daerah bergantung pada sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan. Semakin kecil kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, semakin menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sebaliknya, jika nilai PDRB Non-Pertambangan relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Bagian ini akan menganalisis kondisi PDRB Non-Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 19 Distribusi PDRB Pertambangan dan Non-Pertambangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambangan	1,82	1,85	1,82	1,81	1,76
Non Pertambangan	98,18	98,14	98,17	98,16	98,25

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

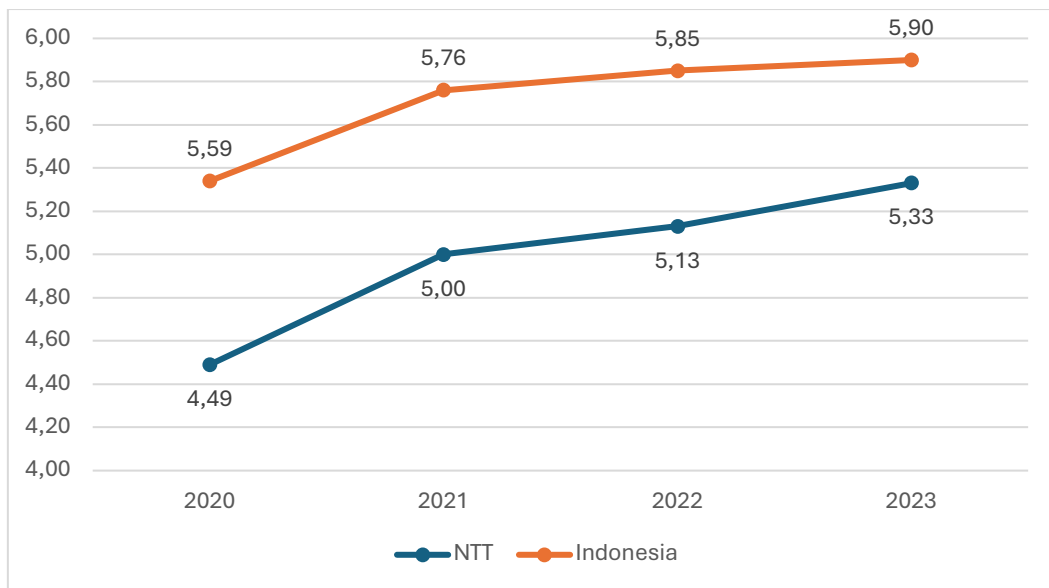
Distribusi ekonomi sektor pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan proporsi yang sangat rendah dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara rata-rata, distribusi ekonomi pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat menyumbang sebesar 1,81 persen per tahunnya, dengan penurunan terjadi sebesar 0,06 poin. Berbanding sebaliknya, kontribusi PDRB yang tidak terkait dengan pertambangan sendiri memiliki kontribusi yang sangat dominan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 98,18 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tidak bergantung pada aktivitas berbasis eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan dan penggalian, melainkan lebih didorong oleh sektor-sektor non-ekstraktif yang berorientasi pada keberlanjutan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah sebuah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam aspek kehidupan, yang pada akhirnya memengaruhi cara dan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan. Digitalisasi dalam pembangunan daerah dapat menyasar berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan yang memungkinkan peningkatan pelayanan publik lebih cepat, integratif, dan efisien. Berikut ini merupakan indikator untuk menilai transformasi digital di Kabupaten Manggarai Barat dalam lima tahun terakhir.

2.1.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

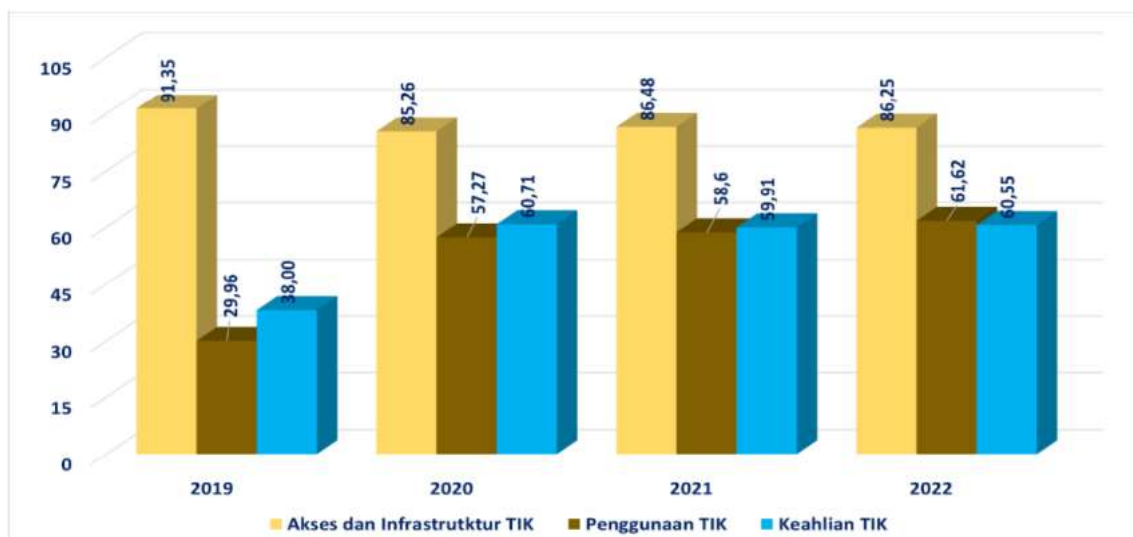
Indeks P-TIK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kesiapan suatu wilayah dalam pemanfaatan TIK. Indeks ini mencerminkan tingkat akses, penggunaan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Capaian IP-TIK Kabupaten Manggarai Barat ditaksir melalui capaian Provinsi NTT berikut ini.



Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT

Sumber: BPS, 2024

Capaian nilai IP-TIK Provinsi NTT pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah capaian rata-rata nasional. Pada tahun 2023, nilai IP-TIK NTT mencapai 5,33, nilai tersebut menunjukkan belum optimalnya adaptasi TIK di Provinsi NTT secara keseluruhan, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat. Secara lebih rinci, capaian nilai IP-TIK berdasarkan komponen adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 45 Capaian Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT

Sumber: Rankhir RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun, aspek penggunaan TIK memiliki nilai terendah jika dibandingkan dengan aspek akses dan infrastruktur dan keahlian TIK. Komponen penggunaan TIK mengindikasikan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat. Komponen ini disusun oleh tiga indikator, yaitu persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan *fixed broadband internet* per 100 penduduk, dan pelanggan *mobile broadband internet* aktif per 100 penduduk. Rendahnya nilai penggunaan TIK mengindikasikan masih rendahnya penggunaan internet di Provinsi NTT. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi isu yang tak terelakkan di masa mendatang, oleh karena itu, peningkatan akses, infrastruktur, dan keterampilan SDM dalam penggunaan TIK menjadi agenda pembangunan yang penting. Daerah yang memiliki daya saing infrastruktur dan SDM yang unggul akan lebih siap menghadapi era digital dan pelayanan publik akan berjalan efisien.

2.1.3.4.2 Capaian Penyelenggaraan Internet

Penyelenggaraan internet di suatu daerah merupakan penopang utama berjalannya ekosistem digital, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat secara luas. Capaian penyelenggaraan internet mencerminkan bagaimana kualitas dan pemerataan akses internet di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut ini merupakan capaian kinerja sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2022	2023
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	166,66	84,62

Sumber: LKIP Dinas Kominfo Kab. Manggarai Barat, 2023

Capaian kinerja penyelenggaraan internet dicerminkan dari persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi. Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi berhasil memenuhi target dengan capaian 166,66 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 84,62 persen dan belum memenuhi target. Capaian yang tidak memenuhi target mewakili belum optimalnya penyelenggaraan

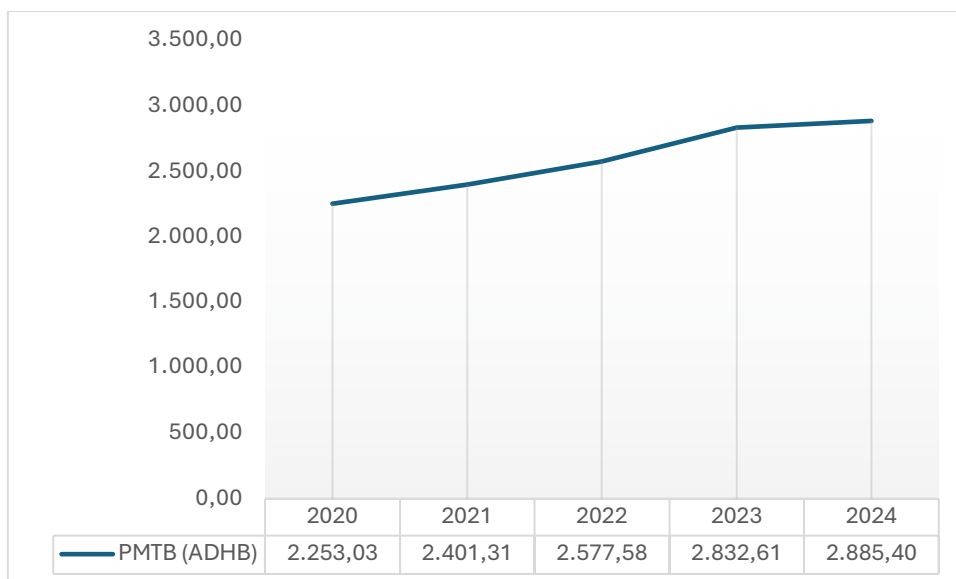
internet di Kabupaten Manggarai Barat. Perluasan akses layanan internet sangat penting untuk menjamin terlaksananya transformasi digital yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Integrasi ekonomi domestik dan global dapat dijelaskan menggunakan dua indikator, yaitu pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa. Berikut gambaran kedua indikator tersebut di Kabupaten Manggarai Barat

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan tingkat investasi suatu negara dalam aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dalam jangka panjang. Investasi ini mencakup berbagai jenis barang modal tetap, seperti pembangunan gedung perkantoran, pabrik, dan perumahan, serta pengadaan mesin, peralatan, dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. PMTB berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat daya saing industri dan sektor usaha. Berikut adalah data tentang PMTB di Kabupaten Manggarai Barat.



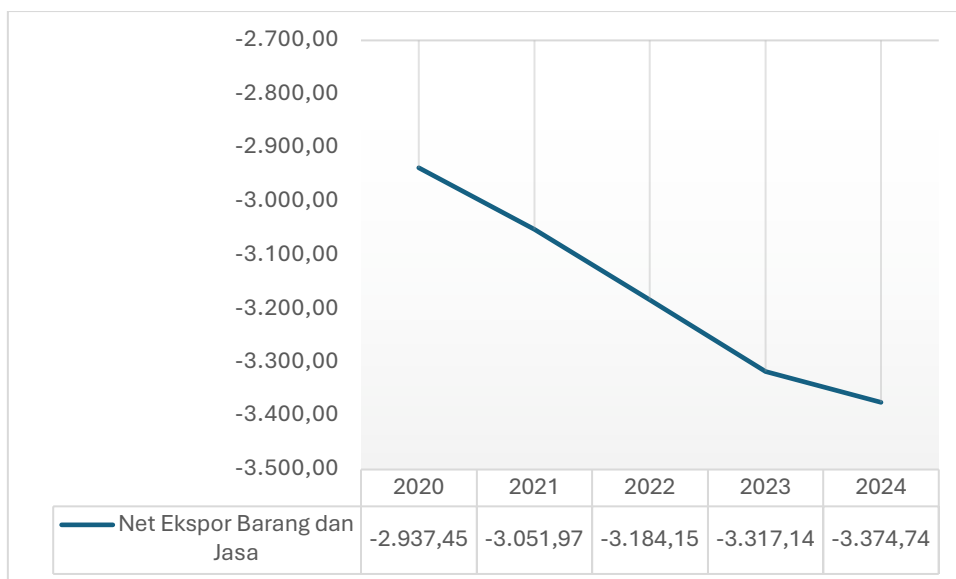
Gambar 2. 46 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (Miliar Rupiah) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Pembentukan modal tetap bruto menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan investasi dalam aset tetap, seperti infrastruktur, mesin, dan bangunan. Namun, perlambatan pertumbuhan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi atau kebijakan investasi. Peningkatan realisasi investasi dalam negeri dan realisasi investasi perlu dilakukan secara berkesinambungan.

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa adalah selisih antara total ekspor dan total impor suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Net ekspor digunakan untuk menghitung kontribusi perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Net ekspor positif (surplus perdagangan) terjadi jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti negara tersebut memiliki surplus perdagangan, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai mata uang. Net ekspor negatif (defisit perdagangan) terjadi jika impor lebih besar daripada ekspor, berarti negara mengalami defisit perdagangan, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada produk luar negeri dan melemahkan mata uang. Berikut adalah data net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. 47 Net Ekspor Barang dan Jasa ADHB (Miliar Rupiah) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Net ekspor barang dan jasa menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Kondisi ini mengindikasikan ada faktor yang mendorong peningkatan defisit perdagangan setiap tahun. Namun, penurunan yang lebih kecil antara 2023 dan 2024 bisa mengindikasikan bahwa tren peningkatan defisit mulai melambat atau adanya intervensi kebijakan yang memengaruhi perdagangan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa defisit perdagangan dalam kategori net ekspor barang dan jasa semakin membesar dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun laju peningkatannya tampak menurun mendekati 2024. Analisis lebih lanjut akan diperlukan untuk memahami faktor-faktor ekonomi spesifik yang menyebabkan tren ini, bisa mencakup faktor-faktor seperti perubahan permintaan pasar, fluktuasi nilai tukar, atau kebijakan perdagangan.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, listrik, transportasi), kualitas infrastruktur, dan dampaknya terhadap masyarakat. Indeks infrastruktur Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024

mempunyai nilai sebesar 85,86. Sementara Indeks Infrastruktur Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 diukur menggunakan perhitungan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Capaian indeks infrastruktur tahun 2024 menunjukkan adanya upaya konsisten dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam memperbaiki dan mengembangkan sarana prasarana publik, seperti transportasi, utilitas dasar, dan fasilitas sosial. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi daya saing wilayah, kenyamanan warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga tren peningkatan ini dengan merancang kebijakan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.1.3.6.2 Tingkat Kemantapan Jalan

Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan tidak akan terlepas dari dukungan kemantapan konektivitas wilayah. Secara lebih rinci, kondisi konektivitas wilayah dapat digambarkan melalui panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun detail mengenai panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020–2024 (Km)

Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	551,07	523,63	523,63	525,63	457,74
Sedang	129	104,52	104,52	112,60	118,68
Rusak	89,97	146,21	146,21	51,98	61,25
Rusak berat	456,86	523,62	452,53	536,67	568,96
Total	1.226,90	1.297,98	1.226,89	1.226,88	1.206,63

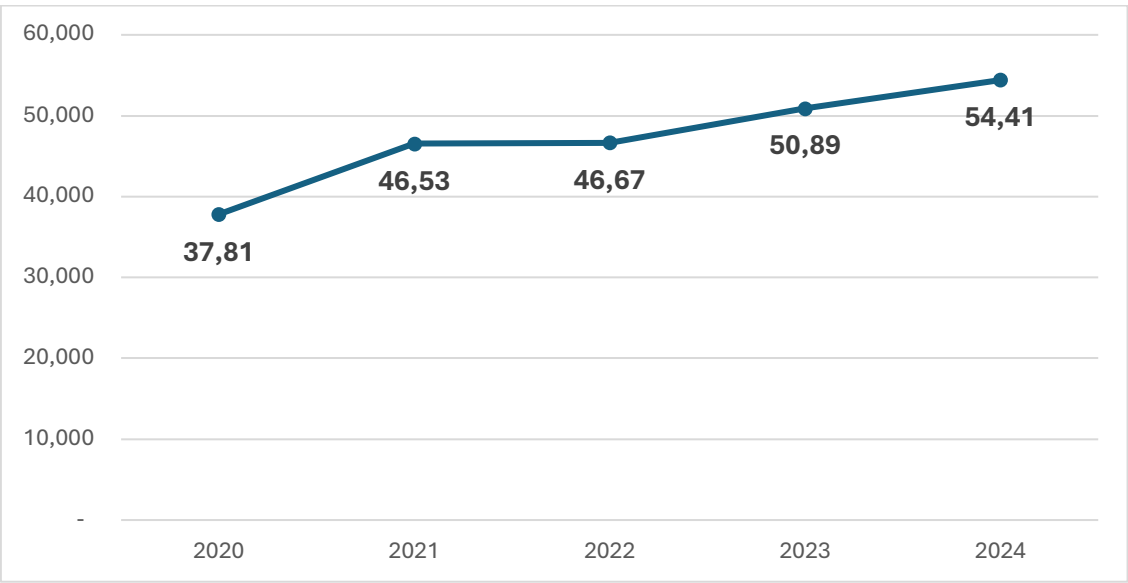
Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka, 2025

Data panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga 2024. Jika dilihat pada kinerja tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 13 persen dibandingkan capaian tahun 2023. Adapun jalan dalam kondisi sedang mengalami peningkatan sebesar 5,4 persen. Namun demikian, jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu

perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas jalan guna mendukung konektivitas Manggarai Barat yang semakin mantap.

2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan akses terhadap hunian layak yang memadai. Hunian yang layak menyediakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan penghuni. Dengan kondisi tempat tinggal yang memadai, masyarakat dapat lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian. Berikut ini merupakan perkembangan akses terhadap hunian layak di Kabupaten Manggarai Barat.

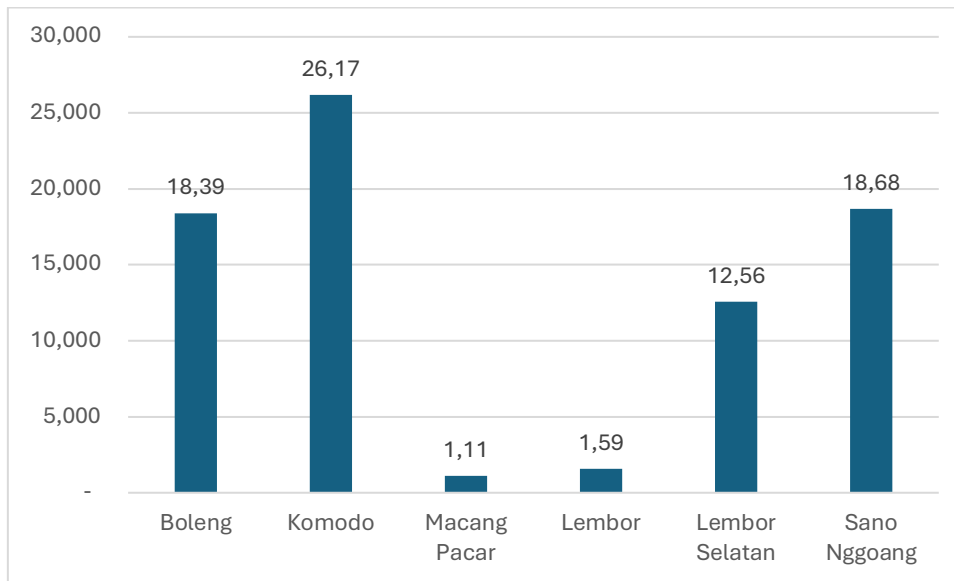


Gambar 2. 48 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahun, akses terhadap hunian layak di Kabupaten Manggarai Barat perlu untuk ditingkatkan. Hal ini menjadi penting mengingat capaian pada tahun 2024 yang berada pada angka 54,41 persen. Artinya, hanya setengah dari penduduk Manggarai Barat yang dapat mengakses hunian layak. Selain itu, di samping rumah tangga dengan hunian layak, kualitas permukiman juga perlu untuk ditingkatkan. Kabupaten Manggarai sendiri masih menghadapi permasalahan terkait kualitas

permukiman, yang ditunjukkan dengan data luas kawasan permukiman kumuh berikut.



Gambar 2. 49 Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan Kecamatan

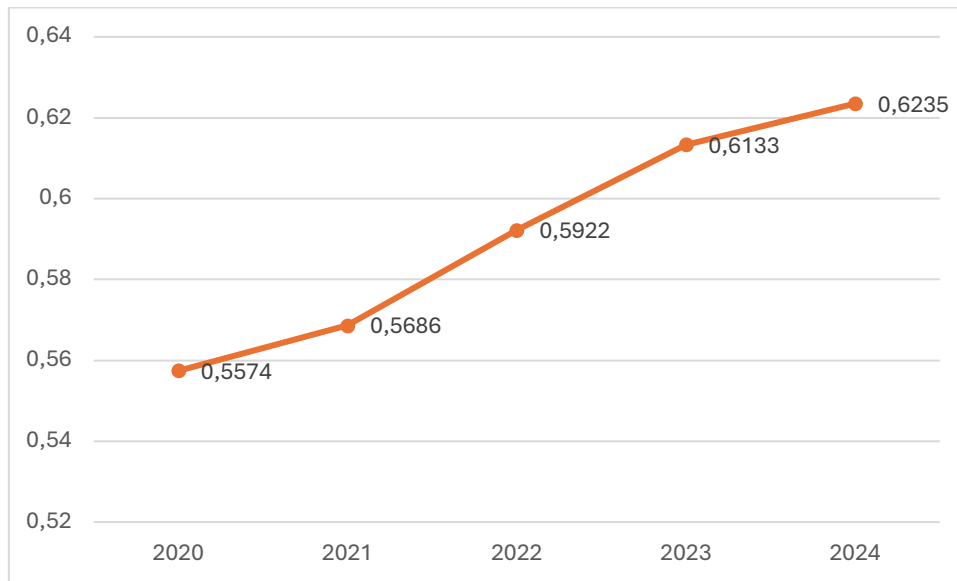
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki kawasan kumuh yang tersebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Boleng, Kecamatan Komodo, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, dan Kecamatan Sano Nggoang. Luas kawasan kumuh tertinggi berada di Kecamatan Komodo yakni mencapai 26,17 ha. Adapun luas kawasan kumuh paling sedikit berada di Kecamatan Macang Pacar, sebesar 1,11 ha. Peningkatan kualitas permukiman menjadi agenda penting karena berkontribusi langsung terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Peningkatan kualitas permukiman tersebut meliputi penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase; perbaikan kondisi fisik bangunan rumah; penataan lingkungan permukiman; serta peningkatan aksesibilitas terhadap beragam fasilitas umum.

2.1.3.6.4 Indeks Desa Membangun

Status Desa Mandiri diperoleh melalui penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil penilaian tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian sebuah desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan

ekologi. Berikut ini merupakan perkembangan nilai IDM Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. 50 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Nilai IDM Kabupaten Manggarai Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian ini telah meningkatkan status desa 'tertinggal' pada tahun 2020 menjadi status 'berkembang' pada tahun 2024. Meskipun demikian, hingga tahun 2024 Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki desa berstatus mandiri.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Indikator tingkat inflasi dan rasio pajak terhadap PDRB dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi stabilitas ekonomi makro. Berikut adalah deskripsi kedua indikator tersebut.

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB adalah perbandingan antara penerimaan pajak suatu daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian daerah tersebut. Rasio ini digunakan sebagai indikator efektivitas pemungutan pajak

serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam suatu wilayah. Berikut adalah data rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 22 Rasio Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak (miliar rupiah)	PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB) (%)	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHK) (%)
2020	62,47	3.519,37	2.267,58	0,018	0,028
2021	82,14	3.611,64	2.296,73	0,023	0,036
2022	141,46	3.883,61	2.391,36	0,036	0,059
2023	188,61	4.256,22	2.505,77	0,044	0,075
2024	212,69	4.594,28	2.629,18	0,046	0,081

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

Rasio pajak terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio pajak terhadap PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 0,028, sedangkan rasio pajak terhadap PDRB ADHK mengalami peningkatan sebesar 0,053. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Manggarai Barat semakin membaik. Kolaborasi dan kerja sama antar *stakeholders* sangat diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu, biasanya dihitung dalam satu tahun. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang, yang berarti bahwa jumlah uang yang sama akan mampu membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor, seperti meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi oleh pasokan, kenaikan biaya produksi, perubahan nilai tukar mata uang, serta kebijakan moneter dan fiskal suatu negara. Tingkat inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan konsumsi. Akan tetapi, jika inflasi meningkat secara tidak terkendali, hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan mengganggu stabilitas ekonomi

secara keseluruhan. Berikut adalah data inflasi di Kabupaten Manggarai Barat. Data ini mengacu pada data inflasi di Kota Maumere.



*) Inflasi Kabupaten Manggarai Barat mengikuti data inflasi Kota Maumere

Gambar 2. 51 Inflasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Inflasi yang rendah pada 2020-2021 mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi. Lonjakan tajam pada 2022 sebesar 6,25 persen disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, gangguan rantai pasok global, atau faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas. Penurunan inflasi pada 2023-2024 menunjukkan normalisasi atau efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan siklus inflasi yang dimulai dengan tingkat rendah, diikuti lonjakan tajam, dan kemudian penurunan bertahap menuju tingkat yang lebih moderat. Pola ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks selama periode tersebut.

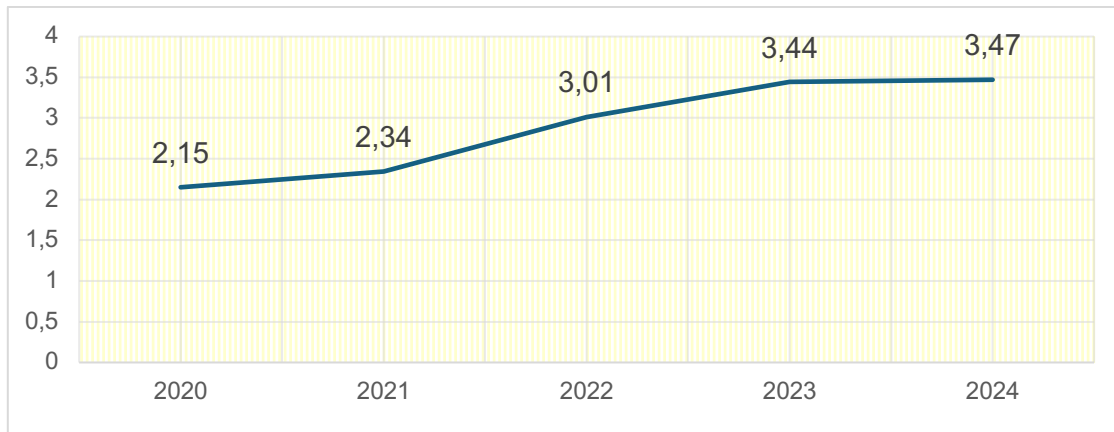
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif berkaitan dengan peningkatan tata Kelola pemerintahan. Aspek ini penting karena menjadi landasan terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, kinerja tata Kelola pemerintahan daerah harus dianalisis untuk mengetahui gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.4.1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kinerja pelayanan publik tersebut salah satunya didukung oleh adanya penerapan dan pemanfaatan TIK. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja indeks SPBE.



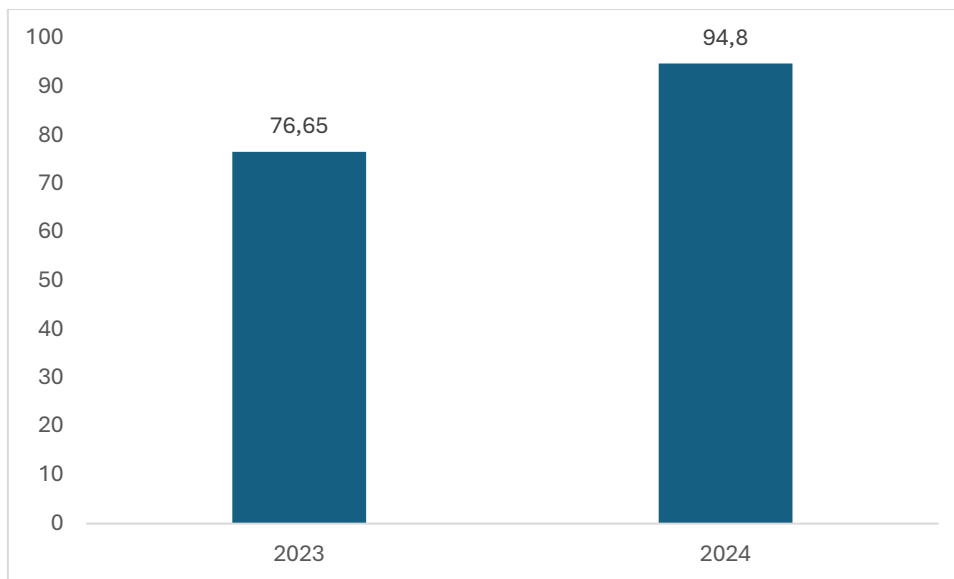
Gambar 2. 52 Indeks SPBE Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Indeks SPBE mengalami peningkatan setiap tahun dengan predikat baik. Peningkatan nilai SPBE tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu meningkat sebesar 28 persen, sementara peningkatan nilai SPBE terendah terjadi pada tahun 2024, yaitu hanya sebesar 0,87 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam sektor pemerintahan semakin baik yang menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi SPBE dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun mengalami dinamika yang kompleks.

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebuah ukuran sekaligus instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan agenda reformasi hukum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Beberapa aspek penting yang dinilai dalam IRH meliputi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, serta akses terhadap keadilan.



Gambar 2. 53 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023-2024

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2024. Dari yang semula hanya mendapatkan predikat BB (Baik) menjadi predikat AA (Istimewa) dengan nilai 94,8. Peningkatan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan agenda reformasi hukum di Kabupaten Manggarai Barat telah mengalami perbaikan.

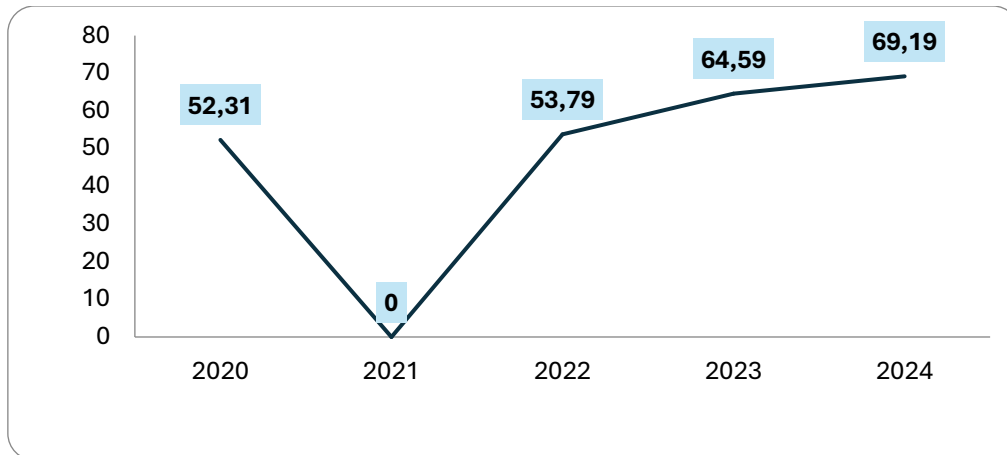
2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IPP ini menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kepuasan masyarakat. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 sebesar 3,71 atau mempunyai nilai B. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah tersebut berada dalam kategori “Baik”.

Unit penyelenggara pelayanan di Kabupaten Manggarai Barat telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan, mulai dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, hingga pengelolaan pengaduan dan inovasi. Meskipun sudah menunjukkan performa yang baik, capaian ini juga menggambarkan masih adanya ruang untuk perbaikan dan menjadi dasar untuk mendorong peningkatan lebih lanjut agar ke depannya pelayanan menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4.1.4 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah secara umum. Adapun kinerja implementasi reformasi birokrasi Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

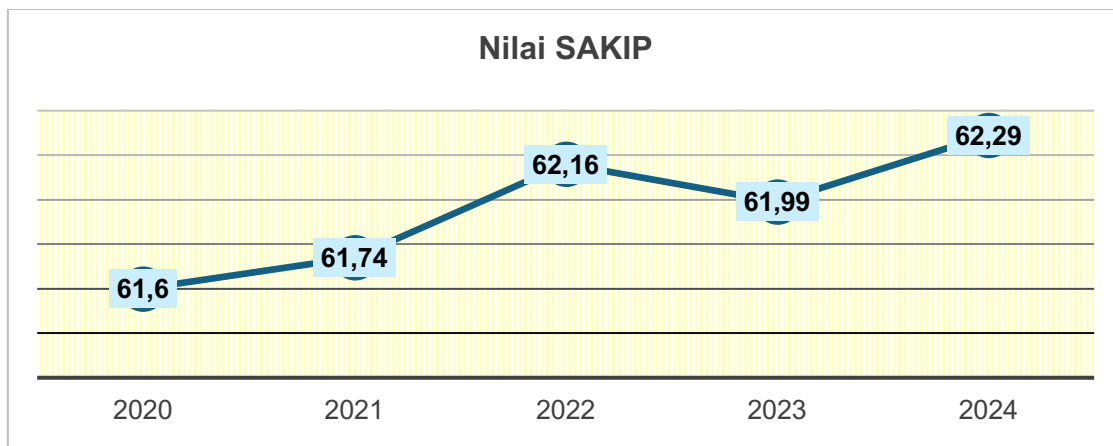


Gambar 2. 54 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2025

Nilai IRB Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat. Selama 5 tahun terakhir, implementasi reformasi birokrasi berjalan dengan penuh dinamika. Pada tahun 2021, nilai IRB tidak dinilai, sementara pada tahun 2022 sampai 2024 telah dinilai dan mengalami peningkatan kinerja dengan predikat baik. Hal ini menandakan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam implementasi reformasi birokrasi untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik semakin optimal. Harapannya dengan adanya peningkatan tersebut menjadi modal utama untuk akselerasi tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kinerja reformasi birokrasi di atas, dipengaruhi oleh berbagai aspek mulai dari aspek akuntabilitas, pelayanan publik, hingga digitalisasi sektor pemerintahan. Adapun aspek akuntabilitas, terutama akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari implementasi SAKIP daerah sebagai berikut.

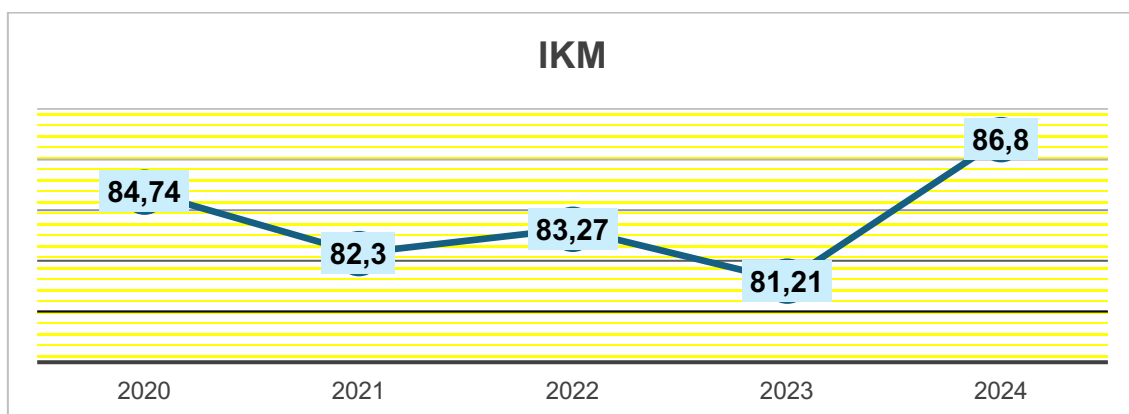


Gambar 2. 55 Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: LHE Kab. Manggarai Barat, 2020-2024

Nilai SAKIP daerah mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2024, SAKIP daerah konsisten dengan predikat B. Meskipun demikian, SAKIP daerah pernah mengalami penurunan pada tahun 2023, namun kembali naik pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sudah berjalan baik, terutama pada unit kerja utama. Akan tetapi, perlu adanya sedikit perbaikan kinerja pada unit kerja karena pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada eselon II dan komitmen dalam penerapan manajemen kinerja belum optimal.

Implementasi akuntabilitas kinerja sejalan dengan kinerja pelayanan publik. Dengan kata lain, peningkatan nilai SAKIP memiliki korelasi positif dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat pada grafik IKM di bawah ini.



Gambar 2. 56 Nilai IKM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

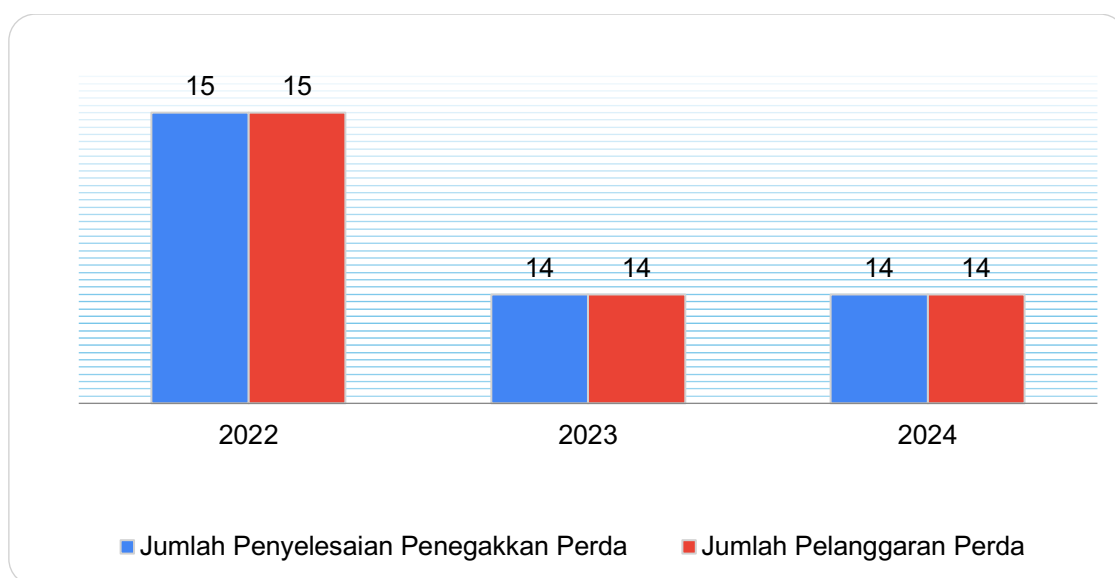
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

IKM Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan, yaitu sebesar 0,67 persen. Peningkatan nilai IKM tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 6 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat semakin optimal yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, jumlah penegakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang dikenai sanksi administrasi berupa Surat Pernyataan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat mengalami sedikit fluktuasi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 15 kasus pelanggaran Perda yang seluruhnya berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 100%. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran mengalami sedikit penurunan menjadi 14 kasus, dengan tingkat penyelesaian yang tetap berada di angka 100%. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana jumlah pelanggaran tetap berada di angka 14 kasus dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.



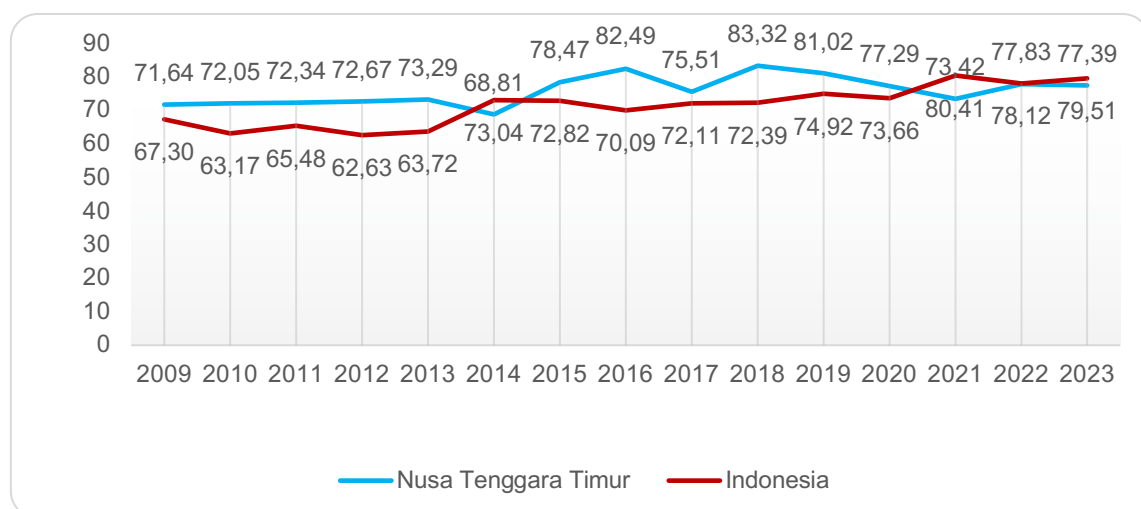
Gambar 2. 57 Persentase Penegakkan Perda Tahun 2022-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat 2025

Secara keseluruhan, tren yang terlihat dari data ini menunjukkan efektivitas dalam penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Barat, di mana setiap pelanggaran yang terjadi selalu direspons dengan tindakan penyelesaian yang setara. Konsistensi dalam tingkat penyelesaian sebesar 100% mengindikasikan bahwa Sat Pol PP Kabupaten Manggarai Barat telah menjalankan tugasnya dengan optimal dalam menegakkan aturan serta memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar. Namun, meskipun jumlah pelanggaran Perda mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 ke 2023, tetap diperlukan upaya preventif dan sosialisasi yang lebih intensif agar angka pelanggaran dapat terus ditekan di tahun-tahun mendatang.

2.1.4.2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam analisis ini, data IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan capaian Indeks Demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat. Perkembangan IDI di Provinsi NTT sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi, di mana pada Tahun 2009, nilai IDI Provinsi NTT sebesar 71,64 yang kemudian meningkat menjadi 82,49 pada Tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 77,39 pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 58 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2023

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur, 2025

Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa kondisi perkembangan dan penerapan demokrasi di Manggarai Barat mengalami fluktuasi tiap tahunnya, mencerminkan bahwa tingginya dinamika demokrasi di wilayah tersebut.

2.1.4.2.3 Indeks Rasa Aman

Berdasarkan data dalam tabel, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, angka ini tercatat sebesar 0,22%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 0,55%, sebelum akhirnya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,35%.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), angka kriminalitas di Manggarai Barat tergolong relatif rendah. Beberapa daerah lain mencatat angka yang lebih tinggi, seperti Sikka yang mencapai 1,89% pada tahun 2021 dan 1,31% pada 2023, serta Malaka yang mengalami lonjakan dari 0,32% pada 2021 menjadi 1,53% pada 2022, sebelum turun ke 0,74% pada 2023.

Secara keseluruhan, tren kejahatan di NTT menunjukkan variasi, dengan beberapa wilayah mengalami penurunan, sementara yang lain mengalami peningkatan. Dalam konteks Manggarai Barat, meskipun terjadi lonjakan pada 2022, angka pada 2023 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa mencerminkan adanya upaya penanggulangan kejahatan atau faktor lain yang memengaruhi keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2. 23 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan (Persen), 2021-2024

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	0.19	0.25	0.22	-
Sumba Timur	0.9	0.88	0.61	0.87
Kupang	0.43	1.37	0.33	0.40
Timor Tengah Selatan	0.93	0.47	0.24	0.57
Timor Tengah Utara	0.69	0.48	0.42	0.44
Belu	0.4	3	0.17	-
Alor	1.39	1.08	1.11	0.62
Lembata	0.68	0.17	0.86	0.62
Flores Timur	0.42	0.17	0.44	-
Sikka	1.89	0.83	1.31	1.34
Ende	0.77	0.55	0.6	-

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Ngada	0.59	0.37	0.41	0.57
Manggarai	0.63	0.27	0.44	0.32
Rote Ndao	0.63	0.07	0.1	0.23
Manggarai Barat	0.22	0.55	0.35	-
Sumba Tengah	0.90	0.08	0.67	0,71
Sumba Barat Daya	0.9	0.08	0.67	0.38
Nagekeo	1.43	1.11	0.35	-
Manggarai Timur	0.45	0.38	0.17	-
Sabu Raijua	0.16	0.02	0.2	0.39
Malaka	0.32	1.53	0.74	-
Kota Kupang	0.09	0.35	0.18	-
Nusa Tenggara Timur	0.84	0.5	0.39	0.39

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2025

*Data terakhir diperbarui: 15 Juli 2025

Berdasarkan data jumlah tindak pidana yang dilaporkan di Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2022-2023, terdapat penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 273 kasus tindak pidana yang dilaporkan, sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 223 kasus. Penurunan ini mencerminkan adanya kemungkinan peningkatan efektivitas penegakan hukum, penguatan keamanan, atau faktor lain yang berkontribusi pada menurunnya angka kejahatan di wilayah tersebut.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah tindak pidana yang dilaporkan di Manggarai Barat tergolong menengah. Beberapa wilayah mencatat jumlah kasus yang lebih tinggi, seperti Timor Tengah Selatan dengan 805 kasus pada 2022 dan meningkat menjadi 874 kasus pada 2023. Demikian pula, Kota Kupang mengalami sedikit penurunan dari 603 kasus pada 2022 menjadi 442 kasus pada 2023.

Tabel 2. 24 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan, 2022-2023

Wilayah	2021	2022	2023
Sumba Barat	313	389	452
Sumba Timur	173	411	443
Kupang	401	603	442
Timor Tengah Selatan	576	805	874
Timor Tengah Utara	452	537	563
Belu	371	517	500
Alor	495	608	734
Lembata	237	290	276

Wilayah	2021	2022	2023
Flores Timur	442	338	461
Sikka	190	315	310
Ende	387	349	338
Ngada	165	170	223
Manggarai	248	312	274
Rote Ndao	376	408	390
Manggarai Barat	208	273	223
Sumba Tengah	-	-	-
Sumba Barat Daya	238	250	280
Nagekeo	131	113	104
Manggarai Timur	137	202	180
Sabu Raijua	80	171	167
Malaka	242	134	335
Kota Kupang	1.472	1.691	1.171
Nusa Tenggara Timur	7.735	9.223	8.740

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2024

Secara keseluruhan, jumlah tindak pidana yang dilaporkan di Provinsi NTT mengalami penurunan dari 1.691 kasus pada 2022 menjadi 1.171 kasus pada 2023. Tren ini menunjukkan adanya potensi peningkatan keamanan di beberapa wilayah, termasuk Manggarai Barat, meskipun beberapa daerah masih menunjukkan peningkatan angka kejahatan. Hal ini bisa menjadi dasar evaluasi lebih lanjut bagi pihak berwenang dalam memperkuat strategi pencegahan dan penindakan kejahatan di provinsi ini.

2.1.4.2.4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, risiko penduduk terkena tindak pidana di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 82 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yang sebesar 103 per 100.000 penduduk.

Tabel 2. 25 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	185	210	163	295
Sumba Timur	69	72	157	173
Kupang	102	109	162	117
Timor Tengah Selatan	78	119	167	184
Timor Tengah Utara	188	174	207	207
Belu	108	95	227	216
Alor	88	234	284	331
Lembata	137	145	213	195
Flores Timur	157	160	122	159
Sikka	64	52	86	92
Ende	170	143	126	121
Ngada	97	100	103	129
Manggarai	64	76	96	83
Rote Ndao	227	218	56	259
Manggarai Barat	86	77	103	82
Sumba Tengah	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	67	37	71	86
Nagekeo	57	76	84	62
Manggarai Timur	41	70	46	61
Sabu Raijua	75	99	181	178
Malaka	55	57	68	175
Kota Kupang	611	438	389	250
Nusa Tenggara Timur	-	-	169	176

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2024

Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), angka ini lebih rendah dari rata-rata provinsi yang mencapai 176 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa risiko tindak pidana di Manggarai Barat berada di bawah rata-rata provinsi, meskipun tetap memerlukan perhatian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

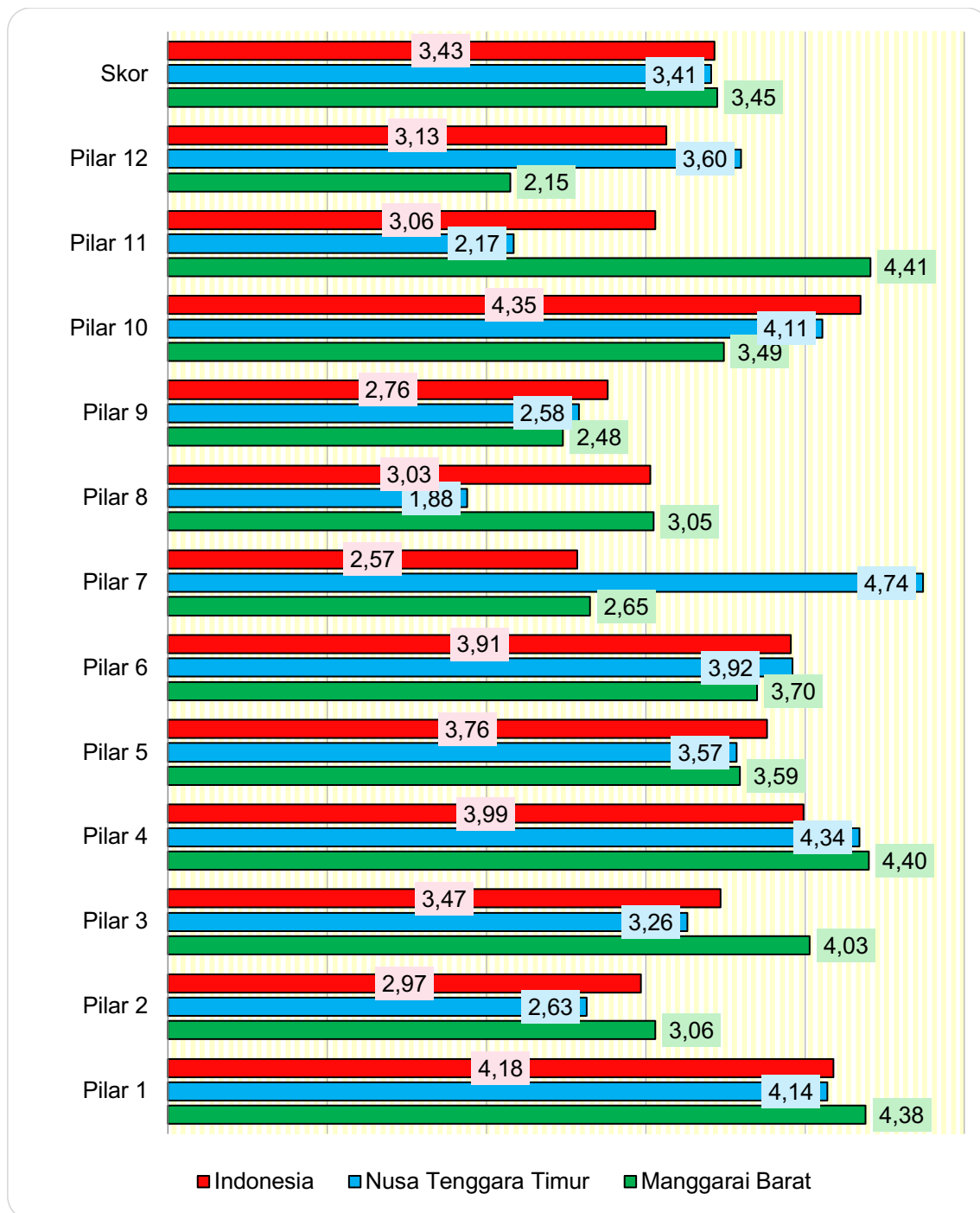
2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur daya saing daerah secara komprehensif, sehingga dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD 2022 mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI)* 2019 dan *World Economic*

Forum (WEF) yang telah disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari 4 komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar yaitu: 1) institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan, 2) infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian, 3) adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0, dan 4) stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar yaitu: 1) kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup, 2) keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar yaitu: 1) pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi, 2) pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja, 3) sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian, 4) ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek. Sementara itu, komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar yaitu 1) dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha, 2) perluasan lapangan kerja dan kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Gambaran mengenai IDSD Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan Indonesia tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 59 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2024

Sumber: Kajian Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Keterangan:

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 9	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Secara umum, skor IDSD Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan variasi dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Pada Pilar 1 (Institusi), Kabupaten Manggarai Barat mencatat skor sebesar 4,38, yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTT dengan 4,14, dan juga sedikit lebih unggul dari Indonesia yang memiliki skor 4,18. Pilar ini mencerminkan sejauh mana institusi di daerah mampu menciptakan iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan yang kondusif bagi daya saing daerah.

Selain Pilar 1, dari seluruh komponen IDSD, terdapat lima pilar lain yang memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi NTT maupun Indonesia, yaitu Pilar 2 (Infrastruktur); Pilar 3 (Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK); Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro); Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja); dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis). Pada Pilar 3 misalnya, Kabupaten Manggarai Barat mencatat nilai 4,03, yang lebih tinggi dari skor nasional sebesar 3,47, Provinsi NTT yang mencatat 3,26. Sementara itu, pada Pilar 4, yang mencerminkan stabilitas ekonomi makro daerah, Kabupaten Manggarai Barat memiliki skor 4,40, lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTT dengan 4,34 dan Indonesia dengan 3,99.

Selain itu, perolehan nilai Pilar 5 (Kesehatan) di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 3,59 menunjukkan bahwa indikator kesehatan di daerah ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi NTT yang memperoleh 3,57, meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 3,76. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan hidup masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Meskipun terdapat keunggulan dalam beberapa pilar, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya, pada Pilar 7 (Pasar Produk), Kabupaten Manggarai Barat hanya mencatat skor 2,65, lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT yang mencapai 4,74. Pilar ini mencerminkan dinamika perkembangan kemajuan usaha mikro dan sektor jasa di daerah.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan pada beberapa pilar, capaian IDSD Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan potensi daya saing yang cukup baik di beberapa aspek strategis, terutama dalam aspek institusi, stabilitas ekonomi makro, adopsi teknologi informasi, serta dinamika bisnis.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama lima tahun terakhir. IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikut capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021–2024.

Tabel 2. 26 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1.1 Pendidikan						
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%			60,95	63,72
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%			97,48	97,77
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%			2,79	5,84
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai			47,28%	52,35
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai			33,89%	47,69
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai			44,71%	61,05
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai			30,92%	55,03
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			42	59
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%			74,35	87,5
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai			70,82	68,90
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai			68,75	70,05
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai			69,18	74,30
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai			67,18	70,65
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai			57,29	61,40
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai			57,45	68,90

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.2 Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	7	8	10	2
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,1	15,9	8,2	36,2
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	72,4	66,8	67,4	64,1
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	94,1	72,3	98,5	75,4
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	98,1	69,4	96,4	75,3
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	51,9	87,0	77,3	75,1
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	49,6	91,8	88,4	92,9
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	79,8	81,9	74,3	70,8
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	71,4	49,1	75,7	88,1
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	72,1	99,7	96,2	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	71,0	97,0	98,6	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	100	98,3	100	97,8
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	100	100	53,1	71,1
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	Persen	58,2	67,3	78,5	73,7
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	30,46	31,45	31,74	34,53
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	15,6	15,85	16,85	17,81
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	52,87	53,50	53,64	55,35
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	43,63	44,15	45,81	46,59

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	72,88	77	33,43	35,25
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	74,25	75	71,43	72,29
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	N/A	50,88	62,27	62,27
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	55,04	51,20	52,02	47,77
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	0	88	0	98
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	24
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	10	10	10	10
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	0	0	2	1
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	24	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	%	N/A	0.01	0,19	0,25
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	56,15	56,41	57,26	57,44
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	33	33,37	35,15	37,71
1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%		80	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%		100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	%				25
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%				100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%				100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%				0
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	75	100	37,47	100
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	50	100	83,33	0,79
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	75,96	71,98	85,71	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	11,11	11,11	0	0
11	Persentase penanganan pra bencana	%	62,50	50,36	60,40	0,50
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	75,96	71,98	83,33	50
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	50	50	50	50
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%				
1.6 Sosial						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,02	0,04	0,13	0,20
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	0	0,06	0,28

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,003	0,006	0,11	0,06
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	0	0	0
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	59,89
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	49,57	52,85	58,49	55,92
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	43,83	42,08	52,77	50,21
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	12	12	12	12
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2.1 Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	69,23	100	38,10

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	11,98	24,75	29,90	5,98
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	0	0	0	25,79
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	31,73	35,71	34,44	24,19
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	75,62	28,44	40,43	27,41
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	87,11	87,82	88,43	89,04
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,481	0,499	0,523	0,461
3	Persentase ARG Daerah	%	N/A	N/A	100	0,12
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
2.3 Pangan						
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	7,91	0	0	0
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	79,70	76,40	74,80	69,4
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	42,6	64,5	64,5	23,08
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	100	100	100	100
2.4 Pertanian						
1	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	100	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	100%	100%	0	100%
3	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	75%	38%
4	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%				N/A
5	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%				N/A
2.5 Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	62,19	70,47	70,81	74,89
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		0	0	0	26,1
	Kebijakan Pengelolaan Sampah	Dokumen	1	2	2	-
	Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan Pengolahan Sampah)	Unit	25	33	30	30
	Anggaran Pengelolaan Sampah	Rupiah	-	8.054.394.192	9.569.231.500	8.827.592.000
	Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah	Kelompok	-	-	2	2
	Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen dari IKLH	Indeks	-	52,11	51,11	57,78
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%				N/A
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%		88,91	90,27	90,52
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%		34,11	38,06	37,89
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	-			3,4
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase peningkatan status sistem	%	0	0	0	0
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	3,66	3,0	5,49	9,15
3	Persentase Fasilitas Kerja sama Desa	%	1	9	11	18
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	3,2	3,2	3,2	3,2
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	5	5	5	5,6
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%		3,18	2,72	2,70
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%		63,49	72,04	70,22
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%		17,59	11,91	7,92
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun		25,21	26,36	27,91
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100		-	-	59,2
2.9 Perhubungan						
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0.17	0.73	0.74	0.75
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	45	37.17	43	60
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	0	0	0	0
2.10 Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	90,2	80,5	97,6	97,6
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	4,65	4,65	4,65	25
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	N/A	N/A	N/A	40

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	N/A	N/A	N/A	13,13
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2,31	2,07	3,82	2,55
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	N/A	10,08	8,67	30,05
2.12 Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-67	46	113	-31
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	101	40	112	89
2.13 Kepemudaan dan Olahraga						
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ <i>training</i> dan memperoleh sertifikat	%			66,81	67,81
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%			60,30	62,25
2.14 Statistik						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	N/A	N/A	1,61	2,43
2.15 Persandian						
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	N/A	N/A	31,15	48,25
2.16 Kebudayaan						
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	100	100	100	100
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	0	0	0	0
2.17 Perpustakaan						
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	N/A	N/A	N/A	65,94
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	N/A	23,28	35,53	53,42
2.18 Kearsipan						
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	4,048
3. Urusan Pilihan						
3.1 Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.150,52	6.700,00	7.047,61	8.308
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	119.415	91,71	20,757	4,14
3.2 Pariwisata						
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0,79	3,01	2,34	2,47

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-82,38	1779,1	217,17	19,21
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0	18,50%	0	33,23
3.3 Pertanian						
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%		4,45	30,33	- 17,19
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%		-33	-3	16
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%		1,94	- 9,1	0,8
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%		(8,7)	(92,3)	(745,7)
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari <i>surveillance</i> penyakit dari 5 PHMS)	%	98	88	85	96
3.4 Perdagangan						
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	15	18	23	33,6
3.5 Perindustrian						
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:	%				
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		-4.82	6,84	12,54	10,37
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota		0,421	0,432	0,464	0,488
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		2.296	3.789	4.328	5.2
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		17.687.500	-	-	-
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota		20.752.400	28.373.210	14.203.540	17.890.552
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	14,1	9,3	1,4	1,4

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	N/A	N/A	N/A	22,12
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	N/A	N/A	N/A	40,48
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
4.1 Perencanaan						
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100
4.2 Keuangan						
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,21	15,20	16,98	19,74
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	7,41	7,14	18,88	10,39
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	N/A	N/A	94,22	72,50
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	N/A	N/A	8,89	7,15
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	N/A	N/A	N/A	89,62
6	Persentase Penurunan SILPA	%	3,28	0,82	416,80	-49,21
4.3 Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	65	68.35	72.26	73.45
4.4 Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	0	0	15,38	23,08
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0:00	0:00	10:10	10:10
5. Fungsi Pengawasan						
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	2	2	3	3
			(skor : 2,77)	(skor 2,77)	(skor 3,059)	(skor 3,086)
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	2	2	3	3
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	N/A	Level 1	Level 2	Level 2
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	71,37	75,17	80,95	83,19
6. Fungsi Pengadaan						
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	100	100	100	100
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	0	0	0	3
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	0	1	2	3
7. Hubungan dengan Perwakilan Daerah						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100%	100%	100%	100%
8. Pelayanan Publik						
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	56,93	70,5	71,27	89,62

Dalam merumuskan perencanaan ke depan, evaluasi atas pencapaian tahun-tahun ke belakang menjadi diperlukan. Hasil evaluasi atas pencapaian perencanaan periode sebelumnya bermanfaat untuk memastikan perencanaan yang dilakukan ke depan kontekstual dan tepat dengan kondisi yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari implementasi kebijakan ke depan. Hasil evaluasi atas capaian IKK Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2024 menunjukkan capaian yang beragam. Beberapa capaian indikator yang belum optimal menggambarkan beberapa intervensi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang belum efektif dalam mencapai tujuan kinerja yang diharapkan. Oleh karenanya, diperlukan rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan dalam perencanaan jangka menengah kali ini.

Gambaran lebih rinci mengenai capaian yang beragam tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang menyajikan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2022-2024.

Tabel 2. 27 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024

No	IKU	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Nilai	60	58,2	97,00	62,5	61,6	98,6	65,0	63,95	98,4
2	Indeks Gini	Persen	0,34	0,34	100,00	0,332	0,306	108,5	0,324	0,324	100,0
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,42	64,92	100,78	65,34	67,84	103,8	66,26	68,68	103,7
4	Prevalensi Stunting	Persen	17,06	15,9	106,8	15,22	8,2	146,1	14,53	11,8	118,8
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	67,24	59,06	87,83	61,56	57,28	93,0	64,06	57,28	89,4
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6074	0,5922	97,50	0,6324	0,6133	97,0	0,6574	0,6133	93,3
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,76	4,12	71,53	5,04	4,77	94,6	5,31	4,93	92,8
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,18	17,15	94,0	16,90	16,82	100,5	16,64	16,74	99,4
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,51	4,91	60,1	4,80	4,42	107,9	4,69	3,47	126,0
10	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	13,4	14,72	109,85	14,2	15,70	110,6	15	16,62	110,8
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,69	70,47	108,93	68,66	70,81	103,1	72,63	74,9	103,1
12	Indeks Risiko Bencana	Nilai	161,70	151,62	106,2	151,12	138,93	108,1	150,62	129,6	114,0
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat	65	53,79	82,75	68	64,59	95,0	CC (58,00)	B (69,19)	119,0
14	Kontribusi PAD	Juta Rp.	339.650	190.742	56,16	251.517	248.869	98,9	333.615	273.711	82,0
15	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	0	0	0	64,77	0	0	67,41	85,9	127,4

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Manggarai Barat periode 2022-2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, dengan beberapa keberhasilan yang melampaui target serta sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus.

Di satu sisi, beberapa indikator konsisten menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Sektor pembangunan manusia, yang tecermin dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB per Kapita, secara konsisten melampaui target setiap tahunnya. Keberhasilan juga terlihat jelas pada upaya penanganan masalah sosial dan lingkungan, seperti penurunan Prevalensi Stunting, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Risiko Bencana yang realisasinya lebih baik dari yang ditargetkan.

Sementara itu, beberapa indikator lain menunjukkan kinerja yang stabil dan mendekati target, seperti Tingkat Kemiskinan dan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan di sektor-sektor tersebut. Namun, terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi fokus utama untuk perbaikan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten belum berhasil mencapai target dalam tiga tahun terakhir. Khususnya Kontribusi PAD, capaiannya masih jauh dari yang diharapkan, yang menandakan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Satu catatan menarik adalah Indeks Infrastruktur Daerah. Setelah tidak menunjukkan realisasi pada tahun 2022 dan 2023, indikator ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 127,4%. Hal ini mengindikasikan adanya akselerasi atau fokus baru pada pembangunan infrastruktur di tahun tersebut. Dinamika capaian ini menjadi basis penting untuk merumuskan prioritas dan strategi pembangunan yang lebih tajam pada periode perencanaan selanjutnya.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029. Selain memastikan efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, pengelolaan ini juga harus mempertimbangkan stabilitas serta keberlanjutan fiskal daerah. Kondisi fiskal mencerminkan kesehatan keuangan daerah, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, serta menjadi landasan utama dalam mendukung program pembangunan selama periode RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi Kabupaten Manggarai Barat

dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran serta mengelola utang secara bijaksana demi keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keuangan daerah berperan penting dalam mendukung pemerintahan, pelayanan publik, serta kesinambungan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan keuangan dilakukan secara terintegrasi dalam APBD untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pengelolaan ini harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Bab ini menyajikan hasil analisis data realisasi APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030 sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan keuangan daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat periode 2020–2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk proyeksi keuangan daerah. Upaya untuk

mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu, yang sedang berjalan, maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 28 Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.340.732.323,62	154.767.294.151,76	190.932.174.516,58	249.055.576.180,94	273.711.972.882,45
1.2	Pendapatan Transfer	946.692.676.409,21	868.022.860.854,00	1.004.830.794.004,00	1.202.546.951.076,00	1.098.467.855.685,09
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	70.026.242.535,34	66.714.193.679,01	59.889.695.012,00	15.244.655.857,00	14.455.143.828,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.116.059.651.268,17	1.089.504.348.684,77	1.255.652.663.532,58	1.466.847.183.113,94	1.386.634.972.395,54
2.	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	734.827.978.141,51	720.906.686.316,24	789.416.323.826,32	760.592.248.363,77	947.895.943.574,68
2.2	Belanja Modal	174.969.249.200,00	162.697.188.838,00	493.263.439.543,00	415.142.121.105,00	214.515.889.849,00
2.3	Belanja Tak Terduga	30.479.088.896,00	3.890.479.982,00	3.173.879.600,00	2.909.721.826,00	1.347.141.302,00
2.4	Belanja Transfer	210.815.854.117,00	211.748.477.416,00	208.426.596.000,00	209.671.636.650,00	214.911.480.376,00
	JUMLAH BELANJA	1.151.092.170.354,51	1.099.242.832.552,24	1.494.280.238.969,32	1.388.315.727.944,77	1.378.670.455.101,68
	Surplus/(Defisit)	(35.032.519.086,34)	(9.738.483.867,47)	(238.627.575.436,74)	78.531.455.169,18	7.964.517.293,86
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	77.798.534.633,36	37.766.015.547,02	256.560.815.271,55	12.933.269.554,81	66.855.292.939,98
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00	5.000.000.000,00	24.609.431.784,00	40.861.891.996,00
	PEMBIAYAAN NETTO	72.798.534.633,36	18.766.015.547,02	251.560.815.271,55	(11.676.162.229,19)	25.993.400.943,98
	SILPA	37.766.015.547,02	9.027.531.679,55	12.933.239.834,81	66.855.292.939,99	33.957.918.237,84

Sumber: Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024

Pada sisi pendapatan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang naik dari Rp99,34 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp273,71 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian fiskal daerah, meskipun pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Pendapatan transfer mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dari Rp946,69 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,09 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis dari Rp70,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14,45 miliar pada tahun 2024.

Di sisi belanja daerah, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada Belanja Operasi, yang meningkat dari Rp734,83 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp947,89 miliar pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam penyelenggaraan layanan publik serta kebutuhan operasional pemerintah daerah. Belanja Modal mengalami lonjakan pada tahun 2022 mencapai Rp493,26 miliar, tetapi menurun kembali hingga Rp214,51 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan selesainya beberapa proyek infrastruktur atau adanya perubahan kebijakan belanja modal. Belanja Tak Terduga mengalami penurunan drastis, yang kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana atau kondisi darurat lainnya.

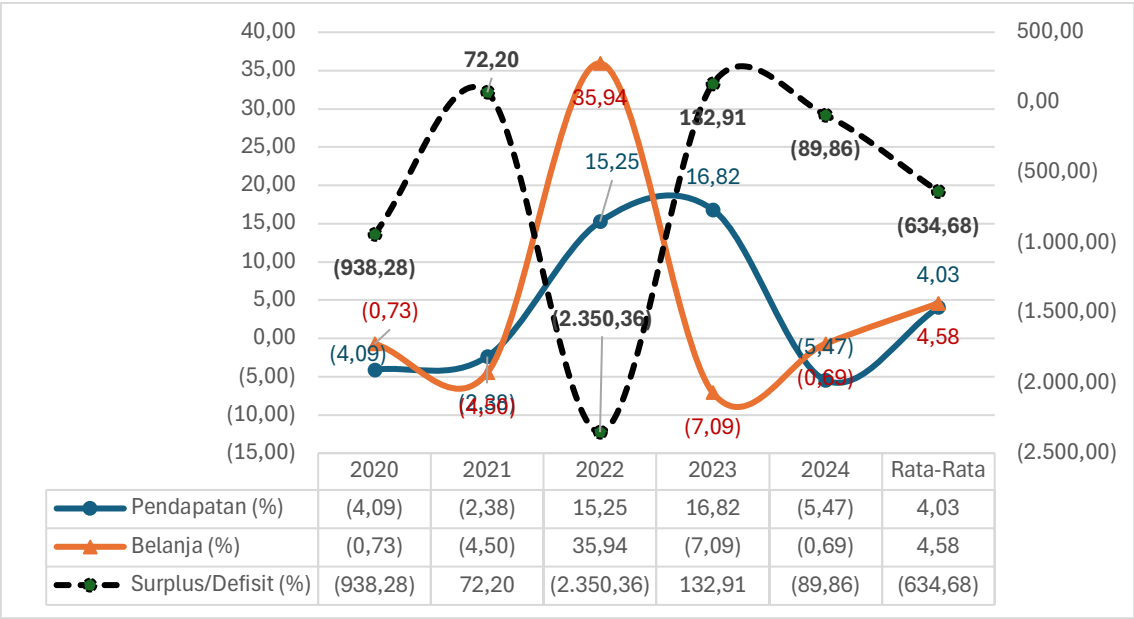
Dari sisi surplus atau defisit anggaran, terlihat bahwa Kabupaten Manggarai Barat mengalami defisit yang cukup besar pada tahun 2022 sebesar Rp238,63 miliar, meskipun kondisi ini berangsur membaik hingga mengalami surplus Rp7,96 miliar pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengendalian belanja.

Dalam aspek pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp256,56 miliar, yang merupakan hasil dari pinjaman daerah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pembiayaan kembali menurun hingga Rp66,85 miliar pada tahun 2024. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan meningkat signifikan dari Rp5 miliar pada tahun

2020 menjadi Rp40,86 miliar pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya kewajiban pembayaran utang atau investasi jangka panjang oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang cukup dinamis dengan peningkatan PAD sebagai indikator positif kemandirian fiskal. Namun, fluktuasi dalam belanja modal dan pembiayaan menunjukkan perlunya strategi pengelolaan anggaran yang lebih optimal untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah guna mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan, belanja, serta surplus atau defisit anggaran.



Gambar 2. 60 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Pada sisi pendapatan, pertumbuhan menunjukkan tren yang tidak stabil. Pada tahun 2020 dan 2021, pendapatan mengalami kontraksi masing-masing sebesar -4,09 persen dan -2,38 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 15,25

persen dan 16,82 persen. Sayangnya, pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan sebesar -5,47 persen. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama periode tersebut adalah 4,03 persen, yang mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga kestabilan pendapatan daerah.

Dari sisi belanja, pola pertumbuhan juga menunjukkan ketidakstabilan. Pada tahun 2020 dan 2021, belanja daerah mengalami penurunan sebesar -0,73 persen dan -4,50 persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat tinggi sebesar 35,94 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur atau belanja modal. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, kembali terjadi kontraksi belanja masing-masing sebesar -7,09 persen dan -0,69 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan belanja dalam lima tahun terakhir berada pada angka 4,58 persen, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan.

Yang paling mencolok dalam analisis ini adalah fluktuasi yang sangat ekstrem pada surplus atau defisit anggaran. Pada tahun 2020, defisit mengalami lonjakan drastis sebesar -938,28 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun 2021 terjadi perbaikan dengan surplus sebesar 72,20 persen, kondisi kembali memburuk pada tahun 2022 dengan defisit yang mencapai -2.350,36 persen. Pada tahun 2023, terjadi perbaikan yang signifikan dengan surplus sebesar 132,91 persen, namun kembali mengalami kontraksi pada tahun 2024 dengan defisit sebesar -89,86 persen. Rata-rata pertumbuhan surplus atau defisit dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka negatif yang sangat besar, yaitu -634,68 persen, menandakan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, analisis pertumbuhan APBD Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan yang tidak stabil mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Sementara itu, pola belanja yang fluktuatif menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran harus lebih disiplin dan berorientasi pada efisiensi, terutama dalam

mengendalikan belanja yang tidak produktif. Ketidakseimbangan yang signifikan dalam surplus atau defisit anggaran mengindikasikan bahwa perlu adanya perencanaan keuangan yang lebih matang agar keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Secara umum, pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua, pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, termasuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang mencakup pendapatan hibah dan penerimaan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rincian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2020–2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 29 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.340.732.323,62	154.767.294.151,76	190.932.174.516,58	249.055.576.180,94	273.711.972.882,45
1.1.1	Pajak Daerah	62.467.994.294,60	82.144.344.494,16	141.461.757.403,65	188.607.506.989,13	215.536.013.903,00
1.1.2	Retribusi Daerah	15.756.120.455,00	51.310.800.176,00	41.417.841.264,00	46.577.771.520,97	44.552.912.873,38
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.809.587.236,35	4.012.182.992,00	2.720.173.212,00	5.281.029.507,00	2.457.403.444,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	17.307.030.337,67	17.299.966.489,60	5.332.402.636,93	8.589.268.163,84	11.165.642.662,07
1.2	Pendapatan Transfer	946.692.676.409,21	868.022.860.854,00	1.004.830.794.004,00	1.202.546.951.076,00	1.098.467.855.685,09
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	923.444.164.622,00	848.880.452.749,00	980.265.861.187,00	1.169.472.616.821,00	1.061.970.503.631,09
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.503.077.638,00	11.285.284.923,00	9.051.047.982,00	4.803.596.144,00	5.822.295.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	892.183.658,00	1.978.080.247,00	2.126.859.069,00	4.328.087.000,00	3.835.027.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	498.893.859.000,00	495.133.465.000,00	495.899.733.992,00	533.243.373.000,00	587.555.198.679,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.938.198.426,00	86.315.187.368,00	257.974.030.469,00	340.856.707.562,00	182.786.139.163,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	86.728.739.900,00	82.992.058.211,00	69.373.213.675,00	134.847.128.115,00	123.565.374.789,09
1.2.1.6	Dana Insentif Daerah	50.985.991.000,00	21.674.262.000,00	-	5.799.334.000,00	11.904.277.000,00
1.2.1.7	Dana Desa	149.502.115.000,00	149.502.115.000,00	145.840.976.000,00	145.594.391.000,00	146.502.192.000,00
1.2.2	Transfer antar – daerah	23.248.511.787,21	19.142.408.105,00	24.564.932.817,00	33.074.334.255,00	36.497.352.054,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	23.248.511.787,21	19.142.408.105,00	24.564.932.817,00	33.074.334.255,00	36.497.352.054,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan					
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	70.026.242.535,34	66.714.193.679,01	59.889.695.012,00	15.244.655.857,00	14.455.143.828,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	70.026.242.535,34	27.742.144.046,00	14.536.876.920,00	839.276.502,00	-
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	38.972.049.633,01	45.352.818.092,00	14.405.379.355,00	14.455.143.828,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.116.059.651.268,17	1.089.504.348.684,77	1.255.652.663.532,58	1.466.847.183.113,94	1.386.634.972.395,54

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024

Berdasarkan data realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp99,34 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp273,71 miliar pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen Pajak Daerah, yang naik dari Rp62,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp215,53 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD semakin meningkat, terutama dalam pemungutan pajak daerah.

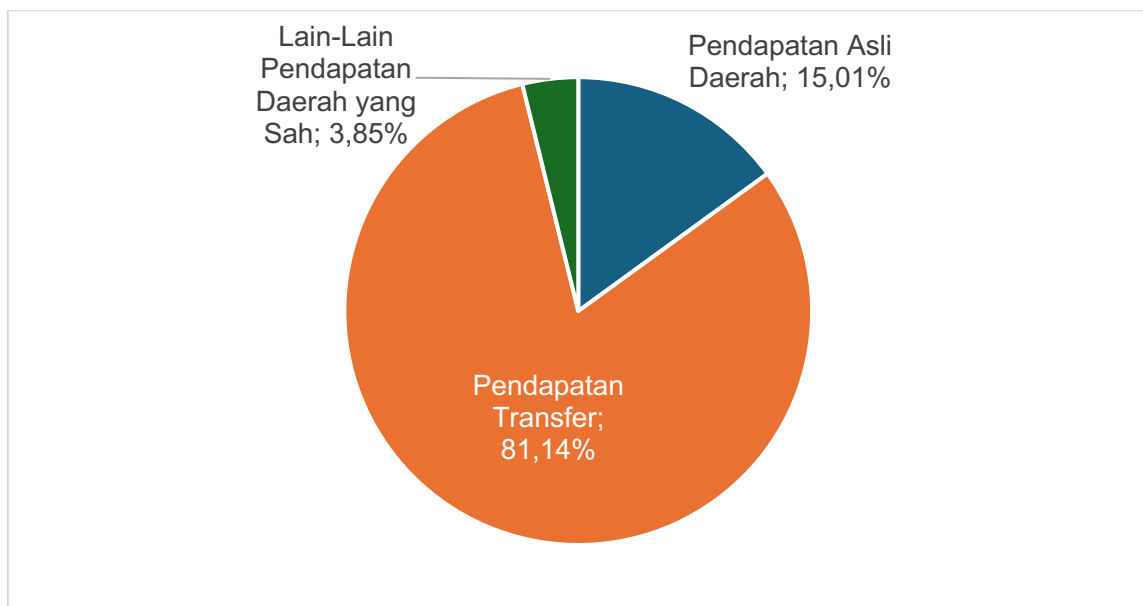
Namun, komponen Retribusi Daerah mengalami volatilitas, dengan kenaikan tajam pada tahun 2021 sebesar Rp51,31 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung fluktuatif, dengan angka terendah pada tahun 2024 sebesar Rp2,45 miliar. Lain-lain PAD yang sah juga mengalami tren penurunan sejak tahun 2022, menunjukkan adanya potensi pengurangan pendapatan dari sumber-sumber yang tidak langsung terkait pajak dan retribusi.

Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Manggarai Barat, dengan porsi terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat. Transfer ini mengalami sedikit penurunan dari Rp946,69 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,09 triliun pada tahun 2024. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap menjadi penyumbang utama dalam kategori ini, dengan kenaikan DAU dari Rp498,89 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp587,55 miliar pada tahun 2024. Sebaliknya, DAK mengalami volatilitas dengan peningkatan tajam pada tahun 2022 hingga 2023, sebelum kembali menurun pada tahun 2024.

Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah menunjukkan tren penurunan signifikan, dari Rp70,02 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14,45 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan hibah yang pada tahun 2024 tidak lagi berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, total pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp1,11 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,38 triliun pada tahun 2024. Namun, terdapat dinamika dalam komposisi pendapatan, di mana peningkatan PAD mengalami tren yang positif, sementara pendapatan transfer mengalami fluktuasi, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah mengalami penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih optimal dalam mengelola sumber PAD, terutama dalam memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data proporsi sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PAD hanya berkontribusi sebesar 8,90 persen terhadap total pendapatan daerah, namun mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 19,74 persen pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi PAD dalam lima tahun terakhir adalah 15,01 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Gambar 2. 61 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

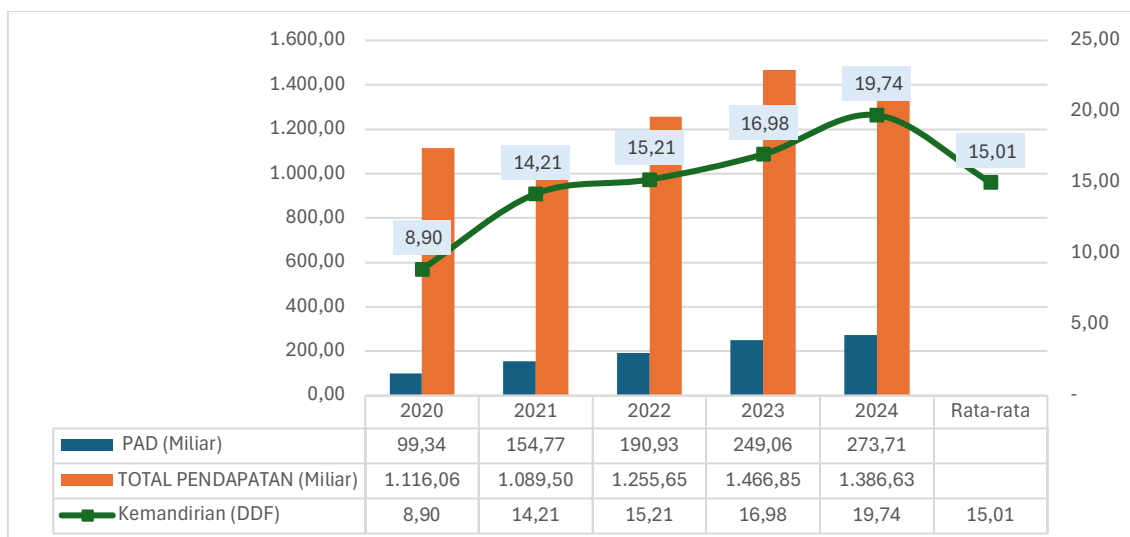
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2020, pendapatan transfer menyumbang sebesar 84,82 persen dari total pendapatan, kemudian mengalami sedikit fluktuasi dalam rentang 79,22 persen hingga 81,98 persen pada tahun-tahun berikutnya. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer selama periode 2020–2024 adalah 81,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Di sisi lain, kontribusi dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2020, komponen ini berkontribusi sebesar 6,27 persen, namun terus menurun hingga hanya menyumbang 1,04 persen pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata kontribusi dari komponen ini dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 3,85 persen, yang mengindikasikan adanya keterbatasan sumber pendapatan lain di luar PAD dan pendapatan transfer.

Secara keseluruhan, meskipun PAD menunjukkan peningkatan, ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta inovasi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang ($DDF \leq 10,00$); (2) Kurang ($10,00 < DDF \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < DDF \leq 30,00$); (4) Cukup Baik ($30,00 < DDF \leq 40,00$); (5) Baik ($40,00 < DDF \leq 50,00$); dan (6) Sangat Baik ($DDF > 50,00$). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024.



Gambar 2. 62 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

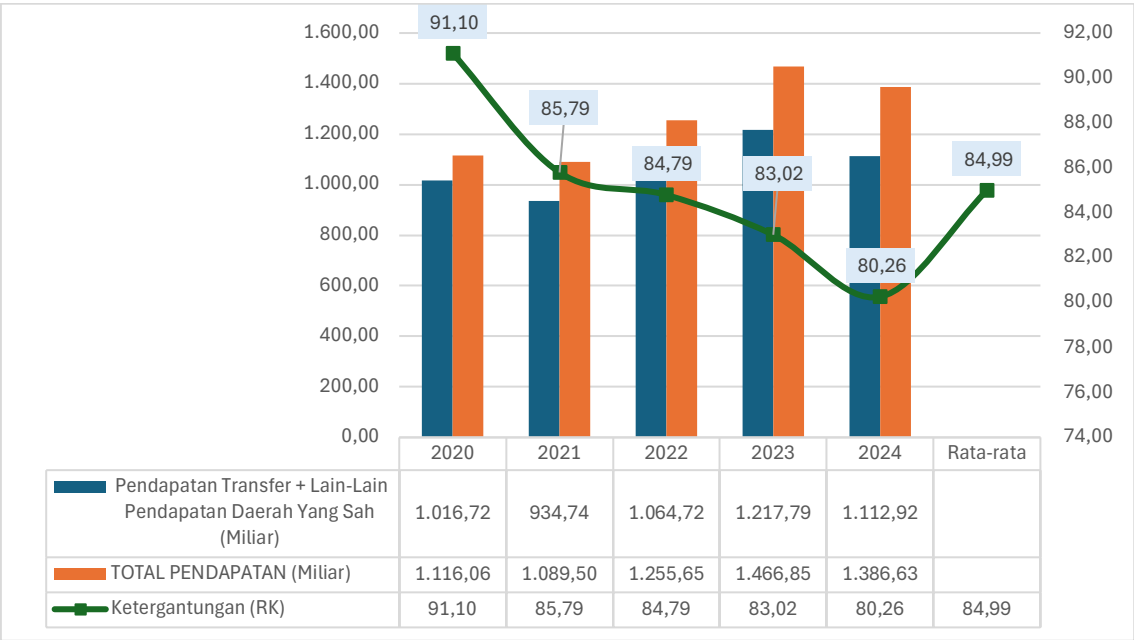
Berdasarkan data rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah atau yang disebut sebagai Derajat Kemandirian Fiskal (DDF) mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, DDF tercatat sebesar 8,90, yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022, nilai DDF meningkat menjadi 14,21 dan 15,21, yang masuk dalam kategori kurang. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, dengan DDF masing-masing sebesar 16,98 dan 19,74, yang masih berada dalam kategori kurang.

Jika dilihat secara rata-rata selama periode 2020–2024, DDF Kabupaten Manggarai Barat berada pada angka 15,01, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar-daerah.

Meskipun terdapat peningkatan dalam proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu terus mengoptimalkan potensi PAD agar dapat mencapai kategori sedang (DDF di atas 20). Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang lebih efektif, serta

diversifikasi sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat berkurang dan kemandirian fiskal daerah dapat meningkat secara lebih signifikan.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah ($RK \leq 10,00$); (2) Rendah ($10,00 < RK \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < RK \leq 30,00$); (4) Cukup Tinggi ($30,00 < RK \leq 40,00$); (5) Tinggi ($40,00 < RK \leq 50,00$); dan (6) Sangat Tinggi ($RK > 50,00$). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024.



Gambar 2. 63 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, RK tercatat sebesar 91,10, kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 80,26 pada tahun 2024. Secara rata-rata, RK dalam periode 2020-2024 berada pada angka 84,99.

Jika mengacu pada klasifikasi tingkat ketergantungan fiskal, RK Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kategori Sangat Tinggi ($RK > 50,00$) sepanjang periode yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta sumber lain di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun terdapat tren penurunan RK, yang mengindikasikan sedikit peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah, angka ketergantungan yang masih tinggi mengindikasikan bahwa Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki kapasitas fiskal yang optimal untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri.

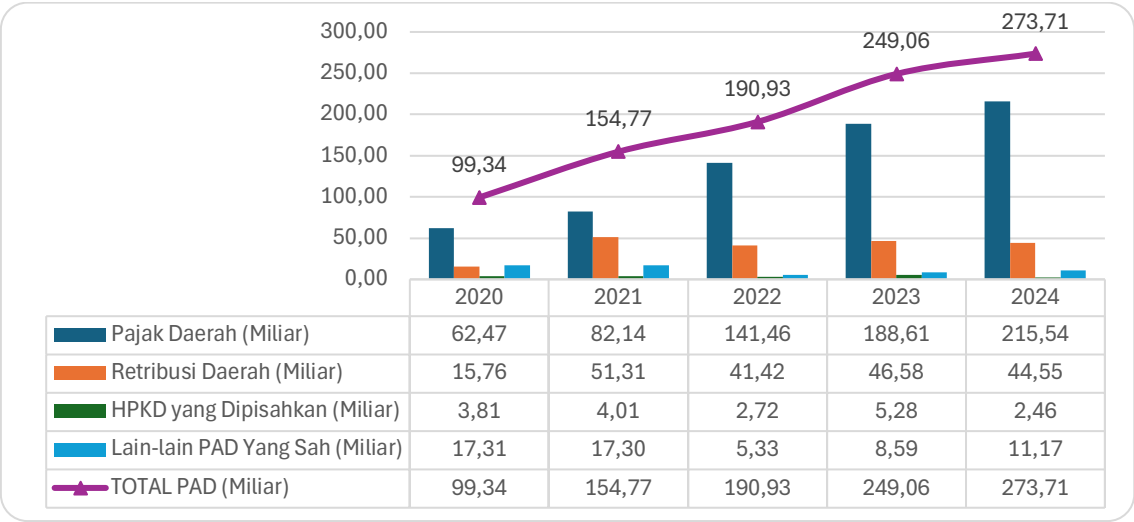
Penurunan RK dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan meningkatnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan lokal, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, untuk mencapai tingkat ketergantungan fiskal yang lebih rendah, diperlukan strategi penguatan PAD yang lebih optimal, termasuk diversifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan perbaikan dalam hal ketergantungan fiskal, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan sumber pendapatan eksternal lainnya.

2.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat yang meningkat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Untuk memahami realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah, berikut disajikan data realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 64 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

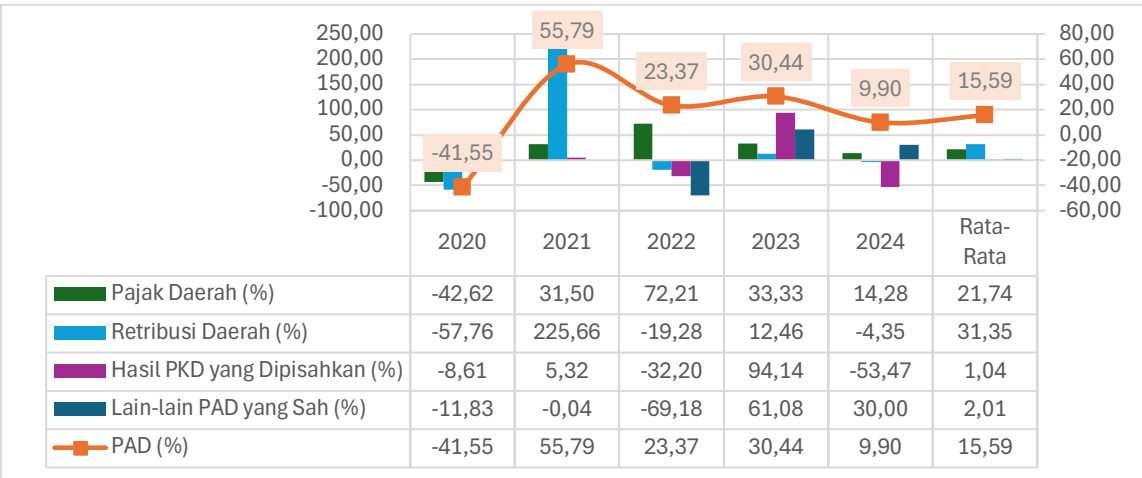
Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada setiap komponen PAD. Pajak daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari Rp62,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp215,54 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemungutan pajak serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

Retribusi daerah juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021 sebesar Rp51,31 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp15,76 miliar. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi retribusi daerah mengalami penurunan dan cenderung stabil di kisaran Rp41–Rp46 miliar. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan tarif, potensi ekonomi daerah, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD) mengalami variasi yang cukup besar, di mana realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp5,28 miliar, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp2,46 miliar. Kondisi ini dapat mencerminkan dinamika kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau aset daerah yang dikelola secara terpisah.

Kategori lain-lain PAD yang sah mengalami tren penurunan dari Rp17,31 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp11,17 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya faktor eksternal yang mungkin memengaruhi penerimaan, seperti perubahan regulasi atau kebijakan terkait dengan penerimaan dana non-pajak daerah.

Secara keseluruhan, total PAD Kabupaten Manggarai Barat meningkat secara signifikan dari Rp99,34 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp273,71 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Namun, meskipun terdapat kenaikan yang positif, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait keberlanjutan tren ini serta strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan pendapatan daerah, berikut disajikan data pertumbuhan dari masing-masing komponen PAD tahun 2020-2024.



Gambar 2. 65 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat adanya pola pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 42,62 persen, tetapi pada tahun 2022, tumbuh signifikan sebesar 72,21 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 21,74 persen. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup berhasil, meskipun masih terdapat ketidakstabilan dalam penerimaannya.

Retribusi Daerah mencatat rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 31,35 persen, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 225,66 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2024, Retribusi Daerah mengalami kontraksi masing-masing sebesar 19,28 persen dan 4,35 persen. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan dalam penerimaan retribusi, yang dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan, tarif retribusi, atau tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

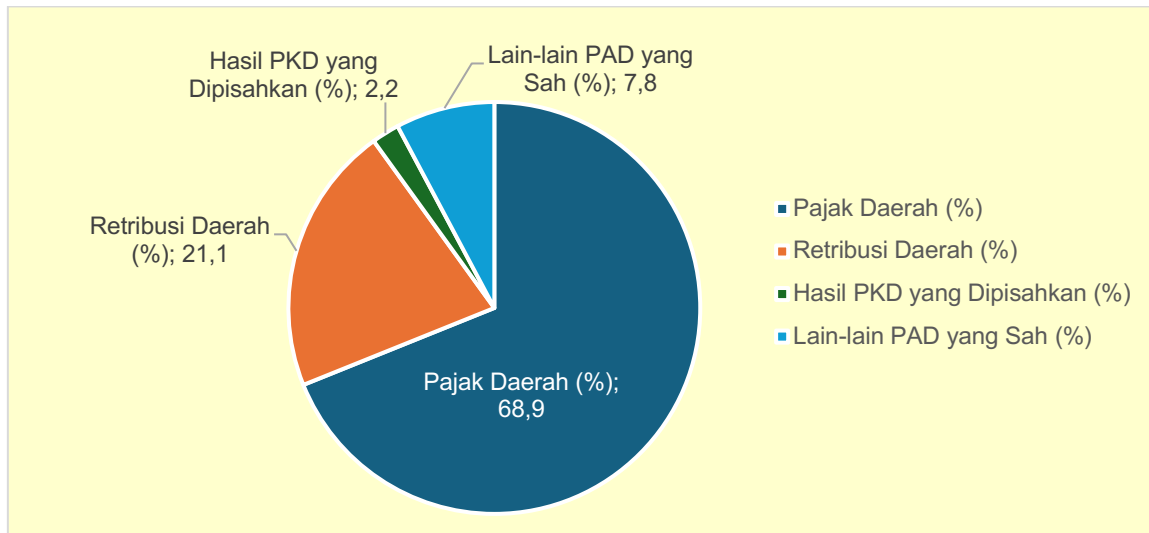
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah (PKD) yang dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang paling tidak stabil, dengan rata-rata hanya 1,04 persen per tahun. Pada tahun 2023, sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 94,14 persen, tetapi kembali mengalami penurunan tajam sebesar 53,47 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi hasil PKD yang dipisahkan terhadap total PAD masih belum optimal dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Lain-lain PAD yang sah juga mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif, dengan rata-rata hanya 2,01 persen per tahun. Tahun 2022 mencatat penurunan tertinggi sebesar 69,18 persen, namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi pertumbuhan positif masing-masing sebesar 61,08 persen dan 30,00 persen. Variasi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sumber-sumber lain masih belum stabil dan memerlukan strategi pengelolaan yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi pertumbuhan PAD yang cukup baik dalam lima tahun terakhir, masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan di setiap komponen pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu meningkatkan efektivitas kebijakan pajak dan retribusi

serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar PAD dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut disajikan grafik proporsi komponen PAD terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 66 Rata-rata Proporsi Komponen PAD, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dapat disimpulkan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap total PAD selama periode 2020 hingga 2024 mencapai 68,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen dominan dalam struktur PAD dan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, kontribusi retribusi daerah menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,1 persen. Meskipun memiliki kontribusi yang cukup signifikan, persentase retribusi daerah cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2021, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan dari sektor ini.

Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PKD) menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, dengan rata-rata sebesar 2,2 persen terhadap total PAD. Kontribusi terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 0,9 persen, yang mengindikasikan bahwa hasil investasi daerah masih belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Adapun lain-lain PAD yang sah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari 17,4 persen pada tahun 2020 menjadi hanya sekitar 4,1 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,8 persen. Penurunan ini dapat mencerminkan perubahan kebijakan atau berkurangnya penerimaan dari sumber-sumber pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Secara keseluruhan, dominasi pajak daerah dalam struktur PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat masih sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi serta pengelolaan kekayaan daerah guna menciptakan struktur PAD yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

2.2.1.1.2 Pendapatan Transfer

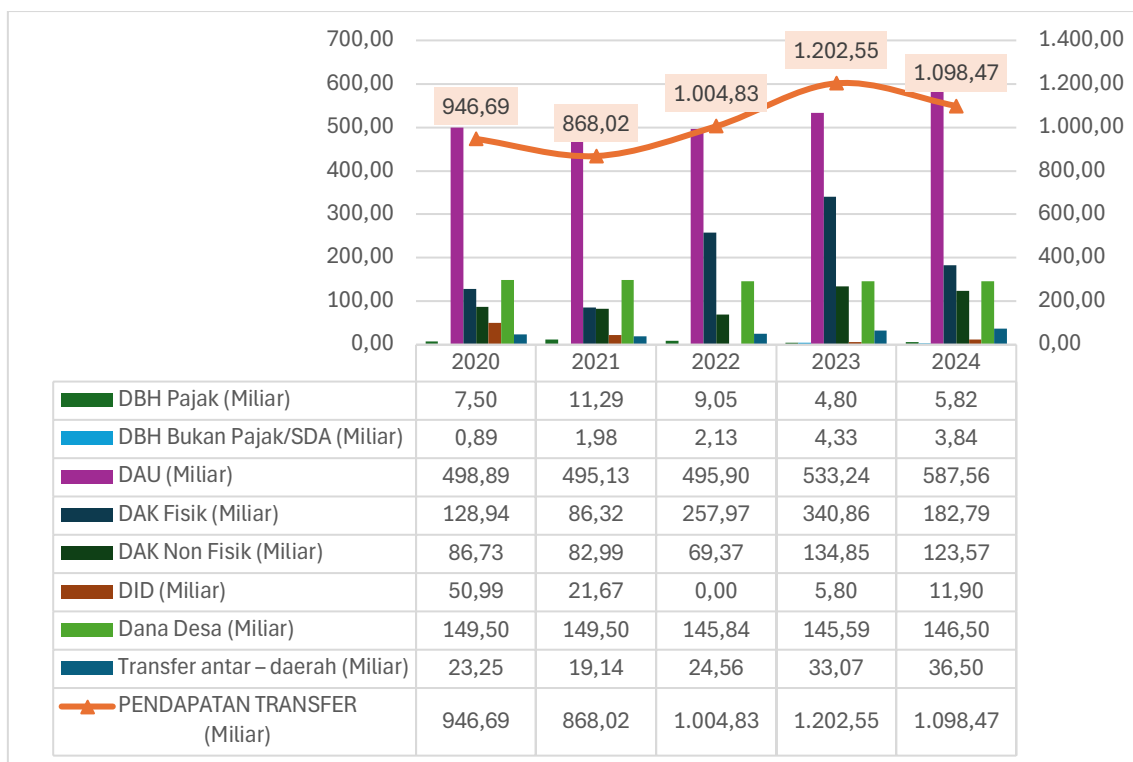
Dalam sistem keuangan daerah, pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Sementara itu, transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan penerimaan yang dibagikan antar-pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan bantuan keuangan adalah alokasi dana yang diberikan

oleh satu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu. Secara keseluruhan, pendapatan transfer berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah serta memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya. Kapasitas fiskal yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya kontribusi pajak dalam pembiayaan daerah serta adanya disparitas jumlah penduduk, kondisi geografis yang memengaruhi biaya operasional, serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Dominasi transfer dalam pendapatan daerah diharapkan dapat dialokasikan secara optimal ke sektor-sektor produktif guna mendorong investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa pendapatan transfer mengalami fluktuasi, dengan tren meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp1.202,55 miliar sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi Rp1.098,47 miliar.



Gambar 2. 67 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

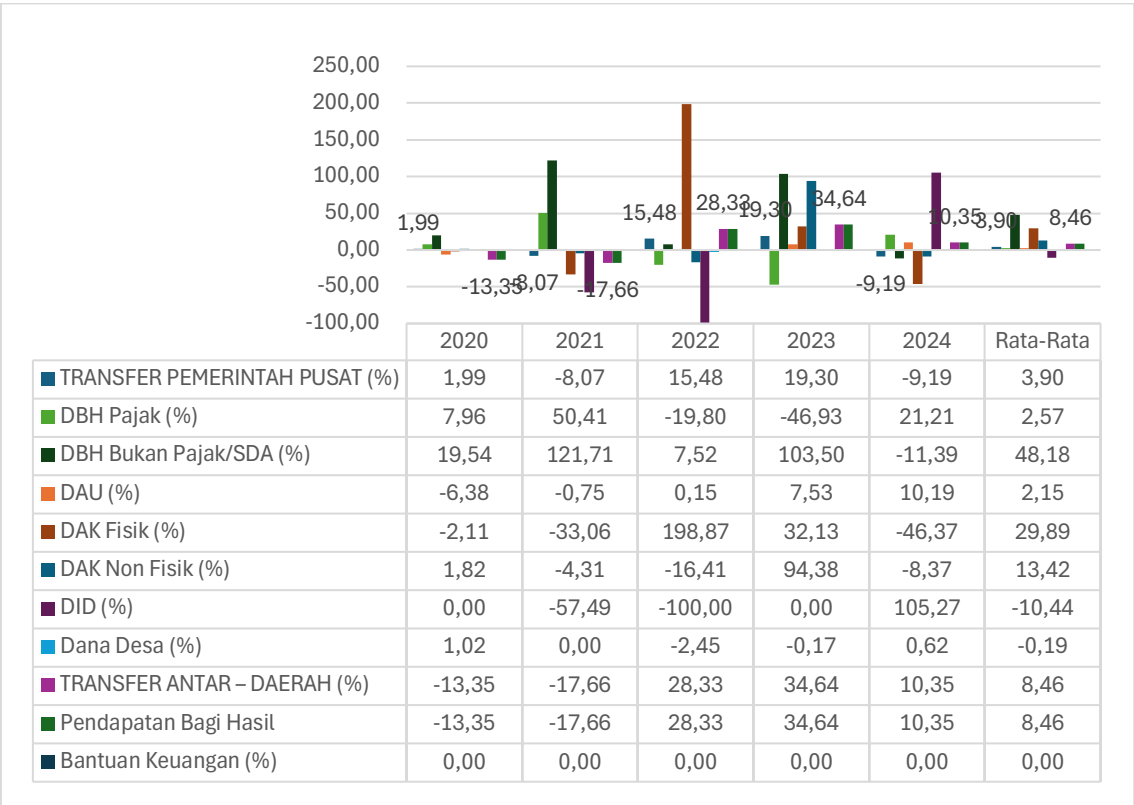
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber utama dalam pendapatan transfer, dengan kontribusi yang cukup stabil dari tahun ke tahun. DAU mengalami peningkatan dari Rp498,89 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp587,56 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 terjadi lonjakan menjadi Rp327,35 miliar, kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 sebesar Rp475,70 miliar, sebelum kembali turun menjadi Rp306,35 miliar pada tahun 2024.

Komponen lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) menunjukkan tren yang tidak stabil. DBH Pajak, misalnya, mengalami peningkatan dari Rp7,50 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp11,29 miliar pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi Rp4,80 miliar, sebelum mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp5,82 miliar pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada DBH SDA, yang mengalami kenaikan dari Rp0,89 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp4,33 miliar pada tahun 2023, namun turun kembali menjadi Rp3,84 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, dana penyesuaian mengalami tren penurunan, dari Rp200,49 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp151,39 miliar pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi Rp158,41 miliar pada tahun 2024. Pendapatan bagi hasil juga mengalami tren peningkatan dari Rp23,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp36,50 miliar pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, ketergantungan Kabupaten Manggarai Barat terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi. Fluktuasi pada beberapa komponen transfer, terutama DAK dan DBH, mengindikasikan bahwa stabilitas pendapatan daerah masih bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 68 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa komponen transfer. Secara rata-rata, pertumbuhan total transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 3,90 persen per tahun, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021 (-8,07 persen) dan 2024 (-9,19 persen).

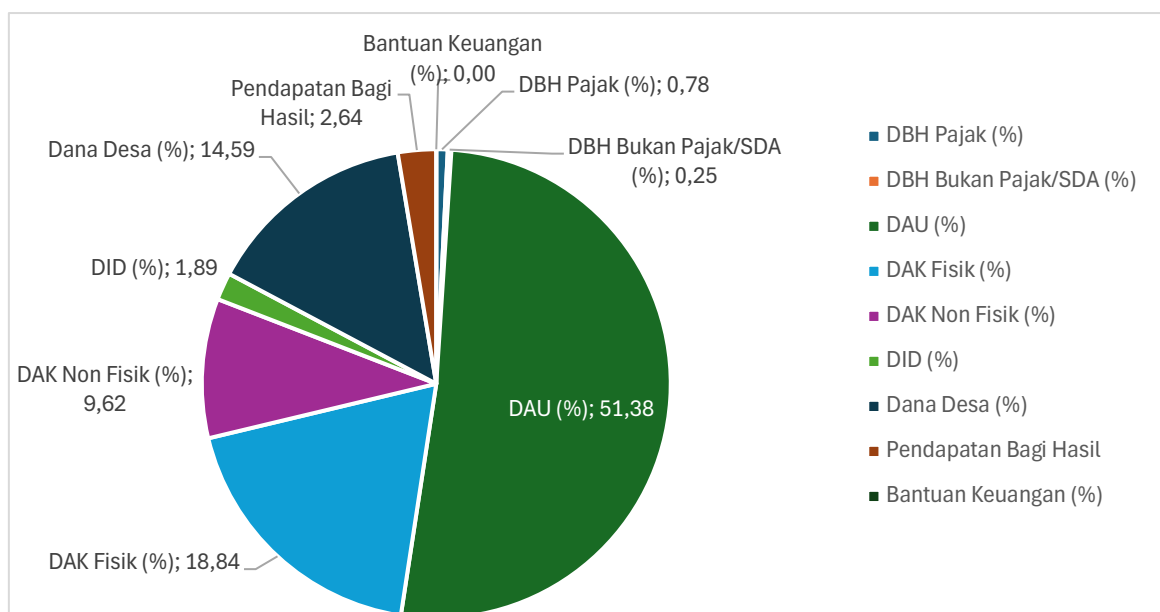
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat bervariasi, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 50,41 persen, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 (-19,80 persen) dan 2023 (-46,93 persen). Secara rata-rata, DBH Pajak hanya tumbuh sebesar 2,57 persen per tahun. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam (SDA) memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi, yakni 48,18 persen per tahun, dengan peningkatan drastis pada tahun 2021 (121,71 persen) dan 2023 (103,50 persen), meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 (-11,39 persen).

Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,15 persen per tahun, meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 (-6,38 persen) dan 2021 (-0,75 persen). Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis dengan rata-rata 16,20 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 (93,35 persen) dan 2023 (45,32 persen), sementara tahun 2021 dan 2024 mengalami penurunan masing-masing sebesar -21,50 persen dan -35,60 persen.

Dana Penyesuaian juga menunjukkan volatilitas dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,90 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen ini tumbuh signifikan sebesar 35,48 persen, namun mengalami kontraksi pada tahun 2021 (-14,62 persen) dan 2022 (-14,80 persen). Sementara itu, Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan komponen dari pendapatan Transfer Antar-Daerah memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 8,46 persen per tahun. Komponen ini mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan 2021, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebelum kembali melambat pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tren pertumbuhan positif dalam beberapa komponen pendapatan transfer, fluktuasi yang signifikan pada DBH, DAK, dan Dana Penyesuaian menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penerimaan transfer daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan strategi fiskal untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi ketergantungan pada sumber dana yang berfluktuasi tinggi.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer, berikut disajikan grafik proporsi komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 69 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data kontribusi komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dapat diamati bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan transfer dengan rata-rata sebesar 51,38 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap DAU masih sangat tinggi, sehingga kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan mandiri masih terbatas.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dengan rata-rata 28,46 persen per tahun. Kontribusi DAK cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, mencapai puncaknya pada

tahun 2023 dengan nilai 39,56 persen. Variasi ini mencerminkan kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

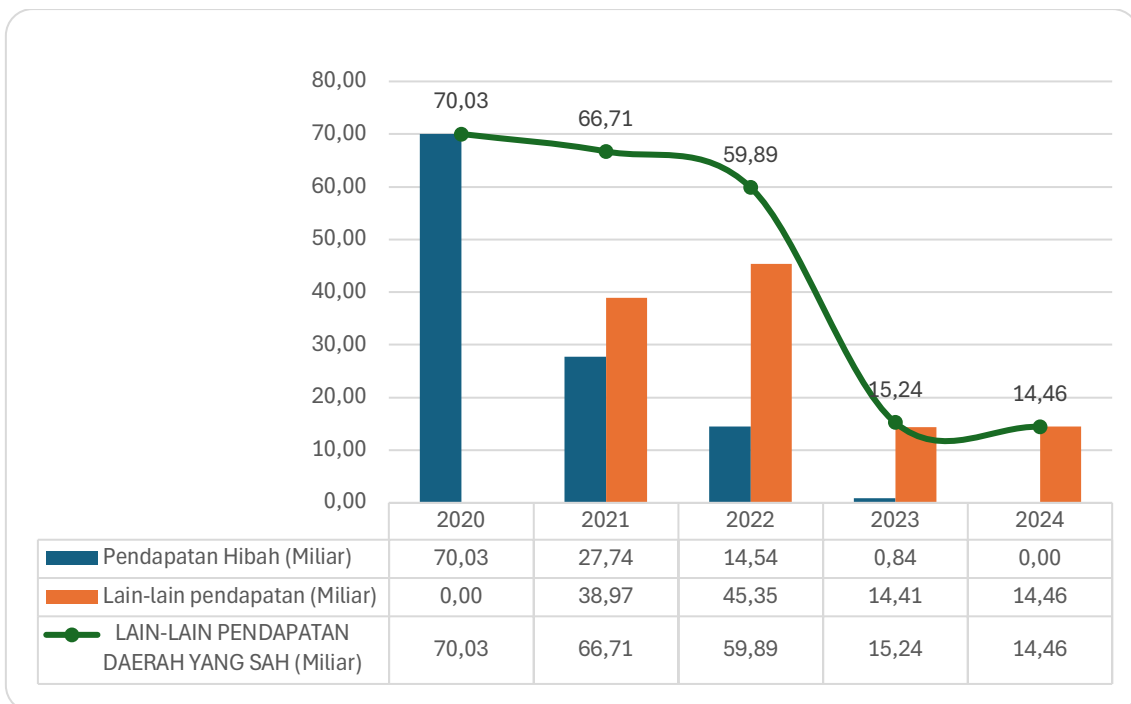
Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa) menunjukkan kontribusi yang semakin menurun dari tahun ke tahun, dengan rata-rata sebesar 16,48 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan dalam distribusi dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Bagi Hasil (PBH) memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan komponen lainnya, dengan rata-rata 2,64 persen per tahun. Demikian pula, Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) memiliki kontribusi yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,78 persen dan 0,25 persen.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan transfer Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh DAU dan DAK, yang menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diperkuat guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara lebih mandiri.

2.2.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup seluruh pendapatan daerah kecuali PAD dan pendapatan transfer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terjadi fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pendapatan dari kategori ini mencapai Rp70,03 miliar, yang mayoritas berasal dari pendapatan hibah. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan pendapatan hibah menjadi Rp27,74 miliar, meskipun ada peningkatan dari kategori lain-lain pendapatan sebesar Rp38,97 miliar.



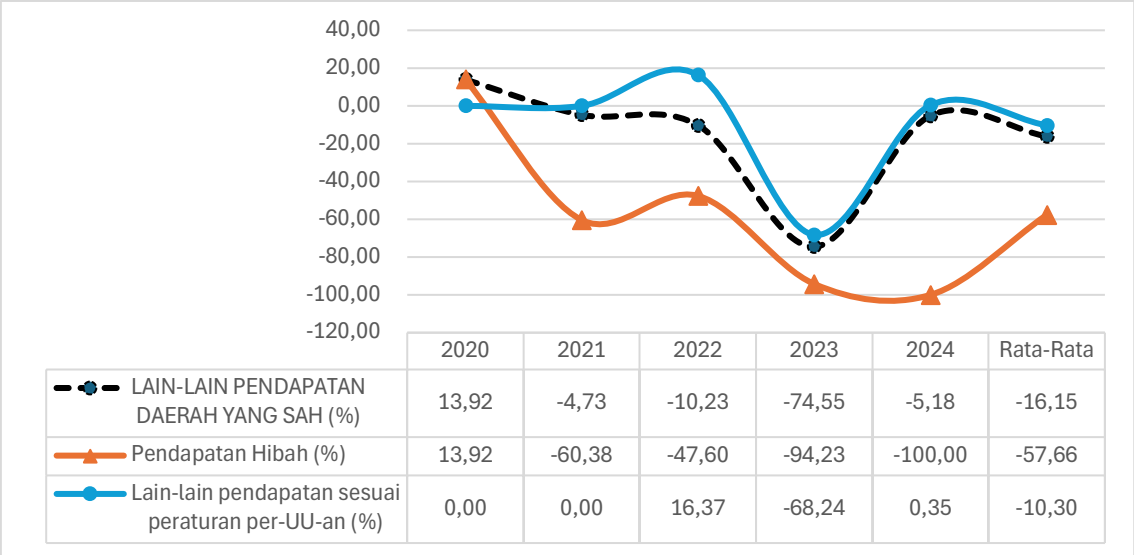
Gambar 2. 70 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Pada tahun 2022, total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami sedikit penurunan menjadi Rp59,89 miliar, dengan kontribusi utama dari lain-lain pendapatan yang meningkat menjadi Rp45,35 miliar, sementara pendapatan hibah semakin berkurang menjadi Rp14,54 miliar. Tren penurunan semakin tajam pada tahun 2023, di mana total pendapatan dari kategori ini merosot drastis ke Rp15,24 miliar, yang sebagian besar berasal dari lain-lain pendapatan sebesar Rp14,41 miliar, sementara pendapatan hibah hampir tidak signifikan sebesar Rp0,84 miliar.

Pada tahun 2024, penurunan terus berlanjut dengan total realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya sebesar Rp14,46 miliar, tanpa adanya pendapatan hibah sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi hibah dalam pendapatan daerah mengalami penyusutan tajam dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan lain-lain pendapatan juga mengalami fluktuasi dan tidak mampu menutupi penurunan yang terjadi.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya ketergantungan yang berkurang terhadap pendapatan hibah, tetapi juga menandakan perlunya strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal untuk menjaga stabilitas penerimaan dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 71 Pertumbuhan Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data realisasi pertumbuhan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah di Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan kategori ini mengalami tren negatif sebesar -16,15 persen per tahun.

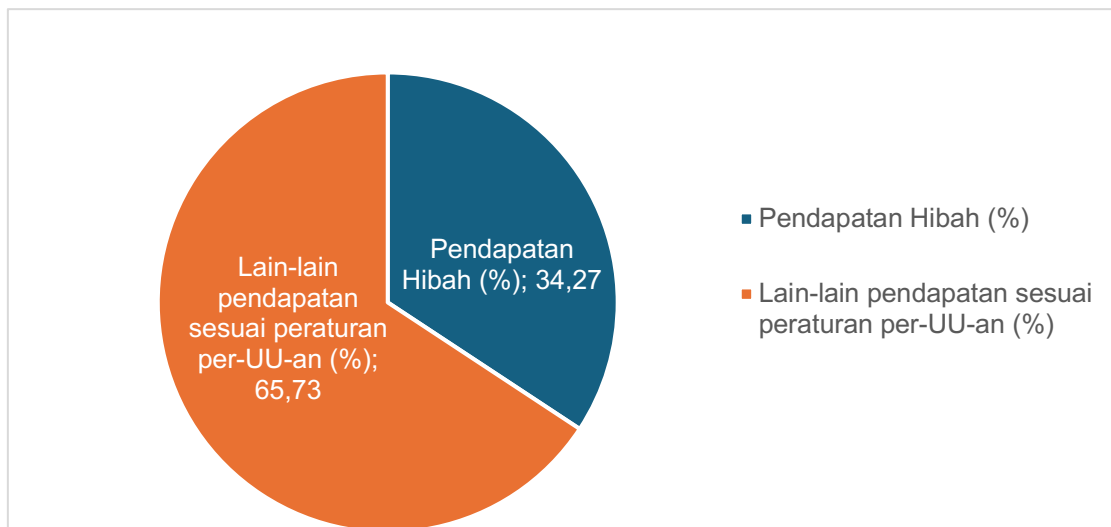
Pendapatan hibah mengalami penurunan paling tajam dengan rata-rata kontraksi sebesar -57,66 persen per tahun. Penurunan ini semakin signifikan pada tahun 2023 dan 2024, di mana realisasi pendapatan hibah mengalami penyusutan hampir sepenuhnya hingga mencapai nol pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap hibah sebagai sumber pendapatan semakin menurun atau terdapat perubahan dalam kebijakan pemberian hibah kepada daerah.

Sementara itu, kategori lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak stabil. Pada tahun 2022, kategori ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,37

persen, namun kembali mengalami kontraksi sebesar -68,24 persen pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan tahunan untuk kategori ini tercatat negatif sebesar -10,30 persen, yang mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam penerimaan dari sumber pendapatan tersebut.

Secara umum, tren negatif dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berdampak pada fleksibilitas fiskal daerah dalam pembiayaan belanja daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, baik melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) maupun melalui kebijakan fiskal yang lebih strategis.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap Lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikut disajikan grafik proporsi komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 72 Rata-rata Proporsi Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data proporsi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terdapat perubahan signifikan dalam struktur kontribusi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020, pendapatan hibah berkontribusi penuh (100 persen) terhadap kategori ini, sementara lain-lain

pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan belum memberikan kontribusi. Namun, sejak tahun 2021, terjadi pergeseran proporsi yang cukup drastis.

Pendapatan hibah mengalami penurunan kontribusi secara bertahap dari 41,58 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 5,51 persen pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 kontribusinya menjadi 0 persen. Sebaliknya, lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan justru meningkat pesat, dari 58,42 persen pada tahun 2021 menjadi 75,73 persen pada tahun 2022, dan mencapai 100 persen pada tahun 2024.

Secara rata-rata tahunan, pendapatan hibah berkontribusi sebesar 34,27 persen, sedangkan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki kontribusi lebih dominan, yaitu 65,73 persen. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam sumber pendapatan daerah yang sah, di mana ketergantungan terhadap hibah semakin berkurang, sementara pendapatan dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan meningkat. Perubahan ini dapat mencerminkan kebijakan fiskal daerah yang lebih berorientasi pada optimalisasi sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan hibah, yang cenderung bersifat tidak tetap dan bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat maupun pihak lain.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan peran Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan bagi masyarakat.

Secara umum, belanja daerah terdiri atas beberapa komponen. Pertama, Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Kedua, Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang

memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ketiga, Belanja Tidak Terduga, yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keempat, Belanja Bantuan Keuangan, yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau desa dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

Untuk memahami lebih lanjut dinamika pengeluaran daerah, berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	734.827.978.141,51	720.906.686.316,24	789.416.323.826,32	760.592.248.363,77	947.895.943.574,68
2.1.1	Belanja Pegawai	347.603.587.058,16	336.092.253.190,25	371.287.510.538,00	394.176.883.894,00	464.207.980.728,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	329.280.834.605,35	374.782.619.165,99	392.905.825.453,32	336.757.101.636,77	416.560.100.628,68
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	7.038.707.835,00	14.908.969.299,00	13.020.161.353,00
2.1.4	Belanja Hibah	56.359.425.801,00	10.031.813.960,00	18.184.280.000,00	14.749.293.534,00	54.018.769.365,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.584.130.677,00	-	-	-	88.931.500,00
2.2	Belanja Modal	174.969.249.200,00	162.697.188.838,00	493.263.439.543,00	415.142.121.105,00	214.515.889.849,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	213.846.175,00	-	-	866.231.698,00	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.549.809.923,00	26.156.043.181,00	38.845.232.335,00	119.270.373.896,00	38.575.362.834,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.870.290.347,00	43.703.403.403,00	159.623.544.220,00	147.074.801.748,00	40.252.810.869,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.103.701.205,00	89.642.030.454,00	292.362.220.356,00	145.438.655.463,00	132.232.861.086,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.231.601.550,00	3.195.711.800,00	2.432.442.632,00	2.492.058.300,00	3.454.855.060,00
2.3	Belanja Tak Terduga	30.479.088.896,00	3.890.479.982,00	3.173.879.600,00	2.909.721.826,00	1.347.141.302,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	30.479.088.896,00	3.890.479.982,00	3.173.879.600,00	2.909.721.826,00	1.347.141.302,00
2.4	Belanja Transfer	210.815.854.117,00	211.748.477.416,00	208.426.596.000,00	209.671.636.650,00	214.911.480.376,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.828.222.917,00	11.948.845.980,00	12.067.494.600,00	9.880.761.350,00	8.822.266.576,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	200.987.631.200,00	199.799.631.436,00	196.359.101.400,00	199.790.875.300,00	206.089.213.800,00
	JUMLAH BELANJA	1.151.092.170.354,51	1.099.242.832.552,24	1.494.280.238.969,32	1.388.315.727.944,77	1.378.670.455.101,68

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024

Berdasarkan data realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terdapat beberapa tren yang dapat dianalisis. Total belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai Rp1,49 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,09 triliun. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, total belanja mengalami sedikit penurunan menjadi Rp1,38 triliun.

Komponen belanja operasi mendominasi total belanja daerah, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp734,82 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp947,89 miliar pada tahun 2024. Belanja pegawai sebagai salah satu subkomponen belanja operasi juga mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari Rp347,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp464,20 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah.

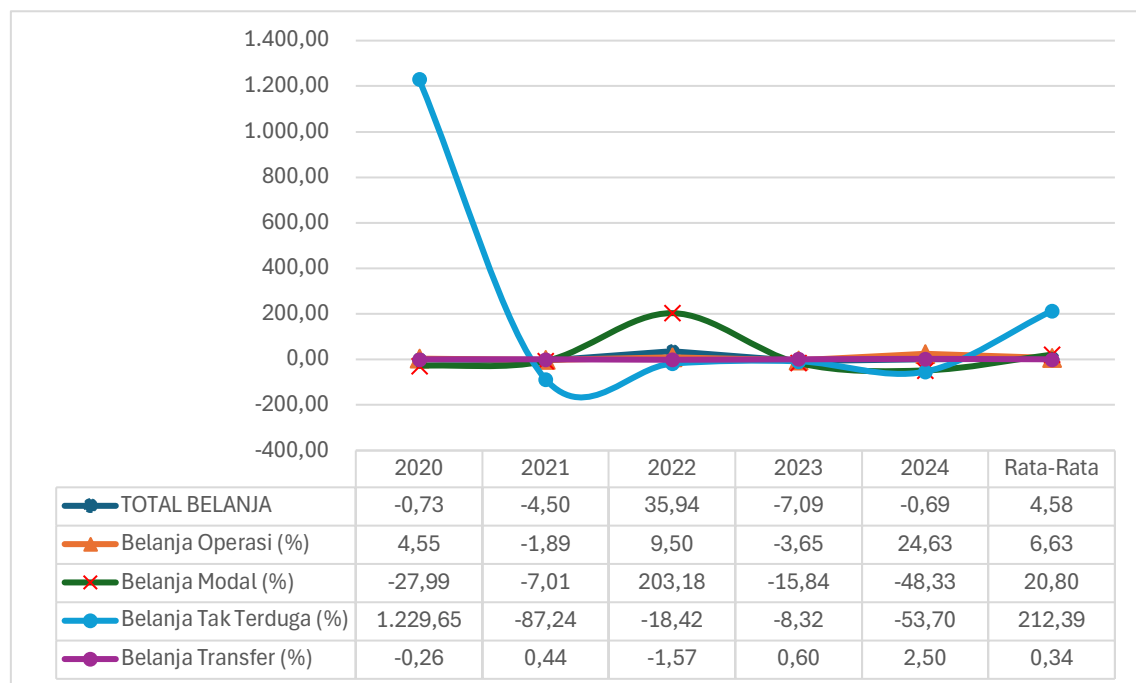
Belanja barang dan jasa juga mengalami tren yang cenderung meningkat dengan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2022, nilai realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp392,90 miliar, meningkat dari Rp374,78 miliar pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp336,75 miliar, sebelum kembali meningkat menjadi Rp416,56 miliar pada tahun 2024.

Belanja modal mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022, dengan realisasi mencapai Rp493,26 miliar dibandingkan tahun 2021 yang hanya Rp162,69 miliar. Namun, tren ini berbalik dengan penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi Rp415,14 miliar dan Rp214,51 miliar. Hal ini mencerminkan adanya kebijakan investasi yang lebih besar pada tahun 2022, kemungkinan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, namun mengalami rasionalisasi dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, belanja tak terduga mengalami tren penurunan yang cukup drastis dari Rp30,47 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp1,34 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, belanja transfer tetap relatif stabil dengan kisaran Rp208 miliar hingga Rp214 miliar per tahun, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara keseluruhan, komposisi belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan prioritas yang lebih besar pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Peningkatan belanja pegawai dan barang/jasa mengindikasikan besarnya kebutuhan operasional dalam menjalankan pemerintahan daerah. Namun, tren penurunan belanja modal setelah lonjakan pada tahun 2022 dapat menjadi perhatian dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di daerah.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen Belanja Daerah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 73 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen belanja daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat bahwa pertumbuhan total belanja mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 4,58 persen. Meskipun pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan sebesar 35,94 persen, namun pada tahun-tahun lainnya mengalami penurunan,

terutama pada tahun 2021 dengan kontraksi sebesar -4,50 persen dan pada tahun 2023 sebesar -7,09 persen.

Belanja operasi menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,63 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 24,63 persen, setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2023. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian dalam belanja rutin yang mencakup pengeluaran untuk pegawai, barang, dan jasa.

Sementara itu, belanja modal mengalami volatilitas yang sangat tinggi. Pada tahun 2022, belanja modal mencatat lonjakan drastis sebesar 203,18 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya proyek pembangunan infrastruktur yang signifikan. Namun, pertumbuhan belanja modal pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024 mengalami penurunan berturut-turut, dengan kontraksi terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar -48,33 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja modal selama lima tahun tercatat sebesar 20,80 persen, yang menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak konsisten.

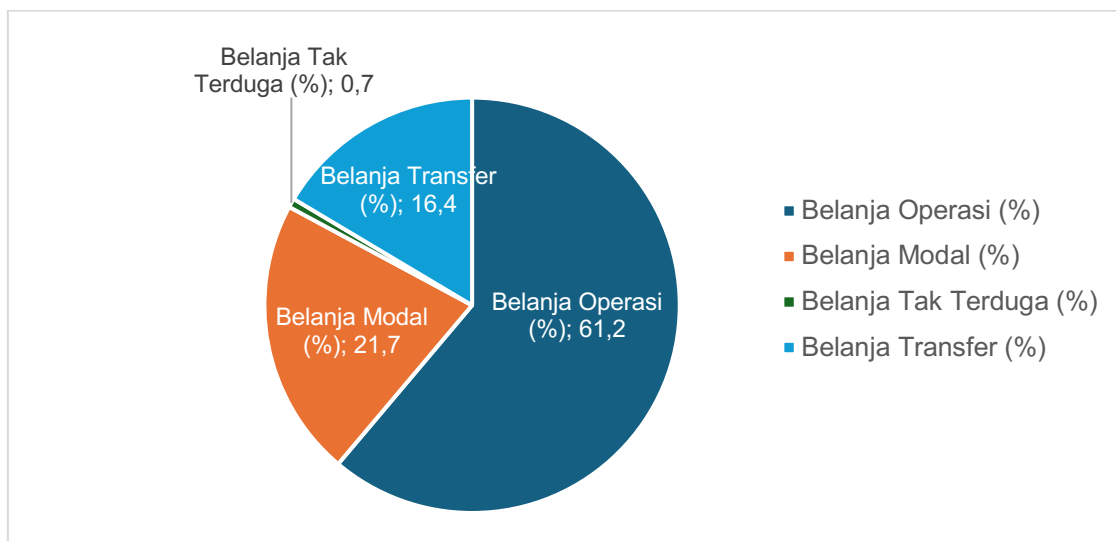
Belanja tak terduga memiliki karakteristik yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 212,39 persen. Peningkatan luar biasa terjadi pada tahun 2020, yakni mencapai 1.229,65 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan darurat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun, setelahnya, belanja tak terduga mengalami kontraksi tajam, terutama pada tahun 2021 dengan penurunan sebesar -87,24 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024.

Di sisi lain, belanja transfer memiliki tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,34 persen per tahun. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, perubahan dalam belanja transfer relatif kecil dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, yang menunjukkan bahwa alokasi dana untuk transfer ke daerah atau pihak ketiga cenderung tidak mengalami perubahan drastis dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, meskipun belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata positif, terdapat pola fluktuasi yang cukup tinggi terutama dalam belanja

modal dan belanja tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat masih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika kebutuhan pembangunan serta penyesuaian fiskal dari tahun ke tahun.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen Belanja Daerah, berikut disajikan grafik proporsi komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 74 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data proporsi komponen belanja daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa belanja operasi selalu menjadi komponen dominan dalam struktur belanja daerah. Rata-rata kontribusi belanja operasi mencapai 61,2 persen dari total belanja, dengan proporsi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 68,8 persen dan terendah pada tahun 2022 sebesar 52,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Sementara itu, belanja modal menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,7 persen. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 33,0 persen, yang mengindikasikan adanya peningkatan investasi dalam pembangunan aset tetap, seperti

infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, pada tahun 2024, proporsi belanja modal mengalami penurunan menjadi 15,6 persen, yang dapat mencerminkan adanya perubahan kebijakan fiskal atau keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam melakukan investasi jangka panjang.

Belanja tak terduga memiliki porsi yang sangat kecil dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,7 persen. Pada tahun 2020, proporsi belanja tak terduga mencapai 2,6 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan mendesak, seperti penanganan pandemi COVID-19. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, proporsi belanja ini menurun drastis, bahkan mencapai 0,1 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan untuk pengeluaran yang bersifat darurat semakin berkurang atau pemerintah daerah lebih mengandalkan mekanisme anggaran lainnya untuk mengatasi situasi tak terduga.

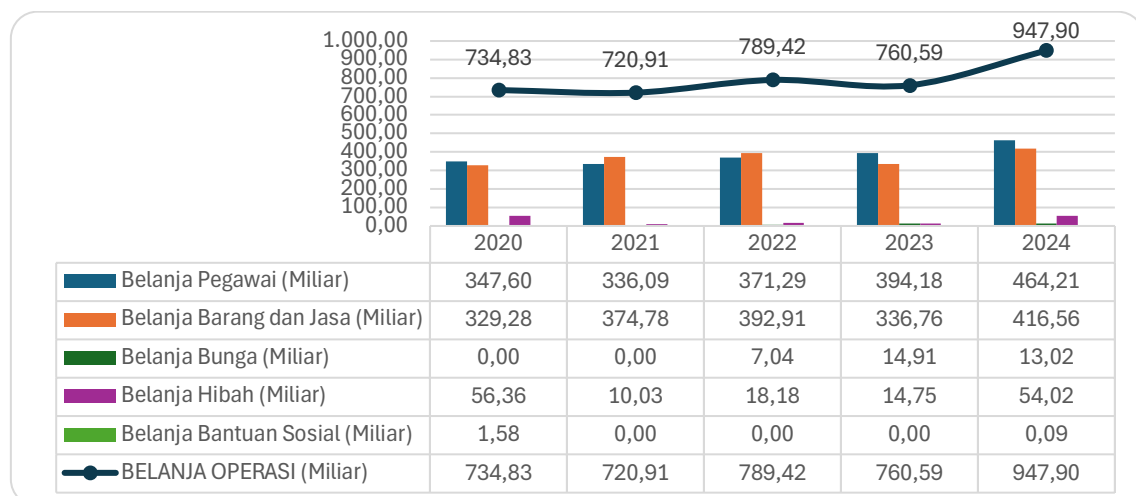
Terakhir, belanja transfer memiliki rata-rata kontribusi sebesar 16,4 persen dalam struktur belanja daerah. Proporsi belanja transfer tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 19,3 persen, sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar 13,9 persen. Komponen belanja ini mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau entitas lainnya. Fluktuasi dalam belanja transfer dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mendistribusikan anggaran kepada pihak ketiga serta dinamika penerimaan daerah yang memengaruhi kapasitas transfer tersebut.

Secara keseluruhan, tren belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan pola yang mengarah pada penguatan belanja operasi sebagai prioritas utama, sementara belanja modal mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Proporsi belanja tak terduga yang semakin mengecil mengindikasikan kondisi fiskal yang lebih stabil, sedangkan belanja transfer tetap mempertahankan proporsi yang relatif konsisten. Hal ini mencerminkan kebijakan alokasi anggaran yang lebih fokus pada operasional pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap mempertimbangkan investasi infrastruktur serta kebutuhan transfer ke pihak terkait.

2.2.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan bagian terbesar dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Tren Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas pengelolaan anggaran. Peningkatan atau penurunan pada belanja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan operasional pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi ekonomi daerah.

Realisasi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, belanja operasi mengalami peningkatan dari Rp734,83 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp947,90 miliar pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2023, tren keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dalam alokasi anggaran untuk belanja operasi.



Gambar 2. 75 Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen belanja operasi yang paling dominan adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai mengalami kenaikan dari Rp347,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp464,21 miliar pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan alokasi untuk gaji dan tunjangan pegawai. Sementara itu, belanja barang dan jasa juga menunjukkan tren yang meningkat, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp416,56 miliar.

Belanja bunga mulai muncul pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp7,04 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp14,91 miliar, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp13,02 miliar. Sementara itu, belanja hibah mengalami fluktuasi yang signifikan, di mana terjadi penurunan tajam pada tahun 2021 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Belanja bantuan sosial, yang pada tahun 2020 masih direalisasikan sebesar Rp1,58 miliar, tidak dialokasikan pada tahun 2021 hingga 2023, dan kembali muncul dalam jumlah yang sangat kecil pada tahun 2024.

Secara umum, peningkatan belanja operasi, khususnya pada belanja pegawai dan barang dan jasa, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, fluktuasi dalam belanja hibah serta munculnya belanja bunga menunjukkan adanya perubahan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan analisis lebih lanjut terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja operasi, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 76 Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam beberapa kategori belanja selama periode 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 6,63 persen per tahun, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 24,63 persen, sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan masing-masing sebesar -1,89 persen dan -3,65 persen.

Komponen belanja pegawai mengalami tren pertumbuhan yang relatif stabil, dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,62 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 17,77 persen, sementara pada tahun 2021 sempat mengalami kontraksi sebesar -3,31 persen. Belanja barang dan jasa menunjukkan pola yang lebih fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,48 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 23,70 persen, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -14,29 persen.

Belanja bunga menunjukkan dinamika yang ekstrem, terutama pada tahun 2023 ketika mengalami lonjakan signifikan sebesar 111,81 persen, meskipun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar -12,67

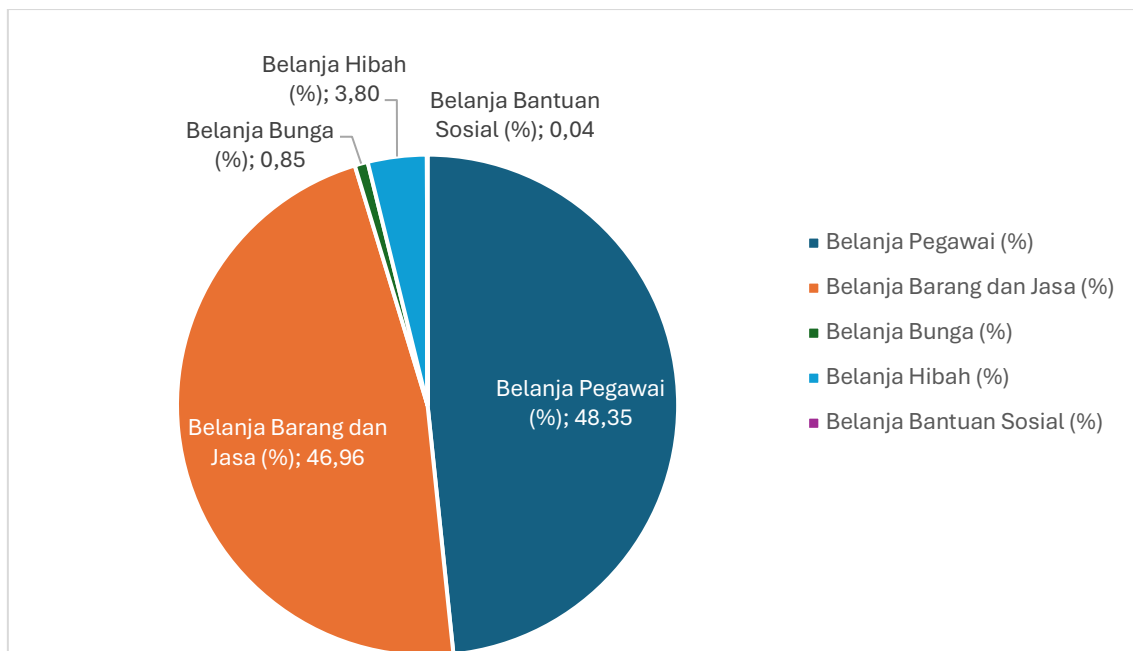
persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan atau kebutuhan pembayaran bunga utang dalam periode tersebut.

Belanja hibah mencatat pertumbuhan yang sangat variatif, dengan rata-rata tahunan sebesar 137,27 persen. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 439,91 persen, namun pada tahun 2021 mengalami kontraksi drastis sebesar -82,20 persen. Pada tahun 2024, belanja hibah kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 266,25 persen. Pola ini menunjukkan bahwa belanja hibah bersifat tidak konstan dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah serta kondisi fiskal tahunan.

Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami tren penurunan yang cukup tajam, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -28,31 persen per tahun. Pada tahun 2021, belanja bantuan sosial mengalami penurunan drastis hingga mencapai -100 persen, yang menunjukkan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk kategori ini pada tahun tersebut.

Secara umum, data menunjukkan bahwa komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki pola pertumbuhan yang dinamis dan cenderung fluktuatif, terutama dalam kategori belanja hibah dan belanja bunga. Stabilitas belanja pegawai dan barang serta jasa mengindikasikan prioritas utama pemerintah dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, variabilitas yang tinggi dalam belanja hibah dan bantuan sosial menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih konsisten dalam perencanaan anggaran untuk menjaga kesinambungan program dan dampaknya terhadap masyarakat.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja operasi, berikut disajikan grafik proporsi komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 77 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data proporsi komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat bahwa belanja pegawai memiliki kontribusi terbesar terhadap total belanja operasi dengan rata-rata sebesar 48,35 persen per tahun selama periode 2020 hingga 2024. Proporsi belanja pegawai cenderung stabil, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 51,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tetap menjadi prioritas utama dalam struktur belanja operasi daerah.

Sementara itu, belanja barang dan jasa juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total belanja operasi dengan rata-rata 46,96 persen per tahun. Proporsi belanja barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan porsi tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 51,99 persen dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika dalam kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi, serta kebutuhan program dan kegiatan pembangunan.

Komponen belanja bunga, hibah, dan bantuan sosial memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan

jasa. Belanja bunga mulai muncul dalam struktur belanja operasi sejak tahun 2022, dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,85 persen per tahun. Meskipun nilainya relatif kecil, peningkatan belanja bunga pada tahun 2023 sebesar 1,96 persen mengindikasikan adanya kewajiban pembayaran bunga utang atau pinjaman daerah yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belanja hibah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,80 persen per tahun. Pada tahun 2020, proporsi belanja hibah mencapai 7,67 persen, tetapi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya. Sementara itu, belanja bantuan sosial memiliki porsi yang sangat kecil dalam struktur belanja operasi, dengan rata-rata kontribusi hanya 0,04 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki alokasi anggaran yang signifikan untuk program bantuan sosial dalam belanja operasinya.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang secara kumulatif mencakup lebih dari 90 persen total belanja operasi. Komponen belanja lainnya, seperti belanja bunga, hibah, dan bantuan sosial, memiliki porsi yang lebih kecil, meskipun tetap mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan prioritas pengeluaran daerah yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik.

2.2.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pengadaan peralatan. Besaran dan pola perubahan Belanja Modal setiap tahun menunjukkan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah serta efisiensi dalam pengelolaan investasi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pos belanja ini mencakup

pengeluaran untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset Lainnya

Fluktuasi dalam alokasi Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta realisasi proyek-proyek strategis. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sehingga analisis terhadap Belanja Modal akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan dan implementasi belanja daerah.

Berdasarkan data realisasi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam pengalokasian anggaran untuk berbagai jenis belanja modal. Secara keseluruhan, total belanja modal mengalami peningkatan tajam pada tahun 2022, mencapai Rp493,26 miliar, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi Rp415,14 miliar pada tahun 2023 dan Rp214,52 miliar pada tahun 2024.



Gambar 2. 78 Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

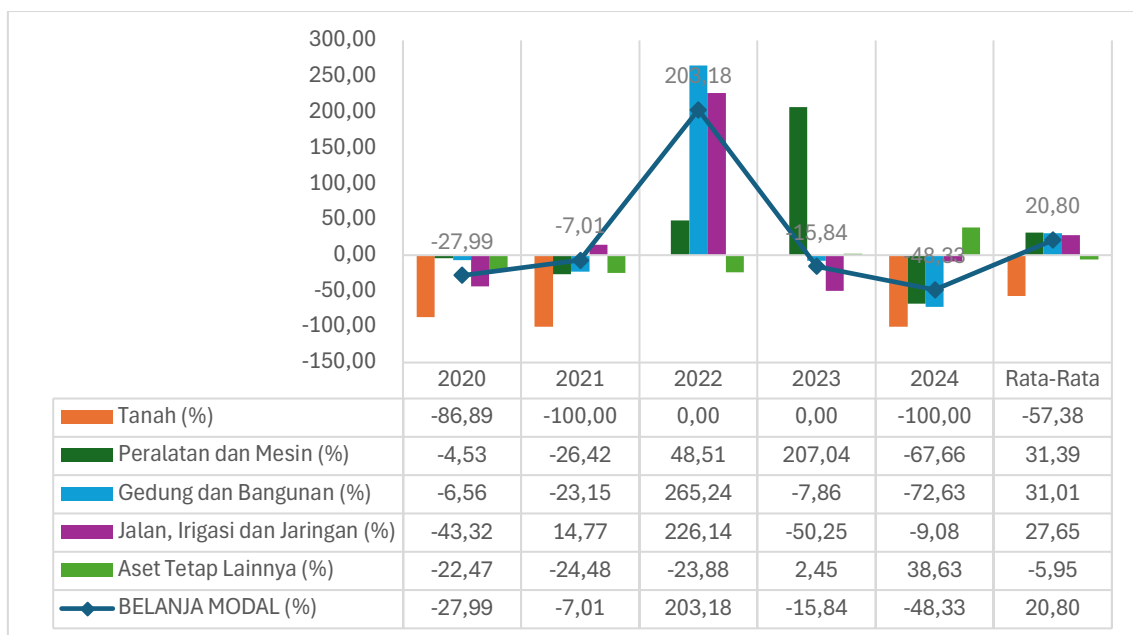
Belanja modal terbesar dalam periode ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pada kategori Belanja Modal Jalan,

Irigasi, dan Jaringan. Kategori ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp292,36 miliar, sebelum menurun menjadi Rp145,44 miliar pada tahun 2023 dan Rp132,23 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga menunjukkan pola yang serupa, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp159,62 miliar, sebelum mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp38,85 miliar, lalu melonjak tajam pada tahun 2023 sebesar Rp119,27 miliar, sebelum turun kembali pada tahun 2024. Sementara itu, alokasi untuk Belanja Modal Tanah sangat minim, bahkan nihil pada beberapa tahun, kecuali pada tahun 2023 yang mencapai Rp0,87 miliar. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memiliki proporsi yang kecil dibandingkan dengan komponen belanja modal lainnya, dengan realisasi yang relatif stabil pada kisaran Rp2,43 hingga Rp4,23 miliar per tahun.

Secara umum, fluktuasi dalam belanja modal mencerminkan strategi alokasi anggaran daerah yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Lonjakan belanja modal pada tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya investasi besar dalam infrastruktur dan fasilitas umum, sedangkan penurunan pada tahun berikutnya mungkin disebabkan oleh faktor keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, atau realokasi ke sektor lain yang lebih prioritas. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak dari belanja modal ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja modal, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 79 Pertumbuhan Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

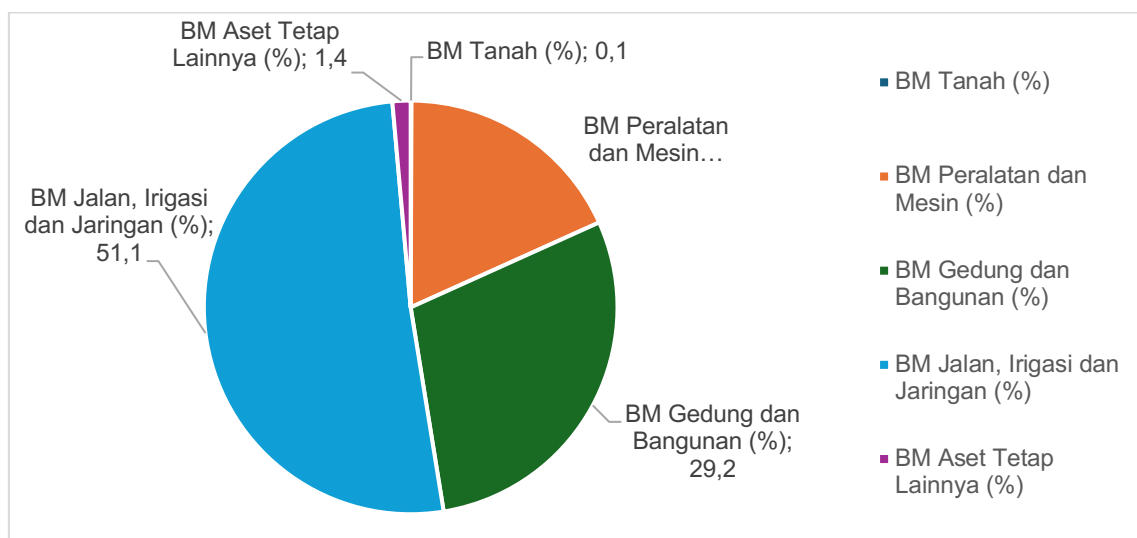
Berdasarkan data pertumbuhan komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam realisasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2024. Secara rata-rata, belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 20,80 persen per tahun, meskipun dengan variasi yang cukup besar antarperiode. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan belanja modal hingga 203,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan investasi dalam infrastruktur dan aset tetap. Namun, pada tahun 2024, belanja modal mengalami kontraksi sebesar -48,33 persen, yang menunjukkan adanya pengurangan signifikan dalam alokasi anggaran untuk investasi jangka panjang.

Jika ditinjau berdasarkan komponennya, belanja modal untuk tanah mengalami penurunan drastis dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -57,38 persen per tahun, bahkan mencapai -100 persen pada tahun 2021 dan 2024, yang menunjukkan tidak adanya realisasi anggaran untuk pengadaan tanah pada tahun-tahun tersebut. Komponen belanja modal peralatan dan mesin menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,39 persen, dengan puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2023 sebesar 207,04 persen. Namun, pada tahun 2024, komponen ini mengalami penurunan tajam hingga -67,66 persen.

Sementara itu, belanja modal untuk gedung dan bangunan juga mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata 31,01 persen per tahun, terutama pada tahun 2022 yang mencapai 265,24 persen. Namun, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2024 yang mengalami kontraksi hingga -72,63 persen. Belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan juga menunjukkan pola fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 27,65 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 226,14 persen, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis hingga -50,25 persen.

Adapun belanja modal untuk aset tetap lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -5,95 persen, meskipun pada tahun 2024 meningkat sebesar 38,63 persen. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan belanja modal yang tidak stabil mencerminkan adanya tantangan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, baik dari sisi pengalokasian dana maupun realisasi program pembangunan. Perubahan tajam dalam komponen belanja modal juga dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan daerah yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja modal, berikut disajikan grafik proporsi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 80 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data proporsi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa alokasi terbesar dalam belanja modal secara konsisten dialokasikan untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Rata-rata kontribusi belanja modal untuk komponen ini mencapai 51,1 persen per tahun, dengan porsi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 61,64 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan sebagai bagian utama dari investasi aset tetap.

Selain itu, belanja modal gedung dan bangunan memiliki kontribusi yang cukup signifikan, dengan rata-rata 29,2 persen per tahun. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 35,43 persen, sementara porsi terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 18,76 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran prioritas belanja modal pemerintah daerah dari pembangunan gedung dan bangunan ke sektor infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan.

Di sisi lain, belanja modal peralatan dan mesin memiliki rata-rata kontribusi sebesar 18,2 persen per tahun, dengan puncaknya pada tahun 2023 mencapai 28,73 persen. Fluktuasi dalam belanja modal ini menunjukkan bahwa pengadaan peralatan dan mesin cenderung disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap tahun.

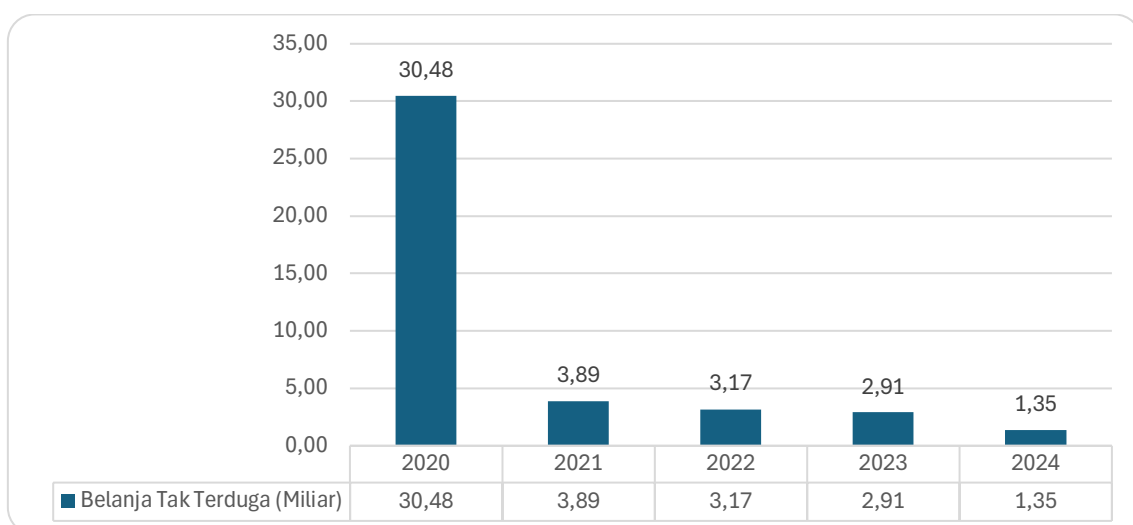
Sementara itu, belanja modal tanah memiliki kontribusi yang sangat kecil, dengan rata-rata hanya 0,1 persen per tahun dan bahkan tidak tercatat dalam beberapa tahun. Demikian pula, belanja modal aset tetap lainnya juga memiliki porsi yang minimal, yaitu rata-rata 1,4 persen per tahun.

Secara keseluruhan, tren belanja modal menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lebih memprioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan serta pembangunan gedung dan bangunan. Sementara itu, belanja untuk tanah dan aset tetap lainnya relatif kecil dan kurang menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja modal daerah.

2.2.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan anggaran, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Pos ini memiliki karakteristik yang unik karena jumlah dan realisasinya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, belanja tak terduga mencapai Rp30,48 miliar, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan penanganan keadaan darurat, seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam. Namun, pada tahun 2021, realisasi belanja tak terduga mengalami penurunan drastis menjadi Rp3,89 miliar, yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan nilai yang semakin menurun, yaitu Rp3,17 miliar pada 2022, Rp2,91 miliar pada 2023, dan Rp1,35 miliar pada tahun 2024.

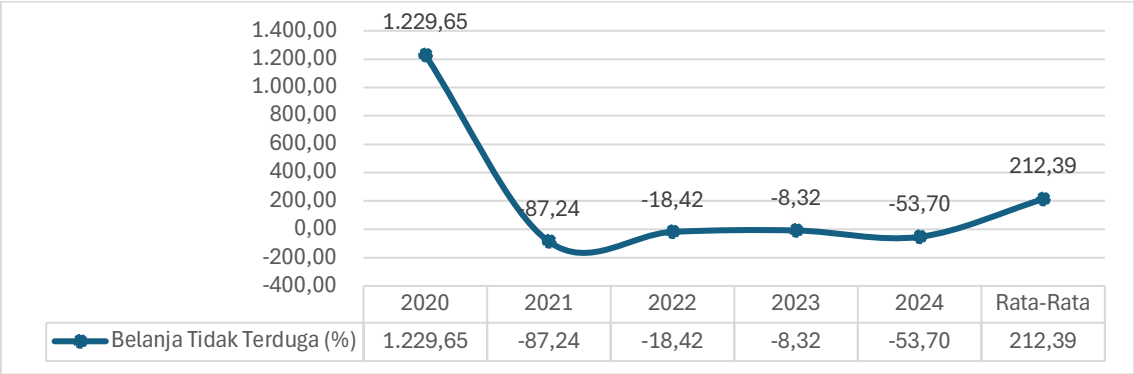


Gambar 2. 81 Realisasi Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Penurunan belanja tak terduga ini dapat mengindikasikan beberapa faktor, seperti peningkatan efektivitas perencanaan anggaran yang lebih matang, berkurangnya kejadian darurat yang membutuhkan alokasi dana tidak terduga, atau adanya kebijakan pengendalian keuangan yang lebih ketat. Meskipun tren ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tetap perlu memastikan bahwa alokasi belanja tak terduga yang lebih kecil tidak menghambat respons cepat terhadap kondisi darurat yang mungkin terjadi di masa depan.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja tak terduga, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen Belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 82 Pertumbuhan Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terdapat fluktuasi yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis dalam belanja tak terduga dengan peningkatan sebesar 1.229,65 persen. Peningkatan yang sangat tinggi ini kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19, yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan krisis kesehatan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Namun, pada tahun 2021, belanja tak terduga mengalami penurunan tajam sebesar 87,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan sebesar

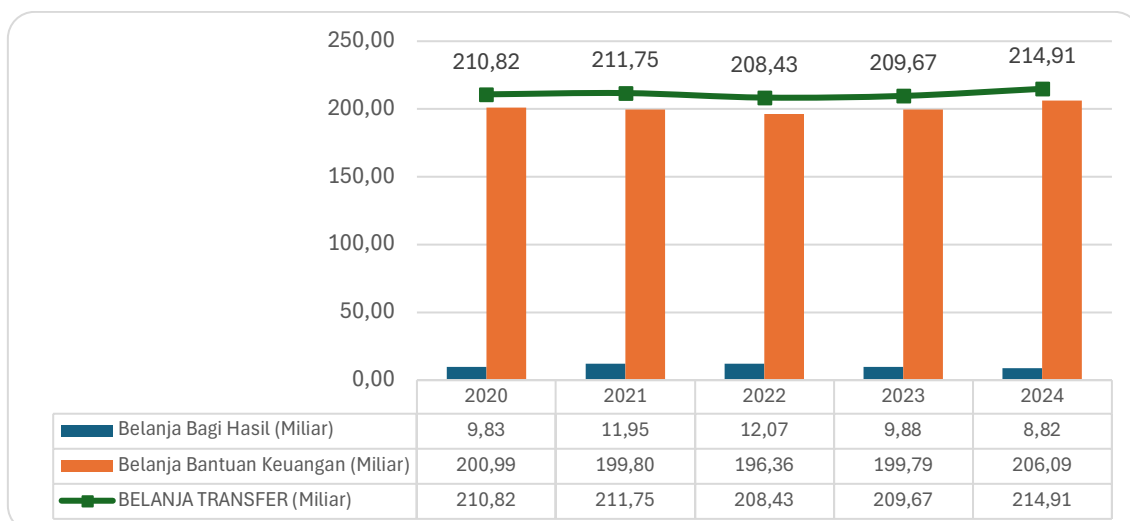
18,42 persen pada tahun 2022, diikuti oleh penurunan sebesar 8,32 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, belanja tak terduga kembali mengalami kontraksi yang cukup besar, yakni sebesar 53,70 persen.

Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga selama periode 2020–2024 menunjukkan angka yang masih cukup tinggi, yaitu 212,39 persen. Namun, jika melihat tren penurunan yang terjadi sejak tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan belanja tak terduga semakin berkurang seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi dan stabilitas fiskal daerah. Penurunan ini juga dapat mencerminkan kebijakan pemerintah daerah yang lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran yang bersifat tidak terduga, sehingga terjadi efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transfer dana ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta memperkuat layanan publik di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan data realisasi belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa total belanja transfer mengalami fluktuasi namun cenderung stabil. Pada tahun 2020, realisasi belanja transfer mencapai Rp210,82 miliar dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp211,75 miliar. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi Rp208,43 miliar sebelum kembali meningkat menjadi Rp209,67 miliar pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, berdasarkan data *unaudited*, belanja transfer diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp214,91 miliar.



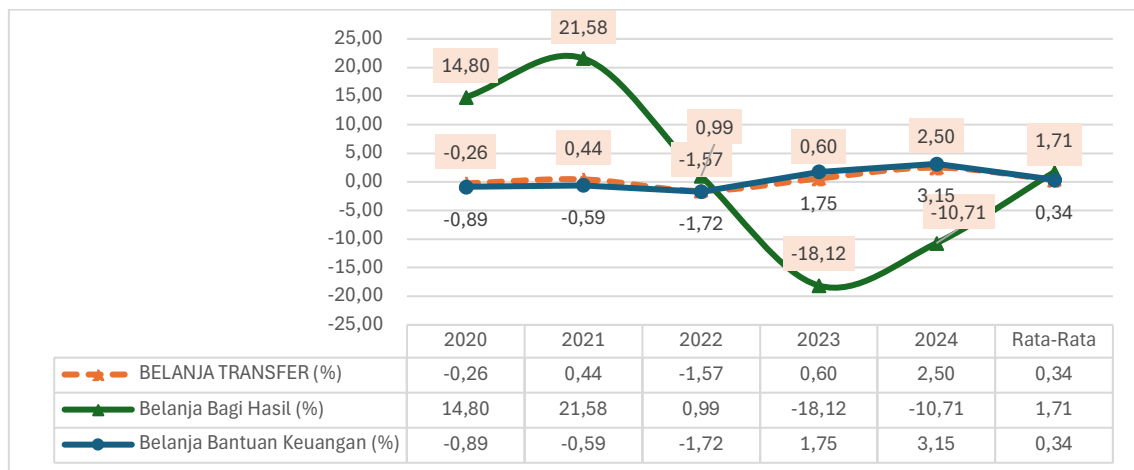
Gambar 2. 83 Realisasi Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil mengalami peningkatan dari Rp9,83 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp12,07 miliar pada tahun 2022. Namun, dalam dua tahun terakhir, belanja bagi hasil mengalami penurunan, yaitu Rp9,88 miliar pada tahun 2023 dan Rp8,82 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, belanja bantuan keuangan menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan realisasi sekitar Rp200 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2020, belanja bantuan keuangan tercatat sebesar Rp200,99 miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp196,36 miliar. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, angka ini kembali meningkat masing-masing menjadi Rp199,79 miliar dan Rp206,09 miliar.

Secara keseluruhan, belanja transfer dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang stabil dengan sedikit fluktuasi. Tren penurunan belanja bagi hasil dapat menjadi perhatian, terutama dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan daerah kepada pihak-pihak terkait. Sementara itu, belanja bantuan keuangan tetap menjadi komponen utama dalam belanja transfer, mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 84 Pertumbuhan Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

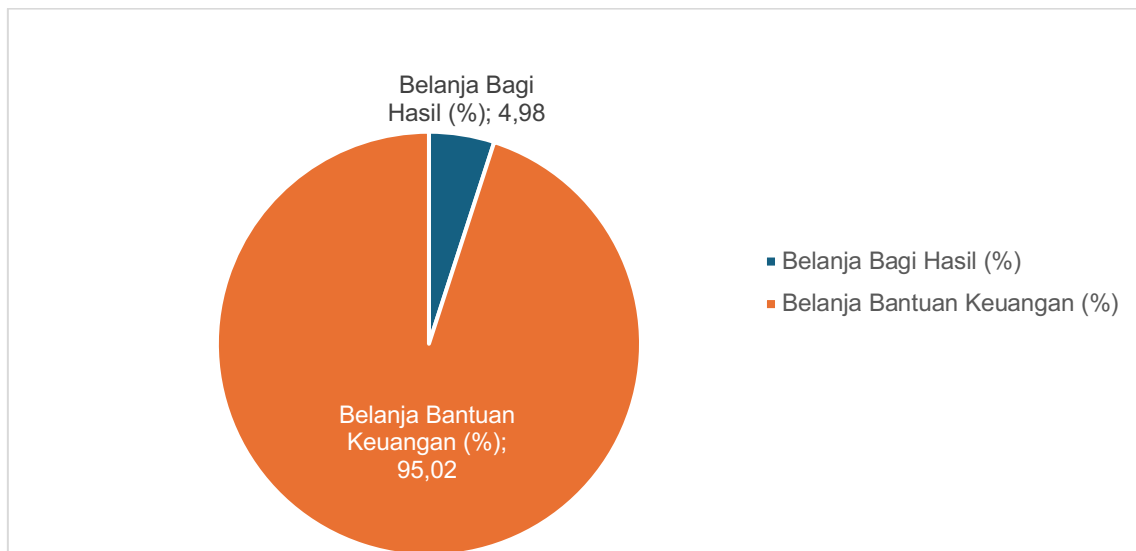
Berdasarkan data pertumbuhan belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, secara rata-rata terdapat peningkatan sebesar 0,34 persen per tahun dalam periode 2020–2024. Meskipun pertumbuhan ini relatif kecil, tren yang terjadi menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, belanja transfer mengalami sedikit kontraksi sebesar -0,26 persen, kemudian tumbuh sebesar 0,44 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi kembali penurunan sebesar -1,57 persen, sebelum akhirnya meningkat sebesar 0,60 persen pada tahun 2023 dan 2,50 persen pada tahun 2024.

Secara lebih rinci, belanja bagi hasil menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,71 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021, dengan kenaikan sebesar 21,58 persen, setelah sebelumnya juga tumbuh signifikan pada tahun 2020 sebesar 14,80 persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi perlambatan, dengan pertumbuhan yang lebih rendah di tahun 2022 (0,99 persen), dan bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2023 (-18,12 persen) serta 2024 (-10,71 persen).

Sementara itu, belanja bantuan keuangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,34 persen per tahun. Dalam lima tahun terakhir, belanja ini cenderung mengalami penurunan, dengan kontraksi pada tahun 2020 (-0,89 persen), 2021 (-0,59 persen), dan 2022 (-1,72 persen). Namun, terjadi pemulihan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 1,75 persen serta peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2024 sebesar 3,15 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja transfer Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi pada komponen belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Penurunan belanja bagi hasil dalam dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian, terutama dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan daerah. Di sisi lain, peningkatan belanja bantuan keuangan pada tahun 2023 dan 2024 dapat mencerminkan adanya dorongan kebijakan fiskal untuk mendukung kebutuhan daerah penerima transfer.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja transfer, berikut disajikan grafik proporsi komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 85 Proporsi Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data kontribusi komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat bahwa belanja bantuan keuangan memiliki proporsi yang dominan dalam struktur belanja transfer selama periode 2020

hingga 2024. Rata-rata kontribusi belanja bantuan keuangan mencapai 95,02 persen per tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi belanja transfer diarahkan untuk mendukung program atau kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme bantuan keuangan.

Sementara itu, belanja bagi hasil memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja bantuan keuangan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,98 persen per tahun. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dalam kontribusi belanja bagi hasil, tren keseluruhannya menunjukkan penurunan, dari 5,79 persen pada tahun 2022 menjadi 4,11 persen pada tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan perubahan dalam alokasi anggaran atau kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada penyaluran dana dalam bentuk bantuan keuangan dibandingkan dengan mekanisme bagi hasil.

Secara keseluruhan, struktur belanja transfer Kabupaten Manggarai Barat cenderung stabil, dengan dominasi belanja bantuan keuangan sebagai instrumen utama dalam mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak efektivitas alokasi belanja transfer terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan mencakup seluruh transaksi keuangan pemerintah yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran daerah, yang harus dibayar atau akan diterima kembali dalam sistem penganggaran pemerintah. Tujuan utama pembiayaan adalah menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, investasi daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) mengatur bahwa terdapat enam sumber penerimaan pembiayaan, yaitu: (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan (6) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, sistematis APBD terdiri dari pendapatan dikurangi belanja, yang menghasilkan surplus atau defisit. Jika terjadi defisit, maka pembiayaan menjadi instrumen untuk menutup kekurangan tersebut, sementara jika terjadi surplus, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran strategis yang mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, penerimaan pembiayaan mengalami fluktuasi signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan mencapai Rp77,80 miliar, namun mengalami penurunan drastis menjadi Rp37,77 miliar pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat signifikan hingga Rp256,56 miliar, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp247,53 miliar. Setelah itu, penerimaan pembiayaan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp12,93 miliar, sebelum meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi Rp66,86 miliar.

Tabel 2. 31 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	77.798.534.633,36	37.766.015.547,02	256.560.815.271,55	12.933.269.554,81	66.855.292.939,98
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	77.788.652.133,36	37.766.015.547,02	9.027.531.679,55	12.933.269.554,81	66.855.292.939,98
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.882.500,00	-	247.533.283.592,00	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00	5.000.000.000,00	24.609.431.784,00	40.861.891.996,00
3.2.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	23.574.594.664,00	35.361.891.996,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.034.837.120,00	5.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	72.798.534.633,36	18.766.015.547,02	251.560.815.271,55	-11.676.162.229,19	25.993.400.943,98
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	37.766.015.547,02	9.027.531.679,55	12.933.239.834,81	66.855.292.939,99	33.957.918.237,84

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024

Komponen utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA mengalami tren yang berfluktuasi, dari Rp77,79 miliar pada tahun 2020, turun menjadi Rp37,77 miliar pada tahun 2021, dan lebih rendah lagi menjadi Rp9,03 miliar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai SiLPA kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp12,93 miliar dan Rp66,86 miliar.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga menunjukkan pola yang beragam. Pada tahun 2020 dan 2022, pengeluaran pembiayaan relatif stabil sebesar Rp5,00 miliar. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi Rp19,00 miliar, kemudian kembali turun menjadi Rp5,00 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pengeluaran pembiayaan melonjak signifikan menjadi Rp24,61 miliar, sebelum kembali meningkat lebih tinggi pada tahun 2024 menjadi Rp40,86 miliar. Komponen utama pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan penyertaan modal pemerintah daerah. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri mulai terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp23,57 miliar dan meningkat menjadi Rp35,36 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, penyertaan modal pemerintah daerah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp1,03 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum meningkat kembali menjadi Rp5,50 miliar pada tahun 2024.

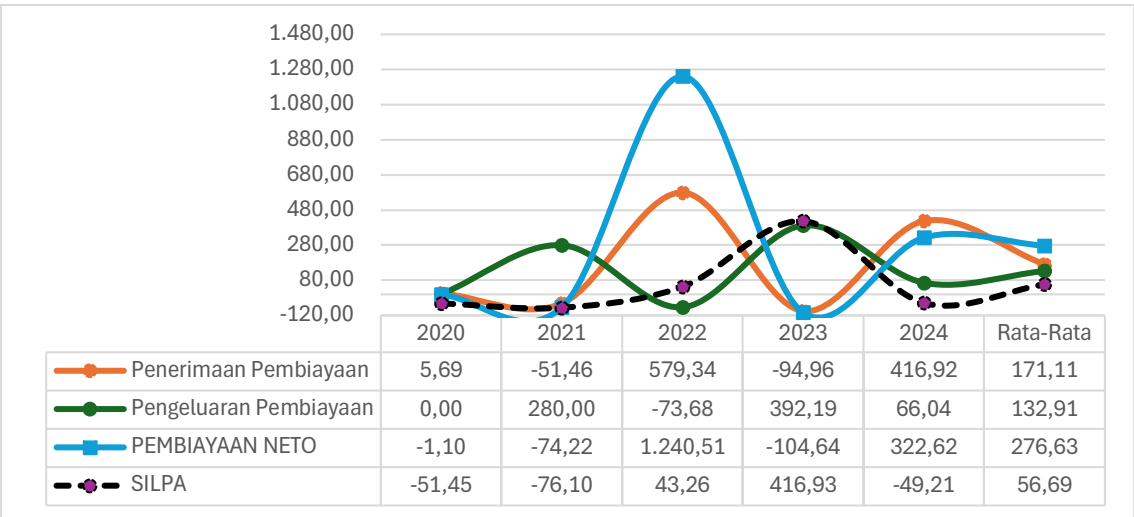
Dari sisi pembiayaan netto, terdapat tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp72,80 miliar, namun turun drastis menjadi Rp18,77 miliar pada tahun 2021. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan nilai pembiayaan netto sebesar Rp251,56 miliar, yang sebagian besar dipengaruhi oleh penerimaan pinjaman daerah. Namun, pada tahun 2023 terjadi defisit pembiayaan netto sebesar Rp-11,68 miliar akibat meningkatnya pengeluaran pembiayaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Pada tahun 2024, pembiayaan netto kembali positif sebesar Rp25,99 miliar.

Adapun SILPA sebagai indikator efisiensi pengelolaan anggaran daerah juga mengalami variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp37,77 miliar, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp9,03 miliar dan Rp12,93 miliar.

Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan SILPA hingga mencapai Rp66,86 miliar, sebelum kembali turun pada tahun 2024 menjadi Rp33,96 miliar. Perubahan nilai SILPA ini menunjukkan dinamika dalam pengelolaan anggaran daerah, yang dipengaruhi oleh penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya ketergantungan terhadap SiLPA sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan, serta adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam pengeluaran pembiayaan. Peningkatan pengeluaran pembiayaan, terutama untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri serta penyertaan modal pemerintah daerah mengindikasikan adanya strategi pembiayaan yang lebih agresif dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam perencanaan ke depan, diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen pembiayaan daerah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024.



Gambar 2. 86 Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah dan SILPA, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen pembiayaan daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam berbagai aspek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mengalami pertumbuhan yang sangat variatif, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 579,34 persen, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh penerimaan pinjaman daerah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis sebesar -94,96 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 416,92 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, pertumbuhan penerimaan pembiayaan menunjukkan angka sebesar 171,11 persen per tahun.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga mengalami tren yang tidak stabil. Tahun 2021 mencatat lonjakan sebesar 280 persen, yang disusul oleh penurunan tajam pada tahun 2022 sebesar -73,68 persen. Kemudian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 392,19 persen, yang dapat diindikasikan sebagai pembayaran pokok pinjaman atau peningkatan penyertaan modal daerah. Pada tahun 2024, pertumbuhan pengeluaran pembiayaan kembali mengalami kenaikan sebesar 66,04 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 132,91 persen.

Pembiayaan neto menunjukkan pola yang sangat fluktuatif dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1.240,51 persen. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis hingga -104,64 persen, yang berarti pembiayaan mengalami defisit atau terdapat pengeluaran pembiayaan yang lebih besar dari penerimaan. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 322,62 persen. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan pembiayaan neto tercatat sebesar 276,63 persen per tahun.

Sementara itu, pertumbuhan SILPA juga menunjukkan ketidakstabilan yang cukup ekstrem. Pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan SILPA mengalami kontraksi masing-masing sebesar -51,45 persen dan -76,10 persen, yang mengindikasikan adanya penggunaan dana yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan positif sebesar 43,26 persen, diikuti oleh lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebesar 416,93 persen. Akan tetapi, pada tahun 2024, pertumbuhan SiLPA kembali mengalami

penurunan sebesar -49,21 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan SILPA menunjukkan angka 56,69 persen per tahun.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Manggarai Barat masih menunjukkan volatilitas yang tinggi, terutama dalam aspek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta SILPA. Lonjakan dan kontraksi yang terjadi dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya faktor eksternal maupun kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap dinamika pembiayaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang lebih stabil dan terukur agar dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran daerah.

2.2.1.4 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Neraca keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu daerah meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada dalam satu periode tertentu. Analisis terhadap neraca keuangan penting dilakukan untuk menilai kesehatan fiskal daerah, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Perkembangan realisasi neraca daerah Kabupaten Manggarai Barat selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	2.138.132.230.008,64	2.210.919.208.336,99	3.896.761.643.640,99	4.278.373.840.756,18	4.566.409.535.623,72
1.1	ASET LANCAR	95.241.555.060,50	130.139.910.849,85	77.495.395.953,97	109.901.637.205,04	96.542.756.532,54
	Kas	38.085.949.750,52	9.274.922.767,91	15.220.296.108,81	66.860.006.660,98	34.037.749.510,30
	Piutang	23.501.744.874,78	60.021.449.602,51	47.851.227.109,84	31.205.112.850,09	31.389.124.245,87
	Persediaan	33.568.943.768,53	60.760.955.146,10	14.298.130.881,99	11.316.089.667,30	24.207.165.714,69
	Beban Dibayar Dimuka	84.916.666,67	82.583.333,33	125.741.853,33	520.428.026,67	6.908.717.061,67
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	81.409.974.451,00	103.062.114.863,00	95.002.402.172,00	85.444.904.567,00	82.606.013.158,00
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	42.478.000,00	-	-	-	-
	Investasi Jangka Panjang Permanen	81.367.496.451,00	103.062.114.863,00	95.002.402.172,00	85.444.904.567,00	82.606.013.158,00
1.3	ASET TETAP	1.927.921.800.025,00	1.945.353.063.845,00	3.664.447.048.100,88	4.019.232.954.669,00	4.307.103.168.812,93
	Tanah	241.113.498.321,00	242.923.171.329,00	1.548.578.763.284,00	1.698.877.169.559,00	1.697.970.844.601,00
	Peralatan dan Mesin	290.998.093.458,00	318.642.210.874,00	379.907.307.706,00	523.566.644.783,00	571.878.537.803,00
	Gedung dan Bangunan	687.358.335.573,00	763.596.751.733,00	967.341.444.390,00	1.100.559.670.049,00	1.251.347.173.543,53
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.572.733.451.476,00	1.654.943.313.600,00	1.795.700.308.617,00	2.141.693.472.297,00	2.559.944.353.464,98
	Aset tetap Lainnya	1.173.884.200,00	2.337.010.110,00	3.696.116.310,00	5.176.923.010,00	15.258.398.374,00
	Konstruksi dalam pengerjaan	30.302.396.653,00	3.746.862.145,00	170.145.676.915,00	22.857.132.645,00	23.237.874.195,32
	Akumulasi Penyusutan	(895.757.859.656,00)	(1.040.836.255.946,00)	(1.200.922.569.121,12)	(1.473.498.057.674,00)	(1.812.534.013.168,90)
1.4	PROPERTI INVESTASI	-	-	-	1.762.434.400,00	1.718.284.000,00
	Properti Investasi - Tanah	-	-	-	265.000.000,00	265.000.000,00
	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	-	-	-	2.207.520.000,00	2.207.520.000,00
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	-	-	-	-710.085.600,00	-754.236.000,00
1.5	ASET LAINNYA	33.558.900.472,14	32.364.118.779,14	59.816.797.414,14	62.031.909.915,14	78.439.313.120,25
	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	1.677.352.999,14	1.880.720.125,14	2.549.753.762,14	4.200.351.615,14	4.608.800.769,25
	Aset tak berwujud	4.584.631.427,00	4.189.306.147,00	4.704.855.887,00	5.556.431.817,00	6.185.427.913,00
	Aset Lain-lain	27.296.916.046,00	26.294.092.507,00	52.562.187.765,00	52.275.126.483,00	67.645.084.438,00
1.6	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	KEWAJIBAN	2.208.114.952,67	783.229.793,53	279.914.610.652,49	230.381.944.614,00	199.081.465.233,13
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	2.208.114.952,67	783.229.793,53	55.955.921.724,49	42.730.815.485,00	46.792.228.100,13
	Utang perhitungan pihak ketiga	319.934.203,50	247.391.088,36	2.287.056.274,00	4.713.721,00	77.640.272,46
	Utang Bunga	-	-	1.125.983.661,00	1.193.762.022,00	1.000.232.644,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	23.574.594.664,00	35.361.891.996,00	35.361.891.996,00
	Pendapatan diterima dimuka	184.088.154,17	109.419.404,17	19.168.487,50	308.122.900,00	509.166.666,67
	Utang belanja	1.672.652.695,00	416.593.301,00	16.388.974.560,99	5.723.784.846,00	8.548.614.648,00
	Utang jangka pendek lainnya	31.439.900,00	9.826.000,00	12.560.144.077,00	138.540.000,00	1.294.681.873,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	223.958.688.928,00	187.651.129.129,00	152.289.237.133,00
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	223.958.688.928,00	187.651.129.129,00	152.289.237.133,00
3	EKUITAS	2.135.924.115.055,97	2.210.135.978.543,46	3.616.847.032.988,50	4.047.991.896.142,18	4.367.328.070.390,59
	Ekuitas	2.135.924.115.055,97	2.210.135.978.543,46	3.616.847.032.988,50	4.047.991.896.142,18	4.367.328.070.390,59
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.138.132.230.008,64	2.210.919.208.336,99	3.896.761.643.640,99	4.278.373.840.756,18	4.566.409.535.623,72

Sumber: Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2020-2024

Berdasarkan data yang disajikan, total aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp2,14 triliun dan meningkat menjadi Rp4,55 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lonjakan signifikan pada aset tetap, yang naik dari Rp1,93 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,31 triliun pada tahun 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Hal ini mencerminkan adanya investasi yang cukup besar dalam infrastruktur daerah.

Aset lancar menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kas mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 tetapi kembali meningkat pada tahun 2023 sebelum mengalami penurunan kembali pada tahun 2024. Persediaan juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp60,76 miliar dan kembali meningkat pada tahun 2024 setelah mengalami penurunan sebelumnya.

Sementara itu, kewajiban daerah menunjukkan lonjakan tajam pada tahun 2022, di mana nilai kewajiban meningkat dari Rp783,2 juta pada tahun 2021 menjadi Rp279,91 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh munculnya kewajiban jangka panjang yang tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kewajiban tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, nilainya tetap cukup signifikan, yaitu Rp199,28 miliar pada tahun 2024. Kewajiban jangka pendek juga mengalami fluktuasi, dengan kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebelum mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dari sisi ekuitas, terdapat peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan pertumbuhan aset. Pada tahun 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp2,14 triliun dan meningkat menjadi Rp4,35 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kekayaan bersih pemerintah daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat kewajiban yang perlu dikelola dengan optimal.

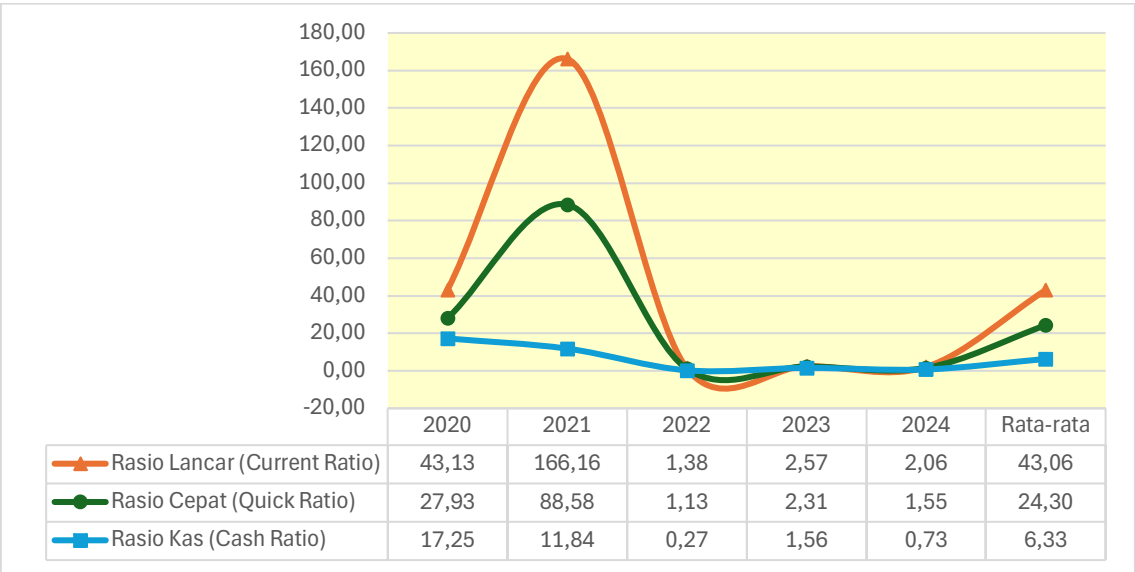
Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama dalam hal peningkatan aset tetap dan ekuitas. Namun, fluktuasi pada aset lancar dan kenaikan signifikan pada kewajiban jangka panjang perlu menjadi perhatian agar

tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah di masa mendatang. Pengelolaan utang dan optimalisasi aset lancar perlu diperhatikan untuk memastikan likuiditas dan keberlanjutan fiskal yang lebih sehat.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2.2.1.4.1 Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



Gambar 2. 87 Rasio Likuiditas Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya,

sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Pada tahun 2020, Rasio lancar (*current ratio*) mencapai 43,13 dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 menjadi 166,16. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis hingga 1,38, yang kemudian sedikit meningkat menjadi 2,57 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 2,16 pada tahun 2024. Secara rata-rata, rasio lancar berada di angka 43,06, yang mengindikasikan bahwa likuiditas pemerintah daerah masih cukup baik, meskipun terjadi ketidakstabilan di beberapa tahun.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Pada tahun 2020, Rasio cepat (*quick ratio*) berada di angka 27,93, meningkat signifikan menjadi 88,58 pada tahun 2021, namun turun drastis menjadi 1,13 pada tahun 2022. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini sedikit meningkat menjadi 2,31 di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 1,32 pada tahun 2024. Rata-rata rasio cepat sebesar 24,30, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan aset likuid

cepat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek masih cukup fluktuatif dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

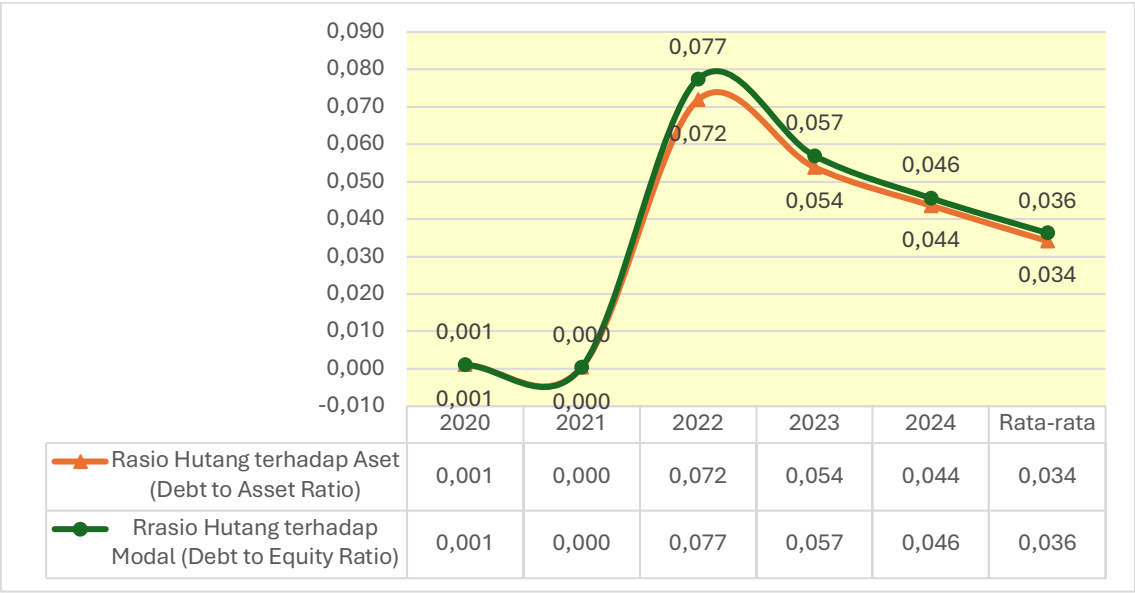
Rasio kas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas yang dimiliki, mengalami tren yang lebih rendah dibandingkan dengan dua rasio lainnya. Pada tahun 2020, rasio kas (*cash ratio*) tercatat sebesar 17,25, kemudian menurun menjadi 11,84 pada tahun 2021. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan rasio kas hanya 0,27, diikuti dengan kenaikan menjadi 1,56 pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 0,72 pada tahun 2024. Rata-rata rasio kas sebesar 6,33 memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek cukup rendah, yang mengindikasikan potensi risiko likuiditas apabila tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, data rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan aset lancar dan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan signifikan pada rasio likuiditas dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi indikator perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, guna menjaga keseimbangan likuiditas yang lebih stabil.

2.2.1.4.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang

dianalisis, yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



Gambar 2. 88 Rasio Solvabilitas Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat ketergantungan terhadap utang dalam struktur keuangan daerah relatif rendah..

1) Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Rasio hutang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 0,072, kemudian menurun menjadi 0,054 pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 0,044 pada tahun 2024. Rata-rata rasio ini selama lima tahun berada pada angka 0,034, yang menunjukkan bahwa porsi kewajiban dibandingkan dengan total aset masih dalam batas aman.

2) Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

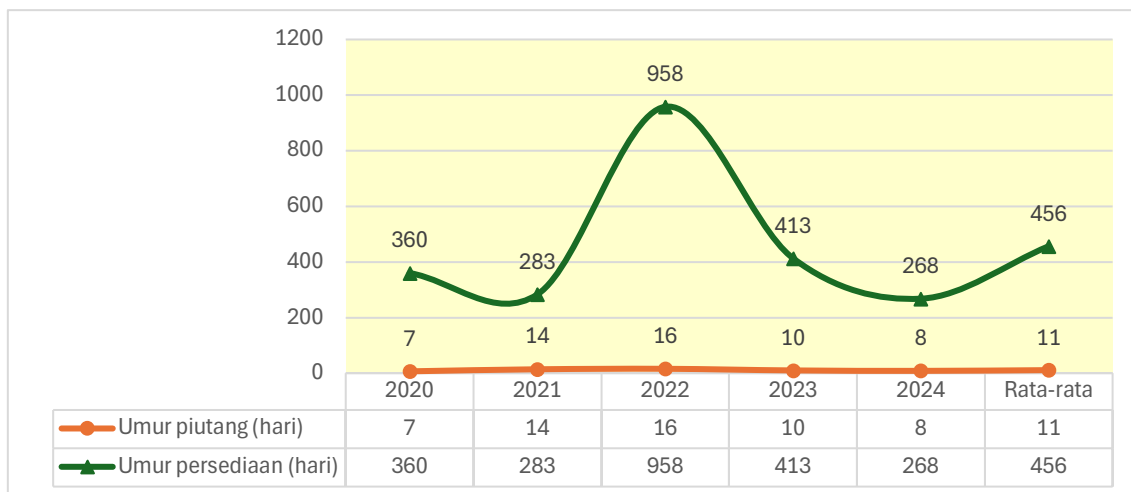
Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio hutang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) menunjukkan pola yang serupa. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio ini berada pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 0,001 dan 0,000. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan angka 0,077, kemudian sedikit menurun menjadi 0,057 pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 0,046 pada tahun 2024. Rata-rata rasio hutang terhadap modal selama periode tersebut berada pada angka 0,036.

Secara umum, tingkat solvabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan kondisi keuangan yang relatif stabil dengan tingkat kewajiban yang masih terkendali. Meskipun terdapat lonjakan rasio pada tahun 2022, penurunan pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan adanya upaya pengelolaan kewajiban yang lebih baik. Tingkat rasio yang masih berada pada kisaran rendah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan fiskalnya tanpa tekanan yang signifikan dari beban utang. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara aset, modal, dan kewajiban guna mendukung keberlanjutan fiskal di masa mendatang.

2.2.1.4.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



Gambar 2. 89 Rasio Aktivitas Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terdapat fluktuasi pada umur piutang dan umur persediaan selama periode 2020 hingga 2024.

1) Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Rata-rata umur piutang selama lima tahun terakhir adalah 11 hari, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola penerimaan piutang dengan relatif cepat. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan arus kas dari pendapatan yang bersumber dari piutang.

2) Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang

dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Umur persediaan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dengan nilai tertinggi sebesar 958 hari pada tahun 2022 dan nilai terendah sebesar 234 hari pada tahun 2024. Rata-rata umur persediaan selama lima tahun terakhir adalah 456 hari, yang menunjukkan adanya kecenderungan persediaan bertahan lama sebelum digunakan atau dikonversi menjadi aset lain. Angka ini cukup tinggi dan dapat mengindikasikan potensi inefisiensi dalam manajemen persediaan, yang dapat berdampak pada biaya penyimpanan serta efektivitas alokasi sumber daya.

Secara keseluruhan, rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan piutang relatif baik dengan waktu penagihan yang cukup singkat, manajemen persediaan masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi akumulasi barang yang dapat berdampak pada efisiensi penggunaan aset daerah.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2. 33 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	273.711.972.882,45	291.778.944.507,00	321.405.632.756,00	354.050.102.450,00	390.008.632.431,00	429.607.663.436,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.098.467.855.685,09	1.136.909.665.097,00	1.111.229.939.021,00	1.160.284.178.909,00	1.212.801.507.997,00	1.269.084.965.162,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.455.143.828,00	14.549.793.283,00	14.622.542.249,00	14.695.654.961,00	14.769.133.235,00	14.842.978.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.386.634.972.395,54	1.443.238.402.887,00	1.447.258.114.026,00	1.529.029.936.320,00	1.617.579.273.663,00	1.713.535.607.498,00
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	947.895.943.574,68	989.357.294.603,00	994.957.665.886,00	1.021.605.457.758,00	1.068.581.501.036,00	1.050.274.919.910,00
2.2	Belanja Modal	214.515.889.849,00	168.505.282.809,00	157.211.916.446,00	198.945.607.591,00	226.418.643.530,00	353.298.893.722,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.347.141.302,00	10.350.626.957,00	8.080.167.850,00	8.888.183.535,00	9.777.001.889,00	10.754.702.077,00
2.4	Belanja Transfer	214.911.480.376,00	229.663.306.522,00	241.146.471.848,00	253.203.795.440,00	265.863.985.212,00	279.157.184.473,00
	JUMLAH BELANJA	1.378.670.455.101,68	1.397.876.510.891,00	1.401.396.222.030,00	1.482.643.044.324,00	1.570.641.131.667,00	1.693.485.700.182,00
	SURPLUS/DEFISIT	7.964.517.293,86	45.361.891.996,00	45.861.891.996,00	46.386.891.996,00	46.938.141.996,00	20.049.907.316,00
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan	66.855.292.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran	40.861.891.996,00	45.361.891.996,00	45.861.891.996,00	46.386.891.996,00	46.938.141.996,00	20.049.907.316,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	25.993.400.943,98	(45.361.891.996,00)	(45.861.891.996,00)	(46.386.891.996,00)	(46.938.141.996,00)	(20.049.907.316,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	33.957.918.237,84	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026 hingga 2030, diperoleh gambaran bahwa pendapatan daerah secara konsisten mengalami pertumbuhan positif, dari Rp1,39 triliun pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp1,71 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan perbaikan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Selain itu, pendapatan transfer juga tetap menjadi sumber utama yang menopang APBD, meskipun dengan laju pertumbuhan yang moderat.

Di sisi belanja daerah, alokasi anggaran juga menunjukkan peningkatan, sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Belanja operasi tetap menjadi komponen dominan dalam struktur pengeluaran daerah, disusul oleh belanja modal yang mengalami peningkatan signifikan terutama pada tahun 2030. Belanja tidak terduga tetap dijaga dalam batas wajar untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

Tren belanja transfer menunjukkan peningkatan dari Rp214,91 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp279,15 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan bagi pemerintahan desa dan entitas lain yang berhak menerima transfer, serta menjaga keseimbangan pembangunan yang merata hingga ke tingkat lokal. Meskipun kontribusinya terhadap total belanja tidak sebesar belanja operasi, peningkatan belanja transfer perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat penerima agar penggunaan dana transfer dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kerangka pendanaan ini mencerminkan kondisi keuangan daerah yang relatif sehat dan berimbang, dengan proyeksi surplus anggaran yang terjaga sepanjang periode. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan optimalisasi PAD, menjaga efisiensi belanja, serta memastikan bahwa belanja transfer benar-benar memberikan manfaat yang berdaya guna bagi masyarakat.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan adalah berdasarkan analisis tren dari data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap objek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan historis, kondisi ekonomi makro yang terjadi, serta kebijakan serta strategi terkait dengan pendapatan daerah di masa mendatang sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut menjadi lebih realistis. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat ditampilkan pada tabel di bawah ini.

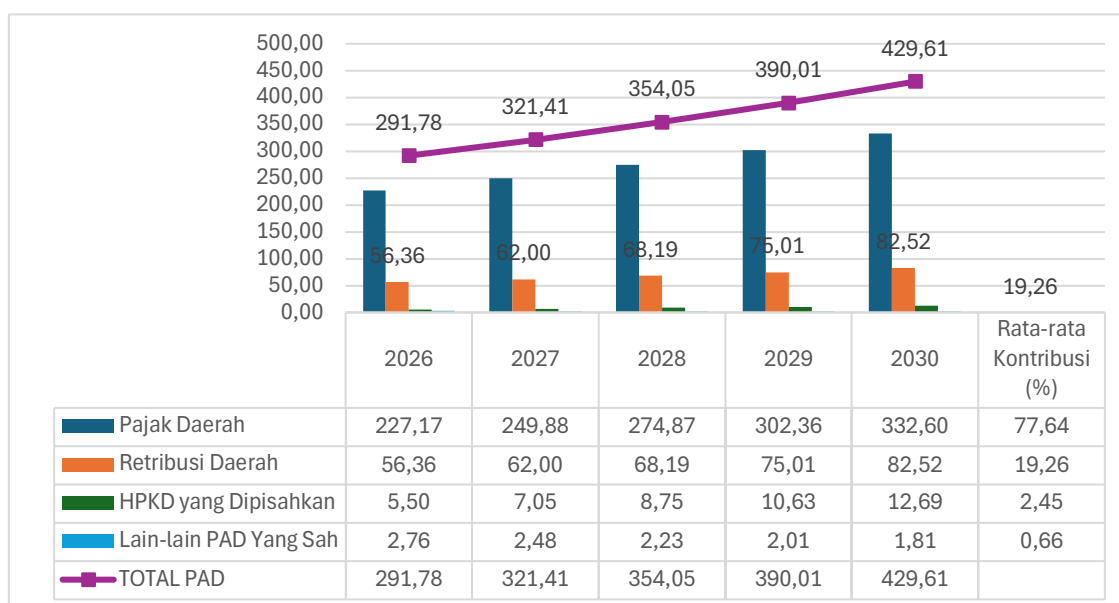
Tabel 2. 34 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	273.711.972.882,45	291.778.944.507,00	321.405.632.756,00	354.050.102.450,00	390.008.632.431,00	429.607.663.436,00
1.1.1	Pajak Daerah	215.536.013.903,00	227.167.667.557,00	249.884.438.313,00	274.872.877.745,00	302.360.165.519,00	332.596.182.071,00
1.1.2	Retribusi Daerah	44.552.912.873,38	56.359.103.540,00	61.995.013.894,00	68.194.515.284,00	75.013.966.812,00	82.515.363.493,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.457.403.444,00	5.496.122.399,00	7.045.734.639,00	8.750.308.103,00	10.625.338.913,00	12.687.872.804,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	11.165.642.662,07	2.756.051.011,00	2.480.445.910,00	2.232.401.318,00	2.009.161.187,00	1.808.245.068,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.098.467.855.685,09	1.136.909.665.097,00	1.111.229.939.021,00	1.160.284.178.909,00	1.212.801.507.997,00	1.269.084.965.162,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.061.970.503.631,09	1.120.997.420.410,00	1.094.265.037.498,00	1.142.235.040.844,00	1.193.635.606.294,00	1.248.768.796.912,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	9.657.322.000,00	12.675.201.300,00	9.813.519.144,00	10.107.924.719,00	10.411.162.461,00	10.723.497.335,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	587.555.198.679,00	657.205.196.450,00	640.871.352.344,00	660.097.492.914,00	679.900.417.701,00	700.297.430.232,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	306.351.513.952,09	292.031.428.660,00	284.494.572.010,00	312.944.029.211,00	344.238.432.132,00	378.662.275.345,00
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	11.904.277.000,00	15.112.648.000,00	15.112.648.000,00	15.112.648.000,00	15.112.648.000,00	15.112.648.000,00
1.2.1.5	Dana Desa	146.502.192.000,00	143.972.946.000,00	143.972.946.000,00	143.972.946.000,00	143.972.946.000,00	143.972.946.000,00
1.2.2	Transfer antar – daerah	36.497.352.054,00	15.912.244.687,00	16.964.901.523,00	18.049.138.065,00	19.165.901.703,00	20.316.168.250,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.497.352.054,00	15.912.244.687,00	16.964.901.523,00	18.049.138.065,00	19.165.901.703,00	20.316.168.250,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.455.143.828,00	14.549.793.283,00	14.622.542.249,00	14.695.654.961,00	14.769.133.235,00	14.842.978.900,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	14.455.143.828,00	14.549.793.283,00	14.622.542.249,00	14.695.654.961,00	14.769.133.235,00	14.842.978.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.386.634.972.395,54	1.443.238.402.887,00	1.447.258.114.026,00	1.529.029.936.320,00	1.617.579.273.663,00	1.713.535.607.498,00

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026 hingga 2030, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,39 triliun pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp1,71 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan optimisme dan potensi ekonomi daerah yang semakin kuat.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp291,78 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp429,61 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan PAD ini didominasi oleh kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang mencerminkan semakin baiknya pengelolaan sumber-sumber pendapatan lokal serta bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan bahwa sektor usaha milik daerah mulai memberikan kontribusi yang lebih berarti.



Gambar 2. 90 Proyeksi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

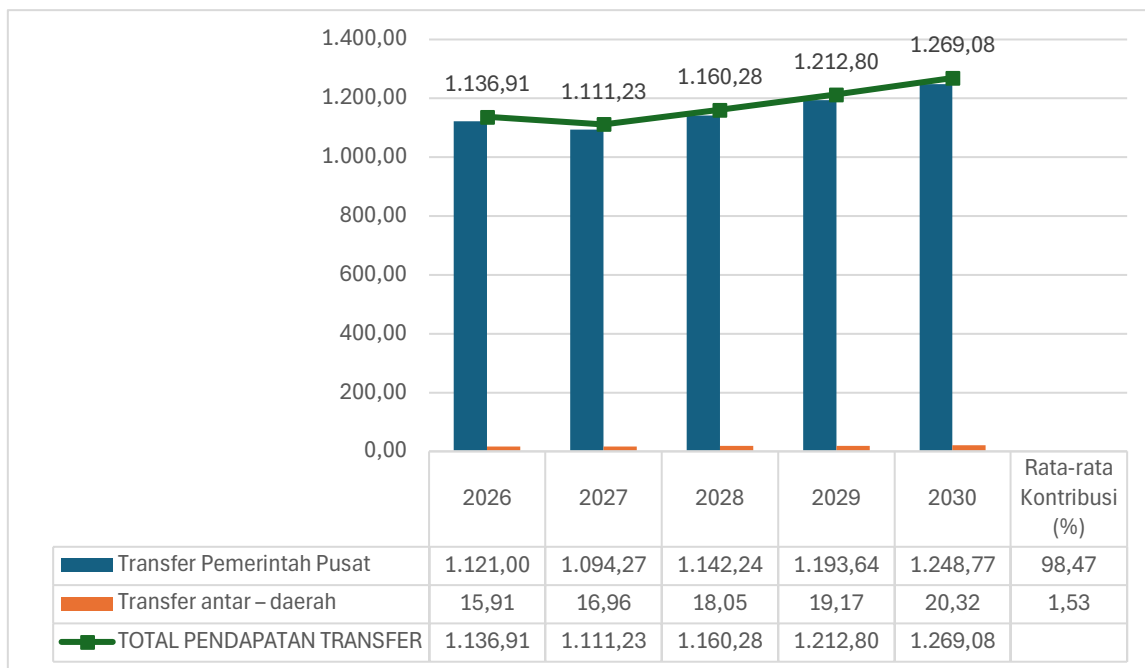
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Secara kontribusi, pajak daerah menjadi sumber dominan dengan rata-rata kontribusi sebesar 77,64 persen, menunjukkan peran penting sektor ini dalam menopang PAD. Peningkatan penerimaan pajak menandakan semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta membaiknya sistem pengelolaan pajak daerah. Selanjutnya, retribusi daerah menyumbang sekitar 19,26 persen terhadap PAD dengan tren pertumbuhan yang stabil, mencerminkan penguatan layanan publik berbasis retribusi yang terus dioptimalkan.

Kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD) juga menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun persentasenya masih relatif kecil, yaitu rata-rata 2,45 persen. Hal ini menggambarkan potensi yang dapat terus dikembangkan dari unit-unit usaha milik daerah untuk menopang PAD ke depan. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah cenderung menurun, dengan kontribusi rata-rata hanya 0,66 persen, sehingga menjadi area yang perlu dibenahi agar dapat memberikan sumbangsih lebih optimal.

Secara keseluruhan, proyeksi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki peluang yang kuat untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, namun tetap memerlukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan serta penciptaan sumber-sumber pendapatan baru agar pertumbuhan tersebut dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi 76,10 persen dari total pendapatan. Komponen terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dengan kontribusi rata-rata mencapai 98,45 persen dari total pendapatan transfer, yang menunjukkan tren peningkatan stabil dari sekitar Rp1,098 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,269 triliun pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan ketergantungan fiskal yang masih tinggi terhadap dana perimbangan dan transfer pusat.



Gambar 2. 91 Proyeksi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Transfer antar-daerah berkontribusi relatif kecil, rata-rata hanya 1,53 persen, meskipun nilainya menunjukkan peningkatan secara bertahap dari Rp15,91 miliar menjadi Rp20,32 miliar dalam lima tahun proyeksi. Kenaikan ini mencerminkan potensi yang masih dapat dikembangkan dalam kerja sama dan bagi hasil antarwilayah guna memperkuat keuangan daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dana transfer ini secara efisien, efektif, dan akuntabel agar benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pertumbuhan yang sangat terbatas dan cenderung stagnan. Hal ini menjadi catatan penting agar pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam menggali potensi pendapatan yang lebih variatif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proyeksi ini mencerminkan kondisi fiskal Kabupaten Manggarai Barat yang stabil dengan peluang pertumbuhan yang menjanjikan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat PAD, meningkatkan kemandirian fiskal, serta menjaga efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer, guna memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan kebijakan pendapatan daerah yang fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas penerimaan transfer, serta penguatan tata kelola penerimaan daerah. Strategi ini diarahkan agar target penerimaan daerah tercapai secara realistis, berkelanjutan, dan mendukung pembiayaan pembangunan. Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat di masa mendatang diarahkan pada:

- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui: (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib

- pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- e. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - f. Meningkatkan kemampuan SDM dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
 - g. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
 - h. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
 - i. Meningkatkan evaluasi, *monitoring* dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
 - j. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan dividen atas laba yang dicapai dengan penyertaan modal;
 - k. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan
 - l. Peningkatan kerja sama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, atau *stakeholders* lainnya.
 - m. Meningkatkan sinergi dengan perusahaan swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih terstruktur, seperti kontribusi dalam bentuk dana hibah atau penyediaan infrastruktur publik.
 - n. Mendorong kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership* - PPP) dalam pembangunan proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Manggarai Barat dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Proyeksi belanja daerah didasarkan pada analisis tren data historis 2020-2024 untuk setiap objek belanja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah juga menjadi faktor utama agar hasil proyeksi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat memperhitungkan kebutuhan belanja secara proporsional, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memprioritaskan belanja daerah untuk mendukung program strategis yang bersifat mendesak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 2026–2030:

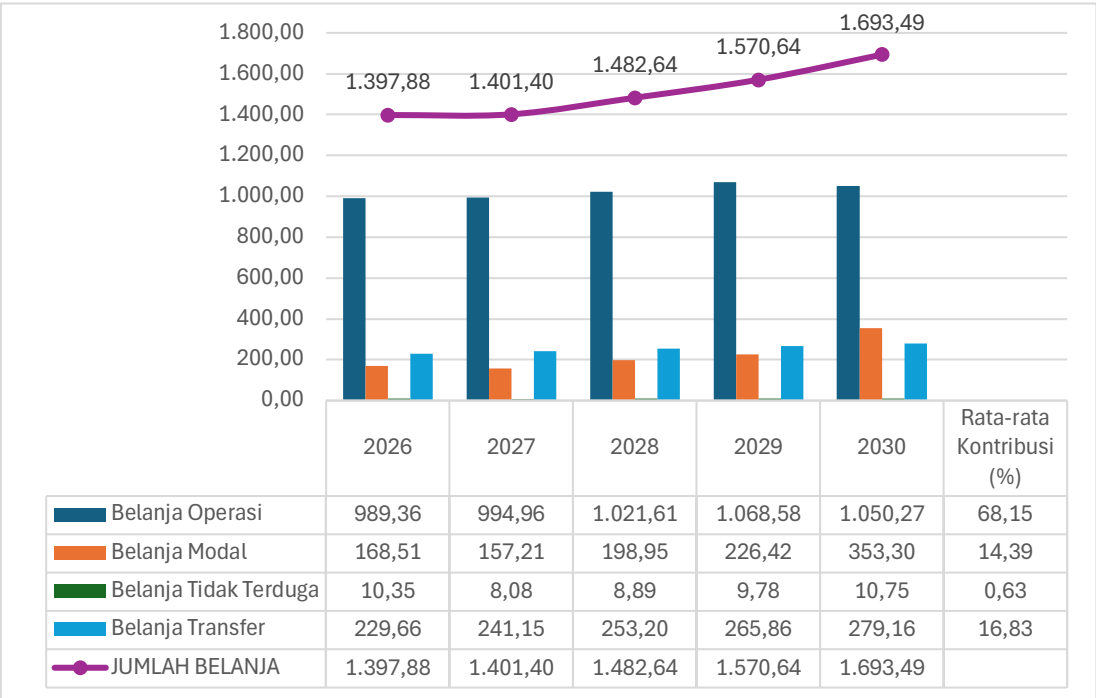
Tabel 2. 35 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	947.895.943.574,68	989.357.294.603,00	994.957.665.886,00	1.021.605.457.758,00	1.068.581.501.036,00	1.050.274.919.910,00
2.1.1	Belanja Pegawai	464.207.980.728,00	553.660.118.465,00	564.733.320.834,00	576.027.987.251,00	587.548.546.996,00	599.299.517.935,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	416.560.100.628,68	414.638.816.681,00	410.220.353.015,00	418.424.760.075,00	426.793.255.277,00	435.329.120.382,00
2.1.3	Belanja Bunga	13.020.161.353,00	9.813.194.464,00	8.593.891.947,00	7.387.600.774,00	5.155.286.912,00	4.236.181.503,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	54.018.769.365,00	10.445.164.993,00	10.610.100.090,00	18.965.109.658,00	48.284.411.851,00	10.610.100.090,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	88.931.500,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
2.2	Belanja Modal	214.515.889.849,00	168.505.282.809,00	157.211.916.446,00	198.945.607.591,00	226.418.643.530,00	353.298.893.722,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.347.141.302,00	10.350.626.957,00	8.080.167.850,00	8.888.183.535,00	9.777.001.889,00	10.754.702.077,00
2.4	Belanja Transfer	214.911.480.376,00	229.663.306.522,00	241.146.471.848,00	253.203.795.440,00	265.863.985.212,00	279.157.184.473,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.822.266.576,00	14.091.758.932,00	14.796.346.878,00	15.536.164.222,00	16.312.972.433,00	17.128.621.055,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	206.089.213.800,00	215.571.547.590,00	226.350.124.970,00	237.667.631.218,00	249.551.012.779,00	262.028.563.418,00
	JUMLAH BELANJA	1.378.670.455.101,68	1.397.876.510.891,00	1.401.396.222.030,00	1.482.643.044.324,00	1.570.641.131.667,00	1.693.485.700.182,00
	SURPLUS/DEFISIT	7.964.517.293,86	45.361.891.996,00	45.861.891.996,00	46.386.891.996,00	46.938.141.996,00	20.049.907.316,00

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Total belanja daerah menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, dari Rp1,38 triliun pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp1,69 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 68,72 persen, mencerminkan besarnya alokasi untuk mendukung operasional pemerintahan, pelayanan dasar, serta kesejahteraan pegawai.



Gambar 2. 92 Proyeksi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari Rp214,5 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp353,30 miliar pada tahun 2030, dengan rata-rata kontribusi 14,39 persen. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendorong investasi pembangunan infrastruktur dan penguatan aset daerah untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Belanja tidak terduga dijaga dalam porsi kecil dengan kontribusi rata-rata sekitar 0,63 persen, namun meningkat setiap tahun sebagai bentuk antisipasi terhadap kebutuhan mendesak dan keadaan darurat. Belanja transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa serta entitas lain dengan kontribusi rata-rata 16,83 persen, menunjukkan peningkatan dari Rp214,91 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp279,16 miliar pada tahun 2030, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.

Secara umum, proyeksi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat mampu menjaga keseimbangan fiskal dengan posisi surplus anggaran yang stabil. Namun demikian, dibutuhkan upaya strategis untuk terus meningkatkan efisiensi belanja, mengendalikan belanja pegawai, serta memperkuat kapasitas fiskal agar keberlanjutan pembangunan dapat terjaga dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan proyeksi belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu menetapkan kebijakan pengelolaan belanja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Kebijakan belanja daerah untuk periode 2026–2030 diarahkan pada sejumlah prinsip utama sebagai berikut.

- a. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pencapaian hasil guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dengan peningkatan alokasi yang terukur dan diikuti oleh peningkatan kinerja serta kualitas layanan publik.
- c. Belanja daerah dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.

- d. Belanja honorarium bagi ASN dianggarkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran program. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya diberikan kepada pegawai yang memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, serta volume pekerjaan, dengan memperhitungkan estimasi sisa persediaan tahun anggaran berjalan. Ketujuh, alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas, dengan mengutamakan produk dalam negeri. Perencanaan kebutuhan BMD menjadi dasar bagi SKPD dalam mengusulkan anggaran, baik untuk pengadaan baru maupun pemeliharaan, dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Belanja modal diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- h. Optimalisasi skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban APBD.
- i. Efisiensi dalam realisasi belanja modal, dengan memastikan proyek yang direncanakan dapat dieksekusi sesuai target waktu dan anggaran.
- j. Belanja bantuan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah desa, agar bantuan keuangan dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya untuk belanja rutin desa.

- k. Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan lebih diperketat, guna menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat membelanjakan secara efektif dan efisien secara signifikan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk mendanai proyek-proyek strategis. Melalui proyeksi pembiayaan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola utang secara lebih efisien, termasuk dalam menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan serta jadwal pelunasan utangnya. Selain itu, proyeksi pembiayaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko keuangan yang mungkin timbul, seperti risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa sumber pembiayaan yang digunakan tidak menimbulkan beban yang berlebihan terhadap anggaran di masa mendatang.

Pertimbangan utama dalam penyusunan proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari tahun 2020 hingga 2024 untuk setiap objek pembiayaan. Di samping itu, proyeksi juga disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, serta kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, termasuk kebijakan defisit anggaran. Melalui pendekatan tersebut, proyeksi pembiayaan diharapkan lebih realistis dan akuntabel. Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 36 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	66.855.292.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	66.855.292.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	40.861.891.996,00	45.361.891.996,00	45.861.891.996,00	46.386.891.996,00	46.938.141.996,00	20.049.907.316,00
3.1.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	35.361.891.996,00	35.361.891.996,00	35.361.891.996,00	35.361.891.996,00	35.361.891.996,00	7.894.844.816,00
3.1.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.500.000.000,00	11.025.000.000,00	11.576.250.000,00	12.155.062.500,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.993.400.943,98	(45.361.891.996,00)	(45.861.891.996,00)	(46.386.891.996,00)	(46.938.141.996,00)	(20.049.907.316,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	33.957.918.237,84	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan baseline tahun 2024, terlihat bahwa pola pembiayaan daerah menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan masih relatif besar dengan nilai Rp66,86 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Namun, mulai tahun 2026 hingga 2030, tidak lagi terdapat proyeksi penerimaan pembiayaan dari SiLPA maupun sumber lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan fiskal yang lebih disiplin dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak lagi bergantung pada pembiayaan tambahan di luar pendapatan riil.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan terus mengalami kenaikan, meskipun dalam skala yang relatif moderat. Pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp45,36 miliar, meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp46,94 miliar pada tahun 2029, sebelum menurun drastis menjadi Rp20,05 miliar pada tahun 2030. Komponen terbesar dari pengeluaran pembiayaan ini adalah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri yang konsisten sebesar Rp35,36 miliar per tahun hingga 2029, kemudian menurun menjadi Rp7,89 miliar pada tahun 2030. Tren ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menunaikan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu, yang sekaligus mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain kewajiban pembayaran pinjaman, terdapat pula alokasi penyertaan modal pemerintah daerah yang menunjukkan tren meningkat secara bertahap. Dari Rp5,5 miliar pada tahun 2024, jumlah ini naik menjadi Rp10 miliar pada tahun 2026 dan terus meningkat hingga Rp12,16 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini dapat ditafsirkan sebagai strategi pemerintah daerah untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau sektor strategis lain yang diharapkan mampu memberikan kontribusi jangka panjang terhadap perekonomian daerah serta memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto daerah pasca-2024 menunjukkan posisi negatif yang konsisten setiap tahun, dengan kisaran defisit pembiayaan antara Rp45 miliar hingga Rp46 miliar, sebelum berkurang pada tahun 2030 menjadi Rp20,05 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas

pembiayaan dari sisi penerimaan tidak lagi tersedia, sementara kewajiban pengeluaran tetap berjalan. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengantisipasi risiko ketidakseimbangan fiskal melalui strategi penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan efisiensi belanja, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Dengan pola tersebut, Kabupaten Manggarai Barat menghadapi tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul dari keterbatasan ruang pembiayaan yang dapat menghambat fleksibilitas fiskal, sedangkan peluang terletak pada potensi memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsistensi dalam mengendalikan pembiayaan dan keberanian melakukan terobosan inovatif dalam pengelolaan aset serta investasi daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah pada periode kepemimpinan ke depan.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

- a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- b. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran;
- c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;

- e. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- f. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 37 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.386.634.972.395,54 00	1.443.238.402.887,00	1.447.258.114.026,00	1.529.029.936.320,00	1.617.579.273.663,00	1.713.535.607.498,00
2	Penerimaan Pembiayaan	66.855.292.939,9824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	1.453.490.265.335,52 00	1.443.238.402.887,00	1.447.258.114.026,00	1.529.029.936.320,00	1.617.579.273.663,00	1.713.535.607.498,00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.453.490.265.335,52 00	1.443.238.402.887,00	1.447.258.114.026,00	1.529.029.936.320,00	1.617.579.273.663,00	1.713.535.607.498,00
3	PRIORITAS I (70 %)		1.010.266.882.020,90	1.013.080.679.818,20	1.070.320.955.424,00	1.132.305.491.564,10	1.199.474.925.248,60
	a. Belanja pegawai		553.660.118.465,00	564.733.320.834,00	576.027.987.251,00	587.548.546.996,00	599.299.517.935,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		45.361.891.996,00	45.861.891.996,00	46.386.891.996,00	46.938.141.996,00	20.049.907.316,00
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya		411.244.871.559,90	402.485.466.988,20	447.906.076.177,00	497.818.802.572,10	580.125.499.997,60
4	PRIORITAS II (20 %)		288.647.680.577,40	289.451.622.805,20	305.805.987.264,00	323.515.854.732,60	342.707.121.499,60
5	PRIORITAS III (10 %)		144.323.840.288,70	144.725.811.402,60	152.902.993.632,00	161.757.927.366,30	171.353.560.749,80

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026 hingga 2030, terlihat bahwa total penerimaan daerah menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp1,44 triliun pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp1,71 triliun pada tahun 2030. Kondisi ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan fiskal dan kesinambungan pembangunan.

Dari keseluruhan kapasitas tersebut, pembagian proporsi berdasarkan tiga prioritas kebijakan menunjukkan pendekatan yang rasional dan sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. Nilai Prioritas I meningkat dari Rp1,01 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,19 triliun pada tahun 2030, menegaskan pentingnya keberlanjutan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintah..
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi anggaran dalam kelompok ini juga mengalami peningkatan yang stabil hingga Rp342,71 miliar pada tahun 2030. Adapun Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati mencakup:
 - 1) Beasiswa Pendidikan Dokter
 - 2) Optimalisasi aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
 - 3) Bantuan untuk anak sekolah
 - 4) Peningkatan Kualitas Guru
 - 5) Fasmadewi (Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata)
 - 6) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan

- 7) Penanganan AKI/AKB
- 8) Pelatihan Naker dan UMKM Berbasis Kebutuhan Pasar
- 9) Pembangunan dan rehab Jalan/Jembatan
- 10) Program Sanitasi dan Air Bersih
- 11) Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan
- 12) Program Pemagangan Kerja

Program-program prioritas tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (*mandatory spending*) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas I (70 persen dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah)

- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Porsi ini juga mengalami pertumbuhan, naik dari Rp144,32 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp171,35 miliar di tahun 2030

Secara keseluruhan, struktur proyeksi kapasitas keuangan riil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya tata kelola fiskal yang sehat dan berbasis prioritas. Pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara belanja rutin, pembangunan strategis, dan program inovatif dalam bingkai kebijakan fiskal yang bertanggung jawab. Dengan tren peningkatan yang terukur dan konsistensi dalam pengalokasian sumber daya, Manggarai Barat menunjukkan kesiapan untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperluas cakupan layanan publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Subbab ini berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang harus direspons di dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029. Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan analisis data yang telah disajikan dalam subbab sebelumnya, hasil FGD dengan perangkat daerah, serta masukan dari berbagai *stakeholders*. Sementara itu, isu strategis Kabupaten Manggarai Barat dirumuskan melalui hasil analisis tabulasi silang terhadap isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional, serta Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 dan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Manggarai Barat.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi eksisting saat perencanaan disusun. Subbab ini menyajikan permasalahan pembangunan yang dilihat dari dua sudut pandang, yaitu permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Manggarai Barat yang menampilkan isu-isu lintas sektor dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan berdasarkan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.3.2 Permasalahan lintas sektor

Permasalahan lintas sektor Kabupaten Manggarai Barat diidentifikasi melalui analisis berdasarkan landasan transformasi, yang secara umum

dikategorikan berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan dan landasan transformasi dalam perencanaan jangka panjang. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan menelaah capaian kinerja serta melalui diskusi kelompok terfokus bersama organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Manggarai Barat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 38 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor Kabupaten Manggarai Barat

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya daya saing ekonomi kerakyatan	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perindustrian
			Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan
			Belum optimalnya pertumbuhan sektor perikanan
			Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian
			Belum optimalnya stabilitas harga barang
			Belum optimalnya ketahanan pangan
			Belum optimalnya pembentukan modal tetap bruto
			Belum optimalnya pertumbuhan sektor koperasi dan UKM
	Belum optimalnya daya saing pariwisata inklusif	Belum optimalnya kunjungan dan daya beli wisatawan	Belum optimalnya pengembangan daya tarik destinasi
			Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata
			Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Sosial	Belum optimalnya keberlanjutan upaya penurunan kemiskinan	Belum optimalnya layanan perlindungan sosial	Belum optimalnya Integrasi Data kemiskinan baik melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
			Kurangnya kolaborasi Stakeholder dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Belum optimalnya penguatan daya saing SDM	Akses dan kualitas layanan dasar pendidikan belum merata	Sarana dan prasarana sekolah masih terbatas dan belum merata
			Kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal
			Sebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang belum merata
			Partisipasi pada pendidikan tinggi masih rendah
			Literasi masyarakat masih rendah
			Penerapan SPM pendidikan belum optimal
			Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai
			Pendidikan karakter yang belum optimal
		Akses dan kualitas layanan kesehatan masih belum optimal	Akses ke pelayanan kesehatan cukup jauh pada daerah-daerah tertentu
			Layanan puskesmas dan pusku belum optimal

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kualitas layanan kesehatan terhadap ibu masih belum optimal
			Kualitas layanan kesehatan terhadap bayi masih belum optimal
			Pemenuhan gizi bayi masih belum optimal
			Penanganan penyakit menular dan tidak menular masih belum optimal
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS dan pola makan sehat
			Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar dan pemerataan tenaga kesehatan masih belum optimal
			Sarana dan prasarana layanan kesehatan yang belum memadai
		Belum optimalnya perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial
			Akurasi dan kelengkapan data kesejahteraan sosial/data masyarakat miskin masih belum maksimal
			Belum optimalnya pengelolaan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat
			Keterbatasan pendampingan pelayanan sosial oleh PSKS

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Keterbatasan kemampuan dan kompetensi SDM PSKS
			Sarana dan prasarana layanan sosial yang belum mencukupi dan memadai
			Kebijakan ramah difabel belum optimal
			Tindak perempuan dan anak masih belum optimal
			Edukasi terkait pencegahan pernikahan dini masih belum optimal
			Sosialisasi dan upaya pencegahan penggunaan narkoba serta kenakalan remaja masih belum optimal
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil
			Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum memanfaatkan TIK
			Belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah
		Masih ada tantangan dalam pelayanan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik
			Belum optimalnya inovasi pelayanan publik
			Belum optimalnya birokrasi yang profesional
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan sosial budaya masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya penguatan harmoni sosial masyarakat	Belum optimalnya pelestarian budaya daerah
		Belum optimalnya pemberdayaan	Belum optimalnya upaya pencegahan, penanganan, dan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	perempuan dan perlindungan anak	perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam
			Adanya potensi pencemaran dan degradasi lingkungan
			Belum optimalnya tingkat pemantauan air dan udara
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap usaha
			Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai basis perencanaan
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengelolaan sampah hulu hingga hilir
			Belum terlaksananya pengelolaan sampah dengan metode 3R
			Masih rendahnya kelompok masyarakat pengelola persampahan
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah
			Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terpadu
	Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana	Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana	Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi, dan dampak bencana

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemerataan Pembangunan	Belum optimalnya kualitas infrastruktur wilayah		Belum adanya keberadaan Desa Tangguh Bencana
			Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
			Belum optimalnya penggunaan peralatan pendeteksi kebencanaan
		Belum meratanya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Belum optimalnya pelayanan akses air bersih
			Belum optimalnya penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam kawasan permukiman
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak
			Belum tersedianya prasarana penunjang sanitasi seperti IPLT, IPAL, dan SPAL
			Sistem drainase jalan lingkungan yang belum memadai
			Rendahnya akses terhadap rumah layak huni
		Belum meratanya infrastruktur konektivitas wilayah yang berkualitas	Belum meratanya bangunan jalan dan jembatan yang berkualitas
			Bangunan pelengkap jalan belum merata
			Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan yang belum optimal
			Pengawasan pelaksanaan konstruksi

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			jalan yang belum optimal
		Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan ruang masih belum optimal
			Belum optimalnya penegakan sanksi bagi pelanggar kebijakan penataan ruang

2.3.3 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada *focus group discussion* dengan perangkat daerah pengampu. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana tingkat SD dan SMP	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran
		Belum optimalnya tata kelola /manajemen pendidikan	Belum optimalnya pengelolaan Dapodik
			SOP pelayanan pendidikan belum tersedia
			Belum optimalnya sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan
			belum optimalnya monitoring pengelolaan sistem pendidikan
		Masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Masih rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi standar

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum optimalnya pengembangan keprofesian guru
			Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan
		Masih rendahnya daya saing siswa	Belum terpenuhinya standar isi, standar proses, standar evaluasi, dan standar kelulusan di tingkat satuan pendidikan
		Belum optimalnya penyelenggaraan PAUD yang berkualitas	Kesadaran masyarakatnya masih rendah (APK rendah)
			Kualitas guru dan pengelola paud masih terbatas
			Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong pendidikan PAUD yang holistik dan integratif (PAUD HI)
2	Kesehatan	Belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM)	Fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas
			Penyediaan layanan dan manajemen kesehatan belum maksimal
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Kesediaan tenaga untuk melakukan kegiatan masih terbatas
			Pemberdayaan di bidang kesehatan masih minim
			Minimnya kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku secara mandiri
		Belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan	Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan
			Belum optimalnya fasilitas kesehatan
			Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia
		Masih tingginya prevalensi stunting dan balita gizi buruk	Belum optimalnya pemenuhan gizi
			masih rendahnya pemahaman terhadap pemenuhan gizi
			Belum optimalnya surveilensi gizi

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		masih tingginya produk pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar	Masih rendahnya sertifikasi pangan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dan kewenangan	Minimnya kajian perencanaan pembangunan jalan
			Banyak kegiatan pekerjaan jalan yang dilaksanakan di luar kewenangan SK jalan
			Minimnya pembangunan jalan yang disertai dengan bangunan pelengkap jalan
			Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap
			Rendahnya pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan konstruksi jalan
			Rendahnya kualifikasi rekanan penyedia jasa konstruksi
		Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Minimnya regulasi umum dan rinci yang mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
			Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang
		Belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung	Ketaatan pembuatan IMB masih rendah
		Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Belum optimalnya pengelolaan saluran air bersih
		Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak	Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah
			Belum tersedianya IPAL Komunal masyarakat
		Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi daerah	Banyaknya saluran irigasi yang rusak
			Masih banyak irigasi yang menggunakan saluran tanah / non permanen

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Masih banyak daerah irigasi yang belum memiliki infrastruktur irigasi
		Belum optimalnya identifikasi kawasan rawan bencana	Masih banyak kawasan rawan bencana yang belum dilengkapi infrastruktur pengaman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyelenggaraan PSU dalam kawasan permukiman	Belum tersedianya masterplan drainase permukiman
			Sistem drainase jalan lingkungan belum terintegrasi
			Minimnya koordinasi terkait lokasi pembangunan jalan lingkungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
			Minimnya fasilitas prasarana pendukung pemeliharaan PSU
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih
			Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak
			Belum adanya prasarana penunjang layanan sanitasi seperti IPLT, IPAL, SPAL
		Rendahnya akses kepemilikan rumah layak huni	Belum tersedianya baseline data jumlah rumah tidak layak huni yang valid
			Rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi pembangunan dan korban bencana
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penyelesaian K3 dan penanggulangan kebakaran	Masih terbatasnya personil yang terlatih
			Belum optimalnya koordinasi perlindungan masyarakat
			Terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
		Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat	Masih terbatasnya jumlah WMK
			Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah pada masyarakat

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		atas peraturan daerah dan Perkada	Masih lemahnya sanksi bagi pelanggar perda
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penegak peraturan	Rasio jumlah anggota Satpol PP dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) belum terpenuhi
			Masih terbatasnya keikutsertaan dalam pendidikan berjenjang pada Satpol PP
			Kurangnya integrasi dan sinkronisasi antar OPD
		Belum optimalnya penanggulangan kebencanaan	Kurangnya sosialisasi dan simulasi/ gladi penanggulangan risiko bencana
			Hierarki dokumen pencegahan penanggulangan bencana belum lengkap
			Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi, dan dampak bencana
			Belum adanya keberadaan Desa Tangguh Bencana
			Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
			Belum optimalnya penggunaan peralatan pendeteksi kebencanaan
			Belum Terbentuknya Relawan Tanggap Bencana
			Belum Terbentuknya Tim Reaksi Cepat untuk Penanganan Bencana
		Belum optimalnya tata kelola penanganan PPKS	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan PMKS berkebutuhan khusus
			Terbatasnya kapasitas shelter sosial dalam menampung PPKS
			Belum optimalnya pengelolaan data PMKS (Fakir miskin, disabilitas, lansia terlanter, anak terlanter, korban bencana)
			Belum optimalnya verifikasi dan validasi DTKS
			Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dalam
6	Sosial		

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			verifikasi data dan penegakan regulasi urusan sosial
			Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
		Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial	Belum adanya kontrak kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial
			Belum optimalnya peran wahana kesejahteraan masyarakat
			Belum optimalnya peran dan pembinaan pada organisasi sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
			Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial
		Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
7	Tenaga Kerja	Minimnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Belum optimalnya peran BLK
			Terbatasnya kerja sama dengan BLK lain
			Belum tersedianya perencanaan ketenagakerjaan
		Belum optimalnya penempatan kerja	Terbatasnya kontrak kerjasama dengan lembaga pemberi kerja
			Belum adanya data based pencari kerja yang berkompetensi
		Kewirausahaan perlu ditingkatkan	Pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan
		Masih adanya permasalahan hubungan industrial	Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan oleh pemberi kerja maupun tenaga kerja
			Kurangnya sosialisasi regulasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja
			Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan peraturan perusahaan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum optimalnya perlindungan ketenagakerjaan sektor formal dan informal
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif
			Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan sektor lainnya
			Terbatasnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya advokasi dan pendampingan layanan kebijakan perlindungan perempuan	Belum optimalnya pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan
			Belum optimalnya kapasitas lembaga dan sumber daya manusia penyedia layanan perlindungan perempuan
			Minimnya kesadaran masyarakat untuk melindungi perempuan
		Minimnya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Belum optimalnya layanan pengaduan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan
			Belum optimalnya kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak
9	Pangan	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Belum optimalnya fungsi lumbung pangan
			Stok cadangan pangan belum memadai
		Belum optimalnya keterjangkauan pangan	Distribusi di wilayah kepulauan masih ada kendala
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan	Diversifikasi pangan belum memadai
			Konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan belum memadai

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Pangan yang memiliki kandungan kimia di atas ambang batas masih beredar	Pengawasan pangan segar asal tumbuhan perlu ditingkatkan
10	Pertanahan	Rendahnya proses penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan
			Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan tanah ulayat
11	Lingkungan Hidup	Menurunnya kualitas air	Minimnya pengolahan limbah cair domestik
			Belum optimalnya penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
			Tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian
			Rendahnya pengelolaan limbah B3 non medis
			Belum optimalnya konservasi sumber mata air
		Menurunnya kualitas udara	Keberadaan aktivitas industri
			Peningkatan emisi gas kendaraan
			Tingginya aktivitas pembangunan perkotaan
		Menurunnya kualitas keanekaragaman hayati	Belum adanya penetapan lokasi RTH publik
			Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati
			Kurangnya sosialisasi dan publikasi terkait informasi pentingnya menjaga lingkungan (sungai, mata air, hutan laut)
			Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup
		Rendahnya pengelolaan persampahan	Tingginya aktivitas pembakaran sampah
			Minimnya sarana dan prasarana penanganan sampah (TPS, kendaraan sampah)
			Rendahnya cakupan wilayah pelayanan sampah

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah
			Belum optimalnya tempat pengelolaan sampah 3R
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kepemilikan kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya kolaborasi dengan paroki dan PD, desa,
			Belum optimalnya implemtasi inovasi pelayanan
			Kesadaran masyarakat belum optimal
			Belum optimalnya sosialisasi kerjasama dan jalur pengajuan PKS terlalu panjang
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum tata kelola pembangunan desa	Belum optimalnya pendataan desa
			Kerja sama desa belum optimal akibat belum adanya badan hukum
			Belum optimalnya kolaborasi dalam pembangunan desa
			Kewenangan dalam mengintervensi dana desa belum optimal
			BPD dan lembaga pengawas belum optimal
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi masih terbatas
			Masih Terbatasnya cakupan layanan KB
			masih adanya kasus pernikahan dini
		Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB	Belum optimalnya penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
			Terbatasnya kompetensi tenaga penyuluh KB
			Keterlibatan/kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB sangat rendah
		Belum terlaksananya pemetaan pengendalian penduduk	belum optimlanya pemanfaatan data kependudukan
			belum adanya kajian kependudukan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		belum optimalnya ketahanan keluarga	belum optimalnya pembinaan keluarga sejahtera dan pra sejahtera
15	Perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya regulasi yang mengatur aktivitas lalu lintas angkutan jalan
			Minimnya kelengkapan perlengkapan jalan
			Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (rambu-rambu)
		Kuranginya kecepatan layanan uji kendaraan bermotor	Rendahnya fungsi peralatan layanan pengujian kendaraan bermotor
			Belum tersedianya dokumen layanan angkutan jalan
		Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum tersedianya lahan parkir yang memadai
		Belum optimalnya pengelolaan angkutan	Belum tersedianya terminal pengurai angkutan umum
		Rendahnya penyelenggaraan lalu lintas perhubungan laut	Minimnya ketersediaan dermaga rakyat
			Minimnya sosialisasi keselamatan pelayaran pada aktivitas angkutan laut
			Belum adanya fasilitas galangan kapal
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya penyelenggaraan <i>E-government</i>	Minimnya sarana prasarana pendukung penerapan SPBE
			Rendahnya tata kelola dan layanan SPBE
			Belum memadainya kapasitas SDM bidang IT
			Minimnya regulasi yang mengatur tata kelola dan layanan SPBE
			Masih rendahnya penyelenggaraan keamanan informasi
			Minimnya perangkat daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi
		Masih rendahnya akses informasi publik	Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			masyarakat / KIM dalam penyebarluasan informasi
			Kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu belum optimal
			Minimnya prasarana penunjang layanan RSPD
			Rendahnya kualitas dan kuantitas konten siaran RSPD
			Rendahnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik
			Masih adanya wilayah yang belum terjangkau telekomunikasi
			Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan statistik sektoral
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kualitas manajerial koperasi belum optimal	Kapasitas SDM pengurus koperasi masih terbatas
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Sarana koperasi belum memadai
		Omzet usaha mikro belum optimal	Kapasitas produksi belum optimal
			Kualitas produk masih kurang
			Kapasitas pemasaran belum optimal
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi belum optimal	Daya tarik investasi perlu ditingkatkan
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal
			Kualitas pelayanan perizinan belum optimal
19	Kepemudaan dan Olahraga	belum optimalnya kualitas organisasi kepemudaan	belum optimalnya Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
			Banyak pemuda yang belum terdaftar dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
			Belum optimalnya organisasi kepramukaan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		belum optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	masih terbatasnya kompetensi pemuda
			belum optimalnya Pembinaan terhadap kelompok pemuda untuk bergerak di sektor ekonomi
		Belum optimalnya dukungan terhadap kegiatan keolahragaan	Belum optimalnya pembinaan olahraga secara berjenjang sejak usia dini
			belum optimalnya sertifikasi pelatih
			belum optimalnya kapasitas wasit
			Belum memadainya Sarana prasarana olahraga
			belum optimalnya manajemen pengelolaan olahraga daerah
20	Statistik	Belum optimalnya ketersediaan data dan statistik sektoral yang terintegrasi	Rendahnya kepatuhan OPD dalam penyediaan data statistik sektoral
			Belum adanya regulasi terkait tata kelola statistik sektoral
			Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi data
21	Persandian		
22	Kebudayaan	Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan lokal	Kesadaran kelompok atau pelaku budaya masih rendah
			Pengetahuan tentang kebudayaan masih rendah
			Bergesernya nilai budaya karena dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK
			Belum dilakukan pendataan manuskrip
		Rendahnya upaya pelestarian cagar budaya	Status tanah masih milik masyarakat
			Belum ada pembebasan lahan
			Belum adanya pagar pengaman situs
			Sebagian compang ada di tengah kampung, sebagian ada di tanah milik pribadi dan ada juga di hutan tutupan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
23	Perpustakaan	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan	Ketersediaan fasilitas perpustakaan belum memadai
			Koleksi buku dalam perpustakaan masih terbatas
			Pelestarian naskah sejarah milik Daerah belum optimal.
			Pengelola perpustakaan masih terbatas
			Cakupan layanan perpustakaan masih terbatas
			masih terbatasnya SDM pengelola Perpustakaan
		Masih rendahnya Kesadaran masyarakat tentang literasi	Pembudayaan gemar membaca belum optimal
			Pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi masih minim
24	Kearsipan	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	Kualitas dan kuantitas pengelola arsip (arsiparis) masih terbatas
			Pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya pengelolaan arsip masih rendah
			Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip
			Mekanisme alih media arsip belum berjalan maksimal
			Sarana prasarana kearsipan belum memadai
			Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip
			Urusan Pemerintahan Pilihan
25	Perikanan	Produksi perikanan belum optimal	Nelayan beralih profesi ke jasa pariwisata
			Akses terhadap bantuan permodalan masih terbatas
			Sarana penangkapan masih bersifat tradisional/berskala kecil
			Rendahnya kapasitas SDM nelayan
			Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
26	Pariwisata	Kunjungan wisatawan masih perlu dioptimalkan	Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan belum optimal
			Pemasaran destinasi wisata belum optimal

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Daya beli wisatawan perlu ditingkatkan	Kapasitas SDM pelaku wisata belum memadai
			Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum optimal
			Kualitas produk ekonomi kreatif belum memadai
			Kapasitas pemasaran produk ekonomi kreatif masih rendah
27	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Kapasitas SDM petani belum memadai
			Serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
			Metode pertanian masih konvensional
			Meningkatnya alih fungsi lahan
			Sarana pertanian belum memadai
			Prasarana pertanian belum memadai
		Kualitas produk pertanian belum optimal	Penerapan <i>good handling practices</i> masih kurang
		Produksi hasil ternak belum optimal	Kapasitas SDM peternak belum memadai
			Metode budidaya masih konvensional
			Ketersediaan pakan ternak kurang memadai
			Bibit unggul kurang memadai
			Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis lainnya masih terjadi
			Standarisasi penanganan produk masih kurang
		Populasi ternak belum optimal	Tingkat kelahiran ternak cenderung menurun
			Tingkat kematian ternak cenderung naik
28	Perdagangan	Ekspor barang dan jasa belum optimal	Produk yang ditangani sesuai standar sertifikasi ekspor belum memadai

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Stabilitas harga barang perdagangan belum optimal	Inisiasi kerjasama ekspor perlu ditingkatkan
			Stabilitas ketersediaan barang kurang terjaga
			Belum optimalnya pengembangan pasar tertib ukur
			Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai
29	Perindustrian	Kapasitas produksi industri belum optimal	Ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu
			Kapasitas SDM pelaku IKM kurang memadai
			Sarana produksi kurang memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan kurang memadai
30	Transmigrasi	Pengembangan kawasan transmigrasi dan konflik sosial	Pengembangan kawasan transmigrasi belum optimal
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
31	Sekretariat Daerah	Masih kurangnya orientasi perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis <i>outcome</i>	Masih kurangnya ketersediaan data dalam pengukuran kinerja di setiap OPD
			Masih kurangnya kapasitas OPD dalam penyusunan laporan kinerja
			Rilis data dari BPS yang terlambat sehingga memengaruhi proses penyusunan laporan kinerja
			Rendahnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
		Belum optimalnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk akuntabilitas sosial	Masih belum terlaksananya SP dan SOP pada Perangkat Daerah
			SKM masih terbatas hanya pada 3 OPD
		Belum efektifnya fungsi pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,	Masih rendahnya kesadaran SKPD dalam pelaksanaan SKM
			Belum adanya instrumen pengendali dan pengukur keberhasilan kebijakan
			Belum efektifnya koordinasi implementasi kebijakan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		perekonomian dan pembangunan daerah	Belum tersedianya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa
			Masih kurangnya identifikasi resiko dan potensi sosial dalam pemberian bansos
			Belum optimalnya peran/fungsi desiminasi informasi pembangunan dan kebijakan daerah (media informasi belum tersedia)
			Belum optimalnya tindak lanjut kebijakan pusat maupun provinsi
			Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga
			Masih banyak OPD yang tidak melaksanakan Raperda
32	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti e-risalah dan e-notulen
			Belum optimalnya penyediaan informasi berbasis online
		Masih rendahnya penyelesaian pembentukan Perda	Belum tersedianya SOP pengajuan RANPERDA
			Kajian akademis belum sinkron dengan aturan yang lebih tinggi
		Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pimpinan DPRD	Rendahnya Kepatuhan DPRD terhadap penyelesaian administrasi keuangan
			Rendahnya komitmen terhadap pemanfaatan aset
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
33	Perencanaan Pembangunan	Masih rendahnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya pemahaman OPD terkait perencanaan strategis
			Belum tersedianya tenaga fungsional perencana
			Belum optimalnya rumusan indikator kinerja
			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak tepat waktu

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Rendahnya ketersediaan data sebagai basis perencanaan
			Masih kurangnya kualitas dan kapasitas SDM
		Rendahnya pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Rendahnya ketersediaan data kinerja pembangunan daerah
			Rendahnya pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan
			Belum adanya <i>reward and punishment</i>
34	Keuangan	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Penyampaian laporan keuangan belum optimal
			Penganggaran daerah belum optimal
			Masih banyak aset belum bersertifikat
		Kemandirian keuangan daerah belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak
			Banyak objek pajak dan retribusi yang tidak dikumpulkan akibat UU HKPD
			Pemutakhiran data pajak belum optimal
			Kesadaran wajib pajak belum optimal
			Belum optimalnya kolaborasi dalam pemungutan pajak
			Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalitas ASN	Belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi ASN
			Belum optimalnya pengisian jabatan sesuai dengan talent pool
			Masih terdapat kendala koordinasi dengan instansi pembina
36	Penelitian dan Pengembangan	Rendahnya tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis	Kurangnya sosialisasi dan diseminasi terhadap hasil-hasil penelitian

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		perencanaan pembangunan	Rendahnya koordinasi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
37	Inspektorat Daerah	Rendahnya kecukupan dan kompetensi APIP	Belum proporsionalnya jumlah dan kualitas APIP terhadap objek pemeriksaan
			Minimnya pelatihan APIP
			Masih rendahnya APIP yang bersertifikat
		Rendahnya implementasi SPIP di SKPD	Pemahaman terhadap SPIP masih rendah
			Belum adanya daftar risiko program/kegiatan di OPD
			Belum adanya monev terhadap RTL Daftar Risiko
		Masih terdapat temuan yang berulang	Belum optimalnya pemantauan kinerja dan keuangan
			Belum optimalnya reviu kinerja dan keuangan
			Belum optimalnya asistensi dan pendampingan
		Belum optimalnya kinerja tim tindak lanjut kerugian negara/daerah	Belum adanya kertas kerja tim pemantauan tindak lanjut
			Belum optimalnya monev secara berkala oleh pimpinan
		Koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat tidak optimal	Belum tersedianya SOP terkait koordinasi pengaduan masyarakat
			Belum tersedianya tim yang menangani tindak lanjut pengaduan masyarakat secara terintegrasi
			Terbatasnya kuantitas dan kualitas APIP
Unsur Kewilayahan			
38	Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan kewilayahan	Belum optimlanya fasilitasi dan pembinaan desa
			Belum optimalnya koordinasi penyelesaian permasalahan sosial
			Belum optimalnya kapasitas SDM
Unsur Pemerintahan Umum			

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kekondusifan wilayah belum optimal	Belum optimalnya wasan kebangsaan dan ideologi
			Belum optimalnya dukungan fasilitas kewaspadaan dini

2.3.4 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung di masa datang. Perumusan Isu Strategis dalam bab ini mempertimbangkan Isu Strategis yang berkembang, baik di level global, nasional dan regional yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.4.1 Isu Internasional

Isu Strategis Internasional merupakan isu pada level makro yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas karena memberikan dampak secara global. Isu Strategis Internasional saat ini sering juga disebut sebagai *megatrend* global karena mengindikasikan adanya perubahan besar yang diperkirakan akan terjadi di dunia dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan. Perubahan-perubahan tersebut diprediksi akan memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tabel 2. 40 Telahaan Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Demografi Global	▪ Peningkatan pesat populasi dunia yang mencapai 9,45 miliar jiwa ▪ Peningkatan pesat populasi lansia
Perkembangan Teknologi	▪ Ancaman hilangnya hamper 40 persen pekerjaan yang digantikan oleh teknologi ▪ Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih
Konstelasi Perdagangan Global	▪ Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun ▪ Urgensi pemanfaatan peluang melalui pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga kerjasama tingkat regional

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Urbanisasi Dunia	▪ Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi dunia ▪ Perkotaan akan menjadi pusat perekonomian dan kehidupan ▪ Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global
Luar Angkasa	▪ Peluang inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian ▪ Limbah luar angkasa yang mengancam operasional satelit
Tata Kelola Keuangan Global	▪ Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal ▪ Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber
Perubahan Iklim	▪ Peningkatan suhu global ▪ Kejadian cuaca ekstrem ▪ Bencana alam
Persaingan Sumber Daya Alam	▪ Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia ▪ Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan
Pertumbuhan Kelas Menengah	▪ Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari seluruh populasi global ▪ Fenomena generasi <i>sandwich</i>, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan
Geopolitik dan Geoekonomi	▪ Persaingan antarnegara yang menegang ▪ Munculnya poros kekuatan baru ▪ Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan

Sumber: RPJPN 2025-2045

Berbagai Isu Strategis tersebut di atas perlu direspons dengan bijak oleh pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Bentuk respons terhadap isu global tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif, kontekstual, dan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perlu disusun dengan konsisten agar berbagai tantangan tersebut dapat berdampak positif bagi pembangunan.

2.3.4.2 Isu Nasional

Dokumen RPJPN tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai isu-isu strategis nasional. Isu-isu

strategis tersebut dibentuk dari dinamika global dan respons atas persoalan pembangunan nasional yang mendesak. Isu-isu nasional ini penting untuk direspons oleh daerah dan mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini mengingat isu nasional yang membawa dampak bagi daerah dan kinerja pembangunan nasional yang ikut ditentukan oleh kinerja pembangunan daerah. Adapun Isu Strategis pada level nasional, antara lain:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;
2. Lemahnya kapasitas Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN);
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif rendah;
8. Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi;
9. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
11. Integrasi ekonomi domestik masih terbatas;
12. Akses dan kualitas yang merata pada sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
13. Kepastian dan penegakan hukum yang masih rendah;
14. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal;
15. Demokratisasi belum optimal; dan
16. Kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa.

Isu-isu jangka panjang nasional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan daerah masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan untuk mewujudkan transformasi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Persoalan membentang dari aspek ekonomi, kualitas SDM hingga

persoalan fondasi berupa tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum. Terdapat pula isu besar yang telah lama menjadi perhatian tetapi masih menjadi persoalan, yaitu pembangunan belum berkelanjutan dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.

2.3.4.3 Isu Strategis Regional Bali-Nusa Tenggara dan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur

Upaya mewujudkan sinkronisasi perencanaan jangka panjang antara pusat dan daerah di Kabupaten Manggarai Barat juga perlu dilakukan dengan menelaah isu strategis pada level regional. Isu strategis regional yang memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari isu strategis regional Bali-Nusa Tenggara dan regional Nusa Tenggara Timur.

2.3.4.4 Regional Bali – Nusa Tenggara

Isu strategis regional Bali-Nusa Tenggara diidentifikasi berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2045. Telaah terhadap isu strategis pada regional Bali - Nusa Tenggara menjadi bahan masukan penting dalam perumusan isu strategis Kabupaten Manggarai Barat. Secara lebih rinci, isu strategis dan permasalahan dalam pembangunan di regional Bali - Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Belum Memberikan Dampak yang Signifikan
Pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali-Nusa Tenggara belum dapat memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat mengurangi kemiskinan. Di samping itu, pusat produksi di perdesaan belum terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.
2. Pengembangan Koridor Pariwisata Wilayah Nusa Tenggara Belum Optimal

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas sejak tahun 2017. Namun demikian, keterhubungan pembangunan pariwisata dalam koridor Bali-Nusa Tenggara masih belum berhasil meningkatkan jumlah wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara. Kondisi ini diindikasikan melalui jumlah wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan wisatawan Wilayah Bali. Hal ini

disebabkan antara lain karena konektivitas yang menghubungkan Bali-Nusa Tenggara masih belum optimal serta belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata di Nusa Tenggara. Lebih dari itu, kapasitas masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata.

3. Kesenjangan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat NTT yang masih rendah diindikasikan dengan persentase penduduk miskin di NTT yang berada pada peringkat ke tiga tertinggi secara nasional. Tingginya kemiskinan disebabkan oleh sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor informal. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya rata-rata pendapatan yang diterima serta lemahnya perlindungan hak-hak di tempat kerja. Lebih dari itu kesenjangan pembangunan intra wilayah juga masih perlu mendapatkan perhatian. Di wilayah Nusa Tenggara, masih terdapat 14 kabupaten tertinggal, 13 di antaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ketertinggalan wilayah ini dipengaruhi oleh infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah, serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi.

4. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur masih lebih rendah jika dibandingkan dengan dibandingkan nasional, kondisi ini berbeda dengan Provinsi Bali dengan capaian IPM sudah berada di atas nasional. Rendahnya IPM disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan, khususnya pada jenjang SD, SMA, dan perguruan tinggi, serta kurang meratanya sebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Lebih dari itu, kualitas tenaga pendidik masih kurang memadai karena masih banyak pendidik dengan pendidikan terakhir kurang dari S1/D4. Aspek kesehatan juga masih menjadi kendala, seperti masih adanya prevalensi stunting dan penyakit malaria dan kusta. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan juga masih terbatas.

5. Kinerja Desentralisasi dan Otonomi Daerah Belum Optimal

Kinerja desentralisasi dan otonomi daerah yang belum optimal ditandai dengan Indeks integritas di Provinsi NTB dan NTT masih berada di bawah capaian nasional. Capaian SPM terutama di Provinsi NTT juga masih perlu untuk ditingkatkan. Di samping itu, beberapa permasalahan lainnya adalah kemandirian fiskal yang rendah, ketergantungan terhadap TKD yang tinggi, dan kualitas belanja daerah yang masih rendah.

6. Kualitas Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana

Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa limbah dan sampah serta berbagai aktivitas pembangunan lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi agenda penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan untuk generasi mendatang. Lebih dari itu, Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi bencana geologi berupa gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara serta zona *megathrust* di selatan NTT dan NTB yang berpotensi menimbulkan bahaya tsunami. Di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta sarana dan prasarana mitigasi bencana masih terbatas.

7. Akses dan Kualitas Sarana dan Prasarana

Konektivitas laut dan penyeberangan di Bali Nusa-Tenggara masih belum optimal terutama dalam mendukung sektor unggulan pariwisata, serta komoditas perikanan, pekebunan, dan peternakan. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Flores dan jalan trans lainnya, serta rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas wilayah. Masalah akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pariwisata juga masih perlu menjadi perhatian.

8. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Masih banyak terjadi kasus *illegal fishing* di perairan Wilayah Bali-Nusa Tenggara terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara dengan Timor Leste dan Australia (WPP 573) yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga perlu dijaga kedaulatannya.

2.3.4.5 Regional Nusa Tenggara Timur

Identifikasi isu strategis regional Nusa Tenggara Timur merujuk kepada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045. Telaah isu strategis Provinsi NTT menjadi bagian penting untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Secara lebih rinci, isu strategis pembangunan di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis di Provinsi NTT. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah pusat telah menargetkan tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045. Angka kemiskinan Provinsi NTT mencapai 19,96 persen per Maret 2023. Secara nasional, Provinsi NTT menempati peringkat ke tiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi NTT.

2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah

Pembangunan wilayah di Provinsi NTT masih belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mencapai 0,632. Lebih dari itu, berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 13 kabupaten di Provinsi NTT yang masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-nilai Budaya

IPM Provinsi NTT pada tahun 2023 mencapai 68,40. Capaian ini masih berada di bawah nasional dan berada pada peringkat 32 secara nasional. Belum optimalnya capaian IPM Provinsi NTT disebabkan oleh permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan. Di samping itu, ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebhinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang berpotensi akan merambah ke Provinsi NTT.

4. Pertanian sebagai Sektor Terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan

Struktur perekonomian NTT hingga saat ini masih didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada tahun 2022 dan sebesar 29,31 persen pada tahun 2023. Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Hilirisasi menjadi penting untuk dilakukan guna meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Kawasan pariwisata yang dikembangkan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan di NTT hanya 744 ribu Wisatawan Nusantara dan 58 ribu Wisatawan Mancanegara, jauh lebih rendah dibandingkan Bali yang jumlah Wisatawan Nusantara mencapai 8,1 juta dan 2,2 juta Wisatawan Mancanegara. Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT menjadi agenda penting untuk mendorong pembangunan ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara.

6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Konsep pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi alam NTT perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana

Perubahan iklim menjadi tantangan yang sangat serius di masa depan. Kenaikan suhu global pada tahun 2022 telah mencapai 0,89 derajat celcius dibandingkan dengan suhu pada tahun 1990 (NOAA, 2023).

Perubahan iklim yang cukup ekstrem berpotensi mengakibatkan gagal panen atau puso semakin luas. Kondisi ini berkaitan dengan ketahanan pangan, prevalensi ketidakcukupan pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Di samping itu, penanggulangan bencana juga perlu menjadi perhatian. Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT mencapai 139,23 dan termasuk dalam kategori sedang.

8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Isu tata kelola pemerintahan di NTT berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan, ASN yang berkualitas dan profesional, penguatan kelembagaan pemerintahan baik dari level pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.

9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

Supremasi hukum menjadi salah satu hal yang penting dalam penciptaan kondisi daerah yang kondusif. Supremasi hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum yang efektif, kepastian hukum yang jelas, dan kepatuhan hukum yang terjaga. Optimalisasi supremasi hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan jangka panjang ke depan. Pentingnya kondisi supremasi hukum terhadap proses pembangunan daerah secara umum menjadikannya salah satu isu strategis jangka panjang yang perlu disasar ke depan, dalam rangka penciptaan proses pembangunan yang efektif dan optimal.

2.3.4.6 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045

Penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Manggarai Barat disusun dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab*) yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance*. *Dynamic governance* menyatakan bahwa sebuah perencanaan harus dibangun dengan tiga perspektif, yaitu memiliki pandangan ke depan (*think ahead*), memperhatikan sekitar (*think across*) dan memperhitungkan capaian atau hasil evaluasi perencanaan jangka panjang pada periode sebelumnya (*think again*). Hal ini

dilakukan agar isu strategis yang dirumuskan lebih kontekstual, adaptif, dan dinamis sehingga selaras dengan isu di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Tabel 2. 41 Tabel Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2045

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis
1.	Akses dan kualitas layanan dasar pendidikan belum merata	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2.	Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan	
3.	Belum optimalnya perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif	
4.	Pengembangan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan potensial	Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan
		Pembangunan Ekonomi Inklusif
		Pemerataan Kesejahteraan masyarakat
5.	Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	
7.	Belum meratanya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Infrastruktur wilayah yang berkualitas
8.	Belum meratanya infrastruktur jalan yang berkualitas	
9.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	
10.	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan profesional, serta pelayanan publik yang adaptif
11.	Belum optimalnya tata kelola desa	

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2045

2.3.4.7 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan pembangunan yang komprehensif telah disepakati secara global melalui adanya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals*. TPB menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan memerhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diukur melalui pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Untuk

memastikan dokumen perencanaan pembangunan telah selaras dengan pembangunan berkelanjutan, maka penyusunan dokumen RPJMD perlu diselaraskan dengan dokumen KLHS RPJMD yang memuat tentang capaian pembangunan berkelanjutan. Berikut ini merupakan hasil identifikasi isu strategis berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045:

1. Kesenjangan Sosial Ekonomi
2. Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata
3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan
4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
5. Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan
6. Ketahanan iklim, bencana, dan pangan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang belum Optimal

2.3.4.8 Isu Strategis Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa mendatang. Isu strategis dapat berupa masalah, potensi, maupun isu sesuai konteks. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain: RPJMN 2025-2029, capaian kinerja pemerintah, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, maupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Secara teknis, perumusan isu strategis daerah mempertimbangkan beberapa hal berikut di antaranya: potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pembangunan daerah, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara lebih rinci, berikut tabel perumusan isu strategis daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 42 Perumusan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Manggarai Barat
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas 2. Konektivitas wilayah strategis (transportasi) 3. Dukungan infrastruktur yang memadai (akomodasi perhotelan) 4. Potensi sumber daya alam (perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan) 5. Potensi sosial ekonomi dan budaya (ekonomi kreatif dan adat istiadat) 6. Kolaborasi antar stakeholders	1. Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah 2. Kualitas layanan dasar pendidikan belum optimal dan merata 3. Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan 4. Belum optimalnya perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif 5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup 6. Belum optimalnya pengelolaan persampahan 7. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian 8. Belum optimalnya pengembangan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan potensial	1. Kesenjangan Sosial Ekonomi 2. Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata 3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan 4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan 5. Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan 6. Ketahanan iklim, bencana, dan pangan 7. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang belum Optimal	Megatren Global 2045: 1. Geopolitik dan geoeкономи 2. Pertumbuhan kelas menengah 3. Persaingan sumber daya alam 4. Perubahan iklim 5. Tata kelola keuangan global 6. Luar angkasa 7. Urbanisasi dunia 8. Konstelasi perdagangan global 9. Perkembangan teknologi Demografi global	Tantangan pembangunan RPJMN: 1. Rendahnya produktivitas 2. Rendahnya kualitas SDM 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat 4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 5. Krisis lingkungan 6. Geopolitik dan geoeкономи 7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Isu strategis RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur: 1. Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif 2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi 3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan	1. Pariwisata inklusif dan berkelanjutan 2. Pembangunan ekonomi yang berkualitas 3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 4. Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan 5. Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian 6. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan melayani

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Manggarai Barat
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	9. Belum meratanya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas 10. Belum meratanya infrastruktur jalan yang berkualitas 11. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang 12. Belum optimalnya reformasi birokrasi				birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan 4. Stabilitas Makro: Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah 5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi: Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan	

Berdasarkan pertimbangan berbagai aspek seperti potensi daerah, permasalahan pembangunan, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 dijelaskan pada narasi berikut.

1. Pariwisata inklusif dan berkelanjutan

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi unggulan ternama di level nasional hingga internasional, yang mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Oleh karenanya, pembangunan sektor pariwisata menjadi upaya yang krusial dan strategis bagi pembangunan daerah secara umum. Pembangunan tersebut perlu ditujukan untuk mendorong sektor pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor pariwisata inklusif merupakan upaya strategis untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan ekonomi daerah secara umum, dengan mendorong sektor-sektor lainnya untuk tumbuh. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk merespons isu strategis ini, di antaranya melalui penguatan rantai pasok sektor pariwisata yang melibatkan sektor daerah lainnya dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang optimal dalam sektor pariwisata daerah. Penguatan kerja sama dengan pelaku pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan peningkatan inklusivitas pariwisata daerah secara umum. Selain itu, upaya peningkatan inklusivitas ini dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata di luar kawasan pariwisata yang saat ini sudah cukup mapan, dengan mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata baru daerah.

Upaya strategis selanjutnya ialah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Upaya ini memiliki makna peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dalam sektor pariwisata daerah. Destinasi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh destinasi alam yang berpotensi dapat menurun kelestariannya, jika aktivitas pariwisata yang masif tidak dikendalikan secara terukur. Risiko aktivitas pariwisata ini perlu dikelola secara

optimal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai daya tarik sektor pariwisata daerah secara umum.

2. Pembangunan ekonomi yang berkualitas

Pembangunan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan pendapatan, pengendalian inflasi, serta rantai pasok yang baik. Dengan pendekatan yang komprehensif, Kabupaten Manggarai Barat dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi fondasi utama dalam pembangunan yang berkualitas. Dengan meningkatnya investasi di sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, Kabupaten Manggarai Barat dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan industri kreatif juga berperan penting dalam mendorong inovasi dan produktivitas ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peluang kerja baru akan tercipta, sehingga masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Program pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap usaha mikro, serta pengembangan ekonomi berbasis desa harus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat ditekan dan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pengendalian inflasi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Harga kebutuhan pokok yang terkendali akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memastikan ketersediaan barang dan jasa, mengoptimalkan produksi lokal, serta memperkuat kebijakan subsidi dan insentif bagi sektor-sektor strategis. Dengan

inflasi yang terkendali, iklim usaha menjadi lebih kondusif, sehingga investasi dan konsumsi masyarakat dapat terus meningkat.

Rantai pasok yang baik menjadi elemen penunjang utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Infrastruktur yang memadai, sistem distribusi yang efisien, serta pemanfaatan teknologi dalam logistik dan pemasaran akan memastikan bahwa barang dan jasa dapat tersedia dengan harga yang stabil dan kompetitif. Dengan rantai pasok yang terintegrasi, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkualitas harus didukung oleh sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengendalian inflasi, dan rantai pasok yang kuat agar dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Dalam rencana pembangunan jangka menengah, peningkatan kualitas SDM menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius. Faktor-faktor seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan yang baik dan merata menjadi kunci bagi masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Selain peningkatan kualitas SDM, daya saing tenaga kerja lokal juga menjadi aspek penting dalam pembangunan Manggarai Barat. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi berbasis digital, diperlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global, menuntut adanya peningkatan kompetensi melalui program pelatihan dan sertifikasi keahlian. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pelatihan kerja, mendorong

kolaborasi dengan sektor swasta, serta memperkuat pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Dengan demikian, tenaga kerja Manggarai Barat dapat memiliki daya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis.

Peningkatan kualitas SDM juga perlu didukung oleh upaya perbaikan pada aspek layanan kesehatan. Aspek kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan merata, peningkatan gizi masyarakat, serta program kesehatan preventif harus terus diperkuat. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti transportasi, teknologi informasi, dan akses listrik juga harus diperhatikan agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan dengan lebih mudah dan berkualitas. Adanya sinergi antara berbagai sektor, kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Manggarai Barat dapat meningkat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Tingkat kemiskinan mencapai 16,74 persen di tahun 2024 yang berarti terdapat sekitar 50 ribu penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat menghadapi tantangan tekanan ekonomi yang semakin tinggi akibat multi-faktor termasuk masih terbatasnya akses layanan Pendidikan dan kesehatan, belum meratanya peluang kerja yang layak, dan keterampilan kerja yang masih rendah. Kesenjangan pembangunan layanan infrastruktur dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan cukup besar, sehingga masyarakat di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses infrastruktur dasar yang berkualitas. Kendala pemerataan infrastruktur bermuara pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterampilan tenaga kerja. Hal tersebut berdampak lanjut terhadap daya saing tenaga kerja lokal pada sektor formal yang masih terbatas, sehingga Masyarakat cenderung terjebak pada sektor informal dengan penghasilan rendah. Jaminan sosial dapat menjadi jaring pengaman dengan memberikan perlindungan dari risiko ekonomi atau sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja pada sektor informal. Namun cakupan jaminan

perlindungan sosial belum sepenuhnya diterapkan dan belum menjangkau seluruh masyarakat, berpotensi membuka siklus kemiskinan berulang pada kelompok rentan.

Struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor primer belum sepenuhnya mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat, akibat masih adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif yakni modal usaha dan penguasaan lahan pertanian, semakin menambah daftar panjang persoalan yang harus dituntaskan. Sebagian besar petani masih mengelola lahan secara tradisional dan menghasilkan produk mentah dengan nilai jual yang masih relatif rendah. Hilirisasi produk pertanian perlu mendapatkan perhatian serius untuk segera dikembangkan, mengingat distribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor dominan mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.

Strategi pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat perlu dilakukan secara holistik dengan pendekatan multidimensi. Penguatan kebijakan harus berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memperluas akses modal bagi kelompok ekonomi lemah, hingga implementasi jaminan sosial secara menyeluruh. Kolaborasi antar aktor melalui penguatan kemitraan menjadi strategi yang perlu dikedepankan untuk memperkuat sumber daya dan kapasitas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Strategi yang terarah dan multidimensi diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan menurunkan Tingkat kemiskinan di Manggarai Barat secara signifikan.

5. Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian

Infrastruktur dasar menjadi elemen fundamental dalam menopang pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Jalan, jembatan, dan jaringan transportasi yang baik memungkinkan distribusi barang dan jasa berjalan lebih efisien, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah. Lebih dari itu, potensi pariwisata Manggarai Barat yang cukup beragam dan pertanian juga perlu ditopang dengan konektivitas wilayah yang semakin andal.

Selain itu, infrastruktur telekomunikasi yang memadai mempercepat arus informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Jaringan telekomunikasi yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar digital. Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat, yang pada diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, mempercepat pertumbuhan investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, akuntabel, dan inovatif melayani

Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, akuntabel, dan inovatif untuk memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintahan dapat lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mengingat Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu destinasi super prioritas di Indonesia, yaitu Labuan Bajo, sehingga kolaboratif harus menjadi strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas menjadi faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Selain itu, inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan mempercepat pencapaian target

Pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mempertimbangkan bahwa sebagian masyarakat Manggarai Barat menempati atau bertempat tinggal di pulau-pulau sehingga akses ke layanan publik sering menemukan kendala dan tantangan. Oleh karena itu, pelayanan yang inovatif melalui kolaborasi, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, dan pengembangan kebijakan berbasis data dapat mempercepat proses kerja pemerintahan dan memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Dengan menerapkan tata kelola yang kolaboratif, akuntabel, dan inovatif, Kabupaten Manggarai Barat dapat mewujudkan pemerintahan yang semakin mantap.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi yang akan dicapai sepanjang periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat yang terdapat di dalam rumusan visi. Selain kondisi, Bab tiga juga memuat substansi strategis berupa agenda pembangunan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai visi. Agenda pembangunan ini dirumuskan dalam bentuk misi, arah kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan.

3.1 Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Sedangkan Misi merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Perumusan visi RPJMD berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati. Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari visi RPJMD periode 2021-2026. Visi periode sebelumnya yaitu “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”. Visi tersebut menjadi pijakan untuk perumusan visi pembangunan jangka menengah periode berikutnya yang disertai dengan komitmen untuk menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan yang semakin progresif. Oleh karena itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 yaitu:

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR SEMAKIN MANTAP”

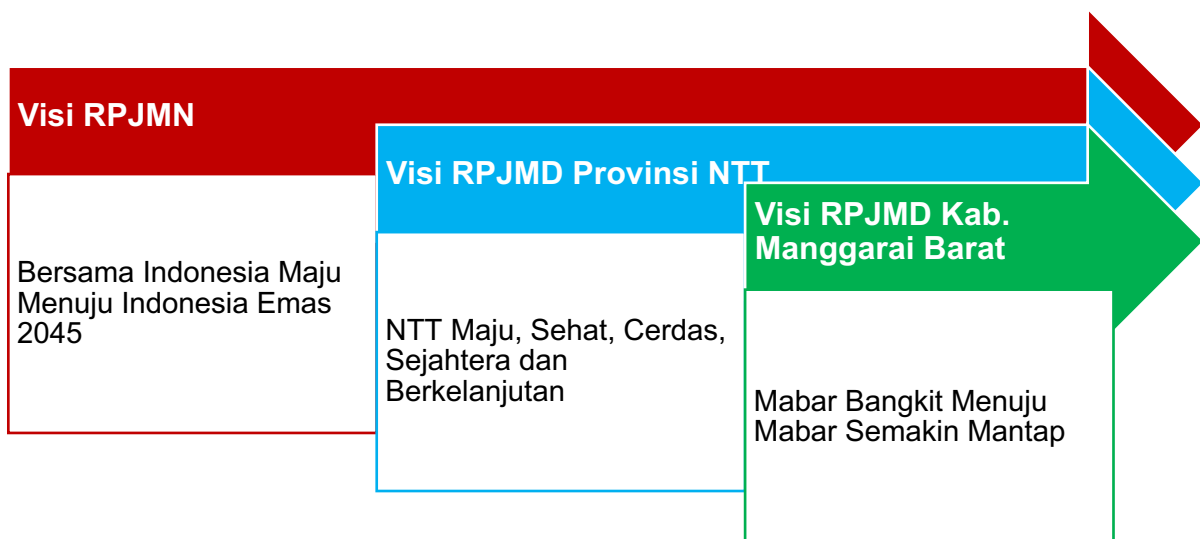
Rumusan visi tersebut diharapkan menjadi nilai dan cita-cita yang mampu membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk mencapainya. Visi jangka menengah menjadi pemandu arah bagi berbagai agenda dan program pembangunan agar diarahkan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan tersebut. Visi pembangunan jangka menengah tersebut memiliki peran penting untuk membangun fondasi transformasi pembangunan dalam konteks pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJMD mendukung pencapaian visi RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045, yaitu: **“Manggarai Barat Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi sebagai rumusan kondisi umum memerlukan penjelasan agar mampu dijabarkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan. Penjelasan visi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat

Kata Kunci Visi	Penjelasan
Bangkit	Bangkit sebagai nilai dan seruan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan agar memiliki semangat dan komitmen bersama untuk bangkit dari ketertinggalan dan bangkit untuk mengoptimalkan berbagai potensi sosial, budaya dan ekonomi yang dimiliki.
Semakin	Bentuk pembangunan yang berkesinambungan dan komitmen pembangunan yang progresif atau memiliki kinerja semakin meningkat dari periode ke periode. Kata “semakin” akan menjadi pemandu arah agar berbagai kinerja yang sudah baik akan terus ditingkatkan capaiannya, sedangkan kinerja yang belum optimal harus diakselerasi agar tercapai sesuai dengan target pembangunan.
Mantap (Maju, Unggul, Tangguh, Populer)	• Maju: Manggarai Barat berkomitmen untuk membangun ekonomi yang semakin maju. Perekonomian yang maju dicapai melalui peningkatan nilai tambah, ekonomi yang berkelanjutan dan membawa peningkatan kesejahteraan

Kata Kunci Visi	Penjelasan
	masyarakat. Kondisi maju juga didukung oleh pembangunan infrastruktur yang semakin merata dan berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang sebagai penopang seluruh bidang pembangunan yang semakin berkualitas. • Unggul: Manggarai Barat berkomitmen untuk membangun SDM yang unggul melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta masyarakat yang inklusif, setara gender, serta mampu melestarikan dan memajukan budaya daerah. • Tangguh: Masyarakat Manggarai Barat memiliki ketangguhan terhadap berbagai situasi dinamis. Masyarakat tangguh dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim, serta memiliki ketangguhan lingkungan hidup sebagai pilar penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. • Populer: Manggarai Barat yang populer sebagai destinasi wisata nasional dan dunia menjadi katalisator seluruh bidang pembangunan untuk mewujudkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat memiliki keterkaitan dengan Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:



Visi yang telah ditetapkan akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut:

- Misi 1: Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi
- Misi 2: Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan
- Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebagai bentuk akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
- Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan
- Misi 5: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*

Berikut penjelasan pada masing-masing Misi:

Misi 1: Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik dari segi keindahan alam maupun kekayaan budayanya yang unik. Destinasi wisata unggulan seperti Taman Nasional Komodo, Pantai Pink, dan Pulau Padar telah menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Kabupaten Manggarai Barat juga menawarkan berbagai destinasi wisata lain yang tidak kalah menarik, seperti Goa Batu Cermin dengan formasi batuan indah yang memantulkan cahaya alami, serta persawahan Lodok di Lembor yang berbentuk jaring laba-laba sebagai cerminan kearifan lokal masyarakat setempat. Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki Air Terjun Cunca Wulang yang menyuguhkan panorama alam asri dan sangat cocok bagi wisatawan yang gemar berpetualang. Beragam destinasi wisata tersebut menjadikan daerah ini sebagai tujuan wisata yang kaya akan pengalaman alam dan budaya. Selain objek wisata yang telah dikenal luas, masih banyak potensi destinasi wisata lainnya yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Dengan beragam destinasi wisata tersebut, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi alam dan budaya tetap terjaga. Langkah-langkah seperti pengelolaan lingkungan yang baik, edukasi bagi wisatawan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan perlu diterapkan. Dengan cara ini, ekosistem wisata tetap lestari dan dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Selain itu, pariwisata harus dikembangkan secara inklusif agar memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat setempat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta promosi produk lokal dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam industri pariwisata, dampak positif yang dihasilkan akan lebih luas dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang dengan baik dan tetap berkelanjutan. Dukungan berupa pembangunan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang melindungi lingkungan serta budaya lokal, dan promosi wisata yang efektif sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Manggarai Barat dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal demi masa depan yang lebih baik.

Misi 2: Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Misi ini ditujukan untuk menyasar optimalisasi pengembangan sektor primer dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manggarai Barat. Sektor primer sebagai sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung merupakan sektor yang dominan di Kabupaten Manggarai Barat secara

distribusi dalam struktur perekonomian, dalam hal ini merupakan sektor pertanian. Salah satu permasalahan utama sektor pertanian di antaranya adalah kurangnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Permasalahan tersebut muncul akibat karakteristik aktivitas perekonomian di sektor pertanian menghasilkan komoditas yang dapat langsung didistribusikan ke konsumen, tanpa perlu melewati beberapa proses pengolahan lebih lanjut. Persoalan selanjutnya adalah sektor pertanian sebagai sektor primer belum berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonominya, dalam hal ini petani, dikarenakan rantai distribusi komoditas pertanian yang cenderung kurang menguntungkan petani.

Dengan demikian peningkatan nilai tambah sektor primer perlu dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya adalah peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi proses produksi, dan optimalisasi rantai distribusi komoditas pertanian secara lebih lanjut. Peningkatan produktivitas dan efisiensi proses produksi dapat ditempuh melalui beberapa langkah, di antaranya adalah optimalisasi sarana pertanian seperti benih, obat, pupuk, serta penyediaan prasarana pertanian yang memadai seperti jalan dan irigasi pertanian. Upaya untuk mengoptimalkan rantai distribusi komoditas pertanian dilakukan melalui penguatan kelompok tani lokal dan penyediaan sarana distribusi yang merata dan mudah diakses oleh para petani. Keberadaan kelompok tani yang kuat dapat meningkatkan nilai tawar petani dalam pasar, sedangkan sarana distribusi yang merata diperlukan untuk memangkas biaya distribusi komoditas pertanian yang memiliki lokasi cukup jauh dari pusat perdagangan.

Upaya lain dalam misi ini adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dilakukan melalui beberapa langkah yang menysasar perekonomian skala kecil. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya adalah pemberdayaan pelaku usaha mikro daerah, pemberdayaan koperasi daerah, serta penjagaan tingkat inflasi daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif untuk seluruh elemen masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro daerah memiliki tujuan untuk mendorong pelaku-pelaku ekonomi skala kecil untuk dapat memiliki kontribusi dan hasil terhadap aktivitas perekonomian daerah secara umum melalui aktivitas usahanya. Selain itu, perwujudan ekonomi inklusif juga perlu ditempuh melalui penjagaan harga-haraga barang pokok dan penting daerah yang akan menjaga

tingkat kenaikan harga-harga atau inflasi daerah secara umum. Dengan terjaganya harga-harga barang pokok dan penting di daerah, masyarakat dapat lebih memiliki akses atas penghidupan yang layak.

Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Sebagai Bentuk Akselerasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Kemiskinan sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan yang kurang memadai, sehingga berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan melalui berbagai program, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Hadirnya SDM yang sehat, cerdas dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan kerja akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidupnya.

Selain meningkatkan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja juga menjadi fokus utama dalam misi pembangunan ini. Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian yang dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru. Dengan SDM yang terampil dan memiliki daya saing, masyarakat dapat lebih berperan dalam sektor-sektor potensial tersebut, baik sebagai tenaga kerja profesional maupun pelaku usaha. Beberapa upaya pendukung perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti mendorong investasi, membangun infrastruktur pendukung, serta menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan pendidikan untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha mandiri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Mewujudkan SDM yang berkualitas sebagai akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja memerlukan sinergi antara berbagai kebijakan pemerintah. Program pendidikan dan pelatihan kerja harus disertai dengan kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti insentif bagi pelaku usaha, penyediaan modal usaha, serta regulasi yang memudahkan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang baik, serta perlindungan sosial juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Adanya koordinasi antara berbagai sektor, pembangunan SDM yang berkualitas dapat menjadi motor utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Manggarai Barat secara berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan menjadi aspek vital dalam mendorong terwujudnya Jabar Bangkit Menuju Jabar Semakin Mantap. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh guna mendukung efisiensi dan efektivitas berbagai layanan publik, mempercepat arus distribusi barang dan jasa, serta memperluas konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah perbatasan, terpencil, dan terisolasi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akses terhadap transportasi dan fasilitas publik lainnya semakin merata, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di samping mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, air bersih, dan sanitasi yang layak memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman, aman, dan produktif. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya generasi Manggarai Barat yang semakin unggul dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Misi ini juga memberikan arahan bahwa pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan harus tetap memperhatikan keberlanjutan

lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga perlu untuk mendukung peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Dengan demikian, infrastruktur yang dikembangkan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap berbagai tantangan di masa depan.

Misi 5: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien melalui inovasi di berbagai sektor. Dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan *clean governance*, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara instansi pemerintahan maupun dengan berbagai *stakeholders*. Pembangunan, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan menghilangkan berbagai potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat mengarah pada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selain itu, penerapan *e-government* menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, layanan yang sebelumnya manual dan berbelit-belit serta sulit diakses oleh Masyarakat dapat disederhanakan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan. Hal ini tentu sangat penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil sehingga sebagian masyarakat tinggal di pulau-pulau tersebut.

Transformasi digital juga mendorong keterbukaan informasi yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Selain itu,

dengan transformasi digital dapat mempermudah promosi sektor unggulan daerah, yang salah satunya adalah sektor pariwisata. Dengan demikian, *e-government* diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan Masyarakat serta mampu mengangkat berbagai sektor unggulan daerah.

Pada akhirnya, misi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang inovatif serta layanan publik berbasis teknologi, diharapkan tercipta lingkungan birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi fasilitator pembangunan, tetapi juga mitra aktif masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang berkualitas dan inklusif. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah, yakni “Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap”.

Lima misi di atas telah memiliki keselarasan dengan misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN. Adapun keselarasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat, RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Manggarai Barat 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025- 2029	Misi RPJMN 2025-2029
Misi 1: Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi	Misi 5: Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Misi RPJMD Manggarai Barat 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025- 2029	Misi RPJMN 2025-2029
Misi 2: Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan	Misi 1: Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) Misi: 4 Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebagai bentuk akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Misi 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT) Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS)	Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	Misi 1: Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Misi RPJMD Manggarai Barat 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025- 2029	Misi RPJMN 2025-2029
Misi 5: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berdasarkan <i>E-Government</i>	Misi 5: Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia

3.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025 hingga 2029, dengan fokus pada pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan inklusif, peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, serta pengembangan tata Kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.

RPJMD ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah tujuan, sasaran, dan indikator RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR SEMAKIN MANTAP” 1. Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi 2. Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebagai bentuk	1. Meningkatkan daya saing pariwisata secara inklusif dan berkelanjutan		Indeks Pariwisata Inklusif	Indeks	63,95	68,40	69,00	71,00	73,00	75,00	77,00
			Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	18,34	20,17	22,19	24,41	26,85	29,54	32,49
		Meningkatnya kunjungan dan daya beli wisatawan	Kunjungan Wisatawan	Orang	411.349	487.110	576.957	683.532	809.977	960.032	1.138.145
			<i>Spend of Money</i>	USD/hari	USD189 /hari	USD201 /hari	USD228,3 /hari	USD255,3 /hari	USD282,3 /hari	USD309,3 /hari	USD336,3 /hari
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,89	78,98	79,15	79,32	79,49	79,66	79,83
			Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,57	123,09	116,61	110,13	103,66	97,18	90,70
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	26,1	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00
	2. Meningkatkan daya saing ekonomi yang berkeadilan		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,45	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4,93	5,15	5,35	5,55	5,75	5,95	6,15
			PDRB Per Kapita	Juta Rp.	16,68	17,02	18,25	19,25	20,25	21,25	22,25
			Indeks gini	Indeks	0,324	0,319	0,3159	0,3128	0,3097	0,3066	0,3035
			Tingkat inflasi	Nilai	2,65	2,60	2,55	2,50	2,45	2,40	2,35
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,00	80,20	82,08	83,95	85,82	87,70	89,57
		Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	85,86	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
			Rasio Konektivitas	Rasio	1,37	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan 5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis E-Government	3. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,68	69,97	70,47	70,98	71,48	71,99	72,49
			Tingkat Kemiskinan	Persen	16,74	16,50	16,25	16,00	15,75	15,50	15,25
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,21	8,42	8,64	8,86	9,08	9,30	9,52
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,54	12,62	12,69	12,77	12,85	12,92	13,00
			Indeks Literasi SD	Indeks	51,70	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00
			Indeks Literasi SMP	Indeks	49,40	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00	74,00
			Indeks Numerasi SD	Indeks	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00
			Indeks Numerasi SMP	Indeks	46,36	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	64,00
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,86	73,03	73,19	73,44	73,73	74,06	74,21
			Prevalensi Stunting	Persen	31,1	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00
		Meningkatnya inklusivitas sosial	Indeks Kesejahteraan sosial	Indeks	42,1	47,1	52,1	57,1	62,1	67,1	72,1
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,47	3,10	3,07	3,05	3,02	2,99	2,96
	4. Tata Kelola pemerintahan yang semakin berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,19	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Nilai SAKIP	Nilai	62,29	62,445	62,61	62,77	62,93	63,10	63,26
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,71 (B)	3,81	3,91	4,01	4,11	4,21	4,31
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan	Persen	19,74	18,57	20,29	22,12	24,07	26,15	28,34

3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subbab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Secara umum, bab ini mencakup tiga poin besar, yaitu: tahapan pembangunan RPJMD, strategi dan arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.

3.3.1 Tahapan Pembangunan RPJMD

Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan teori pembangunan Rostow, yang menggambarkan tahapan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 3. 4 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2030

Tahap I (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mabar Bangkit: Peningkatan kualitas fondasi pembangunan	Mabar Maju: Peningkatan akselerasi pembangunan	Mabar Unggul: Peningkatan daya saing pembangunan	Mabar Tangguh & Populer: Memperkokoh daya saing dan reputasi pembangunan di tingkat nasional	Perwujudan Mabar Bangkit dan semakin Mantap

Sumber: Analisis, 2025

Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat memerlukan strategi yang komprehensif dan terarah guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diterapkan terdiri dari beberapa tahapan arah kebijakan/ tema pembangunan, yaitu Mabar Bangkit, Mabar Maju, Mabar Unggul, Mabar Tangguh dan Populer, serta

Perwujudan **Mabar Bangkit** dan semakin Mantap. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan daerah.

1. Mabar Bangkit: Peningkatan Kualitas Fondasi

Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan dasar pembangunan dengan meningkatkan infrastruktur dasar, kualitas SDM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan jangka menengah. Sebagai upaya menjalankan arah kebijakan, diperlukan beberapa rincian aksi seperti penguatan infrastruktur pariwisata, pelatihan SDM lokal, serta konservasi daya tarik wisata untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro dengan memastikan ketersediaan infrastruktur produksi dan akses pasar. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasi guna membangun SDM yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses internet untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan perbaikan sistem administrasi berbasis digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien.

2. Mabar Maju: Peningkatan Akselerasi Pembangunan

Tahap ini menekankan percepatan pembangunan di berbagai sektor dengan pendekatan inovatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Arah kebijakan ini dapat dijalankan melalui beberapa rincian aksi kebijakan, seperti akselerasi pembangunan destinasi wisata unggulan dengan meningkatkan fasilitas serta promosi wisata daerah; pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat; Implementasi program beasiswa, pelatihan berbasis keterampilan, dan kerja sama dengan dunia usaha guna mempercepat peningkatan kualitas SDM; pembangunan infrastruktur strategis seperti kawasan industri, transportasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; serta implementasi *e-government* untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik berbasis digital.

3. Mabar Unggul: Peningkatan Daya Saing Pembangunan

Pada tahap ini, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi, efisiensi, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Arah kebijakan ini dapat dijalankan melalui beberapa rincian aksi kebijakan, seperti penguatan ekosistem pariwisata berbasis digital; peningkatan daya tarik wisata dan optimalisasi kerja sama internasional dalam sektor pariwisata; pemanfaatan teknologi dan diversifikasi sektor ekonomi guna meningkatkan nilai tambah produk lokal serta meningkatkan daya saing sektor primer; peningkatan kerja sama dengan industri dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan pengembangan program pendidikan berbasis kebutuhan dunia usaha; penggunaan teknologi hijau dan *smart city* dalam pengelolaan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan; serta optimalisasi sistem pemerintahan berbasis data serta penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

4. Mabar Tangguh dan Populer: Memperkokoh Daya Saing dan Reputasi Pembangunan di Tingkat Nasional

Tahap ini bertujuan untuk memastikan daerah memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan diakui secara nasional maupun internasional melalui pencapaian pembangunan yang unggul. Arah kebijakan ini dapat dijalankan melalui beberapa rincian aksi kebijakan, seperti menjadikan daerah sebagai destinasi wisata unggulan nasional dan internasional dengan memperkuat daya saing dan pengelolaan berkelanjutan; meningkatkan ekspor produk unggulan daerah serta memperkuat daya saing sektor primer melalui inovasi dan integrasi rantai pasok global; mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing tinggi serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui program sertifikasi dan pelatihan berbasis industri; membangun infrastruktur yang modern, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim guna meningkatkan daya saing daerah; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan berbasis teknologi guna meningkatkan kepercayaan publik dan daya tarik investasi.

5. Perwujudan Mabar Bangkit dan Semakin Mantap

Tahap akhir dari arah kebijakan ini adalah memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dicapai melalui penguatan regulasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas dalam setiap aspek pembangunan. Arah kebijakan ini dapat dijalankan melalui beberapa rincian aksi kebijakan, seperti menjamin keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata dengan regulasi yang mendukung investasi dan perlindungan lingkungan; menetapkan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi kerakyatan serta memastikan keseimbangan antara sektor primer dan industri; evaluasi dan penguatan kebijakan pendidikan serta ketenagakerjaan guna menjaga kesinambungan peningkatan kualitas SDM; optimalisasi regulasi dalam pengelolaan infrastruktur serta pemeliharaan fasilitas publik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan; memastikan tata kelola pemerintahan semakin inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

3.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisikan langkah-langkah atau upaya untuk merespons isu strategis, menghadapi lingkungan dinamis, serta mencapai tujuan dan sasaran. Strategi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dirumuskan berbasis lima misi dan respons atas isu strategis pembangunan jangka menengah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Perumusan Strategi Berbasis Respon Atas Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi RPJMD
(1)	(2)
Pariwisata inklusif dan berkelanjutan	• Peningkatan daya tarik dan pemasaran destinasi wisata • Pengembangan ekonomi kreatif • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana
Pembangunan ekonomi yang berkualitas	• Peningkatan kapasitas produksi sektor primer • Peningkatan daya saing produk sektor primer
Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	• Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan

	• Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan
Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan	• Akselerasi pengentasan kemiskinan • Peningkatan kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja
Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian	• Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian • Peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan ruas-ruas strategis
Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan melayani	• Peningkatan akuntabilitas dan transparansi daerah • Peningkatan pelayanan publik yang prima • Peningkatan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas • Penguatan kebijakan penganggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel • Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah

Sumber: Analisis, 2025

Strategi pembangunan jangka menengah telah dirumuskan sebagai bentuk respons atas isu strategis. Isu strategis sendiri di dalamnya memuat peta masalah, potensi dan isu lingkungan dinamis. Rumusan strategi kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai upaya-upaya yang lebih operasional untuk merespon permasalahan pembangunan dan lingkungan dinamis, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara lebih operasional. Strategi dan arah kebijakan diklasifikasikan berdasarkan misi RPJMD. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Keselarasan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Misi 1 Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan daya tarik dan pemasaran destinasi wisata	• Penguatan fondasi ekosistem pariwisata dengan membangun infrastruktur dasar, fasilitas wisata, dan meningkatkan kapasitas SDM lokal. • Penguatan promosi wisata bagi wisatawan lokal dan mancanegara • Akselerasi pengembangan destinasi wisata unggulan dan diversifikasi atraksi berbasis budaya dan alam. • Pengembangan Manggarai Barat sebagai destinasi wisata nasional dan internasional dengan memperkuat daya saing serta pengelolaan berkelanjutan. • Penguatan pariwisata MICE. • Pemberdayaan dan integrasi desa wisata ke dalam industri pariwisata.
	Pengembangan ekonomi kreatif	• Penerapan inovasi digital, penguatan branding pelaku ekonomi kreatif. • Pengembangan <i>hub</i> bagi pelaku ekonomi kreatif terpadu • Peningkatan rantai nilai ekonomi kreatif daerah dengan pariwisata daerah
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	• Pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah. • Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan masyarakat. • Penanganan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir. • Pengurangan risiko dan dampak bencana. • Peningkatan dukungan upaya konservasi

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		• Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim.
Misi 2 Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan kapasitas produksi sektor primer	• Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal. • Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, irigasi, dan pasar rakyat. • Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dengan memperhatikan diversifikasi pangan lokal, peningkatan produktivitas lahan, dan pengurangan ketergantungan pada impor bahan pangan strategis.
	Peningkatan daya saing produk sektor pertanian dan perikanan	• Penerapan inovasi dan teknologi tepat guna dalam sektor pertanian dan perikanan. • Peningkatan kualitas komoditas pertanian dan perikanan daerah.
	Peningkatan kapasitas pemasaran produk sektor pertanian dan perikanan	• Peningkatan akses pasar komoditas lokal melalui digitalisasi. • Optimalisasi peran BUMD/BUMDes sebagai distributor komoditas pertanian dan perikanan lokal • Penguatan rantai nilai sektor pertanian dengan sektor pariwisata dan ekraf daerah • Peningkatan kapasitas pemasaran dengan memperhatikan pelatihan, pembentukan kemitraan usaha, promosi berbasis digital, dan penguatan jenama/ <i>brand</i> produk lokal.

Misi (1)	Strategi (2)	Arah Kebijakan (3)
Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Sebagai Bentuk Akselerasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan yang bersifat holistik dan integratif	• Penguatan regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja • Peningkatan kompetensi dan kualitas guru • Peningkatan ketersediaan bangunan gedung pendidikan sesuai standar • Peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa tepat sasaran • Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan	• Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan sesuai standar termasuk layanan kesehatan rujukan • Pemenuhan dan Pemerataan distribusi tenaga kesehatan • Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan • Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan sesuai standar • Peningkatan budaya bersih hidup dan sehat
	Akselerasi pengentasan kemiskinan	• Pemutakhiran data penerima bantuan • Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu • Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan • Memperluas dan meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Bersama • Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		• Mendukung sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial • Pengembangan dan penguatan kapasitas PSKS dalam upaya penanganan PPKS
	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja	• Penguatan keterampilan tenaga kerja berbasis <i>triple skilling</i> melalui pelatihan dan pemagangan kerja • Peningkatan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan
Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian	• Pembangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang wilayah. • Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan masyarakat. • Penanganan sampah kolaboratif dan berbasis hulu-hilir. • Pemerataan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah. • Peningkatan kualitas infrastruktur di pusat pertumbuhan, termasuk infrastruktur penunjang aktivitas pariwisata dan pertanian serta logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor lain. • Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua masyarakat. • Peningkatan akses dan kualitas layanan air minum jaringan perpipaan. • Peningkatan akses rumah layak huni dan berkelanjutan.

Misi (1)	Strategi (2)	Arah Kebijakan (3)
		• Peningkatan akses sanitasi aman.
	Peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan ruas-ruas strategis	• Peningkatan konektivitas di jalur strategis lainnya untuk membuka akses. • Peningkatan akses transportasi publik yang menjangkau ke seluruh wilayah. • Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama dan penyiapan sarana dan prasarana integrasi antarmoda.
Misi 5 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis E-Government	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi daerah	• Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengawasan yang berkualitas • Pengelolaan data kinerja yang akurat • Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah • Penguatan perumusan kebijakan berbasis penelitian • Peningkatan riset dan inovasi daerah • Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran • Peningkatan sistem kerja yang jelas dan terukur
	Peningkatan pelayanan publik yang prima	• Digitalisasi pelayanan publik • Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik
	Peningkatan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	• Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM • Peningkatan budaya ASN sesuai prinsip BerAKHLAK • Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
	Penguatan kebijakan penganggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel	• Penguatan keselarasan perencanaan dengan penganggaran daerah

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		• Peningkatan kinerja daerah untuk mendorong insentif daerah • Mendorong pembiayaan daerah yang inovatif untuk mendukung pembangunan daerah • Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
	Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah	• Penguatan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah • Penguatan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan PAD • Penguatan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah terutama di sektor pariwisata • Peningkatan koordinasi pemungutan retribusi daerah • Peningkatan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan PAD • Peningkatan tata Kelola BUMD dalam mendukung PAD

Sumber: Analisis, 2025

3.3.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang disusun melalui pendekatan politik dan teknokratik. Program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih. Secara politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Kemudian secara teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan relevan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi

yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.

3.3.3.1 Penyandingan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dengan Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Tabel 3. 7 Penyandingan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dengan Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri

Program Unggulan		Program Kepmendagri
Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	
PARIWISATA SEMAKIN MANTAP	FASMADEWI (FASILITASI MASYARAKAT DESA WISATA): - DESA-DESA WISATA AKAN DIBERIKAN PENDAMPINGAN INTENSIF DARI PARA PROFESSIONAL PARIWISATA (DI SEKTOR HOSPITALITY, UMKM, PEMASARAN, PEMBERDAYAAN EKO MASYARAKAT) SELAMA 6 BULAN. - PENDEKATAN DARI HULU SAMPAI HILIR. BAGIAN DARI KONSEP TARIK UANG DARI LAUT.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PEMBANGUNAN BERBASIS EKOLOGI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program Unggulan		Program Kepmendagri
Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	
	PENINGKATAN KUALITAS PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM : PROGRAM BAMBUNISASI, OPTIMALISASI KEBERADAAN RPB BAMBU, KONSERVASI LAHAN/WILAYAH MANGROVE	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN SEMAKIN MANTAP	- MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI DENGAN POLA KEMITRAAN BERSAMA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT (PENINGKATKAN BANTUAN ALSINTAN, SARPRAS PERTANIAN DAN PERIKANAN) - MEMBANGUN COLDSTORAGE - PEMBERIAN NILAI TAMBAH HASIL PRODUK PERTANIAN DAN PERIKANAN (MENDORONG BERAS PREMIUM MABAR) - AKSES PASAR - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Unggulan		Program Kepmendagri
Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	
	PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI OPTIMALISASI KEBERADAAN KOPERASI DESA/KEL MERAH PUTIH, BUMDES DAN UMKM SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Program Unggulan		Program Kepmendagri
Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
SDM MABAR SEMAKIN MANTAP	MENINGKATKAN AKREDITASI SEKOLAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK MELALUI KURSUS/PELATIHAN/PENDAMPINGAN SEBELUM PROGRAM PPG (PENDIDIKAN PROFESI GURU)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	BANTUAN PERALATAN BAGI SISWA/SISWI PAUD, SD, SMP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	PENINGKATAN KUALITAS NAKES DIKLAT NAKES BERBASIS KOMPETENSI, BEASISWA PENDIDIKAN DOKTER	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN PERBAIKAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN YANG CEPAT, TEPAT DAN AKURAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	PENINGKATAN SARPRAS KESEHATAN MELALUI REHAP FASKES DAN PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
	PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI APBD	
	PENANGANAN STUNTING DAN ISU KESEHATAN IBU DAN ANAK	

Program Unggulan		Program Kepmendagri
Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	
	PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAT DAN TIDAK MENULAR MELALUI UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF	
	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK PEKERJA RENTAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	PENINGKATAN PROGRAM PEMAGANGAN KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	MENINGKATKAN PELATIHAN NAKER DAN UMKM BERBASIS KEBUTUHAN PASAR	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	PENGEMBANGAN BLK DAN PLUT	
	PENINGKATAN PELAKSANAAN JOB FAIR	
INFRASTRUKTUR SEMAKIN MANTAP	MELANJUTKAN REHABILITASI JALAN/JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN UNTUK MEMBUKA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH.(TUNTASKAN JALAN-JALAN KE PUSAT KECAMATAN/PUSAT PELAYANAN KESEHATAN DAN RUAS-RUAS STRATEGIS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	MENINGKATKAN PROGRAM SANITASI DAN AIR BERSIH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Program Unggulan		Program Kepmendagri
Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
BIROKRASI SEMAKIN MANTAP	OPTIMALISASI MPP UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN LAINNYA	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	MENINGKATKAN PENDEKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PERIJINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA)	
	MENINGKATKAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK (OPTIMALISASI WEBSITE OPD)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DIGITAL	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL BAGI ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.3.3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 3. 8 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap 1. Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi 2. Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebagai bentuk akselerasi	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata secara Inklusif dan Berkelanjutan			1. Indeks Pariwisata Inklusif 2. Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			
		Meningkatnya kunjungan dan daya beli wisatawan		1. Kunjungan Wisatawan 2. <i>Spend of Money</i>			
			Meningkatnya daya saing destinasi wisata daratan (<i>mainland</i>)	Persentase destinasi wisata daratan (<i>mainland</i>) yang berkembang	PARIWISATA SEMAKIN MANTAP	FASMADEWI (FASILITASI MASYARAKAT DESA WISATA): - DESA-DESA WISATA AKAN DIBERIKAN PENDAMPINGAN INTENSIF DARI PARA PROFESSIONAL PARIWISATA (DI SEKTOR HOSPITALITY, UMKM, PEMASARAN, PEMBERDAYAAN EKO MASYARAKAT) SELAMA 6 BULAN. - PENDEKATAN DARI HULU SAMPAI HILIR. BAGIAN DARI KONSEP TARIK UANG DARI LAUT.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Meningkatnya kecondusifan sosial masyarakat	Angka Konflik Sosial			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan 5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis <i>E-Government</i>		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Risiko Bencana 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase titik pantau lingkungan yang memenuhi baku mutu		PEMBANGUNAN BERBASIS EKOLOGI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Sampah yang terkelola berbasis hulu-hilir	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM : PROGRAM BAMBUNISASI, OPTIMALISASI KEBERADAAN RPB BAMBU, KONSERVASI LAHAN/WILAYAH MANGROVE	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya daya saing ekonomi yang berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		Indeks Daya Saing Daerah			
				1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. PDRB Per Kapita 3. Indeks gini 4. Tingkat inflasi			
			Meningkatnya daya saing	1. PDRB Pertanian & Perikanan	PERTANIAN DAN PERIKANAN	- MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN MELALUI INTENSIFIKASI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sektor unggulan dan potensial		SEMAKIN MANTAP	DAN EKSTENSIFIKASI DENGAN POLA KEMITRAAN BERSAMA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT (PENINGKATKAN BANTUAN ALSINTAN, SARPRAS PERTANIAN DAN PERIKANAN) - MEMBANGUN COLDSTORAGE - PEMBERIAN NILAI TAMBAH HASIL PRODUK PERTANIAN DAN PERIKANAN (MENDORONG BERAS PREMIUM MABAR) - AKSES PASAR - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				2. Rasio PDRB Industri Pengolahan		PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI OPTIMALISASI KEBERADAAN KOPERAS DESA/KEL MERAH PUTIH, BUMDES DAN UMKM SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pembentukan modal daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks harga konsumen			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	1. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB 2. Persentase usaha mikro yang naik kelas			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				Indeks Ketahanan Pangan			
			Meningkatnya cadangan pangan daerah	Stok cadangan pangan daerah	PERTANIAN DAN PERIKANAN SEMAKIN MANTAP	PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI OPTIMALISASI KEBERADAAN KOPERASI DESA/KEL MERAH PUTIH, BUMDES DAN UMKM SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
			Meningkatnya lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik			
			Meningkatnya diversifikasi	Persentase peningkatan			
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pangan non-beras	diversifikasi pangan non-beras			
			Meningkatnya Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya	Persentase Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Meningkatnya Desa/Kelurahan yang Masuk ke dalam Kategori Sulit untuk Pendistribusian Pangan	Persentase Desa/Kelurahan yang Masuk ke dalam Kategori Sulit untuk Pendistribusian Pangan			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Meningkatnya desa/kelurahan yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan	Persentase desa/kelurahan yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan			
		Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah		1. Indeks Infrastruktur Daerah 2. Rasio Konektivitas			
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	1. Tingkat kemantapan jalan 2. Persentase pulau yang terkoneksi pusat pertumbuhan	INFRASTRUKTUR SEMAKIN MANTAP	MELANJUTKAN REHABILITASI JALAN/JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
						MELANJUTKAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN UNTUK MEMBUKA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH.(TUNTASKAN JALAN-JALAN KE PUSAT KECAMATAN/PUSAT PELAYANAN KESEHATAN DAN RUAS-RUAS STRATEGIS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya akses terhadap sumber air bersih	Indeks Kinerja Irigasi		PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya akses hunian layak	Rasio permukiman layak huni		MENINGKATKAN PROGRAM SANITASI DAN AIR BERSIH	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera			1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Tingkat kemiskinan			
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah 3. Indeks Literasi SD 4. Indeks Literasi SMP 5. Indeks Numerasi SD 6. Indeks Numerasi SMP			
						MENINGKATKAN AKREDITASI SEKOLAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas			
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Meningkatnya akses pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	SDM MABAR SEMAKIN MANTAP	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK MELALUI KURSUS/PELATIHAN/PENDAMPINGAN SEBELUM PROGRAM PPG (PENDIDIKAN PROFESI GURU)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
						BANTUAN PERALATAN BAGI SISWA/SISWI PAUD, SD, SMP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Usia Harapan Hidup 2. Prevalensi Stunting				
						PENINGKATAN KUALITAS NAKES DIKLAT NAKES BERBASIS KOMPETENSI, BEASISWA PENDIDIKAN DOKTER	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kesehatan masyarakat			1. Jumlah Kematian Ibu 2. Jumlah Kematian Bayi 3. Prevalensi stunting	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN PERBAIKAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN YANG CEPAT, TEPAT DAN AKURAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							PENINGKATAN SARPRAS KESEHATAN MELALUI REHAP FASKES DAN PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
							PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI APBD	
							PENANGANAN STUNTING DAN ISU KESEHATAN IBU DAN ANAK	
		Meningkatnya inklusivitas sosial		Indeks kesejahteraan sosial				

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka			
			Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK PEKERJA RENTAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
						PENINGKATAN PROGRAM PEMAGANGAN KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
						MENINGKATKAN PELATIHAN NAKER DAN UMKM BERBASIS KEBUTUHAN PASAR	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
						PENGEMBANGAN BLK DAN PLUT	
		PENINGKATAN PELAKSANAAN JOB FAIR					
	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan melayani		1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK 3. Indeks Pelayanan Publik			
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah		Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan			
			Meningkatnya inovasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan	1. Indeks SPBE 2. Indeks Inovasi Daerah	BIROKRASI SEMAKIN MANTAP	OPTIMALISASI MPP UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN LAINNYA	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
					Program Prioritas	Penjabaran Program Prioritas	Program Kepmendagri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya integritas dan profesional pemerintah daerah	1. Nilai MCP 2. Indeks profesionalitas ASN 3. Indeks sistem merit		MENINGKATKAN PENDEKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PERIJINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan		MENINGKATKAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK (OPTIMALISASI WEBSITE OPD)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
						PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DIGITAL	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL BAGI ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.3.4 Dukungan Program Strategis Nasional

Program strategis nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah dan dilaporkan melalui laporan kinerja program strategis nasional setiap bulan Juni untuk kinerja semester pertama dan bulan Januari untuk kinerja semester kedua. Berikut daftar program strategis nasional:

1. Penanggulangan kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Sekolah Rakyat; dan
 - c. Pembangunan 3 juta rumah.
2. Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah
3. Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan:
 - a. Jaminan kesehatan nasional, dan
 - b. Makan bergizi gratis
4. Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah
5. Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 - a. Pengendalian inflasi;
 - b. Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, dan
 - c. Kemudahan perizinan di daerah
6. Program strategis nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

3.3.5 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan

kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas daerah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 9 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Prioritas Nasional 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	Pengembangan Pangan Hewani		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
5	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
6	Peningkatan Penyediaan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
7	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU ERBARUKAN
8	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
9	Konservasi Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)
10	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
11	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
12	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
13	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
14	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
15	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
16	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
17	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
18	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
19	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
20	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
21	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
22	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
23	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
24	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
25	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
26	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
27	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, <i>in-service training</i>), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
28	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
29	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
30	Pencegahan dan Penurunan Stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
31	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
32	Penuntasan TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
33	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
34	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
35	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
36	Investasi pelayanan kesehatan primer		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
37	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
38	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
39	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
41	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
42	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Prioritas Nasional 5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
43	Pengembangan Hilirisasi Kelapa		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
44	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
45	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
46	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
47	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
48	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		PROGRAM PENATAAN DESA
49	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
50	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
51	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
52	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
53	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
54	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
55	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
56	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan prioritas utama RPJMN 2025-2029 terdiri dari 56 prioritas, yang kemudian di klusterisasi menjadi 8 prioritas nasional. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Kabupaten Manggarai Barat menyandingkan dengan program nomenklatur dan perangkat daerah pengampu. Adapun jumlah program yang mendukung sebanyak 56 program. Daftar program tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan program di level Renstra OPD.

3.3.6 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RJMN 2025-2029

Program prioritas di Kabupaten Manggarai Barat juga turut serta dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tahun 2025-2029. Berikut merupakan rincian dukungan program terhadap proyek strategis nasional.

Tabel 3. 10 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
Makan Bergizi Gratis				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Rehabilitasi Sosial
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
Swasembada Pangan				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital				
9	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Perumahan dan Permukiman				
10	Pembangunan 3 juta rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)	Program Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 10 program prioritas nasional (PSN) yang berlokasi secara nasional. Untuk mendukung program prioritas nasional (PSN), Kabupaten Manggarai Barat menyandingkan dengan program nomenklatur yang berkaitan. Adapun jumlah program yang mendukung sebanyak 18 program. Daftar program tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan program di level Renstra OPD.

3.3.7 Arah Kebijakan Khusus Rencana Bisnis Perumda

3.3.7.1 Perumda Bidadari

Sesuai arah kebijakan dan strategi program yang tertuang dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, secara implisit menyatakan bahwa Perumda Bidadari Kabupaten Manggarai Barat bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perumda Bidadari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2021 mempunyai beberapa cakupan usaha, yaitu Jasa Konstruksi, Industri Pariwisata, Perdagangan Umum, Pasar dan Parkir.

Perumda Bidadari berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah melalui pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Goa Batu Cermin. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kami mengajukan permohonan pengelolaan penuh atas aset Wisata Goa Batu Cermin. Pengelolaan dan Manajemen aset Goa Batu Cermin bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki manajemen dan promosi, serta peningkatan layanan pengunjung untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Dengan dukungan dan penguatan manajemen, Perumda Bidadari diharapkan dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisata dan penjualan produk lokal pada galeri-galeri yang dibuka di Batu Cermin dan optimalisasi aset KSPN milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Perumda Bidadari berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi daerah, menciptakan pengalaman wisata yang menarik, serta mengelola aset pemerintah secara efektif. Rencana Bisnis ini diharapkan akan memperkuat posisi Perumda Bidadari dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 3. 11 Capaian Perumda Bidadari 2022-2024 dan Target 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan							Evaluasi
		Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	ACV %	Target Pengeluaran	Realisasi	ACV %	
1	Capaian Rencana Bisnis 3-5 Tahun sebelumnya	2022	1.227.180.235	501.992.069	41%	2.124.752.200	975.278.715	46%	WTP
		2023	2.375.861.591	1.367.570.664	58%	2.201.458.043	1.815.489.412	82%	
		2024	3.486.595.923	877.885.444	25%	2.294.998.264	1.908.991.124	83%	
2	Target Capaian Rencana Bisnis 5 Tahun Kedepan	2025	1.145.485.311	-	-	2.472.279.321	-	-	Perencanaan
		2026	3.015.831.011	-	-	5.324.194.011	-	-	
		2027	4.258.275.652	-	-	4.578.384.389	-	-	
		2028	5.388.046.777	-	-	4.872.648.031	-	-	
		2029	6.237.282.146	-	-	4.894.430.200	-	-	

Sumber: Rencana Bisnis Perumda Bidadari, 2025

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kualitas pelayanan, Obyek Wisata Gua Batu Cermin Perumda Bidadari akan meningkatkan optimalisasi peran Perumda Bidadari melalui pengelolaan penuh manajemen dan operasional objek wisata Gua Batu Cermin dengan menerapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Kebijakan Pemasaran
- Kebijakan Operasional
- Kebijakan Keuangan
- Kebijakan Sumber Daya Manusia

1. Arah Kebijakan Pemasaran

- a) Meningkatkan Promosi: meningkatkan promosi melalui media sosial, iklan online, dan kerja sama dengan agen perjalanan.
- b) Mengembangkan Paket Wisata: mengembangkan paket wisata yang menarik dan kompetitif untuk menarik pengunjung. Perumda Bidadari akan berkolaborasi dengan BTNK, serta berbagai pihak / pelaku pariwisata /tour operator untuk menjadikan obyek wisata Gua Batu Cermin sebagai salah satu destinasi yang menjadi bagian dalam paket tour yang digabung bersama paket kunjungan wisata lainnya di kabupaten Manggarai Barat.
- c) Meningkatkan Kerja Sama: meningkatkan kerja sama dengan pihak lain seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan untuk meningkatkan pendapatan dengan memberikan insentive kepada para guide/ tour operator yang memberikan/mengantar tamu

mengunjungi Gua Batu Cermin.

2. Arah Kebijakan Operasional

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Memberikan pelatihan secara berkala agar staf Perumda Bidadari selalu memberikan kualitas pelayanan yang baik
- b) Mengembangkan Fasilitas: Mengembangkan fasilitas seperti restoran yang ramah lingkungan, toko souvenir, dan tempat parkir untuk meningkatkan pendapatan. Akan dibangun 20 unit rumah makan / restoran dari bahan bahan yang ramah lingkungan seperti kayu dan bambu lokal.
- c) Meningkatkan Keamanan: meningkatkan keamanan dengan meningkatkan sistem keamanan yang modem (CCTV,dll) dan melatih staf keamanan

3. Arah Kebijakan Keuangan

- a) Meningkatkan Pendapatan: meningkatkan pendapatan tanpa merubah harga tiket masuk (untuk wisatawan nusantara Rp. 20,000 dan wisatawan asing Rp. 50,000/orang), mengembangkan paket wisata, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
- b) Mengurangi Biaya: mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
- c) Sistem pembelian karcis: Menerapkan sistem pembelian/pembayaran tiket masuk dan tiket parkir secara online.
- d) Meningkatkan Investasi: meningkatkan investasi dengan meningkatkan fasilitas dan mengembangkan paket wisata.

4. Arah Kebijakan Sumber Daya Manusia

- a) Meningkatkan Kualitas Staf: meningkatkan kualitas staf dengan melatih staf dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui kerjasama pelatihan dengan universitas yang menyelenggarakan pelatihan.
- b) Mengembangkan Karier: mengembangkan karier staf dengan meningkatkan kesempatan promosi dan meningkatkan kualitas pelatihan.

- c) Meningkatkan Kesejahteraan: meningkatkan kesejahteraan staf dengan meningkatkan gaji dan meningkatkan fasilitas.

Dengan menerapkan arah kebijakan di atas, diharapkan Obyek Wisata Gua Batu Cermin dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Selanjutnya dirumuskan strategi Perumda Bidadari. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas perusahaan untuk mencapai sasaran. Strategi yang dilakukan perusahaan yang tertuang dalam RPJMD adalah peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari hasil usaha pengelolaan obyek wisata Gua Batu Cermin, perumda menyiapkan strategi sebagai berikut:

- Strategi Pemasaran
- Strategi Operasional
- Strategi Keuangan
- Strategi Sumber Daya Manusia

1. Strategi Pemasaran

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

2. Strategi Operasional

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: meningkatkan kualitas pelayanan dengan melatih staf dan meningkatkan fasilitas.
- b. Mengembangkan Fasilitas: mengembangkan fasilitas seperti restoran, toko souvenir, dan tempat parkir untuk meningkatkan pendapatan.
- c. Meningkatkan Keamanan: meningkatkan keamanan dengan

meningkatkan sistem keamanan dan melatih staf keamanan.

3. Strategi Keuangan

- d. Meningkatkan Pendapatan: meningkatkan pendapatan dengan menampilkan atraksi budaya secara rutin, mengembangkan paket wisata, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
- e. Mengurangi Biaya: mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
- f. Meningkatkan Investasi: meningkatkan investasi dengan meningkatkan fasilitas dan mengembangkan paket wisata.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan Obyek Wisata Gua Batu Cermin dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengunjung.

3.3.7.2 Perumda Air Minum Wae Mbeliling

Pelaksanaan program kerja tidak hanya melibatkan atau mengikutsertakan jajaran strategis dan taktis, tapi pelaksanaannya akan melibatkan seluruh elemen perusahaan, untuk itu diperlukan proram kerja yang utuh, menyeluruh dan komprehensif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kerja Perumda Air Minum Wae Mbeliling disusun berdasarkan sasaran kerja bidang yang telah ditetapkan di Perumda Air Minum Wae Mbeliling. Setiap bidang kerja mempunyai program kerja masing-masing yang mencakup sasaraan, target dan tujuan guna mencapai keberhasilan perusahaan. Program kerja bidang tersebut meliputi :

1. Program Bidang Teknik

- Optimalisasi SPAM Eksisting
- Pengembangan kapasitas unit produksi
- Pengembangan system distribusi air minum
- Menurunkan NRW
- Meningkatkan cakupan pelayanan / jumlah sambungan pelanggan

2. Program Bidang Keuangan

- Meningkatkan pendapatan
- Penyesuaian tarif

3. Program Bidang Non Teknik

- Manajemen
- Hubungan masyarakat dan Pemasaran
- Teknologi Informasi
- Penelitian dan pengembangan
- Umum

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk lima tahun ke depan. Gambaran program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah.

4.1 Program Perangkat Daerah

Subbab ini memuat daftar program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disertai target dan pagu indikatif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kerangka pendanaan, yang terdiri atas kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Daftar program perangkat daerah disertai kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				384.387.289.196,0 00		390.861.000.066,00 0		399.441.915.433,00 0		411.224.897.977,00 0		425.300.192.080,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				285.878.351.341,0 00		286.477.851.341,00 0		292.477.851.341,00 0		296.477.851.341,00 0		306.477.851.341,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	285.878.351.341,0 00	100	286.477.851.341,00 0	100	292.477.851.341,00 0	100	296.477.851.341,00 0	100	306.477.851.341,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				88.245.975.755,0 00		93.720.186.625,0 00		96.301.101.992,00 0		103.747.046.636,00 0		106.722.340.739,000	
Meningkatnya akses pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD (%)	65,36	71,77	8.640.991.122,0 00	74,81	5.884.874.400,0 00	77,85	5.884.874.400,0 00	80,89	5.884.874.400,0 00	83,86	5.884.874.400,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi SD (%)	98,06	98,61	44.873.009.140,0 00	98,88	40.563.605.653,0 00	99,16	41.544.521.020,0 00	99,43	47.590.465.664,0 00	99,71	49.565.759.767,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi SMP (%)	98,06	98,61	33.064.977.293,0 00	98,88	45.308.288.872,0 00	99,16	46.908.288.872,0 00	99,43	48.308.288.872,0 00	99,71	49.308.288.872,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
: Meningkatnya akses pembelajaran	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam	10,67	18,10	1.666.998.200,0 00	21,82	1.963.417.700,0 00	25,53	1.963.417.700,0 00	29,25	1.963.417.700,0 00	32,97	1.963.417.700,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
non Formal/ Kesetaraan	pendidikan kesetaraan (Angka)												
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM				500.000.000,0 00		900.000.000,0 00		900.000.000,0 00		1.000.000.000,0 00		1.100.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Muatan Lokal pada satuan pendidikan	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan (%)	20	40	500.000.000,0 00	50	900.000.000,0 00	60	900.000.000,0 00	70	1.000.000.000,0 00	80	1.100.000.000,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI (%)	72,22	82,02		87,02		90,02		99,02		100		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				285.878.351.341,000		286.477.851.341,000		292.477.851.341,000		296.477.851.341,000		306.477.851.341,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	285.878.351.341,000	100	286.477.851.341,000	100	292.477.851.341,000	100	296.477.851.341,000	100	306.477.851.341,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				88.245.975.755,000		93.720.186.625,000		96.301.101.992,000		103.747.046.636,000		106.722.340.739,000	
Meningkatnya akses pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD (%)	65,36	71,77	8.640.991.122,000	74,81	5.884.874.400,000	77,85	5.884.874.400,000	80,89	5.884.874.400,000	83,86	5.884.874.400,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi SD (%)	98,06	98,61	44.873.009.140,000	98,88	40.563.605.653,000	99,16	41.544.521.020,000	99,43	47.590.465.664,000	99,71	49.565.759.767,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks literasi siswa SD (Angka)	46,6	52,4		55,3		58,2		61,1		64,0		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Numerasi Siswa SD (Angka)	57,32	60,63		61,82		63,32		64,82		66,32		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi SMP (%)	98,06	98,61	33.064.977.293,000	98,88	45.308.288.872,000	99,16	46.908.288.872,000	99,43	48.308.288.872,000	99,71	49.308.288.872,000	1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks literasi siswa SMP (Angka)	62,03	64,23		65,33		66,43		67,53		68,63		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Numerasi Siswa SMP (Angka)	57,32	60,63		61,82		63,32		64,82		66,32		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			TARGET	2026		TARGET	2027		TARGET	2028		TARGET		2029		TARGET	2030	
Meningkatnya akses pembelajaran non Formal/ Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Angka)	10,67	18,10	1.666.998.200,000		21,82	1.963.417.700,000		25,53	1.963.417.700,000		29,25	1.963.417.700,000		32,97	1.963.417.700,000		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				500.000.000,000			900.000.000,000			900.000.000,000			1.000.000.000,000			1.100.000.000,000		
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Muatan Lokal pada satuan pendidikan	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan (%)	20	40	500.000.000,000		50	900.000.000,000		60	900.000.000,000		70	1.000.000.000,000		80	1.100.000.000,000		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI (%)	72,22	82,02			87,02			90,02			99,02			100			1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				9.762.962.100,000			9.762.962.100,000			9.762.962.100,000			10.000.000.000,000			11.000.000.000,000		
Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase guru TK, SD dan SMP yang bersertifikat Pendidik (%)	25,6	50	9.762.962.100,000		60	9.762.962.100,000		70	9.762.962.100,000		80	10.000.000.000,000		90	11.000.000.000,000		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				317.709.543.025,000			321.852.267.127,000			330.941.696.675,000			355.572.417.375,000			373.995.712.694,000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				122.722.079.994,000			125.043.680.645,000			127.785.729.535,000			135.367.080.786,000			138.098.756.606,000		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	87.685.526.421,000		100	89.439.236.949,000		100	91.111.462.839,000		100	93.569.246.200,000		100	95.066.354.130,000		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	62,5	68-70	35.036.553.573,000		71-73	35.604.443.696,000		74-76	36.674.266.696,000		77-79	41.797.834.586,000		80-81	43.032.402.476,000		1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100			100			100			100			100			1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				160.018.283.031,000			161.151.617.482,000			165.314.846.393,000			177.974.139.128,000			192.269.880.577,000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan		> 80 (Tuntas Madya)	>90 (Tuntas Utama)	107.498.283.606,000		>90 (Tuntas Utama)	107.738.660.629,000		>90 (Tuntas Utama)	109.645.880.183,000		>90 (Tuntas Utama)	115.743.268.441,000		>90 (Tuntas Utama)	126.683.052.873,000		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan (Angka)												
	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	86		89		92		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	BOR (Bed Occupancy Rate) (%)	70	85	52.519.999.425,000	87	53.412.956.853,000	90	55.668.966.210,000	95	62.230.870.687,000	100	65.586.827.704,000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
	Jumlah Jenis Layanan yang tersedia sesuai Kelas Rumah Sakit (Layanan)	17	19		21		22		22		22		1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
	LOS (Lama Operasi Sekali) (Hari)	7	6		6		6		6		6		1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
	NDR (Net Death Rate) (Rasio)	25:1000	25:1000		25:1000		25:1000		25:1000		25:1000		1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
	Persentase Ketersediaan BED (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
	TOI (Turn Over Interval) (Hari)	3	2		2		2		2		2		1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				32.019.180.000,000		32.704.969.000,000		34.839.536.890,000		39.186.388.311,000		40.538.349.501,000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai standar pelayanan (%)	-	100	6.950.000.000,000	100	7.089.000.000,000	100	7.089.000.000,000	100	7.337.086.100,000	100	7.454.479.400,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai standar pelayanan (%)	-	100	25.069.180.000,000	100	25.615.969.000,000	100	27.750.536.890,000	100	31.849.302.211,000	100	33.083.870.101,000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - RSUD Komodo
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				750.000.000,000		708.000.000,000		715.628.280,000		722.278.300,000		729.034.700,000	
Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	-	85	750.000.000,000	89	708.000.000,000	92	715.628.280,000	95	722.278.300,000	100	729.034.700,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.200.000.000,000		2.244.000.000,000		2.285.955.577,000		2.322.530.850,000		2.359.691.310,000	
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Desa/Kelurahan	43	50	2.200.000.000,000	55	2.244.000.000,000	60	2.285.955.577,000	65	2.322.530.850,000	70	2.359.691.310,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sanitasi total berbasis masyarakat (%)												
	Prevalensi obesitas >18 tahun (Angka)	20	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				109.861.343.108,000		128.379.242.142,000		146.964.963.379,000		158.403.580.855,000		231.700.177.075,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.155.723.215,000		7.018.880.181,000		7.127.926.538,000		7.239.153.823,000		7.352.605.653,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	6.155.723.215,000	100	7.018.880.181,000	100	7.127.926.538,000	100	7.239.153.823,000	100	7.352.605.653,000	1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				6.264.382.550,000		7.411.368.530,000		10.870.043.300,000		14.692.245.700,000		15.950.978.523,000	
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan perlindungan kawasan permukiman dari abrasi dan banjir	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	69,29	71,67	6.264.382.550,000	72,69	7.411.368.530,000	73,93	10.870.043.300,000	75,21	14.692.245.700,000	76,46	15.950.978.523,000	1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi dan banjir yang terlindungi bangunan pengaman pantai (%)	43,80	47,92		50,39		52,87		55,36		57,86		1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				12.145.680.000,000		13.250.817.065,000		13.991.584.120,000		17.607.000.000,000		30.000.000.000,000	
Mewujudkan pemenuhan air minum yang layak bagi setiap rumah tangga	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM yang layak dan aman serta berkelanjutan (%)	35,39	36,95	12.145.680.000,000	38,13	13.250.817.065,000	39,48	13.991.584.120,000	41	17.607.000.000,000	43,99	30.000.000.000,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6.200.000.000,000		6.811.946.000,000		6.848.894.860,000		6.894.650.029,000		6.955.258.630,000	
Mewujudkan Pemenuhan Akses Sanitasi yang layak	Persentase rumah yang memiliki akses SPALD (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik) yang layak (%)	66,95	67,96	6.200.000.000,000	68,47	6.811.946.000,000	68,89	6.848.894.860,000	69,40	6.894.650.029,000	69,99	6.955.258.630,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN				300.000.000.000		300.000.000.000		325.000.000.000		360.000.000.000		1.500.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													
Terwujudnya kawasan permukiman bebas banjir	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir (%)	15	17,25	300.000.000,000	18,37	300.000.000,000	20,61	325.000.000,000	21,74	360.000.000,000	23,98	1.500.000.000,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0,000		1.200.000.000,000		1.500.000.000,000		1.700.000.000,000		2.000.000.000,000	
Terwujudnya Infrastruktur Permukiman yang terintegrasi pada Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	Persentase Infrastruktur Permukiman yang terintegrasi pada Kawasan Strategis Daerah Kabupaten (%)	0	12,5	0,000	25	1.200.000.000,000	50	1.500.000.000,000	75	1.700.000.000,000	100	2.000.000.000,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				800.000.000,000		890.191.240,000		1.015.191.240,000		1.135.191.240,000		5.704.959.134,000	
Meningkatnya Bangunan Gedung yang berkepastian hukum	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB/PBG, BGN dalam kondisi baik (%)	3,29	3,61	800.000.000,000	3,76	890.191.240,000	3,92	1.015.191.240,000	4,08	1.135.191.240,000	4,24	5.704.959.134,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				0,000		125.000.000,000		150.000.000,000		200.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis Daerah Kabupaten (%)	0	0	0,000	40	125.000.000,000	60	150.000.000,000	80	200.000.000,000	100	250.000.000,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				75.964.344.843,000		89.008.379.386,000		102.261.594.080,000		105.443.038.723,000		153.891.479.499,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	47,98	51	75.964.344.843,000	52	89.008.379.386,000	53	102.261.594.080,000	54	105.443.038.723,000	55	153.891.479.499,000	1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	54,83	52		55		58		62		67		1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya (%)	52,02	48		45,21		42		38		33		1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.066.212.500,000		1.247.468.500,000		1.709.538.001,000		1.847.110.100,000		2.139.936.502,000	
Meningkatnya kebutuhan jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase Tenaga Terampil Kontruksi yang terlatih (%)	73,50	80	1.066.212.500,000	85	1.247.468.500,000	90	1.709.538.001,000	95	1.847.110.100,000	100	2.139.936.502,000	1.03.0.00.0.00.10.0000 - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				965.000.000,000		1.115.191.240,000		1.165.191.240,000		1.285.191.240,000		5.954.959.134,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah sesuai RTR (%)	25	30	965.000.000,000	35	1.115.191.240,000	40	1.165.191.240,000	45	1.285.191.240,000	50	5.954.959.134,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				15.454.184.920,000		16.264.070.791,000		17.055.553.321,000		17.717.598.475,000		26.008.644.787,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.353.945.120,000		5.535.878.436,000		5.630.076.881,000		5.726.159.294,000		5.824.163.356,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	5.353.945.120,000	100	5.535.878.436,000	100	5.630.076.881,000	100	5.726.159.294,000	100	5.824.163.356,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				850.780.800,000		1.025.095.288,000		1.125.095.288,000		1.221.744.653,000		3.836.896.286,000	
Terpenuhi Rumah Layak Huni bagi warga negara Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase unit rumah korban bencana dan yang terdampak Relokasi Program Pemerintah yang direhab dan dibangun kembali (%)	100	100	850.780.800,000	100	1.025.095.288,000	100	1.125.095.288,000	100	1.221.744.653,000	100	3.836.896.286,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.632.459.000,000		2.300.000.000,000		2.700.000.000,000		2.900.000.000,000		3.500.000.000,000	
Meningkatnya akses rumah layak huni	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	0	14,29	3.632.459.000,000	35,71	2.300.000.000,000	57,14	2.700.000.000,000	78,57	2.900.000.000,000	100	3.500.000.000,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				0,000		3.065.358.847,000		3.112.642.932,000		3.297.616.980,000		5.505.344.429,000	
Meningkatnya akses terhadap rumah layak huni di luar kawasan kumuh	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni di luar kawasan kumuh (%)	59,93	60,23	0,000	60,40	3.065.358.847,000	60,57	3.112.642.932,000	60,74	3.297.616.980,000	60,91	5.505.344.429,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				5.617.000.000,000		4.337.738.220,000		4.487.738.220,000		4.572.077.548,000		7.342.240.716,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	2026 PAGU	TARGET	2027 PAGU	TARGET	2028 PAGU	TARGET	2029 PAGU	TARGET	2030 PAGU	
Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Tertangani infrastrukturnya	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertangani infrastrukturnya (%)	22,82	23,6	5.617.000.000,000	23,99	4.337.738.220,000	24,38	4.487.738.220,000	24,77	4.572.077.548,000	25,54	7.342.240.716,000	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.654.348.202,000		14.360.834.325,000		16.321.450.171,000		18.036.278.335,000		18.255.403.062,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.019.451.789,000		12.107.437.912,000		13.318.053.758,000		14.532.881.922,000		14.752.006.649,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	8.205.568.515,000	100	9.177.062.683,000	100	10.336.686.734,000	100	11.499.503.267,000	100	11.665.576.131,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.813.883.274,000	100	2.930.375.229,000	100	2.981.367.024,000	100	3.033.378.655,000	100	3.086.430.518,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				210.591.913,000		165.591.913,000		165.591.913,000		165.591.913,000		165.591.913,000	
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan Kepala Daerah (Perkada) (%)	100	100	210.591.913,000	100	165.591.913,000	100	165.591.913,000	100	165.591.913,000	100	165.591.913,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				404.304.500,000		1.087.804.500,000		1.837.804.500,000		2.337.804.500,000		2.337.804.500,000	
Meningkatnya Kesiapsiagaan warga negara dalam menghadapi bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	3.55%	26.32%	404.304.500,000	42.11%	1.087.804.500,000	57.89%	1.837.804.500,000	78.95%	2.337.804.500,000	100.00%	2.337.804.500,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.020.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran yang Ditangani dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	100	100	1.020.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			TARGET	2026		TARGET	2027		TARGET	2028		TARGET		2029		TARGET	2030	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.110.535.764,000			5.616.038.133,000			6.239.719.449,000			6.917.857.390,000			6.908.025.092,000		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.221.541.829,000			3.327.692.398,000			3.385.523.714,000			3.425.511.655,000			3.490.679.357,000		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	3.221.541.829,000		100	3.327.692.398,000		100	3.385.523.714,000		100	3.425.511.655,000		100	3.490.679.357,000		1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				78.100.000,000			129.100.000,000			200.375.000,000			257.375.000,000			255.375.000,000		
Meningkatnya kemampuan, peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PSKS yang memiliki kompetensi pemberdayaan sosial (%)	-	80,88	78.100.000,000		84,56	129.100.000,000		88,24	200.375.000,000		91,91	257.375.000,000		100	255.375.000,000		1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				3.500.000,000			35.000.000,000			38.000.000,000			45.700.000,000			45.200.000,000		
Meningkatnya pelayanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlanter yang dipulangkan dari Labuan Bajo ke Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlanter yang dipulangkan dari Labuan Bajo ke Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal (%)	100	100	3.500.000,000		100	35.000.000,000		100	38.000.000,000		100	45.700.000,000		100	45.200.000,000		1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.752.320.735,000			1.942.320.735,000			2.263.320.735,000			2.658.320.735,000			2.641.320.735,000		
Meningkatnya Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Persentase anak terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	27,67	6,36	1.752.320.735,000		7,11	1.942.320.735,000		7,85	2.263.320.735,000		8,6	2.658.320.735,000		9,35	2.641.320.735,000		1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (%)	5,61	5,55			5,85			6,15			6,45			6,75			1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Warga Negara penyandang																	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	19,97	13,34		14,17		15,01		15,84		16,67		Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				11.500.000,000		28.000.000,000		102.500.000,000		205.658.000,000		175.158.000,000	
Meningkatnya masyarakat Miskin (Desil 1-5) yang mendapatkan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat Miskin (Desil 1-5) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	59,58	61,58	11.500.000,000	62,58	28.000.000,000	63,58	102.500.000,000	64,58	205.658.000,000	65,58	175.158.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase masyarakat Miskin (desil 4-5) yang mendapat pemberdayaan sosial (%)	0	0,18		0,19		0,20		0,21		0,22		1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				42.573.200,000		153.925.000,000		250.000.000,000		325.292.000,000		300.292.000,000	
Meningkatnya Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) (%)	100	100	42.573.200,000	100	153.925.000,000	100	250.000.000,000	100	325.292.000,000	100	300.292.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				1.000.000,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten	Persentase taman makam pahlawan yang terawat dan terpelihara (%)	100	100	1.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.293.381.457,000		7.187.594.720,140		7.998.286.926,540		8.749.000.137,070		8.622.740.728,620	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.771.762.057,000		3.487.594.720,140		3.548.286.926,540		3.610.192.977,070		3.673.337.148,620	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	3.771.762.057,000	100	3.487.594.720,140	100	3.548.286.926,540	100	3.610.192.977,070	100	3.673.337.148,620	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				70.000.000,000		100.000.000,000		200.000.000,000		300.000.000,000		400.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro (%)	33,33	40	70.000.000,000	53,33	100.000.000,000	66,67	200.000.000,000	80	300.000.000,000	100	400.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.509.928.000,000		2.500.000.000,000		3.000.000.000,000		3.438.807.160,000		2.949.403.580,000	
Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar (%)	42,46	43,4429	1.509.928.000,000	43,93	2.500.000.000,000	44,42	3.000.000.000,000	44,91	3.438.807.160,000	45,40	2.949.403.580,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				221.291.400,000		300.000.000,000		350.000.000,000		400.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	31,56	33,56	221.291.400,000	36,86	300.000.000,000	38,64	350.000.000,000	40,51	400.000.000,000	42,46	500.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				720.400.000,000		800.000.000,000		900.000.000,000		1.000.000.000,000		1.100.000.000,000	
Meningkatnya perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan (%)	24,19	100	720.400.000,000	100	800.000.000,000	100	900.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.100.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				410.155.000,000		461.350.000,000		645.500.000,000		776.350.000,000		846.350.000,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				165.000.000,000		162.000.000,000		175.000.000,000		245.000.000,000		265.000.000,000	
Meningkatnya lembaga pengarusutamaan gender yang terbentuk dan Aktif	Persentase Lembaga PUG Pemerintah dan Non Pemerintah yang aktif (%)	14,29	34,69	165.000.000,000	51,02	162.000.000,000	67,35	175.000.000,000	83,67	245.000.000,000	100	265.000.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Lembaga PUG yang terbentuk (%)	14,71	38,24		55,88		70,59		85,29		100		1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				33.000.000,000		51.250.000,000		95.500.000,000		106.000.000,000		106.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (%)	100	100	33.000.000,000	100	51.250.000,000	100	95.500.000,000	100	106.000.000,000	100	106.000.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				71.000.000,000		80.000.000,000		115.000.000,000		120.000.000,000		130.000.000,000	
Meningkatnya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persentase Lembaga penyedia Layanan keluarga yang terbentuk (%)		33,33	71.000.000,000	50	80.000.000,000	66,67	115.000.000,000	83,33	120.000.000,000	100	130.000.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				5.000.000,000		35.000.000,000		65.000.000,000		85.000.000,000		100.000.000,000	
Terpenuhinya ketersediaan data Gender dan Anak	Persentase Lembaga yang menyediakan data gender dan anak secara terpilah (%)		55,56	5.000.000,000	66,67	35.000.000,000	77,78	65.000.000,000	88,89	85.000.000,000	100	100.000.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				38.555.000,000		37.500.000,000		80.000.000,000		95.350.000,000		110.350.000,000	
Meningkatnya Keberdayaan anak	Persentase Desa Layak Anak (%)		55,56	38.555.000,000	66,67	37.500.000,000	77,78	80.000.000,000	88,89	95.350.000,000	100	110.350.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				97.600.000,000		95.600.000,000		115.000.000,000		125.000.000,000		135.000.000,000	
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	100	100	97.600.000,000	100	95.600.000,000	100	115.000.000,000	100	125.000.000,000	100	135.000.000,000	1.06.2.08.0.00.02.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.696.781.727,000		3.420.662.242,000		4.665.143.426,000		6.088.172.270,000		6.140.617.715,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.204.721.727,000		3.054.242.242,000		3.507.643.426,000		3.617.172.270,000		3.669.617.715,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	3.204.721.727,000	100	3.054.242.242,000	100	3.507.643.426,000	100	3.617.172.270,000	100	3.669.617.715,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN				0.000		0.000		0.000		1.200.000.000,000		1.200.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN													
Meningkatnya kualitas infrastruktur kemandirian pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang berkondisi baik (%)	64,29	64,29	0,000	64,29	0,000	64,29	0,000	71,43	1.200.000.000,000	78,57	1.200.000.000,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				329.500.000,000		247.125.000,000		964.000.000,000		1.056.000.000,000		1.056.000.000,000	
Meningkatnya cadangan pangan daerah	Stok cadangan pangan daerah (Angka)	0	41,9	329.500.000,000	45,9	247.125.000,000	49,9	714.000.000,000	53,9	756.000.000,000	57,9	756.000.000,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya diversifikasi pangan non-beras	Persentase Diversifikasi pangan non-beras (%)	17	50	0,000	67	0,000	83,33	250.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				99.060.000,000		74.295.000,000		118.500.000,000		131.000.000,000		131.000.000,000	
Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	23,08	21,89	99.060.000,000	21,3	74.295.000,000	20,71	118.500.000,000	20,12	131.000.000,000	19,53	131.000.000,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				63.500.000,000		45.000.000,000		75.000.000,000		84.000.000,000		84.000.000,000	
Meningkatnya Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya	Persentase Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya (%)	100	100	63.500.000,000	100	45.000.000,000	100	75.000.000,000	100				
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				199.012.400,000		97.500.000,000		104.000.000,000		106.000.000,000		110.000.000,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				62.436.800,000		47.500.000,000		48.000.000,000		49.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian Kasus Sengketa tanah garapan	Persentase kasus tanah garapan yang difasilitasi (%)	30,77	100	62.436.800,000	100	47.500.000,000	100	48.000.000,000	100	49.000.000,000	100	50.000.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH				136.575.600,000		50.000.000,000		56.000.000,000		57.000.000,000		60.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNTUK PEMBANGUNAN													
Meningkatnya Penyelesaian Kasus Ganti Rugi, dan Pengelolaan Tanah Akibat Pembangunan	Persentase sengketa tanah akibat pembangunan yang terselesaikan (%)	78	100	136.575.600,000	100	50.000.000,000	100	56.000.000,000	100	57.000.000,000	100	60.000.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.473.706.902,000		12.651.476.686,000		13.722.759.218,000		14.550.097.400,000		14.627.022.346,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.931.777.602,000		4.505.035.988,000		4.582.818.520,000		4.662.156.702,000		4.743.081.648,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.931.777.602,000	100	4.505.035.988,000	100	4.582.818.520,000	100	4.662.156.702,000	100	4.743.081.648,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				48.646.000,000		0,000		0,000		500.000.000,000		0,000	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun dan Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (%)	100	0	48.646.000,000	0	0,000	0	0,000	100	500.000.000,000	0	0,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				185.788.000,000		171.845.000,000		171.845.000,000		171.845.000,000		171.845.000,000	
Meningkatnya Resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim	Persentase masyarakat/komunitas rentan yang difasilitasi untuk adaptasi perubahan iklim (%)	0	33,33	55.845.000,000	50	61.429.500,000	66,67	62.500.000,000	83,33	63.000.000,000	100	63.500.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan secara terukur dan berkelanjutan	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	75	75	129.943.000,000	75	110.415.500,000	80	109.345.000,000	85	108.845.000,000	95	108.345.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				135.236.900,000		63.584.500,000		68.155.000,000		74.155.000,000		80.155.000,000	
Meningkatnya Kualitas RTH Sesuai Standar	Persentase luas RTH terhadap luas wilayah perkotaan (%)	0,40	0,54	135.236.900,000	0,61	63.584.500,000	0,68	68.155.000,000	0,75	74.155.000,000	0,82	80.155.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				37.776.900,000		12.000.000,000		13.000.000,000		13.500.000,000		14.000.000,000	
Meningkatnya penanganan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan (%)	100	100	37.776.900,000	100	12.000.000,000	100	13.000.000,000	100	13.500.000,000	100	14.000.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				117.597.500,000		47.000.000,000		47.500.000,000		48.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya kepatuhan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang patuh terhadap ketentuan perizinan lingkungan (%)	38	42	117.597.500,000	50	47.000.000,000	56	47.500.000,000	61	48.000.000,000	65	50.000.000,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				9.016.884.000,000		7.852.011.198,000		8.839.440.698,000		9.080.440.698,000		9.567.940.698,000	
Meningkatnya Penanganan persampahan Regional	Persentase Timbulan Sampah yang tertangani (%)	95,43	97	9.016.884.000,000	100	7.852.011.198,000	100	8.839.440.698,000	100	9.080.440.698,000	100	9.567.940.698,000	2.11.2.10.0.00.11.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.667.410.872,000		4.486.358.957,000		5.306.686.004,000		6.128.419.592,000		6.201.587.853,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.048.604.272,000		3.986.358.957,000		4.056.686.004,000		4.128.419.592,000		4.221.587.853,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	4.048.604.272,000	100	3.986.358.957,000	100	4.056.686.004,000	100	4.128.419.592,000	100	4.221.587.853,000	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				425.806.600,000		400.000.000,000		800.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	kk berbarcode (Alat)	99,06	99,07	425.806.600,000	99	400.000.000,000	99,08	800.000.000,000	99,08	1.000.000.000,000	99,1	1.000.000.000,000	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen KIA (%)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase kepemilikan e-KTP (%)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (%)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				90.000.000,000		50.000.000,000		220.000.000,000		470.000.000,000		470.000.000,000	
Meningkatnya kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	90.000.000,000	100	50.000.000,000	100	220.000.000,000	100	470.000.000,000	100	470.000.000,000	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				98.000.000,000		30.000.000,000		160.000.000,000		330.000.000,000		320.000.000,000	
Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	persentase data kependudukan yang dimutakhirkan (%)	100	100	98.000.000,000		30.000.000,000	100	160.000.000,000	100	330.000.000,000	100	320.000.000,000	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	persentase OPD/instansi pemerintahan yang memanfaatkan data kependudukan (%)	100	100				100				100		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				5.000.000,000		20.000.000,000		70.000.000,000		200.000.000,000		190.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang diterbitkan (%)	100	100	5.000.000,000	100	20.000.000,000	100	70.000.000,000	100	200.000.000,000	100	190.000.000,000	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.620.111.833,000		6.171.652.362,000		6.724.223.701,000		7.277.846.467,000		7.332.541.689,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.926.525.241,000		3.078.566.968,000		3.181.138.306,000		3.284.761.073,000		3.389.456.295,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi ()	100	100	2.926.525.241,000	100	3.078.566.968,000	100	3.181.138.306,000	100	3.284.761.073,000	100	3.389.456.295,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				22.146.648,000		110.771.349,000		210.771.349,000		315.000.000,000		298.271.348,000	
Meningkatnya Penataan Desa Sesuai Regulasi	Persentase Penataan Desa sesuai regulasi (%)	9,15	6,10	22.146.648,000	6,10	110.771.349,000	6,10	210.771.349,000	6,10	315.000.000,000	6,10	298.271.348,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				7.300.000,000		55.000.000,000		105.385.674,000		158.000.000,000		149.135.674,000	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama Desa (%)	18,29	1,83	7.300.000,000	1,83	55.000.000,000	1,83	105.385.674,000	1,83	158.000.000,000	1,83	149.135.674,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2.156.593.296,000		2.321.542.698,000		2.521.542.697,000		2.730.000.000,000		2.696.542.696,000	
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan sesuai standar regulasi (%)	60,98	73,17	2.156.593.296,000	79,27	2.321.542.698,000	85,37	2.521.542.697,000	91,46	2.730.000.000,000	100	2.696.542.696,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				507.546.648,000		605.771.347,000		705.385.675,000		790.085.394,000		799.135.676,000	
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dan Lembaga Adat Desa Terbentuk	Persentase lembaga adat Desa yang terbentuk (%)	5,49	10,37	507.546.648,000	12,12	605.771.347,000	13,94	705.385.675,000	15,76	790.085.394,000	18,18	799.135.676,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (%)	3,20	6		6		6		6		6		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.732.855.641,000		10.303.838.647,000		10.876.241.313,000		11.995.531.983,000		12.670.843.662,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.224.491.443,000		4.532.352.547,000		4.993.841.813,000		5.195.692.533,000		5.271.020.267,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perrangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	4.224.491.443,000	100	4.532.352.547,000	100	4.993.841.813,000	100	5.195.692.533,000	100	5.271.020.267,000	2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1.094.100.000,000		1.146.143.300,000		1.191.600.000,000		1.362.600.000,000		1.362.600.000,000	
Meningkatnya Pengendalian Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19) (Angka)</i>	24,3	23,01	1.094.100.000,000	23,01	1.146.143.300,000	23,01	1.191.600.000,000	23,00	1.362.600.000,000	22,08	1.362.600.000,000	2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
	Angka kelahiran Total/ Total <i>Fertility Rate (TFR) (Indeks)</i>	2,82	2,81		2,81		2,8		2,8		2,79		2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.928.264.198,000		3.079.725.561,000		3.117.453.911,000		3.466.333.635,000		3.659.176.795,000	
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (Angka)</i>	70,22	70,85	2.928.264.198,000	71,1	3.079.725.561,000	71,31	3.117.453.911,000	71,5	3.466.333.635,000	71,66	3.659.176.795,000	2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
	Persentase kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi <i>(unmeetneed) (%)</i>	7,92	7,84		7,81		7,78		7,76		7,74		2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	4,4	2,6		2,2		2,0		1,8		1,7		2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
	Proporsi Kampung KB Mandiri (%)	2,3	5,1		7		8,3		9,1		10,8		2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB modern (%)	81,6	81,7		81,7		81,8		81,9		81,9		2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN				1.486.000.000,000		1.545.617.239,000		1.573.345.589,000		1.970.905.815,000		2.378.046.600,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Lansia Berdaya	52,8	53,4	1.486.000.000,000	53,7	1.545.617.239,000	54	1.573.345.589,000	54,3	1.970.905.815,000	54,6	2.378.046.600,000	2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok ketahanan keluarga (%)	42	44		44,5		45		45,5		46		2.14.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				3.784.611.320,610		4.386.517.786,000		5.184.204.305,000		6.001.204.553,000		6.069.544.806,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.721.887.081,670		2.819.406.299,000		3.684.204.305,000		3.751.204.553,000		3.819.544.806,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.721.887.081,670	100	2.819.406.299,000	100	3.684.204.305,000	100	3.751.204.553,000	100	3.819.544.806,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				918.760.638,940		935.890.040,000		998.835.060,000		1.746.870.120,000		675.858.288,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Cakupan layanan angkutan umum (%)	100	100	918.760.638,940	100	935.890.040,000	100	998.835.060,000	100	1.746.870.120,000	100	675.858.288,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Fasilitas Kantong Parkir yang disediakan (%)	30	40		45		50		55		60		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik (%)	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase kepemilikan KIR (%)	13,1	17		20		21		23		25		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik (%)	60	65		66		68		69		71		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				143.963.600,000		631.221.447,000		501.164.940,000		503.129.880,000		1.574.141.712,000	
Terwujudnya Sistem Transportasi Laut yang Efisien, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi (%)	24,1	30	143.963.600,000	50	631.221.447,000	70	501.164.940,000	80	503.129.880,000	100	1.574.141.712,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan Konektivitas Antarwilayah													
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat dalam kondisi baik (%)	58,3	63,7		66,7		72		75		83,3		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.054.523.250,000		3.873.406.299,000		4.636.341.769,000		5.354.110.970,000		5.363.901.032,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.776.470.502,000		2.819.406.299,000		2.870.032.009,000		3.021.670.233,000		3.074.341.222,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.776.470.502,000	100	2.819.406.299,000	100	2.870.032.009,000	100	3.021.670.233,000	100	3.074.341.222,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				96.000.000,000		99.000.000,000		105.000.000,000		181.250.000,000		205.000.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan kemitraan media	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STARKOM) terpublikasi (%)	100	100	96.000.000,000	100	99.000.000,000	100	105.000.000,000	100	181.250.000,000	100	205.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif (%)	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.182.052.748,000		955.000.000,000		1.661.309.760,000		2.151.190.737,000		2.084.559.810,000	
Meningkatnya implementasi penggunaan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi (%)	90	100	1.182.052.748,000	100	955.000.000,000	100	1.661.309.760,000	100	2.151.190.737,000	100	2.084.559.810,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik dan terintegrasi (%)	90	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				802.281.800,000		1.009.403.580,000		1.299.403.580,000		1.650.596.420,000		1.930.000.000,000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN				15.000.000,000		20.000.000,000		30.000.000,000		35.000.000,000		40.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERIKSAAN KOPERASI													
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang terbina dan terawasi (%)	55,38	63,08	15.000.000,000	66,92	20.000.000,000	70,77	30.000.000,000	74,62	35.000.000,000	78,46	40.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				15.000.000,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (%)	55,38	60	15.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				250.000.000,000		70.000.000,000		80.000.000,000		85.000.000,000		90.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM dan sumber daya permodalan koperasi	Persentase Koperasi yang difasilitasi Permodalan (%)	1,54	3,08	250.000.000,000	3,85	70.000.000,000	4,62	80.000.000,000	5,38	85.000.000,000	6,15	90.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	Persentase Koperasi yang memiliki SDM terlatih (%)	58,46	66,15		70,00		73,85		77,69		81,54		2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				90.000.000,000		200.000.000,000		300.000.000,000		500.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas SDM-nya (%)	6,58	8,51	90.000.000,000	9,46	200.000.000,000	10,81	300.000.000,000	12,12	500.000.000,000	13,62	700.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				432.281.800,000		719.403.580,000		889.403.580,000		1.030.596.420,000		1.100.000.000,000	
Meningkatnya daya saing produk usaha mikro	Persentase produk usaha mikro yang bersertifikat (%)	8,48	9,04	432.281.800,000	10,24	719.403.580,000	11,48	889.403.580,000	12,87	1.030.596.420,000	15,92	1.100.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya (%)	8,48	9,12		9,46		9,73		10,00		10,31		2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.438.950.085,000		5.254.714.130,700		6.071.793.457,310		6.890.214.370,460		6.960.003.701,870	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.358.950.085,000		3.839.714.130,700		3.868.585.525,310		4.268.585.525,460		4.338.374.856,870	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	92	100	3.358.950.085,000	100	3.839.714.130,700	100	3.868.585.525,310	100	4.268.585.525,460	100	4.338.374.856,870	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				255.000.000,000		290.000.000,000		350.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000	
Meningkatnya Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (%)	11,11	33,33	255.000.000,000	66,67	290.000.000,000	77,78	350.000.000,000	88,89	375.000.000,000	100	375.000.000,000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				40.000.000,000		100.000.000,000		500.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya potensi investasi yang berhasil dipromosikan	Persentase peningkatan investor (%)	0	7	40.000.000,000	9	100.000.000,000	11	500.000.000,000	13	600.000.000,000	15	600.000.000,000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				585.000.000,000		775.000.000,000		953.207.932,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP	Persentase pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP (%)	100	100	585.000.000,000	100	775.000.000,000	100	953.207.932,000	100	1.100.000.000,000	100	1.100.000.000,000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				125.000.000,000		125.000.000,000		200.000.000,000		319.128.845,000		319.128.845,000	
Meningkatnya PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku (%)	74	80	125.000.000,000	84	125.000.000,000	89	200.000.000,000	95	319.128.845,000	100	319.128.845,000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				75.000.000,000		125.000.000,000		200.000.000,000		227.500.000,000		227.500.000,000	
Meningkatnya calon investor yang terlayani kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Persentase investor yang dapat memanfaatkan data dan informasi penanaman modal (%)	100	100	75.000.000,000	100	125.000.000,000	100	200.000.000,000	100	227.500.000,000	100	227.500.000,000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA				2.073.116.900,000		3.478.671.400,000		1.218.671.400,000		1.858.671.400,000		1.278.671.400,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				204.166.400,000		203.671.400,000		203.671.400,000		403.671.400,000		203.671.400,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			TARGET	2026		TARGET	2027		TARGET	2028		TARGET		2029		TARGET	2030	
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase kontribusi pemuda dalam kewirausahaan pemuda (%)	65	67	204.166.400,000		68	203.671.400,000		69	203.671.400,000		70	403.671.400,000		71	203.671.400,000		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.568.950.500,000			2.975.000.000,000			715.000.000,000			1.155.000.000,000			775.000.000,000		
Meningkatnya prestasi keolahragaan	Cakupan Atlet muda yang dibina (Orang)	80	95	1.568.950.500,000		100	2.975.000.000,000		102	715.000.000,000		105	1.155.000.000,000		110	775.000.000,000		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik (Unit)	5	8			9			10			11			12			1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan pelatih yang tersertifikasi (Orang)	9	12			13			14			15			16			1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase perolehan medali (%)	65	66			67			68			69			70			1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				300.000.000,000			300.000.000,000			300.000.000,000			300.000.000,000			300.000.000,000		
Meningkatnya Gugus Depan Pramuka	Persentase Gugus Depan Pramuka (%)	70	72	300.000.000,000		75	300.000.000,000		77	300.000.000,000		79	300.000.000,000		80	300.000.000,000		1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				66.721.000,000			52.000.000,000			73.690.240,000			137.559.263,000			160.440.190,000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				66.721.000,000			52.000.000,000			73.690.240,000			137.559.263,000			160.440.190,000		
Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Perangkat daerah yang memiliki DSSD lengkap dan Digunakan dalam Perencanaan Pembangunan (%)	60.47%	80	66.721.000,000		85	52.000.000,000		90	73.690.240,000		95	137.559.263,000		100	160.440.190,000		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				8.529.000,000			144.000.000,000			160.000.000,000			180.000.000,000			200.000.000,000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				8.529.000,000			144.000.000,000			160.000.000,000			180.000.000,000			200.000.000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya keamanan sandi dan Informasi daerah	Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE (%)	0	5	8.529.000,000	10	144.000.000,000	15	160.000.000,000	20	180.000.000,000	25	200.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	48.25%	76.25%		82.79%		87.15%		98.04%		100.00%		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.591.150.000,000		1.591.150.000,000		1.591.150.000,000		1.591.150.000,000		1.591.150.000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				965.517.700,000		965.517.700,000		965.517.700,000		965.517.700,000		965.517.700,000	
Meningkatnya budaya lokal yang dikembangkan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan (*)	100	100	965.517.700,000	100	965.517.700,000	100	965.517.700,000	100	965.517.700,000	100	965.517.700,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				402.402.300,000		402.402.300,000		402.402.300,000		402.402.300,000		402.402.300,000	
Meningkatnya kesenian daerah yang dikelola dengan baik	Persentase kesenian daerah yang dikelola dengan baik (%)	100	100	402.402.300,000	100	402.402.300,000	100	402.402.300,000	100	402.402.300,000	100	402.402.300,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0,000		23.230.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya warisan sejarah yang dilestarikan	Persentase warisan sejarah yang dilestarikan (%)	100	100	0,000	100	23.230.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				223.230.000,000		200.000.000,000		213.230.000,000		213.230.000,000		213.230.000,000	
Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	223.230.000,000	100	200.000.000,000	100	213.230.000,000	100	213.230.000,000	100	213.230.000,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				103.571.400,000		400.000.000,000		660.000.000,000		992.000.000,000		870.000.000,000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				103.571.400,000		400.000.000,000		660.000.000,000		992.000.000,000		870.000.000,000	
Meningkatnya pembinaan perpustakaan	Persentase Anggota Perpustakaan (Persentase)	10,05	12,71	103.571.400,000	13,91	400.000.000,000	15,23	660.000.000,000	16,67	992.000.000,000	18,26	870.000.000,000	2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam	2,0673	2,1515		2,2181		2,2872		2,3585		2,4318		2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Sosialisasi Perpustakaan (%)												
	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (%)	0,7767	0,8894		0,9570		1,0294		1,1048		1,1822		2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan (Rasio)	0,1069	0,1467		0,1699		0,1922		0,2133		0,2333		2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tingkat Ketercukupan Koleksi (Rasio)	0,1915	0,2179		0,2384		0,2619		0,2883		0,3174		2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (Rasio)	0,3507	1,5563		1,6735		1,8011		1,9383		2,0921		2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tingkat Ketersediaan Perpustakaan (%)	0,3136	0,3517		0,3755		0,4008		0,4277		0,4560		2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.346.191.662,000		3.855.398.041,000		4.402.145.719,000		4.878.028.352,000		5.059.068.636,000	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.242.513.362,000		3.555.398.041,000		3.872.145.719,000		4.146.028.352,000		4.339.068.636,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	91,9	100	3.242.513.362,000	100	3.555.398.041,000	100	3.872.145.719,000	100	4.146.028.352,000	100	4.339.068.636,000	2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				51.679.600,000		125.000.000,000		230.000.000,000		366.000.000,000		360.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	10	30	51.679.600,000	65	125.000.000,000	75	230.000.000,000	85	366.000.000,000	100	360.000.000,000	2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				51.998.700,000		175.000.000,000		300.000.000,000		366.000.000,000		360.000.000,000	
Meningkatnya Arsip Statis Yang Dialih mediakan	Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan (%)	13	46	0,000	63	0,000	77	0,000	80	0,000	100	0,000	2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	10	40,01	51.998.700,000	60,01	175.000.000,000	80	300.000.000,000	85	366.000.000,000	100	360.000.000,000	2.24.2.23.0.00.24.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.160.732.260,000		2.486.272.260,000		3.792.200.000,000		4.420.588.260,000		4.420.588.260,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2.419.757.260,000		1.930.541.010,000		2.810.000.000,000		3.120.588.260,000		3.120.588.260,000	
Meningkatnya kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar (%)	46,75	60,57	2.419.757.260,000	64,63	1.930.541.010,000	68,70	2.810.000.000,000	72,76	3.120.588.260,000	76,83	3.120.588.260,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok nelayan terlatih	Persentase kelompok nelayan terlatih (%)	2,85	4,88	0,000	5,69	0,000	6,50	0,000	7,32	0,000	8,13	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok nelayan yang naik kelas	Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya (%)	5,28	5,69	0,000	6,10	0,000	6,50	0,000	6,91	0,000	7,32	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok nelayan yang mendapat bantuan sarana	Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan sarana (%)	2,85	4,88	0,000	5,69	0,000	6,50	0,000	7,32	0,000	8,13	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				499.975.000,000		374.981.250,000		661.200.000,000		870.000.000,000		870.000.000,000	
Meningkatnya kelompok Perikanan Budidaya yang mendapat bantuan sarana	Persentase kelompok Perikanan Budidaya yang mendapat bantuan sarana (%)	48,04	53,92	499.975.000,000	57,84	374.981.250,000	61,76	661.200.000,000	65,69	870.000.000,000	69,61	870.000.000,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar (%)	41,18	47,06	0,000	50,98	0,000	54,90	0,000	58,82	0,000	62,75	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK (%)	6,86	8,82	0,000	10,78	0,000	12,75	0,000	14,71	0,000	16,67	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis (%)	6,86	8,82	0,000	10,78	0,000	12,75	0,000	14,71	0,000	16,67	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya kelompok perikanan budidaya yang naik kelas	Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas (%)	0	1,96	0,000	3,92	0,000	5,88	0,000	7,84	0,000	9,80	0,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				241.000.000,000		180.750.000,000		321.000.000,000		430.000.000,000		430.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produk perikanan yang ditangani sesuai standar sertifikasi	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar sertifikasi (%)	60	80	241.000.000,000	100	180.750.000,000	100	321.000.000,000	100	430.000.000,000	100	430.000.000,000	2.09.3.25.0.00.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.117.011.836,000		6.290.974.124,700		7.366.415.659,170		8.443.366.024,340		8.521.855.396,800	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.091.821.136,000		5.094.783.424,700		5.570.224.959,170		6.047.175.324,340		6.125.664.696,800	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	5.091.821.136,000	100	5.094.783.424,700	100	5.570.224.959,170	100	6.047.175.324,340	100	6.125.664.696,800	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				350.000.000,000		407.000.000,000		607.000.000,000		807.000.000,000		807.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya (%)	9,20	10,34	350.000.000,000	10,34	407.000.000,000	12,64	607.000.000,000	12,64	807.000.000,000	13,79	807.000.000,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
Meningkatnya desa wisata yang dikembangkan	Persentase Desa Wisata kategori berkembang (%)	4,26	7,45	0,000	8,51	0,000	9,57	0,000	11,70	0,000	13,83	0,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				366.655.300,000		423.655.300,000		623.655.300,000		823.655.300,000		823.655.300,000	
Meningkatnya destinasi wisata yang dipromosikan	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan (%)	25	50	366.655.300,000	62,50	423.655.300,000	75	623.655.300,000	87,50	823.655.300,000	100	823.655.300,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				196.202.700,000		253.202.700,000		353.202.700,000		453.202.700,000		453.202.700,000	
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual (%)	33,23	58,50	196.202.700,000	68,80	253.202.700,000	79,20	353.202.700,000	89,60	453.202.700,000	100	453.202.700,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				112.332.700,000		112.332.700,000		212.332.700,000		312.332.700,000		312.332.700,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	4	5,91	112.332.700,000	7,04	112.332.700,000	7,94	212.332.700,000	9,03	312.332.700,000	10,02	312.332.700,000	3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				31.550.336.192,000		35.074.671.386,000		43.405.493.283,450		52.742.931.619,230		58.087.118.721,690	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.442.077.192,000		17.996.711.886,000		18.097.234.283,450		18.745.078.619,230		18.778.859.721,690	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	12.338.027.529,000	100	12.803.531.394,000	100	12.813.140.345,450	100	13.368.252.966,230	100	13.307.447.719,690	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	5.104.049.663,000	100	5.193.180.492,000	100	5.284.093.938,000	100	5.376.825.653,000	100	5.471.412.002,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				6.951.981.500,000		7.245.054.000,000		10.595.853.500,000		13.515.853.500,000		15.528.259.500,000	
Meningkatnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persentase luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya) (%)	3,93	4,21	6.118.259.500,000	4,72	6.310.054.000,000	5,22	9.440.853.500,000	5,72	12.140.853.500,000	6,23	14.153.259.500,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya luas lahan pertanian Hortikultura yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persentase luas lahan pertanian Hortikultura yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya) (%)	1,76	2,14	0,000	2,20	0,000	2,93	0,000	4,40	0,000	7,33	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya luas lahan pertanian Perkebunan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persentase luas lahan pertanian Perkebunan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya) (%)	0,15	0,55	0,000	0,73	0,000	0,92	0,000	1,28	0,000	1,83	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelompok petani (perkebunan) yang memiliki sarana perkebunan sesuai standar	Persentase kelompok petani (perkebunan) yang memiliki sarana perkebunan sesuai standar (%)	0,65	0,90	0,000	1,15	0,000	1,40	0,000	1,65	0,000	1,90	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar (%)	44,62	51,21	833.722.000,000	54,28	935.000.000,000	57,19	1.155.000.000,000	59,92	1.375.000.000,000	62,47	1.375.000.000,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar (%)	26,42	35,17	0,000	39,26	0,000	43,12	0,000	46,74	0,000	50,13	0,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.040.592.800,000		5.853.000.000,000		8.732.500.000,000		11.884.500.000,000		15.532.500.000,000	
Meningkatnya pengembangan jaringan irigasi dan sumber-sumber air	Persentase Pengembangan Jaringan irigasi dan sumber- sumber air dalam kondisi baik (%)	70,93	74,08	3.370.000.000,000	76,26	4.790.500.000,000	78,11	7.420.000.000,000	79,68	10.322.000.000,000	81,05	13.970.000.000,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Terjaganya luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi	Luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi (ha) (Ha)	16.892,22	16.892,22	0,000	16.892,22	0,000	16.892,22	0,000	16.892,22	0,000	16.892,22	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya jalan usaha tani berkondisi baik	Persentase jalan usaha tani berkondisi baik (%)	86,75	88,77	0,000	89,70	0,000	90,49	0,000	91,17	0,000	91,76	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Prasarana Pertanian lainnya berkondisi baik	Persentase prasarana Pertanian Lainnya berkondisi baik (%)	43,01	55,93	0,000	57,72	0,000	59,38	0,000	60,90	0,000	62,32	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar	Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar (%)	50	50	670.592.800,000	66,67	1.062.500.000,000	66,67	1.312.500.000,000	75	1.562.500.000,000	100	1.562.500.000,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya kualitas Prasarana Pembibitan ternak, HPT dan Veteriner	Persentase Prasarana Pembibitan ternak, HPT dan Veteriner (%)	93,33	93,75	0,000	94,12	0,000	94,12	0,000	94,44	0,000	100	0,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.490.714.300,000		1.360.000.000,000		1.680.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya kematian ternak akibat penyakit ternak	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak (%)	0,07	0,04	1.490.714.300,000	0,03	1.360.000.000,000	0,02	1.680.000.000,000	0,01	2.000.000.000,000	0,00	2.000.000.000,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Menurunnya kejadian Penyakit Zoonosis	Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis (%)	2	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar sertifikasi	Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar sertifikasi (%)	63,4	69,89	0,000	73,39	0,000	77,06	0,000	80,91	0,000	84,95	0,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				315.000.000,000		360.000.000,000		485.000.000,000		885.000.000,000		930.000.000,000	
Meningkatnya luas lahan pertanian yang dapat ditanggulangi akibat tereserang hama dan bencana alam	Persentase Luas lahan pertanian yang ditanggulangi akibat perubahan iklim dan bencana (Ha) (%)	100	100	315.000.000,000	100	360.000.000,000	100	485.000.000,000	100	885.000.000,000	100	930.000.000,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase Luas lahan pertanian yang tereserang hama penyakit yang dapat dikendalikan (Ha) (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				24.222.800,000		178.000.000,000		255.000.000,000		300.000.000,000		305.000.000,000	
Meningkatnya permohonan Usaha Pertanian yang diproses	Persentase Permohonan usaha pertanian yang diproses (%)	0	100	5.000.000,000	100	8.000.000,000	100	45.000.000,000	100	50.000.000,000	100	55.000.000,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Permohonan Usaha Peternakan yang direkomendasikan	Persentase Permohonan Usaha Peternakan yang direkomendasikan (%)	97,18	100	19.222.800,000	100	170.000.000,000	100	210.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.285.747.600,000		2.081.905.500,000		3.559.905.500,000		5.412.499.500,000		5.012.499.500,000	
Meningkatnya Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	Persentase Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis (%)	3,30	4,3	1.049.999.500,000	5,5	1.359.405.500,000	6,5	2.667.405.500,000	7,5	4.349.999.500,000	8,5	3.949.999.500,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya SDM petani yang terlatih		3,16	3,43	0,000	3,70	0,000	3,97	0,000	4,24	0,000	4,51	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase SDM petani yang terlatih (%)												
Meningkatnya kelompok tani yang naik kelas	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	44,82	52,53	0,000	56,13	0,000	59,74	0,000	63,35	0,000	66,95	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya produk pertanian yang tertangani sesuai standar GHP (Good Handing Practices)	Persentase produk pertanian yang tertangani sesuai standar GHP (<i>Good Handing Practices</i>) (%)	0	20	0,000	40	0,000	60	0,000	80	0,000	100	0,000	3.27.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya SDM kelompok peternak terlatih	Persentase SDM kelompok peternak terlatih (%)	29,4	52,8	235.748.100,000	64,6	722.500.000,000	76,3	892.500.000,000	88,1	1.062.500.000,000	100	1.062.500.000,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya kelompok peternak yang menerapkan metode peternakan berorientasi agribisnis	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode peternakan berorientasi agribisnis (%)	7,63	11,55	0,000	13,50	0,000	15,46	0,000	17,42	0,000	19,37	0,000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.405.661.315,000		3.812.485.329,300		4.325.245.823,890		4.833.961.528,360		4.883.651.547,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				<u>2.753.661.315,000</u>		<u>2.862.485.329,300</u>		<u>2.915.245.823,890</u>		<u>2.958.961.528,360</u>		<u>3.008.651.547,000</u>	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.753.661.315,000	100	2.862.485.329,300	100	2.915.245.823,890	100	2.958.961.528,360	100	3.008.651.547,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				60.000.000,000		100.000.000,000		300.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar (%)	20	26,7	60.000.000,000	33,3	100.000.000,000	40	300.000.000,000	46,7	500.000.000,000	53,3	500.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya kelompok pedagang yang terlatih	Persentase kelompok pedagang yang terlatih (%)	15,52	51,95	0,000	55	0,000	58	0,000	60	0,000	63	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya pedagang pasar yang difasilitasi permodalan	Persentase pedagang pasar yang difasilitasi permodalan (%)	8,82	33	0,000	35	0,000	37	0,000	40	0,000	44	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				555.000.000,000		650.000.000,000		800.000.000,000		900.000.000,000		900.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya stabilitas harga bahan pokok	Tingkat stabilitas harga barang pokok (%)	1,47	6	555.000.000,000	6	650.000.000,000	6	800.000.000,000	6	900.000.000,000	6	900.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya stabilitas ketersediaan barang pokok dan barang penting	Tingkat stabilitas Ketersediaan barang pokok dan barang penting (%)	90	90	0,000	95	0,000	95	0,000	95	0,000	100	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya stabilitas harga barang penting	Tingkat stabilitas harga barang penting (%)	1,47	3	0,000	3	0,000	3	0,000	3	0,000	3	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				12.000.000,000		80.000.000,000		110.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya produk yang bersertifikat ekspor	Persentase produk yang ditangani sesuai standar sertifikasi (%)	0	17	12.000.000,000	33	80.000.000,000	50	110.000.000,000	67	200.000.000,000	83	200.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya inisiasi kerjasama ekspor	Persentase pedagang yang berhasil melakukan inisiasi kerja sama ekspor (%)	0	17	0,000	33	0,000	50	0,000	67	0,000	83	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				25.000.000,000		60.000.000,000		100.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000	
Meningkatnya pasar tradisional yang berstatus pasar tertib ukur	Persentase pasar tradisional yang berstatus pasar tertib ukur (%)	0	13,33	25.000.000,000	20,00	60.000.000,000	33,33	100.000.000,000	46,67	125.000.000,000	100	125.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				0,000		60.000.000,000		100.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persentase pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps) (%)	53,87	41	0,000	55	60.000.000,000	58	100.000.000,000	61	150.000.000,000	65	150.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				785.000.000,000		925.000.000,000		1.210.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				725.000.000,000		800.000.000,000		1.000.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000	
Meningkatnya pelaku IKM terlatih	Persentase pelaku IKM terlatih (%)	33,09	55	725.000.000,000	58	800.000.000,000	60	1.000.000.000,000	65	1.100.000.000,000	70	1.100.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar	Persentase pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar (%)	7,94	22,18	0,000	25	0,000	30	0,000	35	0,000	40	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya IKM yang difasilitasi permodalan	Persentase IKM yang difasilitasi permodalan (%)	2,82	15,4	0,000	20	0,000	25	0,000	30	0,000	35	0,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				30.000.000,000		65.000.000,000		110.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya IKM yang memiliki NIB	Persentase IKM yang memiliki NIB (%)	43,5	47,54	30.000.000,000	49,56	65.000.000,000	51,57	110.000.000,000	53,59	200.000.000,000	55,61	200.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				30.000.000,000		60.000.000,000		100.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya IKM terdata di SINAS	Persentase IKM terdata di SINAS (%)	10,48	57,52	30.000.000,000	75,22	60.000.000,000	84,07	100.000.000,000	92,92	200.000.000,000	100	200.000.000,000	3.31.3.30.0.00.12.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				90.000.000,000		250.000.000,000		310.000.000,000		370.000.000,000		430.000.000,000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				45.000.000,000		50.000.000,000		60.000.000,000		70.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkat penataan Kawasan Tarnsmigrasi	Persentase Penataan Kawasan Transmigrasi (%)	66,67	66,67	45.000.000,000	100	50.000.000,000	100	60.000.000,000	100	70.000.000,000	100	80.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				45.000.000,000		200.000.000,000		250.000.000,000		300.000.000,000		350.000.000,000	
Meningkat Kawasan Transmigrasi yang mandiri	Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri (%)	66,67	100	45.000.000,000	100	200.000.000,000	100	250.000.000,000	100	300.000.000,000	100	350.000.000,000	2.07.3.32.2.17.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				43.787.113.886,670		39.072.633.730,580		42.612.863.971,030		42.857.898.816,290		43.107.834.358,460	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				38.197.770.686,670		32.867.150.330,580		35.289.456.171,030		35.534.491.016,290		35.784.426.558,460	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional KDH ,WKDH dan Sekretariat Daerah sesuai standar (%)	90	100	8.407.027.008,000	100	7.960.146.708,000	100	7.960.146.708,000	100	7.960.146.708,000	100	7.960.146.708,000	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	15.003.119.700,000	100	10.000.000.000,000	100	11.000.000.000,000	100	11.000.000.000,000	100	11.000.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Umum
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	207.402.400,000	100	207.402.400,000	100	207.402.400,000	100	207.402.400,000	100	207.402.400,000	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Pemerintahan Umum
Meningkatnya Layanan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan sesuai standar (%)	90	100	423.874.400,000	100	423.874.400,000	100	623.874.400,000	100	623.874.400,000	100	623.874.400,000	4.01.0.00.0.00.01.0009 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	816.140.200,000	100	900.000.000,000	100	900.000.000,000	100	900.000.000,000	100	900.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	300.983.600,000	100	300.983.600,000	100	482.398.000,000	100	482.398.000,000	100	482.398.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	156.300.000,000	100	156.300.000,000	100	256.300.000,000	100	256.300.000,000	100	256.300.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian dan SDA
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	219.903.200,000	100	219.903.200,000	100	320.564.400,000	100	320.564.400,000	100	320.564.400,000	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	36,75	38,00	492.414.800,000	40,00	292.414.800,000	44,00	592.414.800,000	45,00	592.414.800,000	46,00	592.414.800,000	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Organisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	216.162.100,000	100	216.162.100,000	100	316.162.100,000	100	316.162.100,000	100	316.162.100,000	4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Setda	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan yang tersedia sesuai Standar Setda (%)	90	100	11.954.443.278,670	100	12.189.963.122,580	100	12.630.193.363,030	100	12.875.228.208,290	100	13.125.163.750,460	4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.708.220.200,000		5.324.360.400,000		6.042.946.000,000		6.042.946.000,000		6.042.946.000,000	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan (%)	90	100	3.874.805.800,000	100	4.490.946.000,000	100	4.990.946.000,000	100	4.990.946.000,000	100	4.990.946.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Persentase Produk hukum yang dihasilkan (%)	90	100	481.414.400,000	100	481.414.400,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Hukum
Meningkatnya Kualitas Laporan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	352.000.000,000	100	352.000.000,000	100	552.000.000,000	100	552.000.000,000	100	552.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Pemerintahan Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	yang tersedia sesuai standar (%)												
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				881.123.000,000		881.123.000,000		1.280.461.800,000		1.280.461.800,000		1.280.461.800,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian diimplementasikan (%)	100	100	253.070.100,000	100	253.070.100,000	100	353.070.100,000	100	353.070.100,000	100	353.070.100,000	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian dan SDA
Meningkatnya kualitas tatakelola barang dan jasa pemerintah	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai standar (%)	90	93	500.661.200,000	94	500.661.200,000	95	600.000.000,000	96	600.000.000,000	97	600.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Pembangunan	Persentase Dokumen Administrasi Pembangunan yang tersedia sesuai Standar (%)	90	100	127.391.700,000	100	127.391.700,000	100	327.391.700,000	100	327.391.700,000	100	327.391.700,000	4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Administrasi Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				33.802.530.252,000		33.861.732.204,000		36.922.117.749,000		41.983.711.004,000		42.046.536.125,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.861.527.286,000		27.100.000.000,000		27.752.008.256,000		30.527.209.082,000		30.590.034.203,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	25.861.527.286,000	100	27.100.000.000,000	100	27.752.008.256,000	100	30.527.209.082,000	100	30.590.034.203,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				7.941.002.966,000		6.761.732.204,000		9.170.109.493,000		11.456.501.922,000		11.456.501.922,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang undangan	Persentase ketepatan penetapan Perda APBN tahun N (%)	100	100	2.168.237.900,000	100	2.200.000.000,000	100	3.200.000.000,000	100	4.500.000.000,000	100	4.500.000.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase penetapan Ranperda tahun N (%)	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah (%)	100	100	5.772.765.066,000	100	4.561.732.204,000	100	5.970.109.493,000	100	6.956.501.922,000	100	6.956.501.922,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				5.565.307.804,000		6.607.809.744,000		7.687.521.723,000		8.750.467.941,000		8.814.673.084,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.901.439.404,000		4.025.809.744,000		4.087.521.723,000		4.150.467.941,000		4.214.673.084,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	3.901.439.404,000	100	4.025.809.744,000	100	4.087.521.723,000	100	4.150.467.941,000	100	4.214.673.084,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.112.067.100,000		1.582.000.000,000		2.000.000.000,000		2.800.000.000,000		2.900.000.000,000	
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%)	100	100	1.112.067.100,000	100	1.582.000.000,000	100	2.000.000.000,000	100	2.800.000.000,000	100	2.900.000.000,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPd (%)	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas pengendalian Pembangunan	Persentase Program RPJMD yang mencapai realisasi target lebih dari 75% (%)	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				551.801.300,000		1.000.000.000,000		1.600.000.000,000		1.800.000.000,000		1.700.000.000,000	
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan (%)	100	100	551.801.300,000	100	1.000.000.000,000	100	1.600.000.000,000	100	1.800.000.000,000	100	1.700.000.000,000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN				307.221.032.563,290		278.619.309.827,000		284.787.366.814,000		289.847.603.295,000		291.000.149.974,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				37.759.487.658,000		36.430.610.479,000		36.209.825.408,000		37.168.854.865,000		38.219.810.139,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	28.717.764.866,000	100	29.317.764.886,000	100	29.517.764.886,000	100	29.817.764.886,000	100	30.817.764.886,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	9.041.722.792,000	100	7.112.845.593,000	100	6.692.060.522,000	100	7.351.089.979,000	100	7.402.045.253,000	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				259.991.306.092,290		235.094.674.086,000		239.582.319.379,000		242.760.535.931,000		242.329.422.281,000	
Meningkatnya Tata Kelola Penganggaran, Penatausahaan dan pelaporan	Persentase kesesuaian pengajuan SPP dan SPM sesuai Ketentuan yang berlaku (%)	100	100	259.991.306.092,290	100	235.094.674.086,000	100	239.582.319.379,000	100	242.760.535.931,000	100	242.329.422.281,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian KUA PPAS dan RAPBD (%)	90	93		94		95		96		97		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Dana transfer (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase keterpenuhan <i>Mandatory Spending</i> terhadap APBD (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penerbitan SP2D sesuai Ketentuan (%)	100	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.666.913.100,000		4.300.000.000,000		4.700.000.000,000		5.200.000.000,000		5.700.000.000,000	
Meningkatnya Tata kelola Aset Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi aset tetap	100	100	3.666.913.100,000	100	4.300.000.000,000	100	4.700.000.000,000	100	5.200.000.000,000	100	5.700.000.000,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Persediaan tepat waktu (%)												
	Persentase pemanfaatan barang milik daerah (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				5.803.325.713,000		2.794.025.262,000		4.295.222.027,000		4.718.212.499,000		4.750.917.554,000	
Meningkatnya kontribusi pajak daerah	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah (%)	15,54	16,23	5.803.325.713,000	17,26	2.794.025.262,000	17,98	4.295.222.027,000	18,69	4.718.212.499,000	19,41	4.750.917.554,000	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kontribusi retribusi daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,21	3,91	0,000	4,28	0,000	4,46	0,000	4,64	0,000	4,82	0,000	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN				14.392.248.981,000		6.136.748.769,000		6.701.686.617,380		7.348.675.683,990		7.410.645.170,990	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.328.261.981,000		3.742.523.849,000		3.924.385.710,180		4.127.006.631,640		4.188.976.118,640	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	12.328.261.981,000	100	3.742.523.849,000	100	3.924.385.710,180	100	4.127.006.631,640	100	4.188.976.118,640	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.063.987.000,000		2.394.224.920,000		2.777.300.907,200		3.221.669.052,350		3.221.669.052,350	
Meningkatnya kualitas penataan ASN	Persentase Kebutuhan ASN yang terpenuhi sesuai dengan Standar (%)	60	70	2.063.987.000,000	75	2.394.224.920,000	80	2.777.300.907,200	85	3.221.669.052,350	90	3.221.669.052,350	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	24,05	30		35		40		45		50		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				634.104.900,000		913.200.343,000		1.407.825.631,430		1.821.590.963,860		1.821.590.963,860	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				634.104.900,000		913.200.343,000		1.407.825.631,430		1.821.590.963,860		1.821.590.963,860	
Meningkatnya Pengelolaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat	11,34	37	634.104.900,000	40	913.200.343,000	45	1.407.825.631,430	50	1.821.590.963,860	55	1.821.590.963,860	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengembangan Kompetensi ASN	Manajerial dan pemenuhan kebutuhan pelatihan dasar (%)												
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional (%)	35	45		50		55		60		65		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.609.638.811,000		3.390.270.039,000		4.421.513.892,000		5.453.382.621,000		5.485.888.726,000	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.782.638.811,000		2.007.570.039,000		2.065.186.492,000		2.148.382.621,000		2.294.906.326,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.782.638.811,000	100	2.007.570.039,000	100	2.065.186.492,000	100	2.148.382.621,000	100	2.294.906.326,000	5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				827.000.000,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang dihasilkan	Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan (Inovasi)	19	10	827.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Jumlah riset yang dihasilkan (Dokumen)	5	3		0		0		0		0		5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				0,000		1.382.700.000,000		2.356.327.400,000		3.305.000.000,000		3.190.982.400,000	
Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang dihasilkan	Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan (Inovasi)	19	0	0,000	10	1.382.700.000,000	10	2.356.327.400,000	10	3.305.000.000,000	10	3.190.982.400,000	5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Jumlah riset yang dihasilkan (Dokumen)	5	0		4		4		4		4		5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				6.622.683.545,000		7.269.938.657,000		8.119.138.872,000		8.970.323.092,000		9.073.530.994,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.945.542.705,000		5.842.797.817,000		5.941.998.032,000		6.043.182.252,000		6.146.390.155,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	5.945.542.705,000	100	5.842.797.817,000	100	5.941.998.032,000	100	6.043.182.252,000	100	6.146.390.155,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				512.665.000,000		1.025.330.000,000		1.537.995.000,000		2.140.514.550,000		2.132.648.287,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan baik bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan (%)	78	100	512.665.000,000	100	1.025.330.000,000	100	1.537.995.000,000	100	2.140.514.550,000	100	2.132.648.287,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi (%)	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK (%)	83,19	83,29		83,34		83,39		83,44		83,49		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				164.475.840,000		401.810.840,000		639.145.840,000		786.626.290,000		794.492.552,000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	2,656	2,7	164.475.840,000	2,8	401.810.840,000	2,9	639.145.840,000	3,0	786.626.290,000	3,0	794.492.552,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Nilai MCSP KPK (Nilai)	82,02	82,5		83		83,5		84,05		85		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN				25.197.842.999,000		25.585.701.551,580		31.781.309.189,800		32.184.833.062,400		32.596.427.407,710	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.537.279.143,000		22.863.935.598,000		25.413.286.343,000		25.793.545.931,000		25.926.637.985,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	3.486.454.547,000	100	3.544.363.521,000	100	3.854.698.002,000	100	3.913.179.172,000	100	3.972.829.965,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Komodo
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.697.216.631,000	100	1.728.071.471,000	100	1.859.803.409,000	100	1.891.904.785,000	100	1.924.648.188,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Boleng
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang	100	100	1.371.833.147,000	100	1.391.606.319,000	100	1.507.896.836,000	100	1.532.650.213,000	100	1.557.898.657,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Mbeliling

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang sesuai standar regulasi (%)												
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.702.075.913,000	100	1.732.711.222,000	100	1.849.589.535,000	100	1.881.462.510,000	100	1.913.972.944,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sano Nggoang
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	3.311.490.252,000	100	3.338.008.829,000	100	3.580.839.778,000	100	3.602.907.345,000	100	3.633.236.264,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Lembor
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.559.102.758,000	100	1.573.073.375,000	100	1.889.767.405,000	100	1.896.030.615,000	100	1.912.767.783,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Welak
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.541.618.285,000	100	1.555.302.222,000	100	1.894.269.839,000	100	1.910.072.208,000	100	1.931.450.624,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lembor Selatan
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.623.303.950,000	100	2.667.512.453,000	100	2.911.605.166,000	100	2.957.599.714,000	100	3.004.514.152,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuwus
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.271.095.340,000	100	1.281.095.160,000	100	1.577.405.484,000	100	1.598.823.876,000	100	1.610.670.636,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Macang Pacar
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.351.877.977,000	100	1.383.143.037,000	100	1.421.910.219,000	100	1.426.152.746,000	100	1.442.880.122,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ndosso
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.347.618.929,000	100	1.370.618.951,000	100	1.595.007.670,000	100	1.695.930.268,000	100	1.516.884.325,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kuwus Barat
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	1.273.591.414,000	100	1.298.429.038,000	100	1.470.493.000,000	100	1.486.832.479,000	100	1.504.884.325,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pacar
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				184.846.300,000		198.252.404,000		732.702.600,000		749.702.600,000		858.169.596,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	15.702.600,000	100	15.702.600,000	100	65.702.600,000	100	65.702.600,000	100	65.702.600,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Komodo
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Persentase pelayanan administrasi	100	100	18.960.000,000	100	18.960.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	66.466.996,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Boleng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Publik Tingkat Kecamatan	kecamatan sesuai SP dan SOP (%)												
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	7.822.300,000	100	7.830.300,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Mbeliling
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	0	100	10.610.000,000	100	10.610.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sano Nggoang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	18.100.000,000	100	25.000.000,000	100	30.000.000,000	100	50.000.000,000	100	60.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Lembor
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan (%)	100	100	19.800.000,000	100	21.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Welak
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	7.000.000,000	100	9.000.000,000	100	30.000.000,000	100	35.000.000,000	100	90.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lembor Selatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	10.000.000,000	100	5.000.000,000	100	78.000.000,000	100	78.000.000,000	100	78.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuwus
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	25.311.900,000	100	25.311.900,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Macang Pacar
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	2.539.500,000	100	10.000.000,000	100	75.000.000,000	100	85.000.000,000	100	85.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ndoso
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	94.000.000,000	100	74.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kuwus Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	14.000.000,000	100	14.837.604,000	100	100.000.000,000	100	102.000.000,000	100	103.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pacar
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.306.584.656,000		1.327.787.954,580		2.120.778.061,000		2.135.778.061,000		2.159.778.057,000	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	527.969.000,000	100	524.170.300,000	100	591.170.300,000	100	591.170.300,000	100	591.170.300,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Komodo
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	14.000.000,000	100	14.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Boleng
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	8.481.200,000	100	8.483.200,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Mbeliling
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	9.526.700,000	100	9.526.700,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sano Nggoang
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	226.000.000,000	100	231.000.000,000	100	256.000.000,000	100	261.000.000,000	100	266.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Lembor

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakata n mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100		13.500.000,000	100	15.000.000,000	100		65.000.000,000	100	70.000.000,000	100	75.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Welak
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakata n mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100		11.000.000,000	100	18.000.000,000	100		50.000.000,000	100	55.000.000,000	100	56.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lembor Selatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakata n mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100		406.000.000,000	100	406.000.000,000	100		501.000.000,000	100	501.000.000,000	100	501.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuwus
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakata n mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100		37.607.756,000	100	37.607.754,580	100		137.607.761,000	100	137.607.761,000	100	137.607.757,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Macang Pacar
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakata n mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100		5.500.000,000	100	15.000.000,000	100		85.000.000,000	100	90.000.000,000	100	91.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ndoso
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakata n mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100		35.000.000,000	100	35.000.000,000	100		100.000.000,000	100	94.000.000,000	100	105.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kuwus Barat
Meningkatnya Partisipasi Lembaga	Persentase Lembaga														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan	Kemasyarakatan mengikuti Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	12.000.000,000	100	14.000.000,000	100	100.000.000,000	100	101.000.000,000	100	102.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pacar
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				94.171.400,000		159.312.871,000		1.092.246.484,000		1.089.148.070,000		1.183.148.070,000	
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	12.906.400,000	100	15.006.401,000	100	65.006.400,000	100	65.006.400,000	100	65.006.400,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Komodo
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Boleng
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	3.700.000,000	100	3.700.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Mbeliling
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	5.010.000,000	100	5.010.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sano Nggoang
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	7.000.000,000	100	15.000.000,000	100	50.000.000,000	100	55.000.000,000	100	60.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Lembor
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	7.000.000,000	100	15.000.000,000	100	75.000.000,000	100	80.000.000,000	100	81.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Welak
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	3.000.000,000	100	7.000.000,000	100	70.000.000,000	100	71.000.000,000	100	72.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lembor Selatan
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan	Persentase penanganan	100	100	0,000	100	5.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuwus

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketertiban di Tingkat Kecamatan	gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)												
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	11.555.000,000	100	22.141.670,000	100	22.141.670,000	100	22.141.670,000	100	82.141.670,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Macang Pacar
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	0,000	100	20.000.000,000	100	150.000.000,000	100	155.000.000,000	100	156.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ndoso
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	37.000.000,000	100	37.454.800,000	100	95.000.000,000	100	75.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kuwus Barat
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tingkat Kecamatan (%)	100	100	5.000.000,000	100	12.000.000,000	100	95.098.414,000	100	96.000.000,000	100	97.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pacar
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				903.940.200,000		836.778.219,000		1.456.995.800,000		1.453.960.500,000		1.468.995.800,000	
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	122.031.100,000	100	122.031.101,000	100	152.031.100,000	100	152.031.100,000	100	152.031.100,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Komodo
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	60.800.000,000	100	60.800.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Boleng
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	55.400.000,000	100	56.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Mbeliling
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	52.590.000,000	100	52.590.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sano Nggoang
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	74.500.000,000	100	76.000.000,000	100	100.000.000,000	100	101.000.000,000	100	105.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Lembor

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kecamatan	tingkat Kecamatan (%)												
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	86.500.000,000	100	87.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.964.700,000	100	116.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Welak
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	92.730.000,000	100	92.730.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lembor Selatan
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	58.000.000,000	100	58.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuwus
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	75.964.700,000	100	75.964.700,000	100	115.964.700,000	100	115.964.700,000	100	115.964.700,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Macang Pacar
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	74.924.400,000	100	20.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	205.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ndoso
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	100	94.000.000,000	100	84.000.000,000	100	90.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kuwus Barat
Menurunnya Konflik Sosial Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan (%)	100	100	105.500.000,000	100	90.662.418,000	100	115.000.000,000	100	115.000.000,000	100	115.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pacar
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				171.021.300,000		199.634.505,000		965.299.901,800		962.697.900,400		999.697.899,710	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	26.073.300,000	100	26.069.300,000	100	76.073.300,000	100	76.073.300,000	100	76.073.300,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Komodo
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	4.500.000,000	100	4.500.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Boleng
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	12.600.000,000	100	16.017.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Mbeliling

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	7.893.600,000	100	7.893.600,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	Kecamatan Sano Nggoang
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	17.300.000,000	100	30.000.000,000	100	60.000.000,000	100	70.000.000,000	100	80.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Lembor
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	11.000.000,000	100	12.000.000,000	100	60.000.000,000	100	65.000.000,000	100	70.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Welak
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	11.000.000,000	100	12.000.000,000	100	78.000.000,000	100	80.000.000,000	100	81.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lembor Selatan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	4.000.000,000	100	4.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuwus
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	26.624.400,000	100	26.624.600,000	100	86.624.600,800	100	86.624.600,400	100	86.624.599,710	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Macang Pacar
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	0,000	100	10.000.005,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	51.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ndoso
	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	30.000.000,000	100	30.500.000,000	100	100.000.000,000	100	80.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kuwus Barat
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu (%)	100	100	20.030.000,000	100	20.030.000,000	100	89.602.001,000	100	90.000.000,000	100	90.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pacar
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.394.759.002,000		4.940.326.630,000		5.486.805.611,000		6.034.214.171,000		6.082.570.903,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.550.851.402,000		2.675.129.030,000		2.717.928.011,000		2.891.086.571,000		2.858.193.303,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	100	100	2.550.851.402,000	100	2.675.129.030,000	100	2.717.928.011,000	100	2.891.086.571,000	100	2.858.193.303,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				19.999.999,000		384.107.600,000		662.787.600,000		962.037.600,000		1.003.287.600,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemahaman karakter wawasan kebangsaan, bela negara dan pembauran	Persentase pemahaman karakter wawasa kebangsaan, bela negara dan pembauran kebangsaan (%)	98,02	100	19.999.999,000	100	384.107.600,000	100	662.787.600,000	100	962.037.600,000	100	1.003.287.600,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.453.090.000,000		1.468.090.000,000		1.478.090.000,000		1.483.090.000,000		1.488.090.000,000	
Meningkatnya pemahaman dan pendidikan politik	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan (%)	100	100	1.453.090.000,000	100	1.468.090.000,000	100	1.478.090.000,000	100	1.483.090.000,000	100	1.488.090.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				15.000.000,000		35.000.000,000		90.000.000,000		110.000.000,000		130.000.000,000	
Meningkatnya kesadaran oragnisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (%)	98,57	100	15.000.000,000	100	35.000.000,000	100	90.000.000,000	100	110.000.000,000	100	130.000.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				20.000.000,000		35.000.000,000		65.000.000,000		75.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Peran FKUB dalam membina kerukunan (%)	98,13	100	20.000.000,000	100	35.000.000,000	100	65.000.000,000	100	75.000.000,000	100	80.000.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				335.817.601,000		343.000.000,000		473.000.000,000		513.000.000,000		523.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan konflik sosial yang tertangani	Persentase penanganan potensi konflik sosial (%)	99,96	100	335.817.601,000	100	343.000.000,000	100	473.000.000,000	100	513.000.000,000	100	523.000.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN				1.397.876.310.811,570		1.401.396.222.030,000		1.482.643.044.324,000		1.570.641.131.667,000		1.693.485.700.182,000	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Subbab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk lima tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Nilai	63.95	68.4	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	77.0
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74.89	78.98	79.15	79.32	79.49	79.66	79.83	79.83
3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	129.57	123.09	116.61	110.13	103.66	97.18	90.70	90.70
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3.45	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.00
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.93	5.15	5.35	5.55	5.75	5.95	6.15	6.15
6	Indeks Gini	Nilai	0.324	0.319	0.3159	0.3128	0.3097	0.3066	0.3035	0.3035
7	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	16.68	17.02	18.25	19,25	20.25	21.25	22.25	22.25
8	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	68.68	69.97	70.4745	70.98	71.48	71.99	72.49	72.49
9	Prevalensi Stunting	Persen	31.1	30.0	29.0	28.0	27.0	26.0	25.0	25.0
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	16.74	16.50	16.25	16.00	15.75	15.5	15.25	15.25
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.47	3.10	3.07	3.05	3.02	2.99	2.96	2.96
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	85.86	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	91.00

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	69.19	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00
14	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan	Persen	19.74	18.57	20.29	22.12	24.07	26.15	28.34	28.34
15	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Nilai	26.10	28.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	38.00

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. IKD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 memuat indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. IKD tersebut terdiri dari indikator pada lampiran Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 yang terpilih, Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Permendagri 19 tahun 2024, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Manggarai Barat. Berikut indikator dan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,00	80,20	82,08	83,95	85,82	87,70	89,57	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	37,79	36,56	35,67	34,55	33,70	32,79	32,88	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	375,00	375,86	376,86	377,86	378,86	379,86	380,86	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	35,25	71,54	64,82	65,45	66,09	66,72	67,36	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	74,89	78,98	79,15	79,32	79,49	79,66	79,83	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	72,29	76,23	76,18	76,82	77,46	78,11	78,75	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	43.800	44.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	28	30	35	45	45	50	55	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	--	-	-	-	-	-	
10	Indeks Risiko Bencana	poin	129,57	123,09	116,61	110,13	103,66	97,18	90,70	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	276,284	282,453	288,567	294,675	230,897	236,786	242,897	
13	Rasio Penduduk	%	100,88	101,08	101,43	101,48	101,75	101,86	102,00	
14	Kepadatan penduduk	%	88,00	90,00	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,93	5,15	5,35	5,55	5,75	5,95	6,15	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tingkat Kemiskinan	%	16,74	16,50	16,25	16,00	15,75	15,50	15,25	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	16,68	17,02	18,25	19,25	20,25	21,25	22,25	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,47	3,10	3,07	3,05	3,02	2,99	2,96	
5	Indeks Gini	angka	0,324	0,319	0,3159	0,3128	0,3097	0,3066	0,3035	
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	angka	68,68	69,97	70,47	70,98	71,48	71,99	72,49	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	68,3	75,01	75,28	75,55	75,81	76,08	76,35	
10	Indeks Keluarga Sehat	indeks	Belum ada data							
11	Prevalensi Stunting	%	31,1	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	
12	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,21	8,42	8,64	8,86	9,08	9,30	9,52	
13	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,54	12,62	12,69	12,77	12,85	12,92	13,00	
14	Angka Literasi SD	%	51,70	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	
15	Angka Numerasi SD	%	44	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	
16	Angka Literasi SMP	%	49,40	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00	74,00	
17	Angka /Numerasi SMP	%	46,36	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	64,00	
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	53,42							
19	Indeks Literasi Digital	angka	65,94	5,3	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	N/A	12,69	15,79	18,79	21,79	23,79	26,79	
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	84,25	86,51	88,60	90,00	92,20	94,50	96,00	
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	53,04	55,45	57,56	59,78	61,76	63,45	65,00	
23	Indeks Perlindungan Anak	angka	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12	
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	N/A	60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11	
25	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,461	0,4512	0,4322	0,4132	0,3942	0,3752	0,3562	
26	Indeks Pembangunan Gender	Poin								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	58,86	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	N/A	61,35	61,34	61,33	61,32	61,31	61,30	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,37	10,38	10,40	10,42	10,43	10,45	10,47	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,06	1,11	1,21	1,31	1,41	1,51	1,61	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	N/A	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	
5	Rasio Kewirausahaan	%	N/A	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,75	76,76	76,78	76,80	76,82	76,85	76,90	
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	53,22	54,66	55,00	55,20	55,35	55,50	55,65	
8	Indeks Ekonomi	Rupiah/ Jiwa	N/A	-	-	-	-	-	-	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	N/A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61	
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	N/A	29,33	29,55	29,65	29,75	29,85	29,95	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	N/A	5,30	5,32	5,34	5,36	5,38	5,40	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	84,03	85,06	85,07	85,08	85,09	86,00	86,01	
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	4,93	5,00	5,15	5,25	5,30	5,35	5,40	
14	Indeks Infrastruktur / Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	85,86	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	58,86	60,00	61,35	61,86	62,35	62,86	
16	Persentase Desa Mandiri	%	N/A	0,98	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	N/A	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	
18	Tingkat Inflasi	%	2,65	2,60	2,55	2,50	2,45	2,40	2,35	
19.	Indeks Akses Keuangan Daerah		N/A	3,93	3,95	3,97	3,99	4,01	4,03	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	N/A	40,2	42,2	43,2	44,2	45,2	46,2	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,47	3,50	3,53	3,55	3,58	3,60	3,63	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,71	3,81	3,91	4,01	4,11	4,21	4,31	
4	Indeks Integritas Nasional	angka	N/A	65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	N/A							
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai/Level	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
8	Indeks Rasa Aman	Angka	N/A							
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	N/A							
10	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,45	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	

Tabel 4. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)										
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1.1 Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	63,72	65,00	67,35	70	73,50	75,00	77,50	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,77	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	5,84	8,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	62,00	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,69	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,00	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP	Nilai	61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	berdasarkan Asesmen Nasional									
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,40	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	59,00	69,00	79,00	89,00	90,00	100	120	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	54,32	61,22	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	68,90	69,40	69,90	70,40	70,90	71,40	73,00	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,05	71,25	72,45	73,65	74,85	76,05	78,00	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	74,30	75,30	76,30	77,30	78,30	79,30	80,00	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,65	72,45	74,25	76,05	77,85	79,65	81,00	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	61,40	62,70	64,00	65,30	66,60	67,90	70,00	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	68,90	70,30	71,70	73,10	74,50	75,90	77,50	
1.2 Kesehatan										

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	5	5	5	5	5	5	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	31,10	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	64,1	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	75,4	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	75,3	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	75,1	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	92,9	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	70,8	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	88,1	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	97,8	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	71,1	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	Persen	73,7	100	100	100	100	100	100	
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	34,53	35,8	37,08	38,36	39,64	40,91	42,19	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir	%	17,81	19,00	20,20	21,39	22,58	23,77	24,97	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rob kewenangan Kabupaten/Kota									
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	55,35	19,79	21,73	23,66	25,6	27,54	29,47	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	46,59	48,9	51,21	53,52	55,83	58,14	60,46	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	35,25	71,54	64,82	65,45	66,09	66,72	67,36	
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	72,29	76,23	76,18	76,82	77,46	78,11	78,75	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	62,27	68,91	75,56	81,25	86,95	92,64	98,34	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	47,77	47,98	48,94	50,1	52,26	54,33	56,40	
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	98	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	24	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	10	15	15	20	20	25	25	
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	1	1,75	2,5	3	3,5	4	4,5	
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	%	0,25	0,37	0,50	0,62	0,74	0,86	0,97	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	57,44	58,01	58,58	59,10	59,61	60,13	60,64	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	37,71	39,82	41,92	44,09	46,26	48,43	50,6	
1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dilaksanakan oleh Satpol PP									
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	%	50	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	0	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,79	83,055	92,61	92,11	91,61	91,11	90,61	
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	9,04	9,48	9,93	10,37	10,52	10,82	
11	Persentase penanganan pra bencana	%	0,50	53,65	55,80	56,37	56,94	57,51	58,08	
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	50	55	60	70	80	90	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	50	55	60	70	80	90	100	
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.6 Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,20	17,72	13,34	14,17	15,01	15,84	16,67	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,28	31,79	6,36	7,11	7,85	8,60	9,35	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,06	6,75	5,55	5,85	6,15	6,45	6,75	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk	%	N/A	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pelayanan sosial di luar panti									
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	59,89	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	55,92	59,21	62,50	65,79	69,08	72,37	75,66	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	N/A	16,67	33,33	50,0	66,67	83,33	100	
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	50,21	44,08	45,08	54,08	59,08	64,08	69,08	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	N/A	0,019	0,029	0,038	0,048	0,057	0,067	
14	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	12	4	4	4	4	4	4	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2.1 Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	38,10	53,33	60	66,67	73,33	80	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	42,46	42,95	43,44	43,93	44,42	44,91	45,40	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	1.736.013.260.000	1.831.967.300.000	1.917.203.420.000	2.002.439.540.000	2.087.675.660.000	2.172.911.780.000	2.258.147.900.000	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	24,19	32,26	53,76	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	31,55	32,86	33,55	36,86	38,64	40,51	42,46	
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	89,04	89,65	90,26	90,87	91,48	92,09	92,70	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,461	0,479	0,497	0,515	0,533	0,551	0,569	
3	Persentase ARG Daerah	%	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.3 Pangan										

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0	41,084	48,67	58,43	70,35	84,44	100,00	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	69,4	69,90	70,40	70,9	71,4	71,9	72,4	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	23,08	22,49	21,89	21,3	20,71	20,12	19,53	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.4 Pertanian										
1	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	-	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai	%	100%	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran									
3	Terselesainya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	38%	57,08	94,67	100	100	100	100	
4	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	N/A	75	80	85	90	95	100	
5	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	N/A	75	80	85	90	95	100	
2.5 Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	74,89	76,81	79,15	79,32	79,49	79,66	79,83	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		26,1	26,1	26,2	26,3	26,4	26,5	26,6	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kebijakan Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	5	1	1	1	1	1	
	Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan Pengolahan Sampah)	Unit	30	31	32	33	34	35	36	
	Anggaran Pengelolaan Sampah	Rupiah	8.827.592.000	9.125.316.900	9.046.160.900	9.146.000.000	9.250.000.000	9.275.000.000	9.300.000.000	
	Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah	Kelompok	2	3	5	5	5	5	5	
	Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen dari IKLH	Indeks	57,78	69,64	69,84	70,04	70,24	70,44	70,64	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	N/A	75	80	85	90	95	100	
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	90,52	90,60	90,64	90,70	90,80	90,90	91,02	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	37,89	39,50	40,00	42,50	45,00	49,00	53,00	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	-	-	-	1	1	1	1	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	3,4	4,02	4,10	4,50	4,80	5,00	5,10	
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase peningkatan status sistem	%	0	0,89	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	9,15	1,22	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	
3	Persentase Fasilitasi Kerja sama Desa	%	18	2	2	2	2	2	2	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	3,2	70,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	5,6	20,6	15	15	15	18	18	
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,82	2.78	2.81	2.81	2.80	2.80	2.79	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern <i>Contraceptive</i> (mCPR)	%	70,22	70,57	70,85	71,10	71,31	71,50	71,66	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7,92	7,88	7,84	7,81	7,78	7,76	7,74	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	27.91	24.06	23.05	23.04	23.01	23,00	22.08	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	64,7	66,1	67,4	68,6	69,8	70,9	72,0	
2.9 Perhubungan										
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.81	0.83	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	60	62	65	66	68	69	71	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	0	20	25	30	35	40	45	
2.10 Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,6	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	25	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan	%	40	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintah Daerah (SPLPD)									
2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	13,13	15,13	17,13	19,13	21,13	23,13	25,13	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2,55	8,05	9,15	9,27	9,32	9,25	9,59	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	30,05	4,99	6,03	7,29	9,81	12,60	15,38	
2.12 Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-31	3	5	7	9	11	13	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	89	100	100	100	100	100	100	
2.13 Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ <i>training</i> dan memperoleh sertifikat	%	67,81	68,00	69,05	70,20	71,00	72,40	74,00	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	62,25	63,00	65,30	66,60	68,90	69,70	71,00	
2.14 Statistik										

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,43	2,43	2,60	2,60	3,00	3,00	3,50	
2.15 Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	48,25	65,36	76,25	82,79	87,15	98,04	100	
2.16 Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	50	50	70	70	80	90	100	
2.17 Perpustakaan										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	65,94							
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	53,42							
2.18 Kearsipan										

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Unit Kerja yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	4.05	14.37	20.65	36.84	57.09	78.14	100	
3. Urusan Pilihan										
3.1 Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.308	8.508	8.808	9.208	9.708	10.308	11.008	
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	4,14	19,6	23,52	24,52	25,52	26,52	27,52	
3.2 Pariwisata										
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	18,34	19,34	21,34	22,34	24,34	25,34	27,45	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	19,21	19,23	19,25	19,27	19,29	19,31	19,33	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	33,23	48,07	58,46	68,84	79,23	89,61	100	
3.3 Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	- 17,19	2	4	6	8	10	12	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	16	17	18	19	20	21	22	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	0,8	1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari <i>surveillance</i> penyakit dari 5 PHMS)	%	96	95	95	95	95	95	95	
3.4 Perdagangan										
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	14,04	16,37	27,8	33,07	33,07	35	37	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	33,6	33,6	50	75	80	90	100	
3.5 Perindustrian										
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:	%								

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	10,37	10,47	10,57	10,67	10,77	10,87	10,97	
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	0,488	0,508	0,528	0,548	0,568	0,588	0,608	
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	5.200	5.275	5.350	5.425	5.500	5.575	5.650	
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	...	-	0	0	0	0	0	0	
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Rupiah	17.890.552	18.890.552	19.890.552	20.890.552	21.890.552	22.890.552	23.890.552	
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	1,4	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil	%	N/A	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.									
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	22,12	27,03	31,53	36,04	40,54	45,05	49,55	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	40,48	42,48	44,48	46,48	48,48	50,48	52,48	
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
4.1 Perencanaan										
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.2 Keuangan										

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	19,74	21,04	20,22	22,21	23,16	24,11	25,07	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	10,39	17,50	20,42	23,64	26,75	29,16	32,85	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	72,50	75,50	77,69	80,40	82,54	85,90	88,70	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	7,15	12,50	15,45	18,80	21,15	24,20	27,25	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	89,62	82,15	84,25	86,50	89,15	90,30	93,50	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-49,21	-45,14	-42,50	-39,50	-38,20	-35,30	-31,15	
4.3 Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	73.45	74.5	75.65	76.25	77.45	78.27	79.35	
4.4 Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai	%	23,08	11,11	27,78	55,56	77,78	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	landasan dalam implementasi pembangunan daerah									
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	10:10	2:10	4:10	6:10	8:10	10:10	1:1	
5. Fungsi Pengawasan										
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3	3	3	3	3	3	3	
			(skor 3,086)	(skor 3,086)	(skor 3,089)	(skor 3,090)	(skor 3,092)	(skor 3,093)	(skor 3,094)	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3	3	3	3	3	3	3	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	83,19	83,24	83,29	83,34	83,39	83,44	83,49	
6. Fungsi Pengadaan										
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	3	3	15	15	15	15	15	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	3	3	4	6	7	8	10	
7. Hubungan dengan Perwakilan Daerah										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
8. Pelayanan Publik										
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	89,62	76,8	77,99	80	82	85	87,99	

Tabel 4. 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,3	75,01	75,28	75,55	75,81	76,08	76,35
2	Angka Kematian ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	43,6						
	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	0	0	0	0	0	0
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 100.000 kelahiran hidup	11,3						
	Jumlah Kematian Bayi	Orang	52	0	0	0	0	0	0
4	Prevalensi Stunting	Persen	31,1	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00
5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Persen	90	91	100	100	100	100	100
7	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Persen	86,85	90	90	90	90	90	90
8	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus malaria (<i>treatment coverage</i>) (%)	Per 1.000 penduduk	49	50	51	52	55	57	60
9	Angka keberhasilan pengobatan malaria (<i>treatment success rate</i>) (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus DBD (<i>treatment coverage</i>) (%)	Per 100.000 penduduk		214,84					
11	Angka keberhasilan pengobatan DBD (<i>treatment success rate</i>) (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Rata-rata Lama Sekolah penduduk di atas 15 tahun	Tahun	8,21	8,42	8,64	8,86	9,08	9,30	9,52
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,62	12,69	12,77	12,85	12,92	13,00
14	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	N/A	18,47	19,50	19,25	19,50	19,75	20,00
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	N/A	11,27	11,50	11,65	11,75	11,85	11,95
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	10,50	10,53	10,54	10,56	10,57	10,58	10,59
17	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	N/A	58,33	58,50	58,53	58,56	58,57	58,60
18	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,74	16,50	16,25	16,00	15,75	15,50	15,25
19	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	10,75	12,45	14,55	15,76	16,90	17,20	17,35

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	N/A	15	15,5	15,17	15,19	15,20	15,22
21	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	10,37	10,38	10,40	10,42	10,43	10,45	10,47
22	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,06	1,11	1,21	1,31	1,41	1,51	1,61
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang	411,349	550,900	671,536	792,172	912,808	1,033,444	1,154,080
24	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
25	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	Persen	N/A	12,09	12,10	12,11	12,12	12,13	12,14
26	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	N/A	0,77	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20
27	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85
28	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	3,29	3,31	3,33	3,35	3,37	3,39
29	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	N/A	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,47	3,10	3,07	3,05	3,02	2,99	2,96
31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	69,56	70,02	71,35	71,75	71,90	71, 93	72,00
32	Tingkat Penguasaan IPTEK	Persen	N/A						
33	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	N/A	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
34	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	N/A	29,33	29,55	29,65	29,75	29,85	29,95

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	5,30	5,32	5,34	5,36	5,38	5,40
36	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	Angka	N/A	11,49	11,30	11,15	11,01	10,88	10,77
37	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	84,03	85,06	85,07	85,08	85,09	86,00	86,01
38	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	4,93	5,00	5,15	5,25	5,30	5,35	5,40
39	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	N/A	58,86	60,00	61,35	61,86	62,35	62,86
40	Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	0,98	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72
41	Indeks Reformasi Hukum	Angka	N/A	40,2	42,2	43,2	44,2	45,2	46,2
42	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,47	3,50	3,53	3,55	3,58	3,60	3,63
43	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,71	3,81	3,91	4,01	4,11	4,21	4,31
44	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	64,03	64,30	64,43	64,55	64,60	64,72
45	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka/ Level	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
46	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
47	Tingkat Inflasi	Persen	2,65	2,60	2,55	2,50	2,45	2,40	2,35
48	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Angka	N/A	421,13	425,14	427,14	429,31	429,50	429,75

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
49	Persentase kerjasama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	50	50	50	50	50	50
50	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	N/A	51,11	51,69	52,28	52,86	53,45	67,45
51	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	84,25	86,51	88,60	90,00	92,20	94,50	96,00
52	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	N/A	60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11
53	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,461	0,4512	0,4322	0,4132	0,3942	0,3752	0,3562
54	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka		0,465					
55	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,89	78,98	79,15	79,32	79,49	79,66	79,83
56	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	0,465	0,468	0,470	0,472	0,474	0,476
57	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	43.800	44.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
58	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	28	30	35	45	45	50	55
59	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWH	110.86	375,86	376,86	377,86	378,86	379,86	380,86
60	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	SBM/Rp Miliar	N/A	150	148	147	146	145	144
	Skor Pola Pangan Harapan:								
61	- PPH Konsumsi	Angka	70,46	70,50	70,52	70,55	70,56	70,57	70,58
62	- PPH Ketersediaan	Angka	74,62	74,64	74,65	74,67	74,68	74,70	70,73
63	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	N/A	0,04	0,58	0,65	0,75	0,85	0,90

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
64	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	34,36	34,40	34,60	34,75	34,85	35,00
65	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	129,57	123,09	116,61	110,13	103,66	97,18	90,70
66	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	19,85	19,85	20,55	21,30	22,14	23,08	23,85
67	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	34,27	34,27	38,38	39,01	40,67	41,12	41,77

BAB V

PENUTUP

Bab penutup memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5.1 Kesimpulan

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, yang mengandalkan analisis berbasis data serta metode ilmiah untuk mengevaluasi berbagai aspek penting, termasuk kondisi umum daerah, kinerja pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen ini didasarkan pada kajian yang objektif, terukur, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan kemajuan daerah.

Sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 ini juga mengidentifikasi permasalahan utama dan isu-isu strategis yang menjadi tantangan serta peluang dalam pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang mendesak, berdampak luas, serta memerlukan respons kebijakan yang tepat dan cepat agar dapat ditangani secara efektif. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, isu-isu tersebut tidak hanya dianalisis secara internal, tetapi juga diselaraskan dengan

kebijakan pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, serta prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Barat untuk periode tahun 2025-2029. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, isu strategis yang telah diidentifikasi dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program-program prioritas yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Setiap program yang disusun juga dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur, sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara berkala dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

Dengan adanya dokumen perencanaan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Selain itu, RPJMD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang solid bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif mewujudkan Kabupaten Manggarai Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Semoga dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 – 2029 bisa terwujud ketika adanya komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai ketentuan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD. Berikut kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen pembangunan 5 tahun yang harus dipedomani bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta wajib memedomani dan mendukung seluruh kebijakan yang termuat dalam dokumen tersebut, seperti visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat wajib memedomani dalam setiap perumusan kebijakan, seperti RKPD, Renstra, Renja, dan kebijakan lainnya.;
3. Peningkatan sinkronisasi substansi antara RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, dan dokumen lainnya.
4. Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran;
5. Pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata, namun dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;
6. Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
7. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan

pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 – 2029 harus dengan prinsip, yaitu akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi;

8. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 – 2029 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
2. Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun; dan
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh unit kerja bidang perencanaan.



Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Manggarai Barat**

Tahun 2025 - 2029